



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2016 - 2021**





BUPATI TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 03 TAHUN 2016

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tamabahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Tana Toraja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tana Toraja

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 – 2031 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tana Toraja adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.
18. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2021.
19. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021.
- (2) Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja adalah :
 - a. menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati KabupatenTana Toraja melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan daritahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
 - b. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima)tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan RAPBD;
 - c. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpaduan terukur;
 - d. menjadikan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

| | |
|--------|------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah |

| | |
|----------|--|
| Bab III | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan |
| Bab IV | Analisis Isu-isu Strategis |
| Bab V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran |
| Bab VI | Strategidan Arah Kebijakan |
| Bab VII | Kebijakan Umumdan Program Pembangunan Daerah |
| Bab VIII | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan |
| Bab IX | Penetapan Indikator Kinerja Daerah |
| Bab X | Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan |

- (2) Uraian RPJMD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Toraja dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar dalam hal terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (3) Dalam hal perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja, maka penetapan perubahan capaian sasaran tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) RPJMD hanya dapat diubah sekali dalam 5 (lima) tahun yaitu setelah pelaksanaan RPJMD berjalan 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJMD hingga tahun 2021 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana di maksud pada ayat (2) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan pemerintahan daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan di bidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintah tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 dan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROPINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.3.108.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 03
TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

- 13 -

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016
NOMOR 14



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan Tahap II RPJPD Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2030 dan bertujuan untuk memberikan arah dan kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Secara umum RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2016-2021 bersisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan ***Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera***.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD Kabupaten Tana Toraja serta semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati seluruh upaya yang sudah kita lakukan dan tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua.

Makale, 2016
BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GRAFIK | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | 4 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan | 5 |
| 1.5 Maksud dan Tujuan | 5 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | 7 |
| 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah | 7 |
| 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah | 13 |
| 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana | 16 |
| 2.1.4 Demografi | 16 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | 19 |
| 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 19 |
| 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial | 23 |
| 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga | 26 |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum | 27 |
| 2.3.1 Fokus Layanan Umum Wajib Pelayanan Dasar | 27 |
| 2.3.2 Fokus Layanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar | 37 |
| 2.3.3 Fokus Layanan Pilihan | 46 |
| 2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan | 51 |
| 2.4 Aspek Daya Saing Daerah | 53 |
| 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 53 |
| 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | 54 |
| 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi | 55 |
| 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia | 55 |
| BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN | |
| 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu | 58 |
| 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD | 58 |
| 3.1.2 Neraca Daerah | 62 |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | 64 |
| 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah | 64 |
| 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah | 64 |
| 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah | 65 |
| 3.3 Kerangka Pendanaan | 66 |
| 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama | 67 |
| 3.3.2 Analisis Proyeksi Dana | 67 |
| BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah | 73 |
| 4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | 74 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| 4.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar | 76 |
| 4.1.3 | Urusan Pemerintahan Pilihan | 79 |
| 4.1.4 | Penunjang Urusan Pemerintahan | 80 |
| 4.2 | Isu – Isu Strategis | 81 |
| 4.2.1 | Isu Strategis di Luar Kabupaten Tana Toraja | 91 |
| 4.2.2 | Isu - Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tana Toraja | 82 |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| 5.1 | Visi | 85 |
| 5.2 | Misi | 86 |
| 5.3 | Tujuan dan Sasaran | 86 |
| BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 103 |
| BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | 117 |
| BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEUTUHAN PENDANAN | 137 |
| BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR DAERAH | 177 |
| BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN | |
| 10.1 | Pedoman Transisi | 195 |
| 10.2 | Kaidah Pelaksanaan | 195 |

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Luas wilayah menurut kecamatan di Kab. Tana Toraja, 2014 | 8 |
| Tabel 2.2 | Ketinggian dari permukaan laut menurut kecamatan Kab. Tana Toraja, 2012-2014 | 9 |
| Tabel 2.3 | Klasifikasi tingkat kelerengan wilayah Kab. Tana Toraja | 9 |
| Tabel 2.4 | Jumlah curah hujan (mm) dirinci per bulan, 2010-2014 | 12 |
| Tabel 2.5 | Luas Panen, produksi dan produktivitas padi menurut kecamatan, 2014 | 14 |
| Tabel 2.6 | Produksi tanaman hortikultura Kab. Tana Toraja (ton), 2010-2014 | 14 |
| Tabel 2.7 | Produksi tanaman perkebunan Kab. Tana Toraja (ton), 2010-2014 | 15 |
| Tabel 2.8 | Populasi ternak di Kab. Tana Toraja (ekor), 2010-2014 | 15 |
| Tabel 2.9 | Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 17 |
| Tabel 2.10 | Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan, 2014 | 17 |
| Tabel 2.11 | Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 20 |
| Tabel 2.12 | Banyaknya sarana perdagangan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 20 |
| Tabel 2.13 | PDRB Kab. Tana Toraja atas harga berlaku (juta), 2010-2014 | 21 |
| Tabel 2.14 | PDRB Kab. Tana Toraja atas harga konstan 2010 (juta), 2010-2014 | 21 |
| Tabel 2.15 | Perkembangan seni dan budaya di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 27 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan olahraga di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 27 |
| Tabel 2.17 | Rasio murid terhadap sekolah setiap jenjang pendidikan, 2010-2014 | 28 |
| Tabel 2.18 | Rasio murid terhadap guru setiap jenjang pendidikan, 2010-2014 | 28 |
| Tabel 2.19 | Jumlah tenaga medis di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 29 |
| Tabel 2.20 | Rasio penduduk terhadap dokter di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 30 |
| Tabel 2.21 | Jumlah dokter umum menurut kecamatan, 2010-2014 | 30 |
| Tabel 2.22 | Jumlah hidup lahir, jumlah kematian bayi, AKB dan AKHB di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 31 |
| Tabel 2.23 | Jumlah hidup lahir, jumlah kematian bayi, AKB dan AKHB menurut kecamatan, 2010-2014 | 31 |
| Tabel 2.24 | Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dan posyandu di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 32 |
| Tabel 2.25 | Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dan posyandu menurut kecamatan, 2014 | 32 |
| Tabel 2.26 | Kondisi jalan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 33 |
| Tabel 2.27 | Luas areal pelayanan irigasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 33 |
| Tabel 2.28 | Jumlah tempat ibadah menurut kecamatan, 2014 | 34 |
| Tabel 2.29 | Presentase rumah tinggal bersanitasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 35 |
| Tabel 2.30 | Perkembangan penataan ruang di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 35 |
| Tabel 2.31 | Indikator perumahan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 36 |
| Tabel 2.32 | Kegiatan pembinaan politik, jumlah pemilih, jumlah parpol dan ormas di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 36 |
| Tabel 2.33 | Indikator urusan social Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 37 |
| Tabel 2.34 | Indikator ketenagakerjaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 37 |
| Tabel 2.35 | Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 38 |
| Tabel 2.36 | Perkembangan ketahanan pangan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 39 |
| Tabel 2.37 | Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 40 |
| Tabel 2.38 | Volume sampah dan presentase penanganannya di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 40 |
| Tabel 2.39 | Presentase pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 40 |
| Tabel 2.40 | Indikator pemberdayaan masyarakat dan lembang Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 41 |
| Tabel 2.41 | Indikator pengendalian penduduk, KB dan Keluarga sejahtera di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 41 |
| Tabel 2.42 | Indikator sector perhubungan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 42 |
| Tabel 2.43 | Angka rasio dan jumlah sarana komunikasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 43 |
| Tabel 2.44 | Perkembangan koperasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 43 |
| Tabel 2.45 | Perkembangan penanaman modal di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 44 |
| Tabel 2.46 | Indikator Pemuda dan olahraga di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 44 |
| Tabel 2.47 | Indikator capaian urusan statistik Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 45 |

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.48 | Perkembangan sektor kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 45 |
| Tabel 2.49 | Indikator Perpustakaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 46 |
| Tabel 2.50 | Indikator Kearsipan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 46 |
| Tabel 2.51 | Kinerja sektor perikanan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 47 |
| Tabel 2.52 | Jumlah kunjungan wisata di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 47 |
| Tabel 2.53 | Luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 48 |
| Tabel 2.54 | Luas pencetakan sawah di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 48 |
| Tabel 2.55 | Perkembangan populasi ternak di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 49 |
| Tabel 2.56 | Perkembangan kelompok tani di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 49 |
| Tabel 2.57 | Perkembangan sektor kehutanan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 49 |
| Tabel 2.58 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 50 |
| Tabel 2.59 | Indikator urusan perindustrian Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 51 |
| Tabel 2.60 | Jumlah transmigrasi dan sarana prasarana di lokasi transmigrasi Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 51 |
| Tabel 2.61 | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 52 |
| Tabel 2.62 | Indikator urusan otonomi daerah Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 52 |
| Tabel 2.63 | Rasio panjang jalan dan jumlah orang/barang pengguna terminal Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 54 |
| Tabel 2.64 | Banyaknya hotel dan restoran/rumah makan Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 54 |
| Tabel 2.65 | Angka beban tanggungan penduduk Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 55 |

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.1 | Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, 2010-2015 | 58 |
| Tabel 3.2 | Penerimaan pajak daerah menurut jenisnya Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 59 |
| Tabel 3.3 | Realisasi belanja daerah Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 60 |
| Tabel 3.4 | Proporsi anggaran belanja tidak langsung menurut jenisnya Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 60 |
| Tabel 3.5 | Realisasi anggaran belanja langsung menurut jenisnya Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 61 |
| Tabel 3.6 | Target dan realisasi belanja modal menurut jenisnya Kab. Tana Toraja, 2013-2015 | 61 |
| Tabel 3.7 | Neraca daerah Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 62 |
| Tabel 3.8 | Analisis rasio keuangan Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 64 |
| Tabel 3.9 | Penutup deficit Riil Anggaran Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 65 |
| Tabel 3.10 | Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 66 |
| Tabel 3.11 | Pengeluaran periodic wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 67 |
| Tabel 3.12 | Asumsi makro ekonomi Kab. Tana Toraja, 2016-2021 | 68 |
| Tabel 3.13 | Proyeksi pendapatan daerah Kab. Tana Toraja, 2016-2021 | 68 |
| Tabel 3.14 | Proyeksi belanja dan pembiayaan wajib, mengikat serta prioritas utama Kab. Tana Toraja, 2016-2021 | 70 |
| Tabel 3.15 | Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah pemerintah Kab. Tana toraja (milliard), 2016-2021 | 70 |
| Tabel 3.16 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 (Milyar) | 71 |
| Tabel 3.17 | Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Milyar) | 72 |

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 5.1 | Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kab. Tana Toraja | 86 |
| Tabel 5.2 | Keterkaitan RPJMN, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMD Kab. Tana Toraja | 91 |
| Tabel 5.3 | Keterkaitan visi, misi 1, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kab. Tana Toraja | 93 |
| Tabel 5.4 | Keterkaitan visi, misi 2, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kab. Tana Toraja | 94 |
| Tabel 5.5 | Keterkaitan visi, misi 3, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kab. Tana Toraja | 96 |
| Tabel 5.6 | Keterkaitan visi, misi 4, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kab. Tana Toraja | 97 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| Tabel 5.7 | Keterkaitan visi, misi 5, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kab. Tana Toraja | 99 |
| BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| Tabel 6.1 | Strategi, arah dan kebijakan Kab. Tana toraja, 2016-2021 | 104 |
| BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | |
| Tabel 7.1 | Kebijakan umum dan program pembangunan Kab. Tana Toraja, 2016-2021 | 120 |
| BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN | |
| Tabel 8.1 | Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan | 139 |
| BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | |
| Tabel 9.1 | Indikator kinerja daerah menurut sasaran strategis | 178 |
| Tabel 9.2 | Penetapan indikator kinerja pembangunan Kab. Tana Toraja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, Kab. Tana Toraja 2016-2021 | 183 |
| Tabel 9.3 | Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, Kab. Tana Toraja 2016-2021 | 187 |
| Tabel 9.4 | Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pilihan, Kab. Tana Toraja 2016-2021 | 190 |
| Tabel 9.5 | Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan, Kab. Tana Toraja 2016-2021 | 192 |

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

| | | |
|-------------|---|----|
| Grafik 2.1 | Pekembangan jumlah penduduk Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 16 |
| Grafik 2.2 | Penduduk usia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha, 2010-2014 | 18 |
| Grafik 2.3 | APM dan APK menurut jenjang pendidikan, 2014 | 18 |
| Grafik 2.4 | Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kab. Tana Toraja | 19 |
| Grafik 2.5 | Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulawesi Selatan, 2010-2014 .. | 19 |
| Grafik 2.6 | Pertumbuhan PDRB per kapita Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 22 |
| Grafik 2.7 | Banyaknya keluarga menurut klasifikasi kesejahteraan, 2014 | 23 |
| Grafik 2.8 | Perbandingan IPM Kab. Tana Toraja dengan Prov. Sulawesi Selatan, 2010-2014 | 23 |
| Grafik 2.9 | Angka Melek Huruf (AMH) Kab. Tana Toraja, 2010-2013 | 24 |
| Grafik 2.10 | Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 24 |
| Grafik 2.11 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 25 |
| Grafik 2.12 | Nilai Angka Partisipasi Kasar Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 25 |
| Grafik 2.13 | Nilai Angka Partisipasi Murni Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 26 |
| Grafik 2.14 | Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 26 |
| Grafik 2.15 | Perkembangan Angka Partisipasi sekolah Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 28 |
| Grafik 2.16 | Presentase balita gizi buruk di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 32 |
| Grafik 2.17 | Banyaknya rumah ibadah di Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 34 |
| Grafik 2.18 | Perbandingan TPAK Kab. Tana Toraja dengan kab. tetangga, 2010-2014 | 38 |
| Grafik 2.19 | Perbandingan TPT di Kab. Tana Toraja dengan kab. tetangga, 2010-2014 | 38 |
| Grafik 2.20 | Jumlah penumpang angkutan umum Kab. Tana Toraja, 2010-2014 | 42 |
| Grafik 2.21 | Perkembangan pengeluaran per kapita Kab. Tana Toraja (ribu), 2010-2014 | 53 |
| Grafik 2.22 | Perkembangan indeks pengeluaran Kab. Tana Toraja (ribu), 2010-2014 | 53 |

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 3.1 | Proporsi realisasi belanja langsung menurut jenisnya Kab. Tana Toraja, 2010-2015 | 61 |
| Grafik 3.2 | Proyeksi komposisi belanja daerah Kab. Tana Toraja, 2016-2021 | 69 |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| Gambar 1.1 Pola hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya | 4 |
|---|---|

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Peta administrasi Kab. Tana Toraja | 8 |
| Gambar 2.2 Peta kemiringan lereng Kab. Tana Toraja | 10 |
| Gambar 2.3 Peta ketinggian Kab. Tana Toraja | 10 |
| Gambar 2.4 Peta geologi Kab. Tana Toraja | 11 |
| Gambar 2.5 Peta hidrologi Kab. Tana Toraja | 11 |
| Gambar 2.6 Peta daerah aliran sungai Kab. Tana Toraja | 12 |
| Gambar 2.7 Peta curah hujan Kab. Tana Toraja | 12 |
| Gambar 2.8 Peta rencana pola ruang Kab. Tana Toraja | 13 |

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

| | |
|--|-----|
| Gambar 8.1 Indikasi rencana program prioritas RPJMD Kab. Tana Toraja | 138 |
|--|-----|

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANA TORAJA NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses melalui tahapan-tahapan penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktu, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RPJMD ialah penjabaran Visi, Misi dan program Bupati Tana Toraja terpilih Ir. Nicodemus Biringkanae dan Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara, SH. yang pelantikannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17

Februari 2016 oleh Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-314 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 2016 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132.73-315 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Februari 2016 masa bakti periode 2016-2021 dengan Visi **“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”**.

Visi disusun dengan berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan umum dan strategi pembangunan daerah. Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah selanjutnya menjadi acuan dan dasar penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan memperhatikan pendekatan holistik, integrated dan sustainable, prioritas dan kearifan lokal. Selain RPJMD menyajikan rencana program/kegiatan pembangunan, pemerintahan, isu-isu dan masalah yang muncul dan berkembang juga rencana kerja regulasi dan pembiayaan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi : Hendaknya diartikulasikan sebagai suatu impian dan harapan bahwa Kabupaten Tana Toraja menuju masyarakat yang unggul dan sejahtera secara komprehensif dan kompetitif yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cerdas dan memiliki karakter dan integritas yang tinggi, berbudi luhur, berakhlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi : Merupakan suatu kerangka logis untuk mewujudkan visi dengan pendekatan *money follow program priority* dalam mendorong proses pembangunan “dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat” yang didukung oleh daya saing, partisipatif, pola kawasan, kesesuaian lahan, keterukuran, manfaat lebih luas dan dapat dirasakan oleh rakyat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing;
2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama diperdesaan;
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat;
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha / investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dokumen RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

1. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji pasangan kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan daerah dan penyelerasan dengan pembangunan nasional serta pembangunan provinsi selama 5 (lima) tahun ke depan.
3. RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan RKPD, keberadaannya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
5. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun.
6. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan

komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tana Toraja untuk mewujudkan arah dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

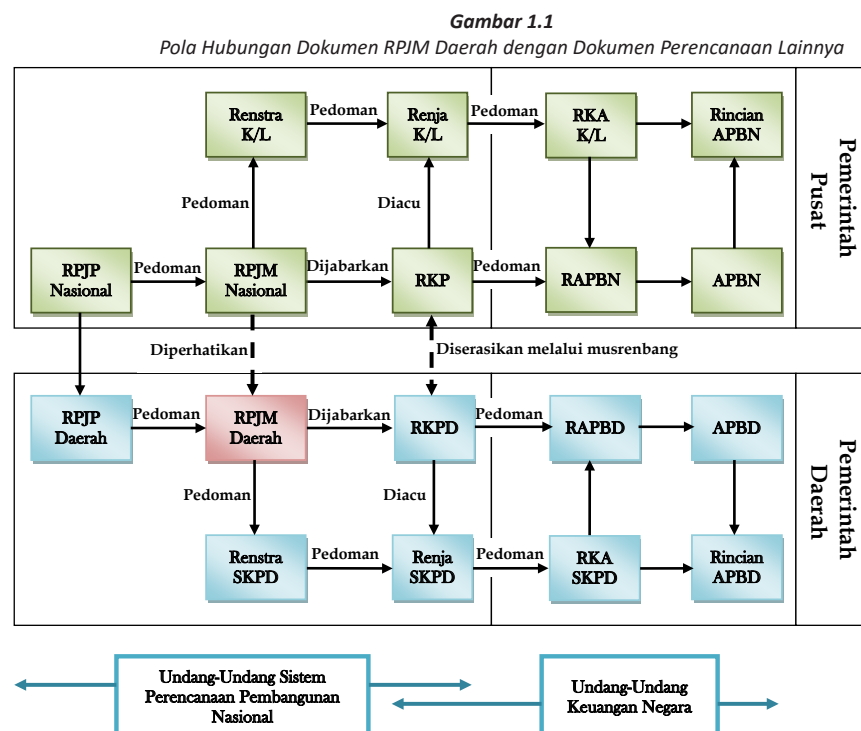
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029; (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan Pemerintah Nasional dan Nawa Cita, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan visi, misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 dengan memperhatikan kearifan lokal, masalah dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu periode 2016-2021 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

RPJMD sebagai dokumen strategis memuat arah dan kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD). Hubungan antar RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 terdiri atas 10 (sepuluh) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat kondisi umum Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memuat gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat analisis isu-isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi dan isu strategis yang merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif dan negatif terhadap daerah di masa yang akan datang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat hubungan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas berdasarkan urusan pemerintahan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggaran.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja daerah Kabupaten Tana Toraja dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan yang holistik, integrated and sustainable, prioritas dan kearifan lokal.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 adalah :

- a. Menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

- b. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;
- d. Menjadikan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

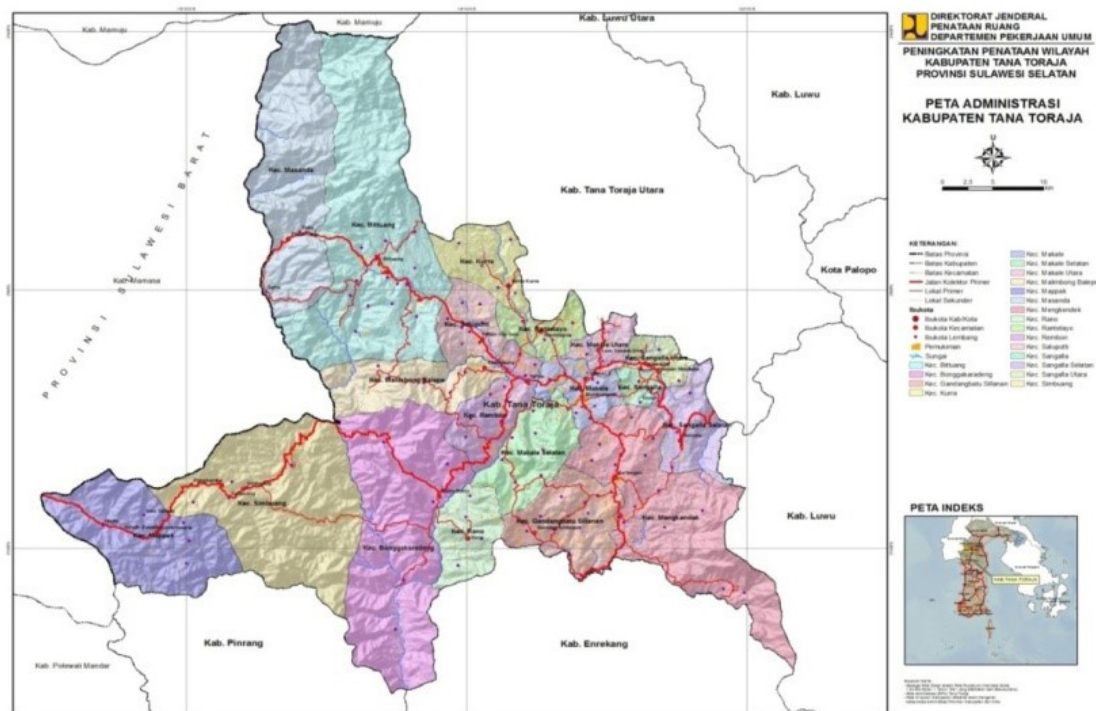
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makale serta memiliki luas 2.054,30 km² persegi dengan elevasi ketinggian 400-3.075 mdpl yang meliputi 19 kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Lembang dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 211,47 Km² dan 206,76 Km², sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangala Utara dengan luas masing-masing adalah 26,08 km² dan 27,96 Km². Jumlah serta luas wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, 2014

| No. | Kecamatan | Luas Kecamatan | | Jml. Desa | Jml. Kel. |
|--------|-----------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | Luas (km ²) | % | | |
| 1 | Bonggakaradeng | 206,76 | 10,06 | 5 | 1 |
| 2 | Simbuang | 194,82 | 9,48 | 5 | 1 |
| 3 | Rano | 89,43 | 4,35 | 5 | - |
| 4 | Mappak | 166,02 | 8,08 | 5 | 1 |
| 5 | Mengkendek | 196,74 | 9,58 | 13 | 4 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 108,63 | 5,29 | 9 | 3 |
| 7 | Sangalla | 36,24 | 1,76 | 3 | 2 |
| 8 | Sangalla Selatan | 47,80 | 2,33 | 4 | 1 |
| 9 | Sangalla utara | 27,96 | 1,36 | 4 | 2 |
| 10 | Makale | 39,75 | 1,93 | 1 | 14 |
| 11 | Makale Selatan | 61,70 | 3,00 | 4 | 4 |
| 12 | Makale Utara | 26,08 | 1,27 | - | 5 |
| 13 | Saluputti | 87,54 | 4,26 | 8 | 1 |
| 14 | Bituang | 163,27 | 7,95 | 14 | 1 |
| 15 | Rembon | 134,47 | 6,55 | 11 | 2 |
| 16 | Masanda | 134,77 | 6,56 | 8 | - |
| 17 | Malimbong Balepe | 211,47 | 10,29 | 5 | 1 |
| 18 | Rantetayo | 60,35 | 2,94 | 3 | 3 |
| 19 | Kurra | 60,50 | 2,94 | 5 | 1 |
| Jumlah | | 2.054,30 | 100,00 | 112 | 47 |

Sumber Data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Gambar 2.1
Peta Admistrasi Kabupaten Tana Toraja



Sumber Data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

Letak geografis, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Toraja Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Enrekang dan Kab. Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Luwu.

b. Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Tana Toraja terletak antara 119°22'14,322" - 120°2'37,566" Bujur Timur dan 2°44'21,296" - 3°23'23,505" Lintang Selatan.

Tabel 2.2
Ketinggian dari Permukaan Laut menurut Kecamatan
Kabupaten Tana Toraja, 2012-2014

| No. | Kecamatan | Ketinggian dari Permukaan Laut (meter) | | |
|-----|-----------------------|--|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Bonggakaradeng | 920 | 920 | 920 |
| 2 | Simbuang | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| 3 | Rano | 700 | 700 | 700 |
| 4 | Mappak | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
| 5 | Mengkendek | 974 | 974 | 974 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 980 | 980 | 980 |
| 7 | Sangalla | 817 | 817 | 817 |
| 8 | Sangalla Selatan | 781 | 781 | 781 |
| 9 | Sangalla utara | 781 | 781 | 781 |
| 10 | Makale | 780 | 780 | 780 |
| 11 | Makale Selatan | 736 | 736 | 736 |
| 12 | Makale Utara | 820 | 820 | 820 |
| 13 | Saluputti | 853 | 853 | 853 |
| 14 | Bituang | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
| 15 | Rembon | 762 | 762 | 762 |
| 16 | Masanda | 864 | 864 | 864 |
| 17 | Malimbong Balepe | 859 | 859 | 859 |
| 18 | Rantetayo | 884 | 884 | 884 |
| 19 | Kurra | 882 | 882 | 882 |

Sumber Data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

c. Topografi

Topografi Kabupaten Tana Toraja sebahagian besar relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif kecil. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan datar (0-8%) pada umumnya berada di daerah di sebelah timur dan lahan sepanjang jalan poros. Selanjutnya kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 8-15% tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kemiringan lahan di atas 40% pada umumnya berada di sebelah barat Kabupaten Tana Toraja seperti Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Masanda dan beberapa kecamatan lainnya. Adapun kondisi kemiringan lereng dan ketinggian wilayah Kabupaten Tana Toraja, diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi Tingkat Kelerengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja

| No. | Klasifikasi Lereng | Kecamatan | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | BTG | BK | GDS | KRR | MKL | MKL-S | MKL-U | MB | MPK | MSD |
| 1 | 0 - 8 | 2284,34 | 26,47 | 837,74 | 703,98 | 1204,59 | - | 1055,97 | 373,28 | - | 57,99 |
| 2 | 8 - 15 | 3533,75 | 609,15 | 3197,42 | 1799 | 1299,67 | 32,15 | 411,73 | 710,61 | - | 727,01 |
| 3 | 15 - 25 | 11034,55 | 2228,12 | 3053,65 | 1451,79 | 1414,9 | 1762,68 | 469,2 | 2055,61 | 2639,14 | 3758,22 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 4 | 25 - 40 | 12316,44 | 6480,88 | 1243,86 | 928,64 | 288,82 | 4041,45 | 140,91 | 5878,83 | 6996,48 | 10502,69 |
| 5 | >40 | 2598,31 | 9538,24 | 130,66 | 1143,72 | - | 1456,76 | - | 1552,19 | 4754,02 | 4763,88 |
| | | 31767,39 | 18882,86 | 8463,33 | 6027,13 | 4207,98 | 7293,04 | 2077,81 | 10570,52 | 14389,64 | 19809,79 |

Lanjutan

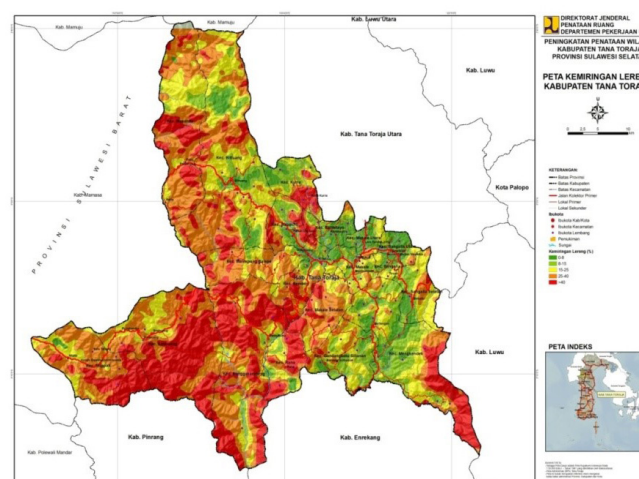
| Klasifikasi Lereng | Kecamatan | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| | MKK | RN | RTY | RMB | SLPT | SGL | SGL-S | SGL-U | SBG |
| 0 - 8 | 2837,88 | 297,83 | 1550,06 | 670,02 | 796,32 | 539,02 | 955,91 | 1175,09 | - |
| 8 - 15 | 6347,8 | 431,56 | 484,59 | 362,8 | 1441,59 | 526,63 | 2332,16 | 295,83 | 149,17 |
| 15 - 25 | 5215,26 | 1333,81 | 150,92 | 1078,95 | 815,45 | 850,91 | 5179,87 | 313,79 | 4457,08 |
| 25 - 40 | 2951,88 | 1141,04 | 159,12 | 2241,28 | 1198,93 | 50,6 | 2736,21 | 186,72 | 11784,25 |
| >40 | 4862,05 | 2545,41 | | 1315,63 | 1502 | - | 360,83 | | 16071,76 |
| | 22214,87 | 5749,65 | 2344,69 | 5668,68 | 5754,29 | 1967,16 | 11564,98 | 1971,43 | 32462,26 |

Sumber Data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

Ket:

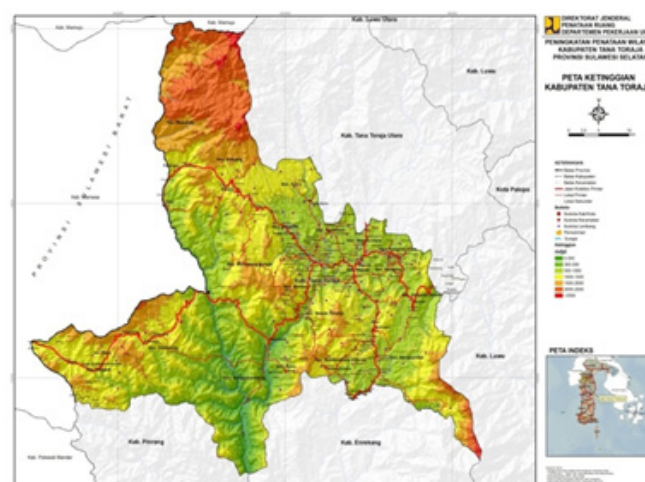
BTG=Bittuang, BK=Bonggakaradeng, GDS=Gandasil KRR=Kurra, MKL=Makale, MKL-S=Makale Selatan, MKL-U=Makale Utara, MB=Malimbong Balepe, MPK=Mappak, MSD=Masanda, MKK=Mengkendek, RN=Rano, RTY=Rantetayo, RMB=RembonSLPT=Saluputi, SGL=Sangalla, SGL-S=Sangalla Selatan, SGL-U=Sangalla Utara, SBG=Simbuang

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja



Sumber Data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja

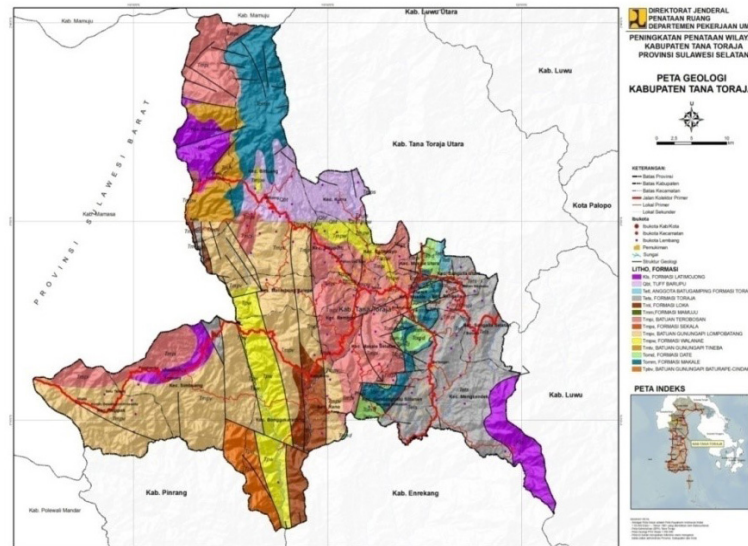


Sumber Data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

d. Geologi

Struktur geologi batuan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis batuan yang dapat ditemukan di Kabupaten Tana Toraja pada umumnya antara lain batu gamping terumbu, kelabu dan putih berupa lensa besar, batupasir hijau, grewake, napal, batu lempung dan tufa, sisipan lava bersisipan andesit-basal, batu sabak, kuarsit, filit, batu pasir kuarsa malih, pualam granit, granodiorit, riolit, diorit, aplit, konglomerat, batu pasir glokonit dan serpih, latit kuarsa, kalkarenit dan batubara. Formasi geologi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja



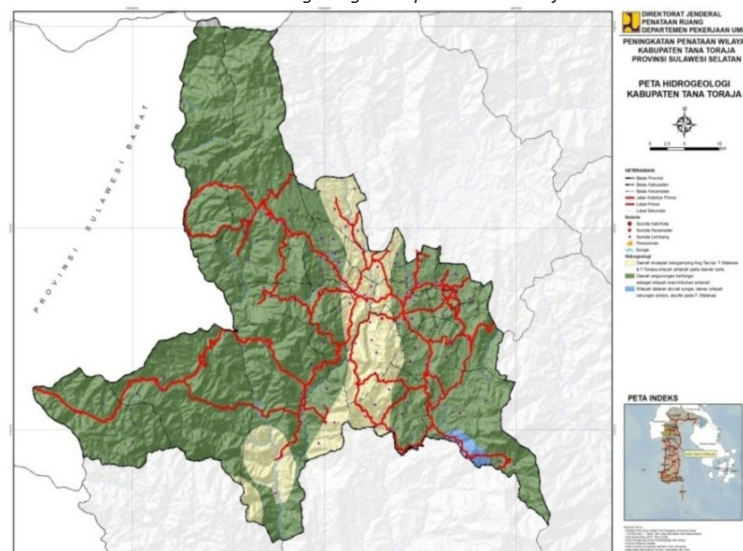
Sumber data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

e. Hidrologi

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Tana Toraja umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Sa'dan, Salu Tapparan, Sungai Saluputti, Sungai Mataallo, Sungai Masuppu'dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. DAS Hulu Sungai Sa'dan merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Tana Toraja merupakan urat nadi yang vital bagi pengembangan pertanian dan PLTU Bakaru di Kabupaten Pinrang. Keberadaan sungai-sungai tersebut pada umumnya digunakan untuk irigasi perdesaan, sumber PLTMH dan sangat potensial dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya arum jeram dan wisata rafting. Kondisi hidrologi Kabupaten Tana Toraja secara umum adalah sebagai berikut:

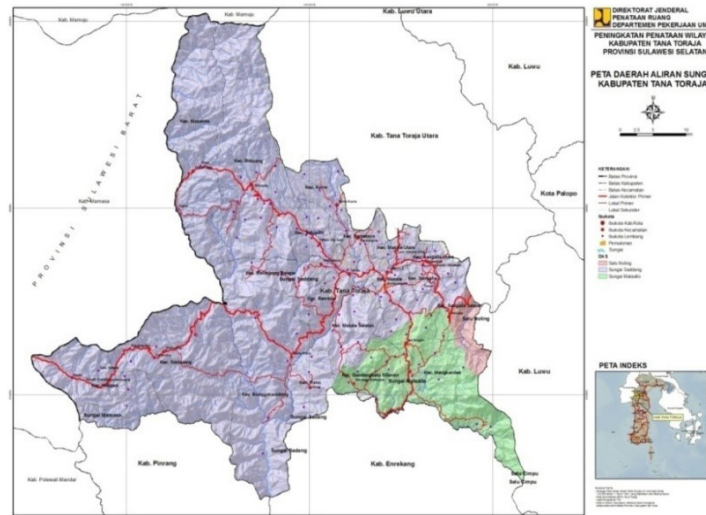
- Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
- Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Gambar 2.5
Peta Hidrogeologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber Data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tana Toraja



Sumber data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

f. Klimatologi

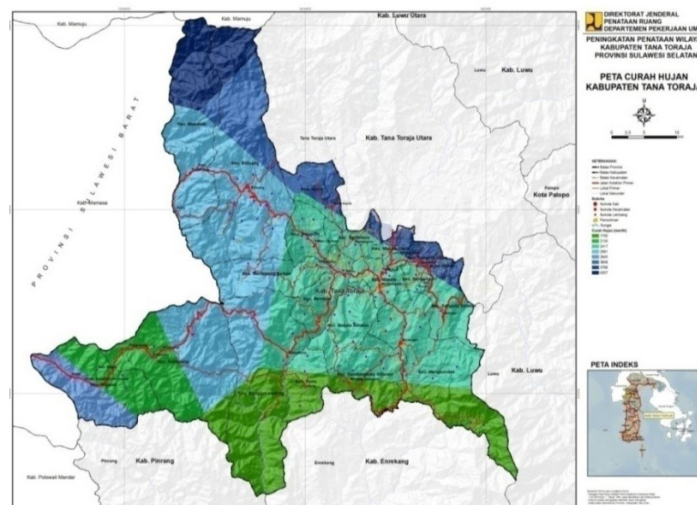
Kondisi iklim Kabupaten Tana Toraja menunjukkan curah hujan terbanyak pada tahun 2014 terjadi pada bulan Desember yaitu sekitar 393,5 mm dan banyaknya hari hujan yang terjadi pada tahun 2014 terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 29 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan (mm) Dirinci Per Bulan, 2010-2014

| Bulan | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|-----------|------|-----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | Hari | mm | Hari | mm | Hari | mm | Hari | mm | Hari | mm |
| Januari | 19 | 111 | 23 | 401.7 | 19 | 128.9 | 15 | 95.9 | 16 | 140.1 |
| February | 19 | 98 | 20 | 87.6 | 27 | 521.0 | 19 | 300.7 | 18 | 194.0 |
| Maret | 26 | 250 | 24 | 344.6 | 23 | 350.8 | 24 | 356.8 | 26 | 308.2 |
| April | 26 | 217 | 23 | 384.3 | 26 | 463.4 | 29 | 490.2 | 24 | 321.6 |
| Mei | 25 | 47 | 23 | 454.8 | 14 | 434.9 | 28 | 339.1 | 27 | 156.9 |
| Juni | 19 | 48 | 13 | 95.6 | 22 | 246.7 | 23 | 364.1 | 26 | 315.2 |
| Juli | 21 | 106 | 14 | 111.2 | 19 | 110.9 | 26 | 323.7 | 14 | 152.5 |
| Agustus | 20 | 169 | 15 | 15.4 | 17 | 134.6 | 18 | 139.0 | 7 | 99.9 |
| September | 20 | 224 | 16 | 117.5 | 14 | 194.0 | 17 | 109.3 | 7 | 53.4 |
| Oktober | 24 | 611 | 17 | 168.9 | 21 | 172.3 | 17 | 98.3 | 5 | 8.8 |
| Nopember | 20 | 360 | 25 | 381.2 | 20 | 339.2 | 23 | 447.9 | 18 | 108.5 |
| Desember | 9 | 216 | 27 | 438.1 | 27 | 135.3 | 22 | 400.2 | 29 | 393.5 |

Sumber : BPS Kab. Tana Toraja

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja



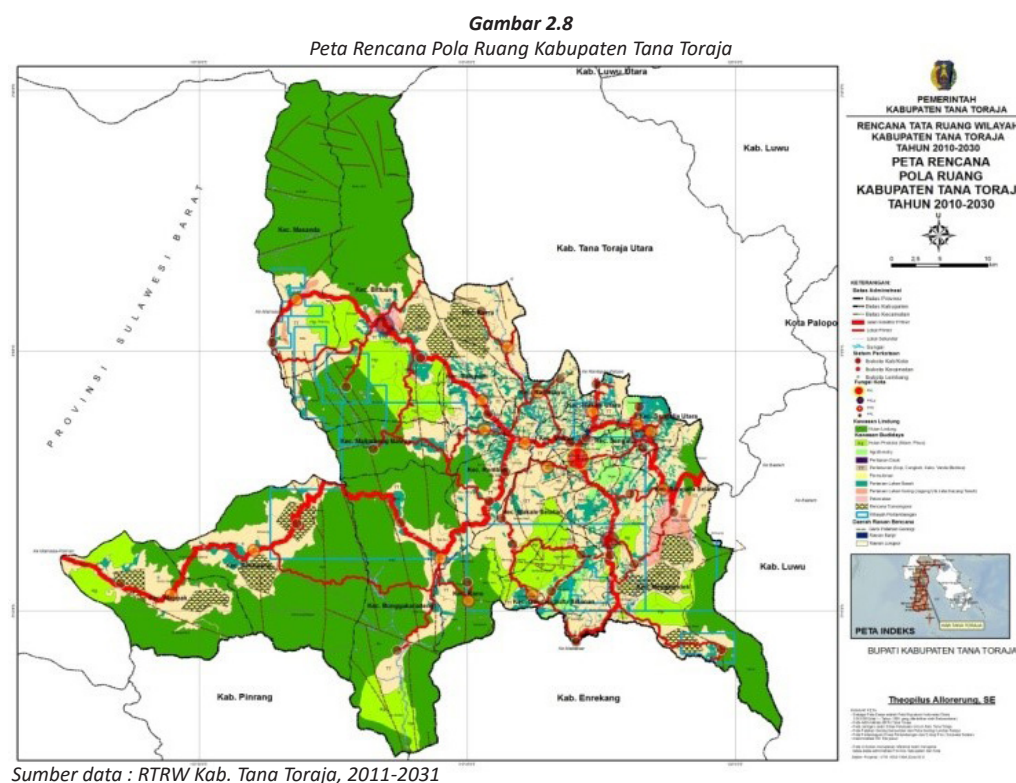
Sumber data : RTRW Kab. Tana Toraja, 2011-2031

g. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten dan atau lintas kecamatan dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Selain itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah.

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja. Arah kawasan lindung ditetapkan dengan dasar sebagai berikut:

1. Menetapkan kawasan lindung sebesar minimal 30% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dikelompokkan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, termasuk berbagai kawasan konservasi.
2. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air.
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.



2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Toraja meliputi beberapa kawasan, antara lain :

- a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.** Produksi padi di Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 sebesar 111.937,02 ton yang dipanen dari areal seluas 21.314 ha atau menghasilkan rata-rata 5,25 ton per hektar. Wilayah kecamatan yang memiliki produksi tertinggi adalah Kecamatan Mengkendek, yakni sebanyak 16.965,79 ton. Sedangkan wilayah kecamatan dengan produksi tanaman padi terendah adalah Kecamatan Rano dengan produksi 1.535,54 ton.

Tabel 2.5
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi menurut Kecamatan, 2014

| No. | Kecamatan | Padi Sawah | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (ton/ha) |
| 1 | Bonggakaradeng | 1.141 | 5.654,61 | 4,96 |
| 2 | Simbuang | 1.330 | 6.597,65 | 4,96 |
| 3 | Rano | 313 | 1.535,54 | 4,91 |
| 4 | Mappak | 462 | 2.237,58 | 4,84 |
| 5 | Mengkendek | 3.127 | 16.965,79 | 5,43 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 1.994 | 9.529,36 | 4,90 |
| 7 | Sangalla | 1.231 | 6.769,67 | 5,50 |
| 8 | Sangalla Selatan | 1.049 | 5.820,85 | 5,55 |
| 9 | Sangalla utara | 993 | 5.440,60 | 5,48 |
| 10 | Makale | 1.074 | 6.430,50 | 5,99 |
| 11 | Makale Selatan | 346 | 1.725,08 | 4,99 |
| 12 | Makale Utara | 813 | 4.535,90 | 5,58 |
| 13 | Saluputti | 600 | 3.149,50 | 5,25 |
| 14 | Bituang | 909 | 4.474,00 | 4,92 |
| 15 | Rembon | 1.078 | 5.368,78 | 4,98 |
| 16 | Masanda | 1.325 | 7.018,50 | 5,30 |
| 17 | Malimbong Balepe | 848 | 4.437,61 | 5,23 |
| 18 | Rantetayo | 1.605 | 8.356,75 | 5,21 |
| 19 | Kurra | 1.126 | 5.888,75 | 5,23 |
| Jumlah | | 21.314 | 111.937,02 | 5,25 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

b. Kawasan Pertanian Holtikultura. Produksi holtikultura di Kabupaten Tana Toraja tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan. Untuk mengetahui jumlah produksi tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2.6
Produksi Tanaman Hortikultura Kab. Tana Toraja (ton), 2010-2014

| No. | Tanaman Holtikultura | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|----------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Bawang Merah | 36,96 | 82,80 | 56,00 | 2,70 | 0,36 |
| 2 | Cabe | 858,05 | 540,40 | 6.633,00 | 1.112,00 | 86,02 |
| 3 | Kentang | 1.077,20 | 1.539,10 | 29.116,00 | 2.682,10 | 157,91 |
| 4 | Kubis | 584,50 | 2.977,10 | 29.957,00 | 1.570,10 | 161,00 |
| 5 | Wortel | 477,90 | 1.127,20 | 7.562,00 | 659,10 | 79,30 |
| 6 | Petsai | 760,40 | 2.643,80 | 32.773,00 | 3.148,10 | 366,41 |
| 7 | Mangga | 19,52 | 1.195,78 | 21,56 | 189,55 | 2.346,03 |
| 8 | Durian | 35,23 | 1.310,82 | 16,04 | 443,98 | 3.451,36 |
| 9 | Jeruk | 46,30 | 3,13 | 0,23 | 63,61 | - |
| 10 | Pisang | 262,59 | 149,47 | 17,69 | 607,53 | 75.181,60 |
| 11 | Pepaya | 102,60 | 449,15 | 5,674 | 161,24 | 3.547,00 |
| 12 | Nanas | 125,46 | 50,95 | - | 189,43 | 6.724,00 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

c. Kawasan Perkebunan. Kawasan pekebunan di Kabupaten Tana Toraja tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan. Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Kabupaten Tana Toraja adalah kopi dan cacao dengan produksi masing-masing 3.699,94 ton dan 1.295,16 ton. Produksi Tanaman kopi terbesar berada pada Kecamatan Gandang Batu Sillanan dan Kecamatan Bittuang, sedangkan produksi cacao terbesar berada pada Kecamatan Rembon dan Kecamatan Mengkendek. Data rinci menyangkut produksi hasil perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2.7
Produksi Tanaman Perkebunan Kab. Tana Toraja (ton), 2010-2014

| No. | Tanaman Perkebunan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Kelapa | 10,73 | 11,33 | 11,33 | 12,14 | 17,07 |
| 2 | Kopi | 1.278,17 | 3.796,79 | 3.796,79 | 3.594,30 | 3.699,94 |
| 3 | Lada | 27,13 | 28,05 | 28,05 | 30,20 | 35,71 |
| 4 | Cacao | 2.199,76 | 2.210,05 | 2.210,25 | 1.184,02 | 1.295,16 |
| 5 | Cengkeh | - | - | - | 128,93 | 148,69 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

d. Kawasan Peternakan. Populasi ternak besar di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 terdiri dari sapi, kerbau dan kuda secara berturut-turut adalah 6.659 ekor, 25.416 ekor dan 4.414 ekor dengan populasi terbesar masing-masing berada di Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Mengkendek dan Kecamatan Bonggakaradeng. Populasi ternak kecil pada tahun 2014 terdiri dari babi dan kambing masing-masing 279.236 ekor dan 7.339 ekor dengan populasi terbesar untuk kedua jenis ternak berada di Kecamatan Mengkendek. Populasi unggas pada tahun 2014 terdiri dari ayam kampung, ayam pedaging dan itik secara berturut turut adalah 715.732 ekor, 5.000 ekor dan 72.303 ekor dengan populasi terbesar masing-masing jenis ternak semua berada di Kecamatan Mengkendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2.8
Populasi Ternak di Kab. Tana Toraja (ekor), 2010-2014

| No. | Ternak | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Sapi | 6.110 | 5.935 | 5.979 | 6.611 | 6.659 |
| 2 | Kerbau | 27.093 | 21.913 | 23.176 | 22.448 | 25.416 |
| 3 | Kuda | 4.472 | 3.718 | 4.395 | 4.361 | 4.144 |
| 4 | Kambing | 7.382 | 7.661 | 7.227 | 7.191 | 7.339 |
| 5 | Babi | 253.726 | 253.912 | 250.993 | 268.524 | 279.236 |
| 6 | Ayam Kampung | - | 571.090 | 659.533 | 668.412 | 715.732 |
| 7 | Ayam Pedaging | - | 6.500 | 7.687 | 3.000 | 5.000 |
| 8 | Itik | - | 55.061 | 62.385 | 62.552 | 72.303 |

Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan & BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

e. Kawasan Perikanan. Mengingat Kabupaten Tana Toraja adalah daerah yang tidak memiliki garis pantai maka potensi kawasan perikanan yang dapat di kembangkan adalah kawasan perikanan air tawar. Produksi perikanan di Kabupaten Tana Toraja berasal dari budidaya kolam, Mina Padi dan sungai. Berdasarkan data BPS tahun 2014, produksi perikanan Kabupaten Tana Toraja terdiri dari budidaya kolam sebesar 18 ton, budidaya mina padi sebesar 390 ton dan 13,18 ton di peroleh dari sungai.

f. Kawasan Pertambangan. Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi disektor pertambangan yang meliputi mineral, minyak bumi, dan bahan galian. Potensi pertambangan yang terkandung di Kabupaten Tana Toraja hanya sebagian yang sudah diketahui secara pasti potensinya, sehingga kandungan kekayaan alam tersebut oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih dilakukan penelitian. Jenis potensi sumberdaya alam tersebut berupa minyak bumi yang diperkirakan terdapat di Kecamatan Bongkaradeng, batu bara terdapat pada 5 (lima) kecamatan, logam mulia diperkirakan mencakup luas 5.000 Ha yang tersebar pada lima kecamatan, logam besi dan logam dasar yang masih dalam tahap penyelidikan, dan tambang golongan C yang terdiri atas zeolit, tras, koalin, toeseiki, batu gamping dan sebagainya.

g. Kawasan Pariwisata. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Pariwisata Tana Toraja memiliki daya tarik yang unik. Peninggalan budaya yang telah ada sejak zaman megalitikum memberikan warna dan makna tersendiri bagi para wisatawan. Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan lestari menjadikan Tana Toraja menjadi icon pariwisata di Indonesia. Keunikan inilah yang kemudian pada tahun 2009 dinominasikan sebagai salah satu dari 23 situs dalam daftar World Heritage Culture Oleh UNESCO dan juga telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Kabupaten Tana Toraja memiliki banyak objek wisata unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan dimana masing-masing objek wisata tersebut memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. Objek wisata tersebut diantaranya : Kawasan Wisata Religius Buntu Burake yang memiliki patung Kristus Raja, Kawasan Tongkonan Tumbang Datu-Bebo', Kawasan Agrowisata Pango-Pango, Kawasan Air Terjun Sarambu Assing dan Talondo Tallu, Kawasan Kuburan Alam sirope, Kawasan Permandian alam Tilanga, Kawasan Perumahan Adat Sillanan dan kawasan objek wisata lainnya yang telah di kenal sampai ke manca negara.

2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

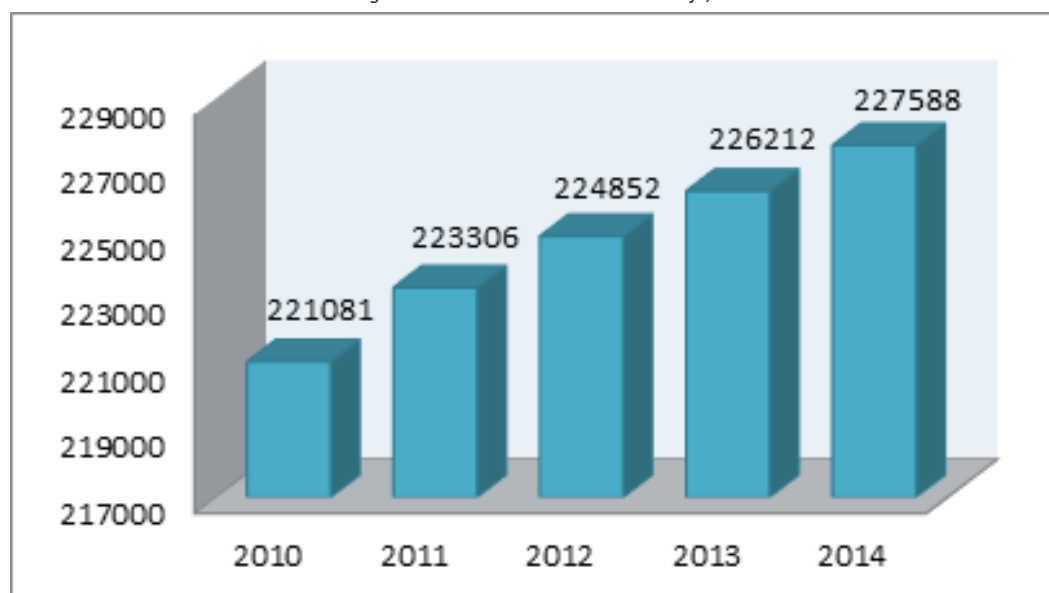
Potensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Tana Toraja antara lain gempa bumi, longsor dan banjir. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Tana Toraja terletak pada pertemuan berbagai lempeng yang membentuk sesar pada wilayah tersebut. Disamping itu, geografis wilayah Kabupaten Tana Toraja yang didominasi oleh daerah pegunungan dengan pola kegiatan permukiman yang cenderung berada pada daerah perbukitan menyebabkan terjadinya longsor pada musim penghujan. Demikian pula halnya dengan potensi banjir umumnya disebabkan oleh penggundulan hutan di daerah hulu yang diperparah oleh pembangunan permukiman di sepanjang bantaran sungai. Adapun potensi Wilayah Rawan Bencana Alam di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

- Rawan Gempa di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda;
- Rawan Longsor tersebar di Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Masanda.
- Rawan Banjir di Kecamatan Makale.

2.1.4 DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja mencapai 227.588 jiwa yang terdiri dari 115.310 jiwa laki-laki dan 112.278 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan data tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja sebesar 221.081 jiwa yang artinya mengalami peningkatan sebesar 2.86 persen. Penduduk Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 59.27 persen dari total penduduk. Penduduk usia muda (0-14 tahun) menempati urutan kedua terbesar dengan proporsi 33.91 persen dari total penduduk sedangkan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya sekitar 6.82 persen total penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini :

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Grafik 2.9
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Tahun | Laki – Laki | | Perempuan | | Jumlah |
|-----|-------|-------------|-------|-----------|-------|---------|
| | | Jiwa | % | Jiwa | % | |
| 1 | 2010 | 112.472 | 50,87 | 108.609 | 49,13 | 221.081 |
| 2 | 2011 | 113.760 | 50,94 | 109.546 | 49,06 | 223.306 |
| 3 | 2012 | 114.256 | 50,81 | 110.596 | 49,19 | 224.852 |
| 4 | 2013 | 114.589 | 50,65 | 111.623 | 49,35 | 226.212 |
| 5 | 2014 | 115.310 | 50,67 | 112.278 | 49,33 | 227.588 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Tana Toraja sebesar 103 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan perbandingan setiap 100 perempuan terdapat 103 orang laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja 110,79 jiwa/Km². Kecamatan Makale tercatat sebagai daerah dengan kepadatan tertinggi, yaitu 874,06 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Simbuang yaitu 32,50 jiwa/km². Fakta ini menegaskan bahwa penyebaran penduduk antar wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja sangat tidak merata. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

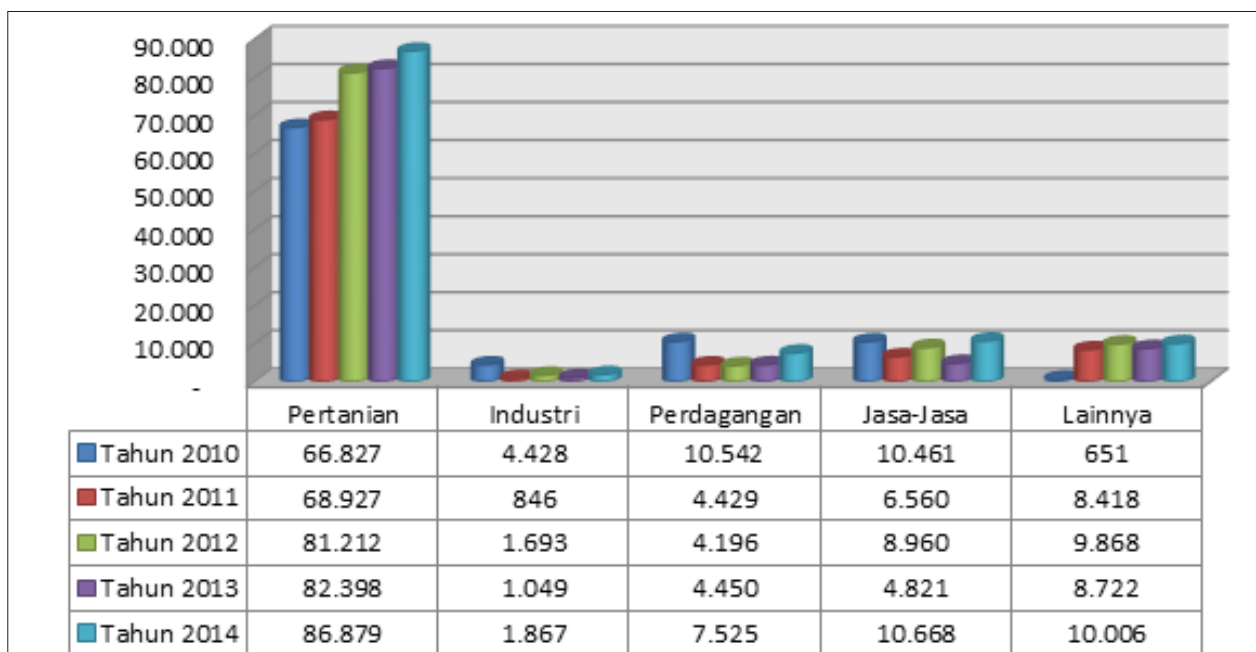
Tabel 2.10
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2014

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|--------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Bongkaradeng | 206,76 | 7.026 | 33,98 |
| 2 | Simbuang | 194,82 | 6.331 | 32,50 |
| 3 | Rano | 89,43 | 6.204 | 69,37 |
| 4 | Mappak | 166,02 | 5.746 | 34,61 |
| 5 | Mengkendek | 196,74 | 27.769 | 141,15 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 108,63 | 19.701 | 181,36 |
| 7 | Sangalla | 36,24 | 6.791 | 187,39 |
| 8 | Sangalla Selatan | 47,80 | 7.549 | 157,93 |
| 9 | Sangalla utara | 27,96 | 7.518 | 268,88 |
| 10 | Makale | 39,75 | 34.744 | 874,06 |
| 11 | Makale Selatan | 61,70 | 12.811 | 207,63 |
| 12 | Makale Utara | 26,06 | 12.064 | 462,58 |
| 13 | Saluputti | 87,54 | 7.614 | 86,98 |
| 14 | Bituang | 163,27 | 14.771 | 90,47 |
| 15 | Rembon | 134,47 | 18.670 | 138,84 |
| 16 | Masanda | 134,77 | 6.546 | 48,57 |
| 17 | Malimbong Balepe | 211,47 | 9.387 | 44,39 |
| 18 | Rantetayo | 60,35 | 11.029 | 182,75 |
| 19 | Kurra | 60,50 | 5.317 | 87,88 |
| Jumlah | | 2.054,30 | 227.588 | 110,79 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Dari sisi lapangan usaha, sebagian besar penduduk di Kabupaten Tana Toraja bekerja di sektor pertanian yakni mencapai 74,27 persen dari seluruh penduduk usia 15 tahun yang bekerja kemudian disusul oleh sektir jasa dengan persentase sebesar 9,14 persen. Perkembangan sektor lapangan usaha di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

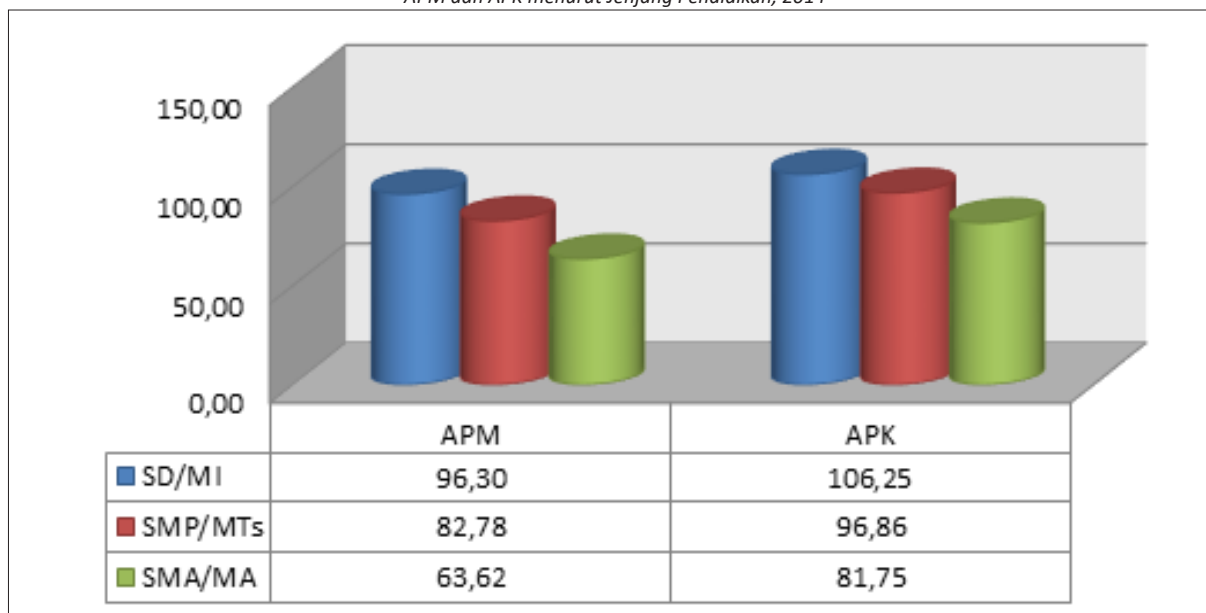
Grafik 2.2
Penduduk Usia 15 Tahun yang bekerja menurut Lapangan Usaha, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Tana Toraja semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk mencapai bangku pendidikan tertentu harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang baik. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

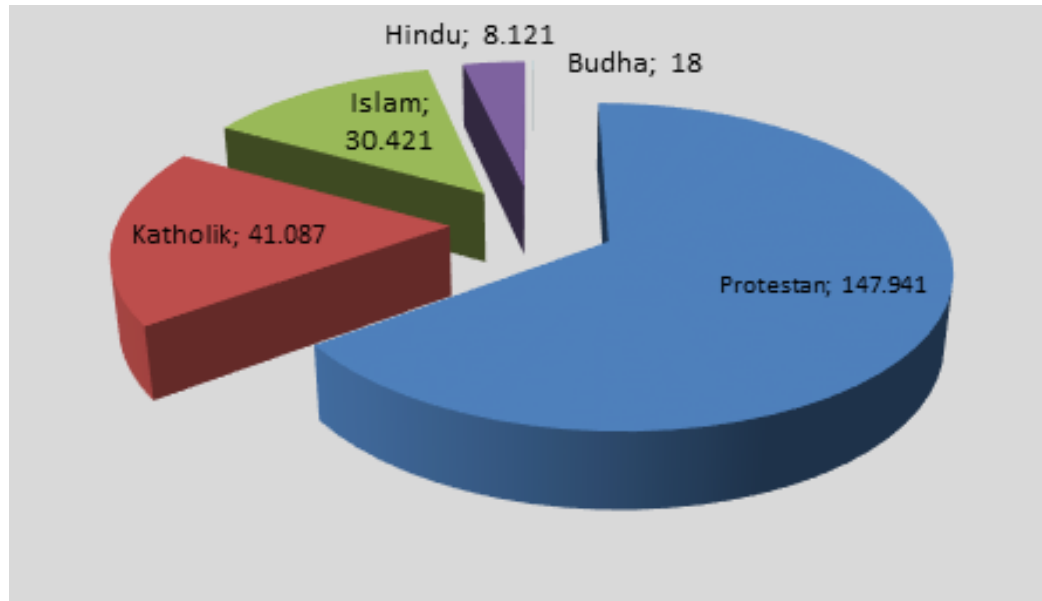
Grafik 2.3
APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Komposisi penduduk berdasarkan agama pada tahun 2014 di dominasi oleh Agama Protestan sebanyak 147.941 jiwa (65,01 %), Katholik sebanyak 41.087 jiwa (18,05 %), Islam sebanyak 30.421 jiwa (13,37 %), Hindu sebanyak 8.121 jiwa (3,56 %), Budha sebanyak 18 jiwa (0,01 %). Secara umum kondisi kehidupan antar umat bergama di Kabupaten Tana Toraja sangat rukun dan kondusif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kab. Tana Toraja, 2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dinilai dari tiga fokus, yaitu : Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial serta Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

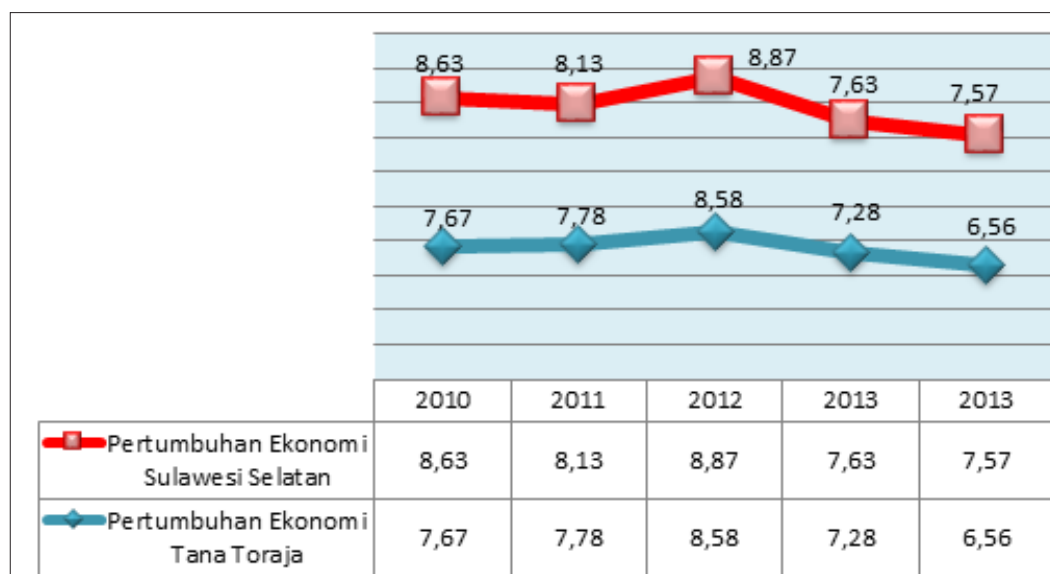
2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja menjelaskan kondisi dan perkembangan masalah Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan Kondisi Kemiskinan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 tercatat sebesar 6,56 persen sedangkan tahun 2013 tercatat sebesar 7,28 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,47 persen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini :

Grafik 2.5
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha
Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 2.43 | 8.34 | 4.90 | 2.64 | 6.30 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 6.88 | 4.59 | 6.06 | 10.36 | 13.47 |
| 3 | Industri Pengolahan | 7.58 | 6.90 | 6.71 | 8.59 | 5.98 |
| 4 | Pengadaan Listrik & Gas | 4.3 | 10.55 | 21.51 | 2.46 | 10.58 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 14.71 | 11.17 | 7.15 | 6.07 | 2.74 |
| 6 | Konstruksi | 8.23 | 9.40 | 9.77 | 10.76 | 3.55 |
| 7 | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor | 12.01 | 7.54 | 14.74 | 10.26 | 10.58 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 12.47 | 8.17 | 9.70 | 13.57 | 9.58 |
| 9 | Penyediaan akomodasi & Makan Minum | 7.86 | 6.54 | 11.26 | 10.21 | 8.66 |
| 10 | Informasi & Kominikasi | 27.16 | 9.94 | 20.08 | 13.79 | 5.66 |
| 11 | Jasa Keuangan & Asuransi | 15.08 | 19.23 | 19.10 | 15.59 | 7.95 |
| 12 | Real Estate | 6.30 | 6.40 | 6.98 | 6.26 | 8.32 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 17.67 | 4.44 | 9.18 | 7.00 | 5.27 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan sosial Wajib | 3.28 | 5.21 | 3.97 | 4.62 | 1.14 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 12.24 | 5.88 | 7.02 | 7.15 | 5.45 |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 14.14 | 7.68 | 8.83 | 7.29 | 11.87 |
| 17 | Jasa Lainnya | 11.78 | 5.37 | 6.30 | 2.94 | 7.56 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi Tana Toraja adalah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran berupa fasilitas pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan jasa yang beredar. Perkembangan jumlah pasar yang dikategorikan sebagai pasar kecamatan dan pasar desa serta sarana perdagangan lainnya tahun 2010-2014 tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Banyaknya Sarana Perdagangan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Jenis Sarana Perdagangan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Pasar Umum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Pasar Desa | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Toko | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 4 | Kios | 250 | 317 | 317 | 320 | 340 |
| 5 | Warung | 50 | 125 | 125 | 130 | 135 |
| 6 | Rumah Makan/Restoran | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jumlah | | 404 | 551 | 552 | 560 | 593 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

b. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur lapangan usaha sebahagian masyarakat Tana Toraja tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peran masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tana Toraja. Sumbangan terbesar pada tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kemudian industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
PDRB Kab. Tana Toraja atas Harga Berlaku (juta), 2010-2014

| No. | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 678.028,0 | 792.901,2 | 877.777,1 | 970.508,0 | 1.135.916,2 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 29.717,2 | 33.409,0 | 36.778,6 | 44.862,8 | 58.289,5 |
| 3 | Industri Pengolahan | 164.668,2 | 194.558,9 | 219.126,2 | 257.664,0 | 300.188,7 |
| 4 | Pengadaan Listrik & Gas | 3.630,1 | 3.967,1 | 4.639,0 | 4.392,4 | 4.751,7 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 3.208,5 | 3.800,4 | 4.147,1 | 4.601,6 | 4.844,8 |
| 6 | Konstruksi | 271.376,6 | 325.898,9 | 387.976,8 | 468.424,7 | 527.142,8 |
| 7 | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor | 378.212,2 | 447.717,6 | 544.820,0 | 620.741,9 | 704.872,4 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 48.736,7 | 55.479,8 | 63.972,3 | 80.060,1 | 98.606,6 |
| 9 | Penyediaan akomodasi & Makan Minum | 31.557,4 | 36.947,8 | 46.940,6 | 54.795,9 | 66.618,0 |
| 10 | Informasi & Kominikasi | 102.976,7 | 113.956,7 | 146.267,3 | 169.278,8 | 180.291,2 |
| 11 | Jasa Keuangan & Asuransi | 46.775,5 | 59.777,0 | 81.242,7 | 101.856,6 | 125.232,2 |
| 12 | Real Estate | 110.666,1 | 131.627,1 | 152.942,7 | 181.998,7 | 221.932,0 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2.250,5 | 2.571,0 | 3.035,0 | 3.484,8 | 3.816,3 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan sosial Wajib | 269.762,5 | 310.855,2 | 338.286,4 | 366.986,4 | 399.557,3 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 135.882,4 | 161.041,1 | 181.251,6 | 209.454,2 | 236.360,1 |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 59.73,7 | 70.184,4 | 81.349,4 | 93.143,7 | 117.357,8 |
| 17 | Jasa Lainnya | 49.915,1 | 55.741,4 | 61.751,3 | 68.928,1 | 79.738,7 |
| PDRB | | 2.387.100,9 | 2.800.435,7 | 3.232.304,1 | 3.701.182,6 | 4.267.516,3 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Tabel 2.14
PDRB Kab. Tana Toraja atas Harga Konstan 2010 (juta), 2010-2014

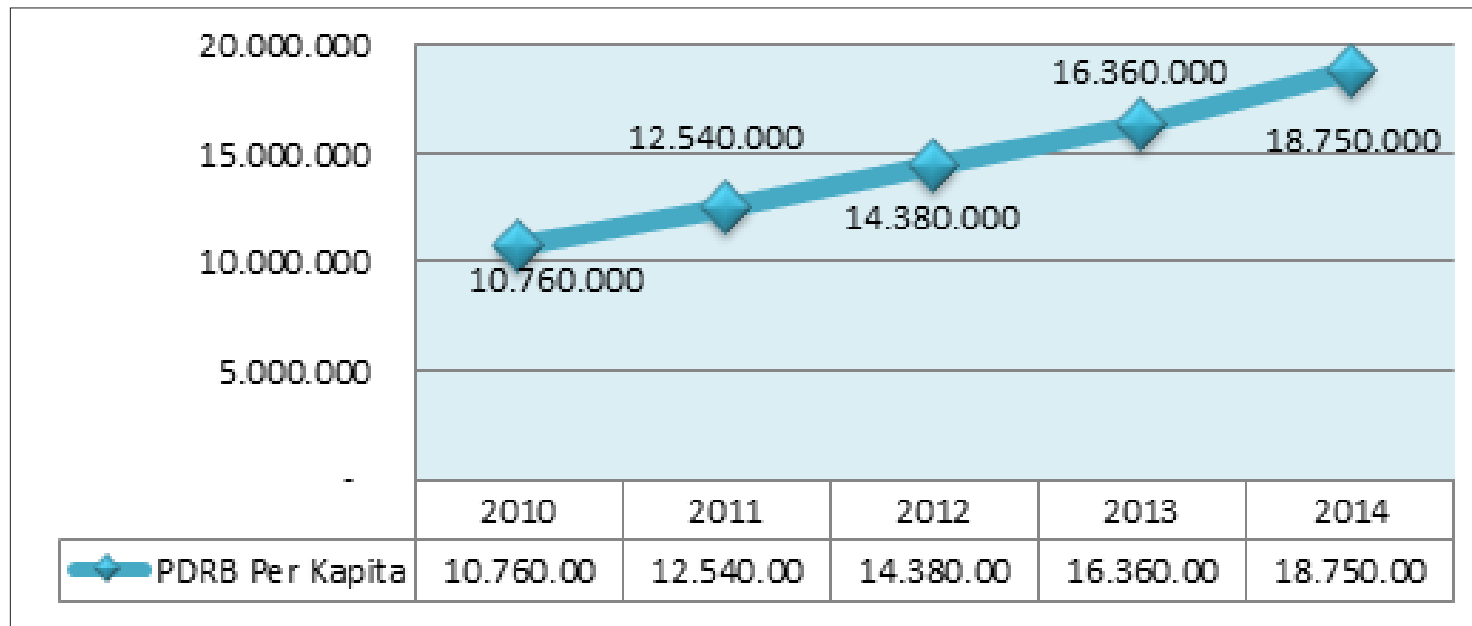
| No. | Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan & Perikanan | 678.028,0 | 734.578,9 | 770.581,8 | 790.920,0 | 840.762,2 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 29.717,2 | 27.803,5 | 29.717,2 | 31.079,9 | 32.963,7 |
| 3 | Industri Pengolahan | 164.668,2 | 176.023,7 | 187.829,9 | 203.956,3 | 216.157,9 |
| 4 | Pengadaan Listrik & Gas | 3.630,1 | 4.012,9 | 4.876,3 | 4.996,1 | 5.524,8 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 3.208,5 | 3.655,8 | 3.821,8 | 4.053,7 | 4.164,8 |
| 6 | Konstruksi | 271.376,6 | 296.891,9 | 325.906,7 | 360.972,5 | 373.795,5 |
| 7 | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Motor | 378.212,2 | 406.742,3 | 466.705,9 | 514.604,4 | 569.041,9 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 48.736,7 | 52.719,9 | 57.831,6 | 65.681,2 | 71.971,2 |
| 9 | Penyediaan akomodasi & Makan Minum | 31.557,4 | 33.619,7 | 37.404,1 | 41.222,8 | 44.793,8 |
| 10 | Informasi & Kominikasi | 102.976,7 | 113.208,6 | 135.943,3 | 154.689,3 | 163.452,2 |
| 11 | Jasa Keuangan & Asuransi | 46.775,5 | 55.769,8 | 66.422,6 | 76.776,4 | 82.878,1 |
| 12 | Real Estate | 110.666,1 | 117.744,9 | 125.966,3 | 133.856,6 | 144.991,4 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2.250,5 | 2.350,4 | 2.566,3 | 2.745,9 | 2.890,6 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan sosial Wajib | 269.762,5 | 283.827,4 | 295.086,6 | 308.722,4 | 312.256,8 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 135.882,4 | 143.875,8 | 153.979,2 | 164.985,4 | 173.970,2 |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial | 59.736,7 | 64.316,7 | 69.931,5 | 75.032,1 | 83.937,5 |
| 17 | Jasa Lainnya | 49.915,1 | 52.595,2 | 55.906,3 | 57.552,1 | 61.902,3 |
| PDRB | | 2.387.100,9 | 2.572.924,8 | 2.793.723,9 | 2.997.145,5 | 3.193.807,4 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

c. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah hasil bagi antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Tana Toraja mencapai 18,75 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 16,55 persen. PDRB Per kapita Kabupaten Tana Toraja dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.6
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kab.Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

d. Kondisi Kemiskinan

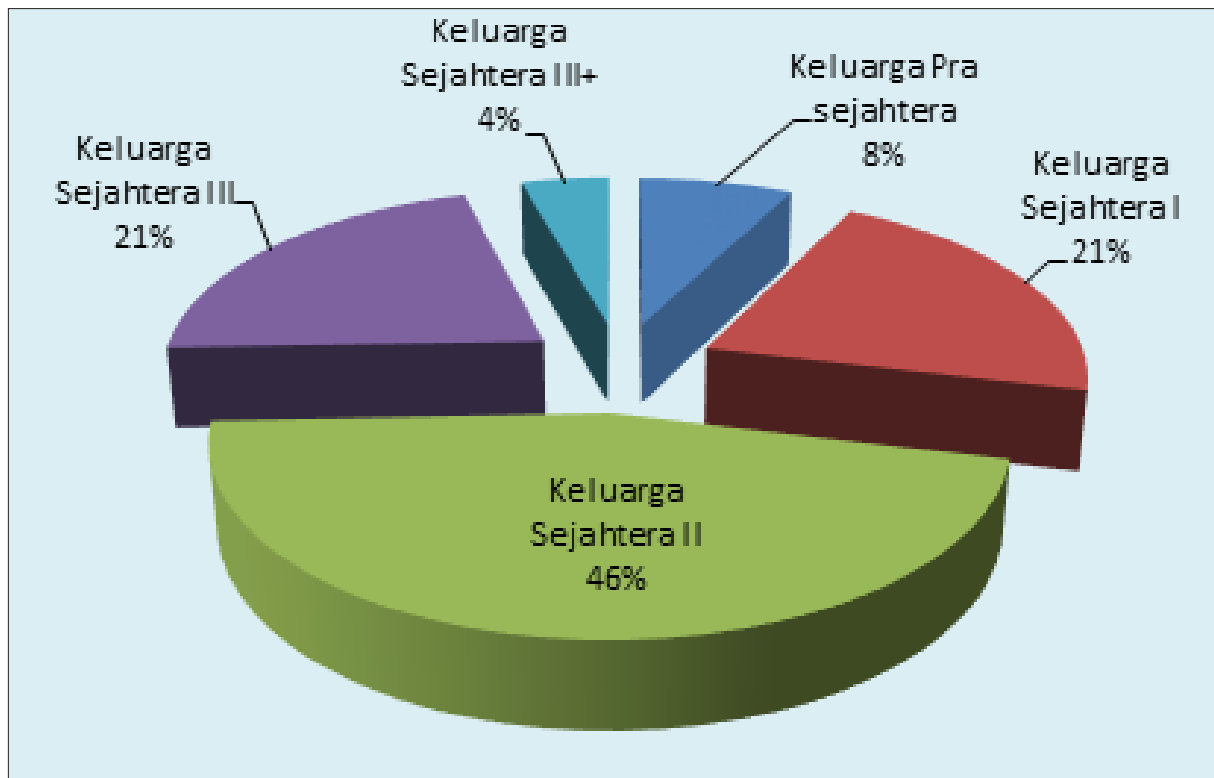
Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak pemenuhan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak dan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Selain memberikan bantuan, upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan pengarahan serta pembekalan keterampilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berkreasi menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mampu bangkit dari kemiskinan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas yang harus ditangani secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak dalam mendorong masyarakat Tana Toraja yang sejahtera.

Berdasarkan data Tahun 2014 Tana Toraja membagi klasifikasi tingkat kesejahteraan menjadi 5 (lima) menyangkut:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dengan lingkungan dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, social psikologis dan pengembangan tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratus bagi masyarakat seperti memberi sumbangan materi dan peran aktif dalam kegiatan masyarakat.
5. Keluarga sejahtera III+, yaitu keluarga yang sudah mampumemenuhi kebutuhan dasar, psikologis, pengembangan diridan aktualisasi diri.

Banyaknya keluarga menurut klasifikasi tingkat kesejahteraan di Kab. Tana Toraja tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.7
Banyaknya Keluarga menurut klasifikasi kesejahteraan, 2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

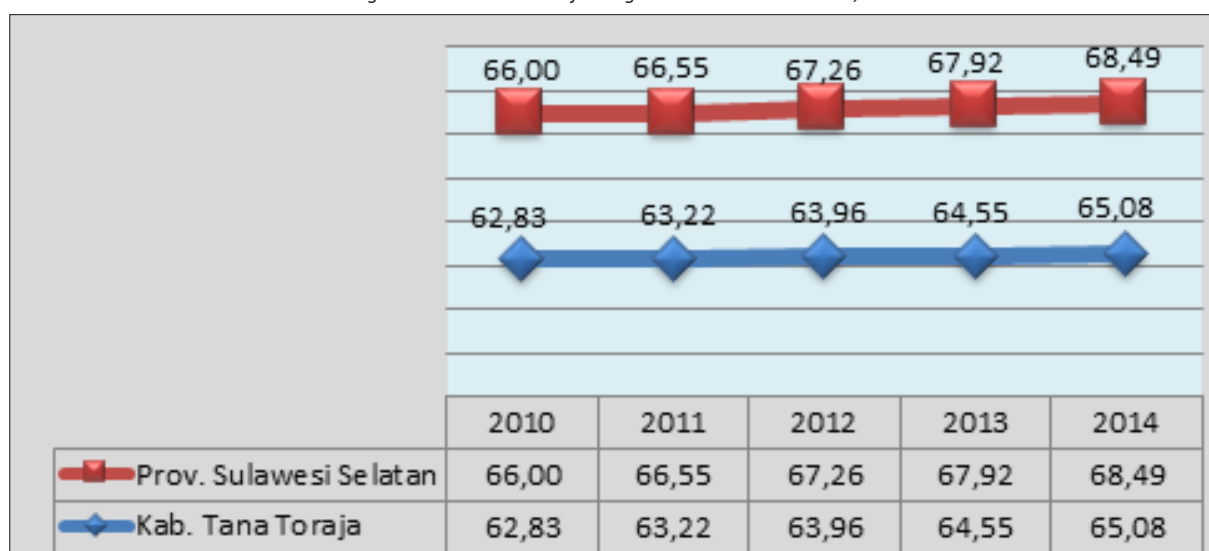
2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia di Kabupaten Tana Toraja yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Aspek pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Aspek kesehatan diukur dari angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan balita gizi buruk. Aspek ekonomi diukur dari tingkat daya beli dan kesempatan kerja/penduduk yang bekerja.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 merupakan agregasi dari tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2010 IPM Tana Toraja sebesar 62,83 meningkat menjadi 65,08 pada tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata 0.89 pertahun. Jika dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan maka IPM Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 berada pada urutan ke 18 dari 24 Kabupaten Kota. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Perbandingan IPM Kab. Tana Toraja dengan Prov. Sulawesi Selatan, 2010-2014

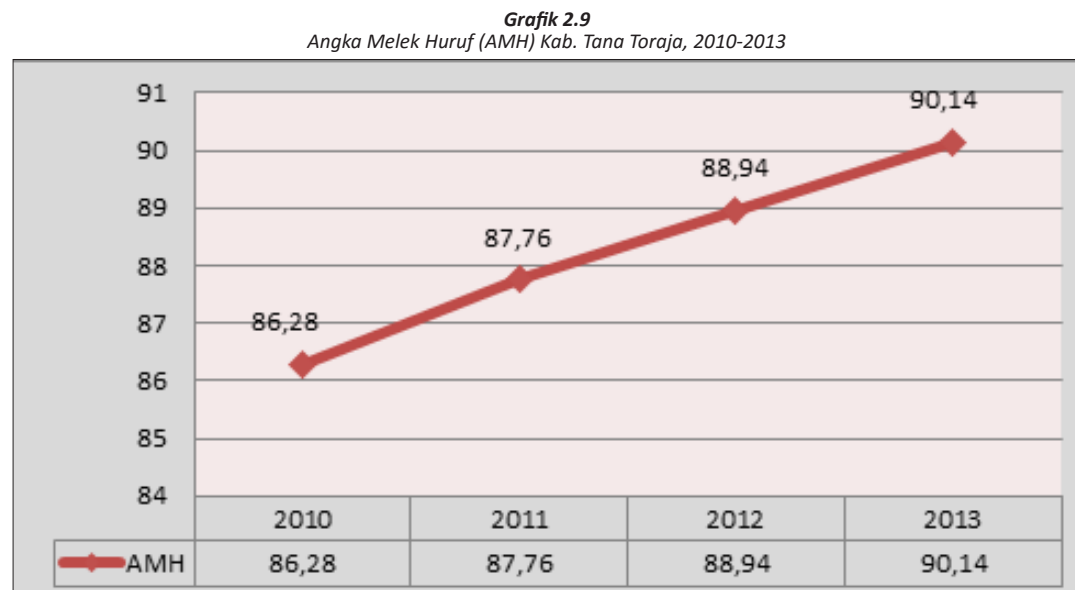


Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

b. Angka Melek Huruf atau mengukur keberhasilan

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf terutama di daerah perdesaan, selain itu dapat juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga angka melek huruf dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

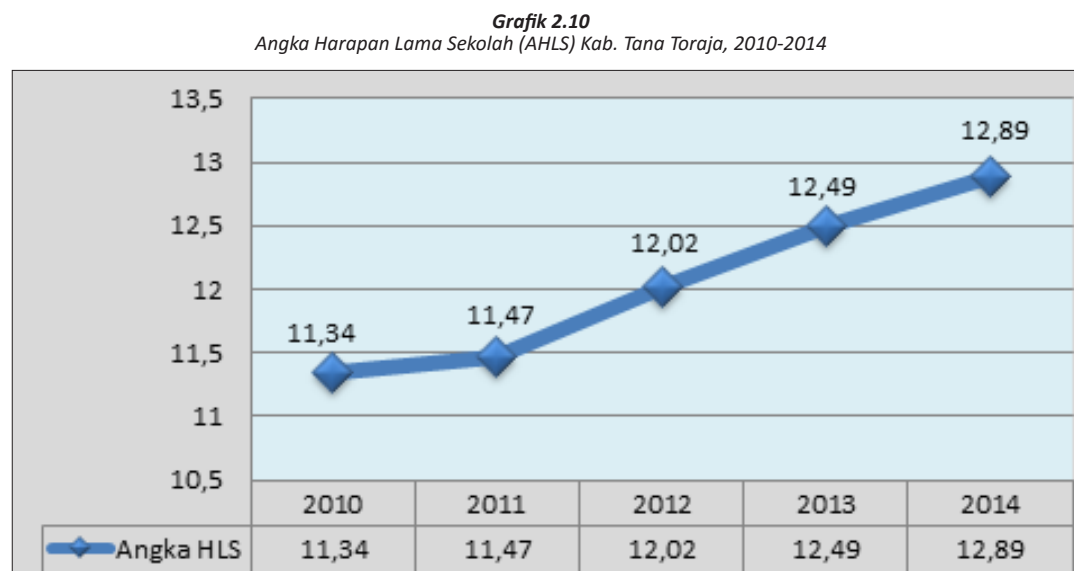
Angka Melek Huruf di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 Angka Melek Huruf 86,28 dan meningkat menjadi 90,14 pada tahun 2013, artinya pada tahun 2013 masih ada 9,86% penduduk usia di atas 15 tahun yang masih buta huruf. Pada tahun 2014 Angka Melek Huruf berubah menjadi Harapan Lama Sekolah. Untuk melihat perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

c. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Selama kurun waktu 2010 – 2014, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja terus meningkat, ditandai 11,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,89 tahun pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 3,42 persen per tahun. Angka HLS pada tahun 2014 tercatat 12,89 tahun, artinya di Tana Toraja anak usia 7 Tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,89 tahun atau dengan kata lain mencapai Diploma I. Harapan lama sekolah dapat digunakan pula untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tengah berlangsung yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



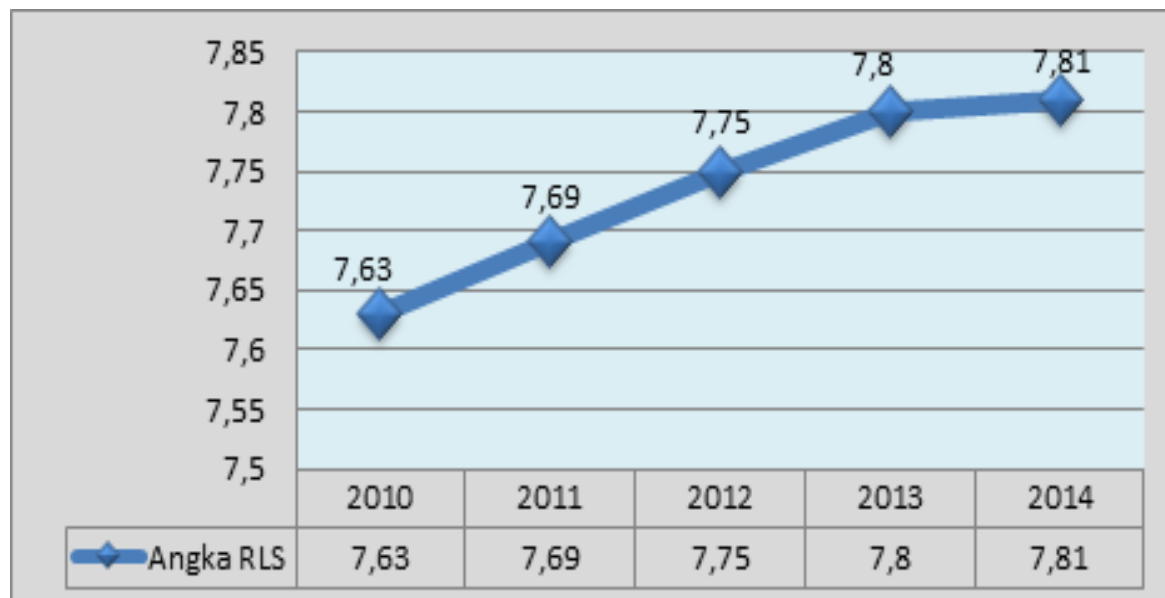
Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

d. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Di Kabupaten Tana Toraja, sampai dengan tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun telah mencapai 7,81 tahun atau setara dengan kelas VII. Selama tahun 2010-2014, rata-rata lama sekolah terus meningkat dari 7,63 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,81 tahun pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 0,58 persen per tahun.

Patut diapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Tana Toraja karena di tingkat Kab./Kota se-Sulawesi Selatan rata-rata lama sekolah berkisar antara 5,63 tahun dan 10,64 tahun dimana Kabupaten Tana Toraja berada pada urutan ke 5 (lima) dari 24 Kab./Kota. Peningkatan ARLS di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.11
Angka Rata-rata Lama sekolah (ARLS) Kab. Tana Toraja, 2010-2014

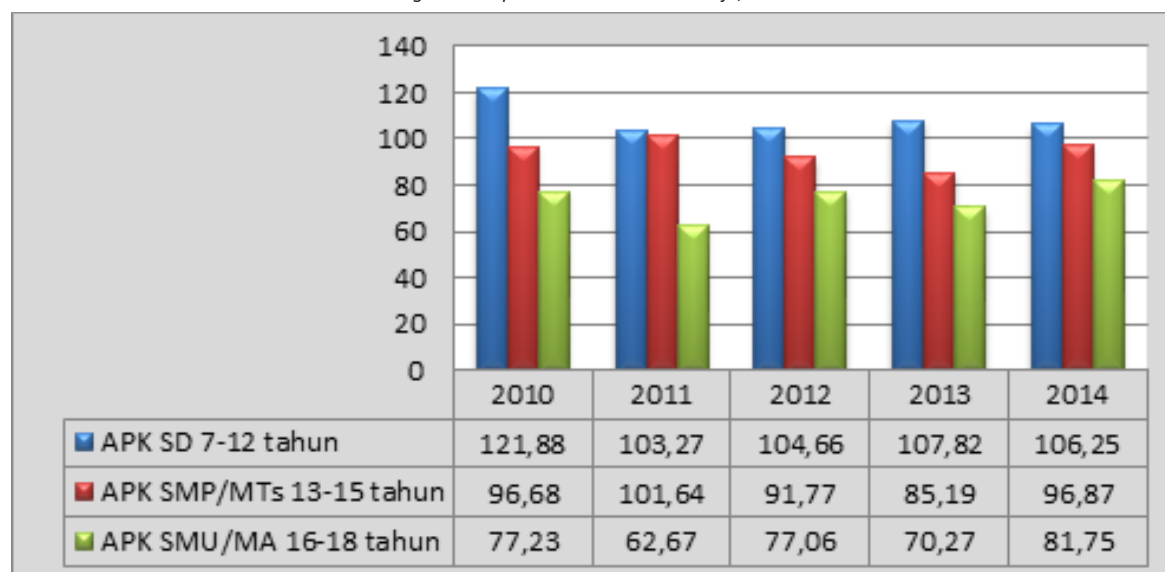


Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

e. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

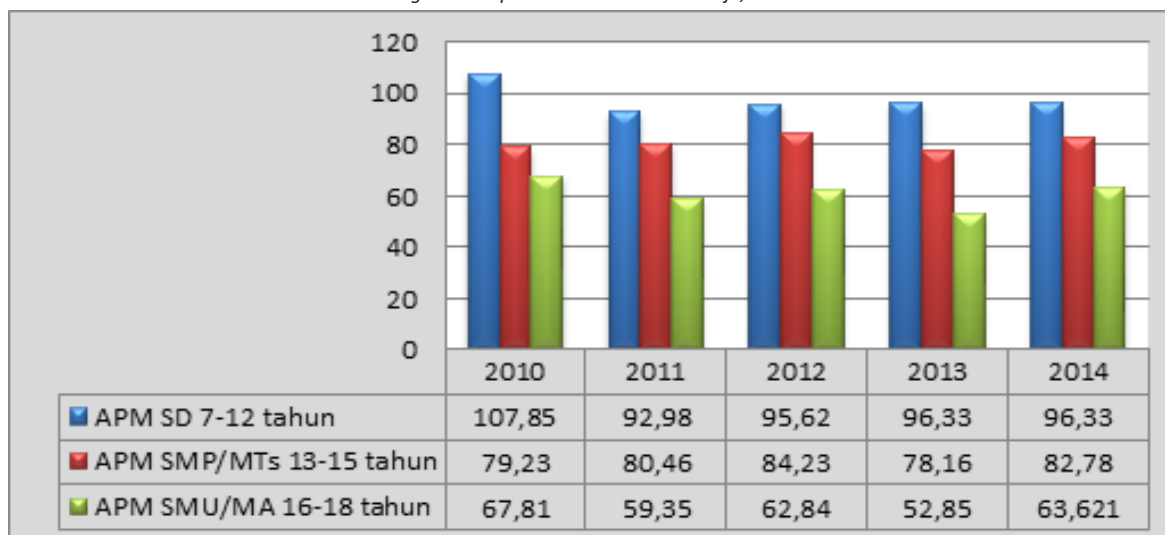
Angka partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan nilai yang bervariasi. Pada Tahun 2014, Nilai APK untuk Sekolah Dasar sebesar 106,25 persen sedangkan Nilai APM sebesar 96,33 persen. Untuk SMP/MTs, Nilai APK sebesar 96,87 persen sedangkan Nilai APM sebesar 82,78 persen dan untuk SMU/MA, Nilai APK sebesar 81,75 persen sedangkan Nilai APM sebesar 63,62 persen. Untuk lebih jelasnya, peningkatan Nilai APM dan Nilai APK dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.12
Nilai Angka Partisipasi Kasar Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Grafik 2.13
Nilai Angka Partisipasi Murni Kab. Tana Toraja, 2010-2014

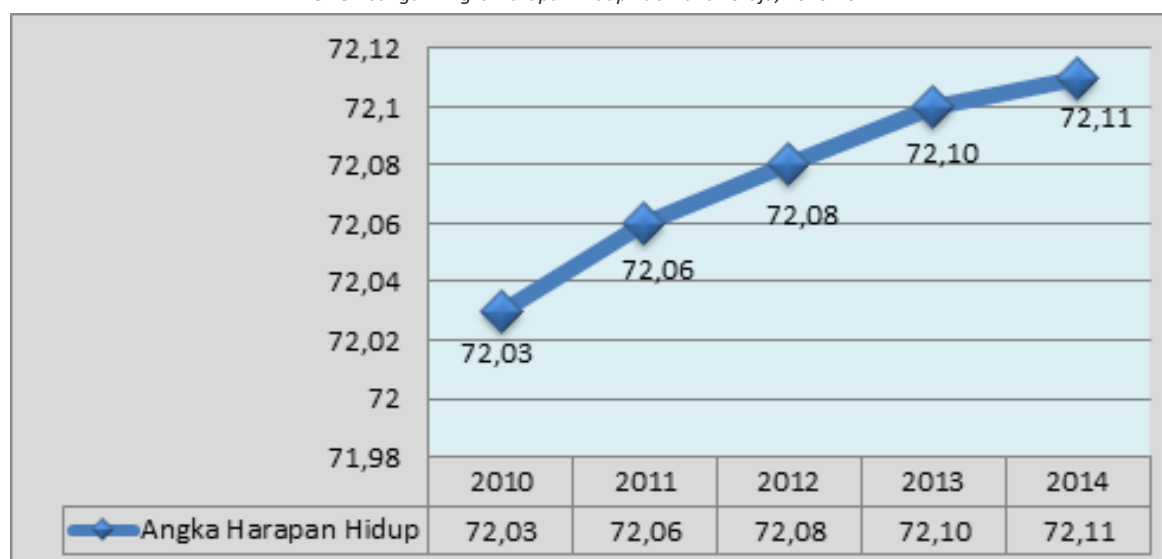


Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

f. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tana Toraja menunjukkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, mengalami kecenderungan positif selama kurun waktu 2010 – 2014. Angka Harapan Hidup saat lahir terus meningkat 0.03 persen pertahun dan pada tahun 2014, Angka Harapan hidup telah mencapai 72.11 tahun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

2.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Fokus pembangunan pada bidang seni budaya yang erat kaitannya dengan pelestarian dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelompok/sanggar namun belum memberikan hasil yang optimal. Sehubungan dengan maksud tersebut dibutuhkan upaya inventarisasi seni budaya yang berkarakter lokal/budaya Toraya, menumbuhkembangkan seni budaya sejak usia dini peningkatan pembinaan kelompok/sanggar seni, dan promosi.

Fokus pembangunan pada bidang olahraga melalui pembinaan, penelusuran bakat mulai dari anak usia dini sekaligus upaya mendorong prestasi olahraga dari berbagai cabang olahraga namun disayangkan sampai saat ini sarana dan prasarana belum memadai dan bahkan dapat dikatakan tidak ada.

a. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari 19 kecamatan dan 159 Kelurahan/Lembang, memiliki adat-istiadat

serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Tana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Perkembangan Seni dan Budaya di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Capaian Pembangunan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Grup Kesenian | 20 | 25 | 49 | 49 | 55 |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian | - | - | - | - | - |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tana Toraja, 2015

b. Pemuda dan Olahraga

Dalam mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Data mengenai jumlah kegiatan olahraga serta lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Tana toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Perkembangan Olahraga di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Capaian Pembangunan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Kegiatan Olahraga | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 2 | Jumlah Lapangan Olahraga | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 |

Sumber data : Bagian Pemuda dan Olahraga Setda Kab. Tana Toraja, 2015

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

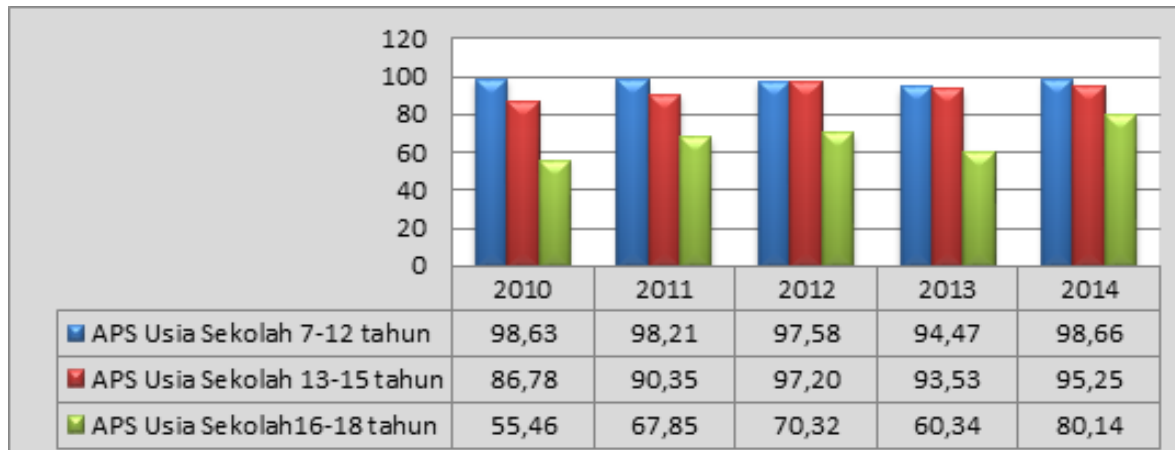
2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan dan merupakan salah satu pilar utama agar penduduk dapat memberdayakan dirinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Manusia yang berpendidikan cenderung akan lebih memperhatikan tingkat pada bidang kesehatan, produktif, inovatif, kreatif, efisien dan efektif dalam mendorong kinerja yang terukur, peluang berusaha dan usia lama hidup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

a. Pendidikan Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan gambaran tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Fenomena yang terjadi di Tana Toraja adalah tingkat partisipasi pendidikan di tingkat dasar sangat tinggi tetapi cenderung menurun ketika masuk tingkatan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesulitan akses dan ketidaktersediaan sarana pendidikan lanjutan di beberapa kecamatan serta faktor pemenuhan ekonomi membuat sebagian siswa lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah. Perkembangan Angka Partisipasi di Kabupaten Tana toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

b. Rasio Murid terhadap Jumlah Sekolah

Rasio murid terhadap jumlah sekolah tahun 2014 cenderung mengalami perbaikan dibanding tahun 2010 terutama pada tingkat SMP/MI dimana pada tahun 2010 rasio murid terhadap sekolah sebesar 206.41 dan mengalami peningkatan menjadi 182.45 pada tahun 2014. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah gedung sekolah bertambah lebih cepat di bandingkan dengan jumlah peserta didik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Rasio Murid terhadap sekolah setiap jenjang Pendidikan, 2010-2014

| No. | Jenjang Pendidikan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD / MI | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah | 228 | 228 | 228 | 227 | 226 |
| | b. Jumlah Murid | 41.229 | 41.229 | 41.229 | 39.963 | 36.369 |
| | Rasio Murid Sekolah | 180.83 | 180.83 | 180.83 | 162.83 | 160,92 |
| 2 | SMP / MTs | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah | 66 | 66 | 88 | 88 | 95 |
| | b. Jumlah Murid | 13.623 | 13.627 | 13.941 | 15.916 | 17.333 |
| | Rasio Murid Sekolah | 206.41 | 206.47 | 158.42 | 180.86 | 182.45 |
| 3 | SMU | | | | | |
| | a. Jumlah Sekolah | 38 | 38 | 44 | 47 | 50 |
| | b. Jumlah Murid | 10.253 | 10.253 | 11.507 | 12.277 | 13.144 |
| | Rasio Murid Sekolah | 269.82 | 269.82 | 261.52 | 261.21 | 262.88 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

c. Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 cenderung menurun dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal ini merupakan tantangan pemerintah daerah di bidang pendidikan karena menurut Standar Pelayanan Minimum, jumlah rasio seharusnya 14 murid per guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Rasio Murid terhadap Guru setiap jenjang Pendidikan, 2010-2014

| No. | Jenjang Pendidikan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | SD / MI | | | | | |
| | c. Jumlah guru | 2.440 | 2.440 | 2.432 | 2.467 | 1.337 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | d. Jumlah Murid | 41.229 | 41.229 | 41.229 | 39.963 | 36.369 |
| | Rasio Murid Guru | 16.89 | 16.89 | 16.95 | 14.98 | 27.20 |
| 2 | SMP / MTs | | | | | |
| | c. Jumlah guru | 1.249 | 1.269 | 1.131 | 690 | 756 |
| | d. Jumlah Murid | 13.623 | 13.627 | 13.941 | 15.916 | 17.333 |
| | Rasio Murid Guru | 10.90 | 10.73 | 12.34 | 23.07 | 22.93 |
| 3 | SMU | | | | | |
| | c. Jumlah guru | 745 | 745 | 555 | 1.053 | 492 |
| | d. Jumlah Murid | 10.253 | 10.253 | 11.507 | 12.277 | 13.144 |
| | Rasio Murid Guru | 13.76 | 13.76 | 20.73 | 11.16 | 26.72 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2011-2015

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan manusia mensyaratkan pembangunan di bidang kesehatan yang optimal ditandai dengan adanya kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat, terselenggaranya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu serta tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

a. Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Tana Toraja tidak mengalami penambahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni hanya dua unit yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta. Akibatnya Rasio rumah sakit terhadap penduduk setiap tahun semakin membesar. Pada Tahun 2010 rasio rumah sakit terhadap penduduk sebesar 110.540 dan pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebesar 227.588 jiwa, maka Rasio rumah sakit terhadap penduduk adalah 113.794 yang berarti setiap rumah sakit di Kabupaten Tana Toraja melayani 113.794 orang.

b. Jumlah Tenaga Medis

Secara keseluruhan, jumlah tenaga medis di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2010 sebanyak 484 orang dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 515 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Medis di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Tenaga Medis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Dokter Spesialis | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 |
| 2 | Dokter Umum | 38 | 32 | 31 | 33 | 31 |
| 3 | Dokter Gigi | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | Perawat | 241 | 249 | 245 | 244 | 255 |
| 5 | Bidan | 112 | 141 | 146 | 146 | 148 |
| 6 | Farmasi | 9 | 21 | 22 | 16 | 15 |
| 7 | Ahli Gizi | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 |
| 8 | Sanitasi | 20 | 34 | 20 | 13 | 19 |
| 9 | Kesehatan Masyarakat | 24 | 16 | 16 | 20 | 13 |
| Jumlah | | 484 | 524 | 516 | 524 | 515 |

Sumber data : Dinas Kesehatan & RSUD Lakipadada Kab. Tana Toraja, 2011-2015

c. Jumlah Dokter

Jumlah dokter (umum, ahli dan gigi) di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan penurunan pada tahun 2011 dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 60 dokter menurun menjadi 49 dokter. Pada Tahun 2010, rasio dokter terhadap penduduk adalah 3.684,68 penduduk untuk setiap dokter dan meningkat menjadi 4.551,76 penduduk untuk setiap dokter pada tahun 2014. Secara umum, rasio ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan rasio ideal, yaitu 2.500 penduduk untuk setiap dokter. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.20
Rasio penduduk terhadap dokter di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Jumlah Dokter (Spesialis, Umum, Gigi) | 60 | 49 | 52 | 52 | 50 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 221.081 | 223.306 | 224.852 | 226.212 | 227.588 |
| 3 | Rasio Penduduk - Dokter | 3.684,68 | 4.557,27 | 4.324,08 | 4.350,23 | 4.551,76 |

Sumber data : Dinas Kesehatan & RSUD Lakiapada Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Tabel 2.21
Jumlah Dokter Umum menurut Kecamatan, 2014

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Jumlah Dokter Umum | Rasio |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Bonggakaradeng | 7.026 | 1 | 7.026 |
| 2 | Simbuang | 6.331 | 1 | 6.331 |
| 3 | Rano | 6.204 | 1 | 6.204 |
| 4 | Mappak | 5.746 | - | - |
| 5 | Mengkendek | 27.769 | 2 | 13.884 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 19.701 | 1 | 19.701 |
| 7 | Sangalla | 6.791 | 1 | 6.791 |
| 8 | Sangalla Selatan | 7.549 | 1 | 7.549 |
| 9 | Sangalla utara | 7.518 | 1 | 7.518 |
| 10 | Makale | 34.744 | 2 | 17.372 |
| 11 | Makale Selatan | 12.811 | 1 | 12.811 |
| 12 | Makale Utara | 12.064 | 13 | 928 |
| 13 | Saluputti | 7.614 | 1 | 7.614 |
| 14 | Bituang | 14.771 | 1 | 14.771 |
| 15 | Rembon | 18.670 | 1 | 18.670 |
| 16 | Masanda | 6.546 | 1 | 6.546 |
| 17 | Malimbong Balepe | 9.387 | 1 | 9.387 |
| 18 | Rantetayo | 11.029 | 1 | 11.029 |
| 19 | Kurra | 5.317 | 1 | 5.317 |
| Kab. Tana Toraja | | 227.588 | 32 | 7.112.12 |

Sumber data : Dinas Kesehatan & RSUD Lakiapada Kab. Tana Toraja, 2015

d. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) mengukur kasus kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kecenderungan menurun dari 9 bayi per 1000 kelahiran pada tahun 2010 menjadi 7 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2014. Namun tetap penting dicatat bahwa AKB ini merupakan kasus kematian yang dilaporkan (facility based) dan tidak sepenuhnya mencerminkan kasus kematian bayi yang sesungguhnya (community based). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Jumlah Hidup Lahir, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB
di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Hidup Lahir | 4.135 | 4.092 | 3.760 | 3.945 | 3.904 |
| 2 | Jumlah Kematian Bayi | 37 | 29 | 37 | 42 | 41 |
| 3 | Angka Kematian Bayi (AKB) | 9/1000 KH | 7/1000 KH | 9.8/1000 KH | 7/1000 KH | 7/1000 KH |
| 4 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) | 18.75/1000 | 18.33/1000 | 16.72/1000 | 17.44/1000 | 17.20/1000 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2011-2015

AKHB di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan angka yang sedikit variatif. AKHB tertinggi terjadi di Kecamatan Mappak dan terendah di Kecamatan Masanda. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Jumlah Hidup Lahir, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan AKHB
menurut Kecamatan, 2014

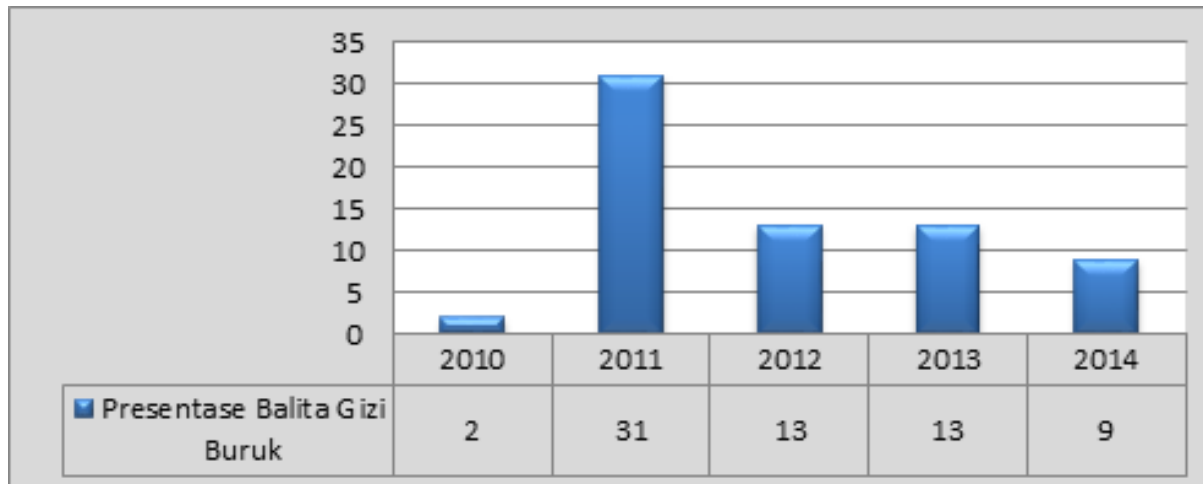
| No. | Kecamatan | Jumlah Kematian Bayi Usia di Bawah 1 Tahun | Jumlah Kelahiran Hidup | AKB per 1000 Kelahiran Hidup | AKHB |
|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Bonggakaradeng | 4 | 107 | 37.4/1000 KH | 15.6/1000 |
| 2 | Simbuang | 2 | 121 | 16.5/1000 KH | 19.6/1000 |
| 3 | Rano | 0 | 114 | - | 18.7/1000 |
| 4 | Mappak | 0 | 112 | - | 20.3/1000 |
| 5 | Mengkendek | 7 | 393 | 17.8/1000 KH | 13.7/1000 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 1 | 354 | 2.8/1000 KH | 19.1/1000 |
| 7 | Sangalla | 0 | 118 | - | 17.7/1000 |
| 8 | Sangalla Selatan | 2 | 136 | 14.7/1000 KH | 17.9/1000 |
| 9 | Sangalla utara | 1 | 131 | 7.6/1000 KH | 16.1/1000 |
| 10 | Makale | 3 | 632 | 4.7/1000 KH | 19.4/1000 |
| 11 | Makale Selatan | 0 | 235 | - | 18.6/1000 |
| 12 | Makale Utara | 2 | 179 | 11.1/1000 KH | 14.9/1000 |
| 13 | Saluputti | 5 | 173 | 28.9/1000 KH | 18.5/1000 |
| 14 | Bituang | 5 | 224 | 22.3/1000 KH | 15.7/1000 |
| 15 | Rembon | 1 | 330 | 3.0/1000 KH | 17.9/1000 |
| 16 | Masanda | 0 | 85 | 13.1/1000 KH | 13.5/1000 |
| 17 | Malimbong Balepe | 2 | 152 | 13.1/1000 KH | 16.4/1000 |
| 18 | Rantetayo | 2 | 211 | 9.5/1000 KH | 17.7/1000 |
| 19 | Kurra | 4 | 97 | 41.2/1000 KH | 15.5/1000 |
| Kab. Tana Toraja | | 41 | 3.904 | 10.5/1000 KH | 17.2/1000 |

Sumber data :Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2015

e. Presentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011. Jika mengacu pada data tahun 2010, maka persentase balita gizi buruk meningkat pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.16
Presentase Balita Gizi Buruk di Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2011-2015

f. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Posyandu

Dari berbagai jenis fasilitas kesehatan, Posyandu yang menunjukkan peningkatan paling signifikan. Jumlah Posyandu meningkat dari 264 unit pada tahun 2010 menjadi 303 unit pada tahun 2014. Sedangkan jumlah Puskesmas hanya bertambah 2 unit selama periode 2010-2014. Akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang relatif lebih cepat ketimbang pertumbuhan Puskesmas menyebabkan rasio Puskesmas terhadap penduduk cenderung menurun. Keberadaan Puskesmas menyebar di seluruh wilayah kecamatan, bahkan Kecamatan Gandang Batu Sillanan dan Kecamatan Rantetayo telah memiliki Puskesmas lebih dari satu unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Posyandu di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah Puskesmas | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 2 | Jumlah Poliklinik | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Jumlah Pustu | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 4 | Jumlah Posyandu | 264 | 266 | 274 | 277 | 303 |
| 5 | Jumlah Penduduk | 221.081 | 223.306 | 224.852 | 226.212 | 227.588 |
| 6 | Jumlah Bayi | 4.135 | 4.864 | 4.099 | 3.786 | 3.967 |
| 7 | Rasio puskesmas terhadap penduduk | 0.00859 | 0.00895 | 0.00889 | 0.00928 | 0.00923 |
| 8 | Rasio pustu terhadap penduduk | 0.0149 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0137 | 0.0136 |
| 9 | Rasio posyandu terhadap bayi | 0.119 | 0.119 | 0.122 | 0.122 | 0.133 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2011-2015

Tabel 2.25
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Posyandu menurut Kecamatan, 2014

| No. | Kecamatan | Jumlah Puskesmas | Jumlah Poliklinik | Jumlah Pustu | Jumlah Posyandu |
|-----|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Bonggakaradeng | 1 | - | 2 | 9 |
| 2 | Simbuang | 1 | - | 1 | 14 |
| 3 | Rano | 1 | - | 1 | 13 |
| 4 | Mappak | 1 | - | 1 | 13 |
| 5 | Mengkendek | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 2 | - | 5 | 22 |
| 7 | Sangalla | 1 | - | - | 11 |
| 8 | Sangalla Selatan | 1 | - | - | 12 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 9 | Sangalla utara | 1 | - | - | 8 |
| 10 | Makale | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 11 | Makale Selatan | 1 | - | 3 | 20 |
| 12 | Makale Utara | 1 | - | 2 | 16 |
| 13 | Saluputti | 1 | - | 1 | 10 |
| 14 | Bituang | 1 | - | 4 | 22 |
| 15 | Rembon | 1 | - | 1 | 26 |
| 16 | Masanda | 1 | - | 1 | 12 |
| 17 | Malimbong Balepe | 1 | - | 2 | 12 |
| 18 | Rantetayo | 2 | - | 1 | 18 |
| 19 | Kurra | 1 | - | 2 | 10 |
| Kab. Tana Toraja | | 21 | 4 | 31 | 303 |

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja, 2011-2015

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Panjang Jaringan Jalan

Secara umum, kualitas jalan di Kabupaten Tana Toraja terus membaik yang ditandai dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang. Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat sekitar selama kurun waktu 2010-2014. Secara relatif, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 23.47 persen pada tahun 2010 menjadi 30.50 persen pada periode tahun 2014. Sebaliknya, panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat menunjukkan penurunan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26
Kondisi Jalan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Kondisi Jalan | Panjang Jalan (Km) | | | | |
|---------------------|---------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Baik | 146.95 | 301.84 | 157.07 | 272.92 | 382.21 |
| 2 | Sedang | 175.50 | 358.60 | 175.50 | 170.80 | 234.00 |
| 3 | Rusak | 295.75 | 322.20 | 295.75 | 265.95 | 237.25 |
| 4 | Rusak Berat | 633.80 | 269.36 | 623.62 | 542.33 | 398.54 |
| Total Panjang Jalan | | 1.252.00 | 1.252.00 | 1.252.00 | 1.252.00 | 1.252.00 |

Sumber data : BPS dan Dinas PU Kab. Tana Toraja, 2015

b. Jaringan Irigasi

Pengairan areal persawahan di Kabupaten Tana Toraja dilayani oleh jaringan irigasi sekunder dan tersier dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan luas areal pelayanan. Luas areal persawahan yang dilayani irigasi tersier meningkat dari 669 Ha pada tahun 2010 menjadi 3.001 Ha pada tahun 2014. Pada saat yang sama, Luas areal persawahan yang dilayani irigasi sekunder meningkat dari 13.688 Ha menjadi 14.236 Ha. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Luas Areal Pelayanan Irigasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

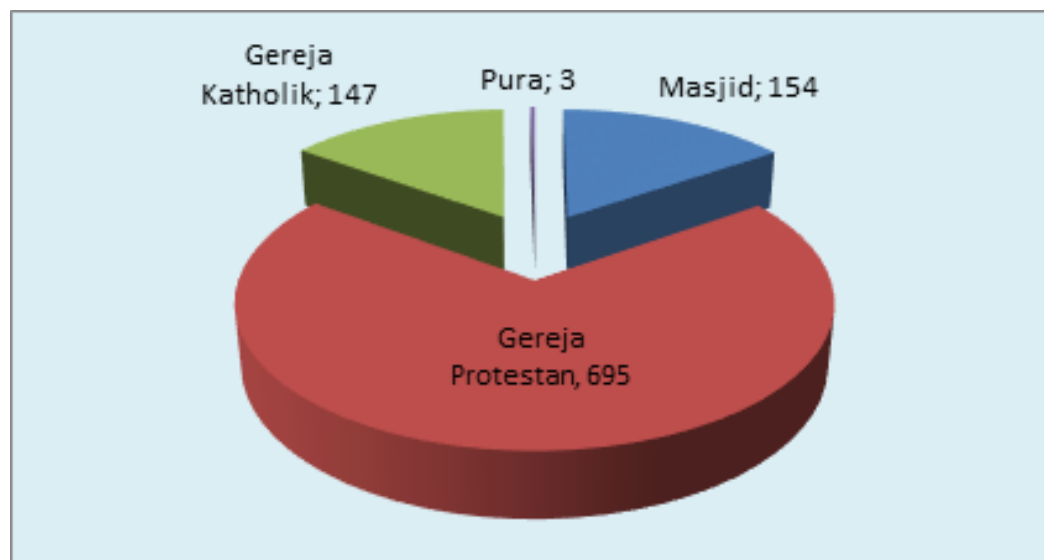
| No. | Jaringan Irigasi | Luas Areal Pelayanan Irigasi (Ha) | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jaringan Primer | - | - | - | - | - |
| 2 | Jaringan Sekunder | 13.668 | 13.668 | 13.668 | 14.236 | 14.236 |
| 3 | Jaringan Tersier | 669 | 946 | 1.501 | 2.001 | 3.001 |
| Total Luas Areal Pelayanan | | 14.337 | 14.614 | 15.169 | 16.237 | 17.237 |

Sumber data : Dinas PU & Dinas Pertanian Kab. Tana Toraja, 2011-2015

c. Jumlah Tempat Ibadah

Mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen Protestan, maka jumlah tempat ibadah juga didominasi oleh Gereja. Sampai dengan tahun 2014, jumlah Gereja Protestan di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 695 unit sedangkan Gereja Katholik sebanyak 147 unit. Jumlah Masjid di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 154 unit. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik dan tabel di berikut ini :

Grafik 2.17
Banyaknya Rumah Ibadah di Kab. Tana Toraja, 2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

Tabel 2.28
Jumlah Tempat Ibadah menurut Kecamatan, 2014

| No. | Kecamatan | Jumlah Masjid | Jumlah Gereja Protestan | Jumlah Gereja Katholik | Jumlah Pura |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Bonggakaradeng | 8 | 31 | 1 | - |
| 2 | Simbuang | 1 | 37 | 7 | 1 |
| 3 | Rano | 18 | 25 | 2 | - |
| 4 | Mappak | - | 26 | 11 | - |
| 5 | Mengkendek | 41 | 62 | 20 | - |
| 6 | Gandang Batu Sillanan | 29 | 48 | 9 | - |
| 7 | Sangalla | 3 | 40 | 5 | - |
| 8 | Sangalla Selatan | 8 | 35 | 5 | - |
| 9 | Sangalla utara | 1 | 36 | 10 | - |
| 10 | Makale | 14 | 43 | 11 | - |
| 11 | Makale Selatan | 6 | 35 | 13 | - |
| 12 | Makale Utara | 2 | 36 | 7 | 1 |
| 13 | Saluputti | 4 | 35 | 7 | - |
| 14 | Bituang | 4 | 27 | 5 | - |
| 15 | Rembon | 8 | 44 | 12 | 1 |
| 16 | Masanda | 2 | 23 | 2 | - |
| 17 | Malimbong Balepe | 1 | 38 | 6 | - |
| 18 | Rantetayo | 5 | 45 | 11 | - |
| 19 | Kurra | 1 | 29 | 3 | - |
| Kab. Tana Toraja | | 154 | 695 | 147 | 3 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja, 2015

d. Rumah Tinggal Bersanitasi

Selama kurun waktu 2010-2014, Presentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tana Toraja cenderung meningkat. Pada tahun 2010, Presentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 65.50 % dan meningkat menjadi 87.41 % pada tahun 2014. Capaian ini menunjukkan masih ada sekitar 12.59 persen rumah tinggal di Kabupaten Tana Toraja yang belum memiliki akses terhadap sanitasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi | 32.980 | 35.605 | 39.831 | 43.570 | 46.947 |
| 2 | Jumlah Rumah Tinggal | 50.350 | 50.784 | 52.135 | 53.651 | 53.709 |
| Presentase | | 65.50 | 70.11 | 76.40 | 81.21 | 87.41 |

Sumber data : Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kab. Tana Toraja, 2015

e. Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah sekitarnya. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 – 2013.

Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan di Tana Toraja semakin meningkat meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan, ini merupakan salah satu indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dari pihak terkait saat akan mendirikan bangunan. Pada tahun 2010, jumlah pengajuan IMB di Tana Toraja sebanyak 229 dan meningkat menjadi 388 Pengajuan IMB pada tahun 2014. Untuk mengetahui perkembangan penataan ruang di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Perkembangan Penataan Ruang di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Luas Wilayah (Ha) | 2.054,30 | 2.054,30 | 2.054,30 | 2.054,30 | 2.054,30 |
| 2 | Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| 3 | Jumlah Pengajuan IMB | 229 | 331 | 268 | 330 | 388 |
| 4 | Ruang Publik yang Berubah Peruntukan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |

Sumber data : Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih dan listrik pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/ KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2010 adalah sebesar 90,20 %, kemudian meningkat menjadi 92,20 % pada tahun 2014. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 69.89 % pengguna pada tahun 2010, kemudian meningkat menjadi 78.96 % pada tahun 2014 sedangkan indikator rumah layak huni pada tahun 2010 sebesar 75.70 % meningkat menjadi 80.00 % pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Indikator Perumahan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rumah Tangga pengguna Air Bersih (%) | 90.20 | 90.80 | 91.10 | 91.80 | 92.20 |
| 2 | Rumah Tangga pengguna Listrik (%) | 69.89 | 70.71 | 68.12 | 75.10 | 78.96 |
| 3 | Rumah Layak Huni | 75.70 | 76.60 | 78.50 | 78.90 | 80.00 |

Sumber data : Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pementapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk meningkatkanantisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja juga meningkatkan jalinan hubungan dan berkoordinasi dengan Intel Kodim, Intel Kejaksaan dan Intel Polres serta organisasi masyarakat.

Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk di Kabupaten Tana Toraja cenderung menurun selama periode 2010-2014, dimana rasio tersebut menurun dari 0,31 persen pada tahun 2010 menjadi 0,27 persen pada tahun 2014. Ini disebabkan oleh jumlah polisi pamong praja mengalami penurunan, dan pada saat yang sama jumlah penduduk terus bertambah. Pada tahun 2014, jumlah polisi pamong praja sebanyak 62 orang, menurun dari 69 orang pada tahun 2010.

Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Kegiatan Pembinaan Politik, Jumlah Pemilih, Jumlah Parpol dan Ormas
Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) | - | - | - | 3 | 5 |
| 2 | Kegiatan pembinaan politik di daerah (kali) | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Partai Politik | | | | | |
| | a. Jumlah Partai Politik | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 |
| | b. Jumlah Parpol Peserta Pemilu | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 |
| 4 | Jumlah Pemilih : | | | | | |
| | a. Laki-laki | 74.722 | - | - | 77.906 | 84.114 |
| | b. Perempuan | 72.890 | - | - | 76.699 | 81.560 |
| 5 | Presentase kasus perselisihan partai politik yang terselesaikan | Hanya ada satu kasus sepanjang tahun 2010 – 2014 dan terselesaikan di MK | | | | |
| 6 | Jumlah Ormas Terdaftar yang Aktif | 33 | 39 | 42 | 42 | 69 |
| | Jumlah Polisi Pamong Praja | 69 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| | Jumlah Penduduk | 221.081 | 223.306 | 224.852 | 226.212 | 227.588 |
| | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 1.000 Penduduk | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |

Sumber data : Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang

taruna, korban bencana dan lansia. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Indikator Urusan Sosial Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Sarana Sosial : | | | | | |
| | a. Panti Jompo | - | - | - | - | - |
| | b. Panti Asuhan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | c. Panti Sosial | - | - | - | - | - |
| | d. Rumah Singgah | - | - | - | - | - |
| | e. Panti Cacat | - | - | - | - | - |
| 2 | PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | 150 | 80 | 250 | 360 | 360 |
| 3 | Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Anak Jalanan | 250 | 260 | 320 | 450 | 450 |

Sumber data : Dinas Kesos dan Transnaker & BPS Kab. Tana Toraja

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

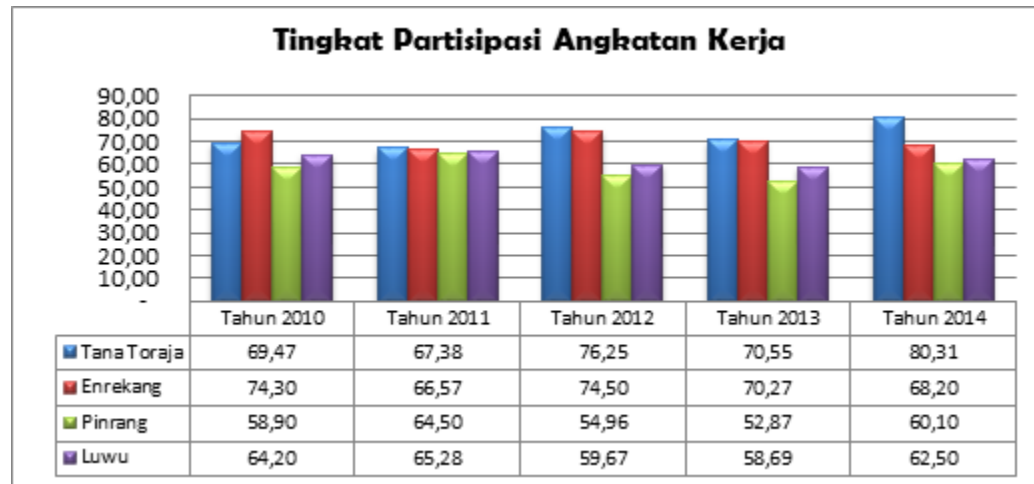
Pada tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tana Toraja sebanyak 150.544 orang atau 66,15 persen dari total penduduk. Sekitar 80,31 persen dari jumlah penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, dan sisanya, 19,69 persen bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja laki-laki lebih besar dari perempuan. Dari seluruh angkatan kerja tersebut, 96,73 persen bekerja dan selebihnya menganggur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.34
Indikator Ketenagakerjaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Angkatan Kerja : | | | | | |
| | a. Bekerja | 159.003 | 91.101 | 104.749 | 101.440 | 116.965 |
| | b. Pengangguran | 8.282 | 6.361 | 5.085 | 3.416 | 3.492 |
| 2 | Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) | 73.477 | 47.275 | 34.211 | 43.776 | 29.635 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 56 % | 49 % | 50 % | 46 % | 51 % |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % |

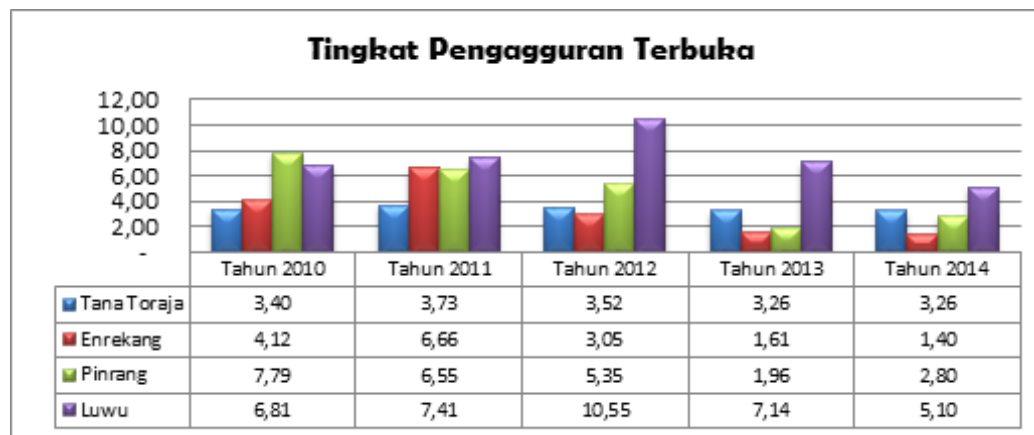
Sumber data : Dinas Kesos dan Transnaker Kab. Tana Toraja, 2015

Grafik 2.18
Perbandingan TPAK Kab Tana Toraja dengan Kabupaten Tetangga, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja,

Grafik 2.19
Perbandingan TPT di Kab Tana Toraja dengan Kabupaten Tetangga, 2010-2014



Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja,

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Tana Toraja cukup tinggi. Dari seluruh pegawai dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 sekitar 69,60 persen berjenis kelamin perempuan, dengan kata lain, setiap sepuluh orang pegawai, tujuh diantaranya perempuan. Jika diamati berdasarkan jabatan, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon III dan IV juga sudah menunjukkan angka yang cukup besar. Namun, untuk eselon II, tingkat partisipasi perempuan masih relatif kecil.

Pada tahun 2014, persentase perempuan yang menduduki eselon II hanya 12.90 persen, yang berarti bahwa setiap 10 orang yang menduduki eselon II, hanya ada satu atau dua orang yang berjenis kelamin perempuan. Dalam hal pengaduan perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2014 tercatat ada 25 kasus. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 yakni 32 kasus. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Presentase Perempuan di Parlemen (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Presentase jabatan perempuan eselon II (%) | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| 3 | Presentase jabatan perempuan eselon III (%) | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.26 | 26.26 |
| 4 | Presentase jabatan perempuan eselon IVa(%) | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 39.49 | 39.49 |
| 5 | Presentase jabatan perempuan eselon IVb (%) | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang) | 2.970 | 2.970 | 2.985 | 2.985 | 2.990 |
| 7 | Presentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%) | 54.45 | 54.45 | 57.78 | 69.60 | 69.60 |
| 8 | Rasio KDRT | 2.68 | 2.68 | 1.34 | 3.30 | 1.72 |
| 9 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus) | 16 | 16 | 32 | 13 | 25 |

Sumber data : BKKBD-PP Kab. Tana Toraja

2.3.2.3 Ketahanan Pangan (Pangan)

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam urusan ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangandengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 terjadi penurunan dikarenakan anomali cuaca dan serangan hama Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan produksi walau tidak signifikan karena terjadinya penambahan luas tanam serta kinerja para Petugas Penyuluh Lapangan yang semakin baik dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan kepada kelompok tani. Perkembangan ketersediaan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Ketahanan Pangan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|------|---|---|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Regulasi Ketahanan Pangan | | | Kep. Bupati No. 107/III/2012 ttg Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan | Kep. Bupati No. 138/V/2013 ttg Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan | Kep. Bupati No. 92/V/2014 ttg Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama/beras (ton) | | | 17.020,35 | 14.575,02 | 21.225,64 |
| 3 | Jumlah Kelompok Tani : | | | | | |
| | a. Pemula | 821 | 831 | 833 | 835 | 1.386 |
| | b. Lanjut | 236 | 237 | 239 | 239 | 236 |
| | c. Madya | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| | d. Utama | - | - | - | - | - |

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.4 Pertanahan

Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini belum diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi.

Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2010 hingga tahun 2013 secara umum semakin meningkat tetapi mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2014 khususnya untuk sertifikat tanah Hak Milik, dimana pada tahun 2014 jumlah sertifikat tanah Hak Milik yang dikeluarkan adalah 1.039 sertifikat menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.913 sertifikat tanah Hak Milik. Untuk sertifikat tanah Hak Guna dan Hak Pakai jumlahnya bervariasi tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2014 sedikit lebih meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Jumlah Sertifikat Tanah yang di Keluarkan BPN Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Sertifikat Tanah Hak Milik | 1.217 | 1.342 | 1.728 | 1.913 | 1.039 |
| 2 | Jumlah Sertifikat Tanah Hak Guna | 2 | 1 | 3 | - | 3 |
| 3 | Jumlah Sertifikat Hak Pakai | 11 | 6 | 4 | 9 | 15 |

Sumber data : Badan Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja diiringi pula dengan peningkatan jumlah produk sampah yang dihasilkan. Volume sampah di Kabupaten Tana Toraja terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah sampah sebesar 20,363 m³ dan meningkat menjadi 43,680m³ pada tahun 2014.

Meskipun mengalami peningkatan volume, namun persentase sampah yang mampu ditangani memperlihatkan tren meningkat tetapi dari segi presentase sampah yang ditangani mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Volume Sampah dan Presentase Penanganannya di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Volume Produksi Sampah (m ³) | 20.363 | 25.280 | 34.499 | 41.860 | 43.680 |
| 2 | Jumlah Sampah yang Ditangani (m ³) | 15.413 | 19.877 | 28.979 | 28.994 | 30.411 |
| 3 | Presentase Sampah yang Ditangani (m ³) | 75.69 | 78.63 | 83.99 | 69.17 | 69.62 |

Sumber data : BLHD Kab. Tana Toraja

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Presentase pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari peningkatan presentase enrolment e-KTP tahun 2012 sebesar 68 % meningkat menjadi 86 % pada tahun 2014. Selain itu peningkatan juga terlihat pada presentase kepemilikan kartu keluarga dari 50 % pada tahun 2010 meningkat menjadi 97 % pada tahun 2014. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Presentase pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Presentase ketersediaan data base kependudukan | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Presentase enrolment e-KTP | 0 % | 0 % | 68 % | 72 % | 86 % |
| 3 | Presentase kepemilikan kartu keluarga | 50 % | 58 % | 87 % | 89 % | 97 % |
| 4 | Presentase kepemilikan akte kelahiran | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | presentase pasangan berakte | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan Lembang di Kabupaten Tana Toraja digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan lembang sebagai berikut :

Tabel 2.40
Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Lembang/kelurahan yang difasilitasi penataan dan pengembangan kemasyarakatan | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 2 | Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif | - | - | - | 176 | 176 |
| 3 | Jumlah bahan peralatan/hasil expoTeknologi Tepat Guna (TTG) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 4 | Jumlah BUMDES | - | - | - | - | - |

Sumber data : BPMPL Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tana Toraja sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa capaian indikatornya. Jumlah Keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I dari tahun ke tahun semakin menurun artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di Tana Toraja semakin meningkat. Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program Keluarga Berencana (KB) mengalami penurunan tetapi Pemerintah Daerah terus berusaha untuk meningkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Indikator pengendalian penduduk, KB dan keluarga sejahtera di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rata-rata jumlah jiwa perkeluarga | 4.07 | 4.00 | 4.10 | 4.12 | 4.09 |
| 2 | Cakupan peserta KB Aktif | 27.523 | 25.494 | 25.937 | 25.386 | 24.689 |
| 3 | Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I | 18.096 | 17.761 | 17.392 | 16.311 | 15.942 |
| 4 | Peserta KB Pria | 1.102 | 1.128 | 1.317 | 1.317 | 1.280 |
| 5 | Pasangan Usia subur | 36.847 | 37.384 | 36.759 | 37.285 | 37.299 |
| 6 | Presentase KB aktif dengan PUS (prevalensi) | 73.96 | 68.19 | 70.55 | 68.08 | 66.19 |
| 7 | Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) | 849 | 891 | 940 | 990 | 1.043 |

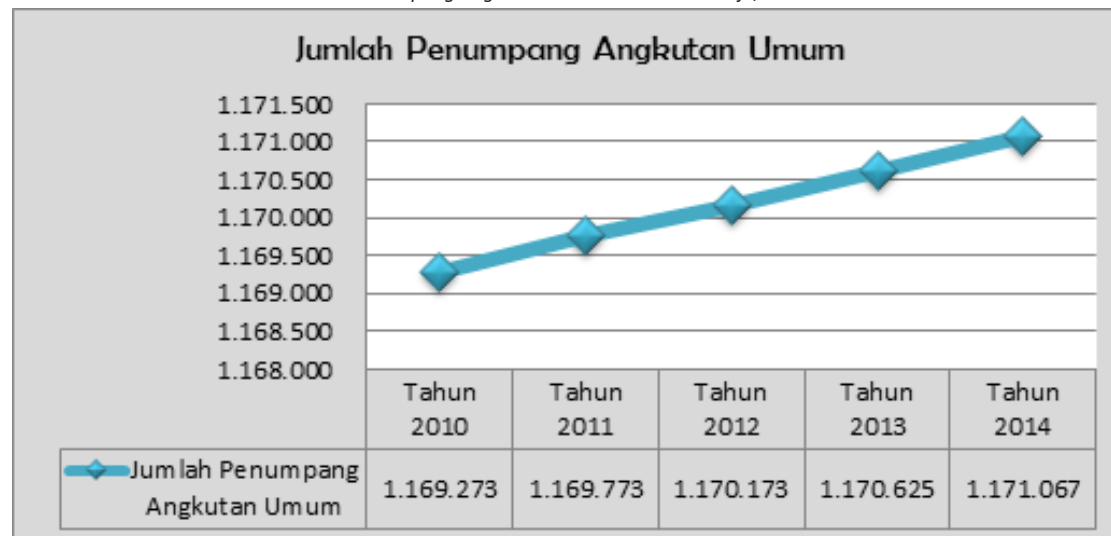
Sumber data : BKKBD-PP Kab. Tana Toraja

2.3.2.9 Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 1.171.067 orang pada tahun 2014. Namun sebagai dampak peningkatan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama tiga tahun terakhir juga mengalami penurunan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya karena rentan mengalami kecelakaan, selain itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu selain peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan, sangat diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. Untuk mengetahui perkembangan sektor perhubungan dapat dilihat dari grafik dan tabel berikut :

Grafik 2.20
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Tana Toraja, 2010-2014



Sumber data : Dinas Perhubungan dan Infokom Kab.Tana Toraja, 2015

Tabel 2.42
Indikator Sektor Perhubungan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | 1.169.273 | 1.169.773 | 1.170.173 | 1.170.625 | 1.171.067 |
| 2 | Rasio Ijin Trayek | 0.35 | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 3 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 1.991 | 2.210 | 2.104 | 2.291 | 2.128 |
| 4 | Jumlah Terminal Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum | 20 menit | 15 menit | 15 menit | 10 menit | 10 menit |

Sumber data : Dinas Perhubungan, Infor& Telkom, Kab.Tana Toraja, 2015

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Tana Toraja untuk tahun 2010 adalah sebesar 0,00010. Angka rasio warnet/wartel tahun 2014 menurun dibanding tahun 2010 karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah. Jumlah jaringan telepon seluler di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 hanya ada 3 jaringan sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 6 jaringan. Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rasio Warnet/Wartel terhadap Penduduk | 0.00010 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00003 | 0.0004 |
| 2 | Jumlah Surat Kabar Lokal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah Surat Kabar Nasional | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Jumlah Penyiaran : | | | | | |
| | a. Radio Nasional (jaringan ke daerah) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. Radio Lokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | c. TV Lokal | | | | | |
| | d. TV Nasional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Web Site Milik Pemerintah Daerah | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Pameran/expo yang Diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah sebagai Partisipasi berdasarkan Tingkat Even : | | | | | |
| | a. Skala Even Tingkat Lokal/Daerah/Kabupaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b. Skala Even Tingkat Regional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | c. Skala Even Tingkat Nasional | - | - | - | - | - |
| | d. Skala Even Tingkat Internasional | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Jumlah Jaringan Telepon seluler | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |

Sumber data : Dinas Perhubungan, Info & Postel, Kab.Tana Toraja, 2015

2.3.2.11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Tana Toraja terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan kondisi yang semakin meningkat yaitu 121 koperasi pada tahun 2010 menjadi 174 koperasi pada tahun 2014. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 110 koperasi pada tahun 2010 menjadi 161 koperasi pada tahun 2014. Sementara jumlah koperasi beku semakin menurun dari 4 koperasi pada tahun 2010 menjadi 2 koperasi pada tahun 2014. Demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 93.718.142.000 pada tahun 2010 menjadi Rp. 162.310.326.000 pada tahun 2014. Jumlah volume usaha sebesar Rp. 302.921.137.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 898.957.605.000 pada tahun 2014. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 3.174.713.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 5.743.482.000 pada tahun 2014. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Perkembangan Koperasi di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Koperasi | 121 | 137 | 149 | 162 | 174 |
| 2 | Kondisi Koperasi : | | | | | |
| | a. Koperasi Aktif | 110 | 126 | 138 | 151 | 161 |
| | b. Koperasi Tidak Aktif | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| | c. Koperasi Beku/ Mati | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Jumlah Modal Sendiri (Rp. 000) | 93.718.142 | 106.573.909 | 129.535.754 | 145.923.000 | 162.310.326 |
| 4 | Volume Usaha (Rp. 000) | 302.921.137 | 338.096.257 | 469.843.067 | 626.256.000 | 898.957.605 |
| 5 | Sisa Hasil Usaha (Rp. 000) | 3.174.713 | 3.517.773 | 4.063.623 | 4.903.553 | 5.743.482 |

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.12 Penanaman Modal

Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja di tahun 2014 hanya meliputi investasi PMDN 1 Perusahaan yakni PT Sulotco yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kopi dengan daya serap tenaga kerja 436 orang. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Perkembangan Penanaman Modal di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Init usaha : | | | | | |
| | a. PMA | - | - | - | - | - |
| | b. PMDN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | c. Non PMS/PMDN | - | - | - | - | - |
| 2 | Nilai Investasi : | | | | | |
| | a. PMA | - | - | - | - | - |
| | b. PMDN | 494.003.525 | 589.250.600 | 641.252.820 | 695.508.325 | 744.261.775 |
| | c. Non PMS/PMDN | - | - | - | - | - |
| 3 | Daya Serap Tenaga Kerja : | | | | | |
| | a. PMA | - | - | - | - | - |
| | b. PMDN | 396 | 425 | 402 | 467 | 436 |
| | c. Non PMS/PMDN | - | - | - | - | - |
| 4 | Peningkatan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMDN : | | | | | |
| | a. PMA | - | - | - | - | - |
| | b. PMDN | - | 19,28 % | 8,82 % | 8,46 % | 7,00 % |
| | c. Non PMS/PMDN | - | - | - | - | - |

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tana Toraja, 2015

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau event kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Indikator Pemuda dan Olahraga di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Jumlah Organisasi Olahraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 600 | 605 | 670 | 675 | 680 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 4 | Jumlah Kegiatan Olahraga | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 5 | Jumlah Karang Taruna | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 |
| 6 | Jumlah Lapangan Olahraga | 24 | 25 | 29 | 31 | 31 |

Sumber data : Bagian Pemuda dan Olahraga Setda Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.14 Statistik

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Tana Toraja digambarkan oleh capaian indikator kinerja urusan statistik sebagai berikut :

Tabel 2.47
Indikator Capaian Urusan Statistik Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka (DDA) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Ketersediaan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Ketersediaan Buku Indikator Ekonomi | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber data : Bagian Statistik dan Pelaporan Bappeda Kab. Tana Toraja

2.3.2.15 Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, salah satunya yang sangat terkenal dan banyak menarik minat wisatawan adalah Lovely December. Selain itu pelestarian benda purbakala, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Toraja yang sangat unik dan beragam.

Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada capaian kinerja urusan kebudayaan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Perkembangan Sektor Kebudayaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Persentase organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam seni dan budaya pengembangan | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka yang dapat memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang berimbas kepada peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Indikator perpustakaan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah perpustakaan milik pemerintah | 199 | 217 | 226 | 245 | 253 |
| 2 | Jumlah perpustakaan milik non pemerintah | 112 | 124 | 127 | 139 | 142 |
| 3 | Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah | 7.356 | 10.872 | 15.515 | 17.842 | 24.748 |
| 4 | Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemerintah | 5.107 | 12.529 | 13.640 | 14.281 | 16.315 |

Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan jumlah SDM dan sarana prasarana masih sangat terbatas. Untuk mengetahui capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Indikator Kearsipan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD | 23 | 27 | 28 | 172 | 197 |
| 2 | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan) | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Jumlah SDM Pengelola Arsip di LKD | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Box Arsip | - | - | 15 | 15 | 21 |

Sumber data: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Tana Toraja

2.3.3 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan kondisi positif ditandai dengan meningkatnya capaian produksi perikanan dari 275.50 ton pada tahun 2010 menjadi 421.78 ton pada tahun 2012. Selain itu, jumlah konsumsi ikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan juga dicapaimelalui pembinaan kelompok perikanan ditandai dengan semakin meningkatnya produksi perikanan dari kelompok binaan. Selain pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, salah satu kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produksi perikanan adalah dengan membangun Balai Benih Ikan (BBI) serta

penyebaran benih ikan di embung dan kolam yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja sektor perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Kinerja Sektor Perikanan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Capaian Produksi Perikanan (ton) | 275.50 | 329.38 | 374.39 | 419.37 | 421.78 |
| 2 | Capaian Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn) | 18.00 | 20.10 | 20.55 | 20.41 | 22.00 |
| 3 | Produksi Perikanan Kelompok Binaan (%) | 93.40 | 94.27 | 94.85 | 95.40 | 96.88 |

Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tana Toraja

2.3.3.2 Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Pariwisata Tana Toraja memiliki daya tarik yang unik. Peninggalan budaya yang sudah ada sejak zaman megalitikum memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi Tana Toraja. Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan lestari menjadikan Tana Toraja menjadi salah satu tujuan utama wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Keunikan inilah yang kemudian pada tahun 2009 menjadikan Tana Toraja dinominasikan sebagai salah satu dari 23 situs dalam daftar World Heritage Culture oleh UNESCO.

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, hal ini tercermin dalam arah dan kebijakan pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan kepariwisataan adalah menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi kedua setelah Bali. Salah satu program pemerintah untuk menunjang hal tersebut di atas adalah perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata dan penataan objek-objek wisata. Selain adat dan budaya, Objek wisata unggulan di Tana Toraja diantaranya Agrowisata Pango-Pango, Wisata Religius Patung Kristus di Buntu Burake, Air Terjun Talondo Tallu dan Sarambu Assing, Pekuburan Lemo, Perumahan Adat di Sillanan dan masih banyak lagi yang lain.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kunjungan wisatawan Mancanegara (orang) | 5.627 | 9.015 | 13.532 | 19.324 | 20.167 |
| 2 | Kunjungan wisatawan Nusantara (orang) | 12.631 | 14.651 | 20.836 | 42.319 | 60.069 |
| 3 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (Rp) | 86.391.000 | 140.668.000 | 358.152.000 | 449.290.000 | 504.262.000 |

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tana Toraja

2.3.3.3 Pertanian

a. Tanaman Pangan

Volume produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija di Kabupaten Tana Toraja selama tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif. Produktivitas komoditi kacang kedelai menunjukkan kondisi positif, yaitu meningkat dari 1.69 ton/ha pada tahun 2010 menjadi 1.80 ton/ha pada tahun 2014. Peningkatan ini diktribusi oleh pertambahan luas areal yang cukup signifikan. Beberapa komoditas menunjukkan penurunan luas areal,

namun tetap menunjukkan peningkatan produktivitas.
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas padi dan palawija di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Jenis Tanaman | Tahun | | | | |
|----|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Padi Sawah | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 18.713,00 | 21.223,00 | 21.252,00 | 16.015,00 | 21.314,00 |
| | Produksi (ton) | 97.359,94 | 110.455,00 | 113.140,32 | 84.360,26 | 111.937,02 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 5.20 | 5.20 | 5.32 | 5.27 | 5.25 |
| 2 | Jagung | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 4.378,00 | 5.254,00 | 6.446,00 | 2.639,00 | 1.684,00 |
| | Produksi (ton) | 21.166,84 | 23.830,47 | 31.553,48 | 12.720,81 | 8.131,30 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 4.83 | 4.54 | 4.90 | 4.82 | 4.83 |
| 3 | Kacang Kedelai | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 62,00 | 67,00 | 56,00 | 143,00 | 274,00 |
| | Produksi (ton) | 105,07 | 75,04 | 101,02 | 268,97 | 493,76 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1.69 | 1.12 | 1.80 | 1.88 | 1.80 |
| 4 | Ubi Jalar | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 306,00 | 243,00 | 390,00 | 224,00 | 192,00 |
| | Produksi (ton) | 3.367,40 | 2.687,00 | 4.419,00 | 2.502,73 | 2.171,00 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 11,00 | 11,06 | 11,33 | 11,17 | 11,31 |
| 5 | Kacang Tanah | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 104,00 | 112,00 | 79,00 | 57,00 | 82,00 |
| | Produksi (ton) | 160,32 | 176,76 | 106,74 | 67,92 | 133,07 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1.54 | 1.58 | 1.35 | 1.19 | 1.62 |
| 6 | Ubi Kayu | | | | | |
| | Luas Panen (ha) | 463,00 | 406,00 | 486,00 | 357,00 | 349,00 |
| | Produksi (ton) | 5.335,32 | 5.003,00 | 5.369,38 | 3.994,74 | 3.929,00 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 11.52 | 12.32 | 11.47 | 11.19 | 11.26 |

Sumber data : Dinas Pertanian TP dan Holtikultura Kab.Tana Toraja

b. Infrastruktur Pertanian (Pertanian)

Luas areal persawahan di Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 – 2014 sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 yakni 16.015 ha dari tahun sebelumnya yakni seluas 21.252 ha namun pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 21.314 ha. Salah satu hal yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian adalah alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman khususnya pada daerah perkotaan. Salah satu program Pemerintah Daerah dalam menangani hal tersebut adalah dengan jalan pencetakan sawah baru. Untuk mengetahui luasan pencetakan sawah baru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Luas Pencetakan Sawah di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Percetakan Sawah (Ha) | - | 57.00 | 93.95 | - | - |

Sumber data : Dinas Pertanian TP dan Holtikultura Kab.Tana Toraja, 2015

c. Peternakan

Di Kabupaten Tana Toraja, Ternak yang menjadi unggulan adalah Kerbau dan Babi. Kerbau Belang (Saleko dan Bonga) adalah ternak yang paling penting bagi masyarakat Toraja. Kerbau merupakan ternak penting dalam kehidupan sosial mereka dimana kerbau dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sosial, ritual maupun kepercayaan tradisional. Hal tersebut diatas mengakibatkan jumlah kerbau pada tahun 2014 menurun dibandingkan pada tahun 2010. Untuk mengetahui jumlah populasi ternak di Kabupaten Tana Toraja dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Table 2.55
Perkembangan Populasi Ternak di Kab. Tana Toraja (ekor), 2010-2014

| No. | Ternak | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Sapi | 6.110 | 5.935 | 5.979 | 6.611 | 6.659 |
| 2 | Kerbau | 27.093 | 21.913 | 23.176 | 22.448 | 25.416 |
| 3 | Kuda | 4.472 | 3.718 | 4.395 | 4.361 | 4.144 |
| 4 | Kambing | 7.382 | 7.661 | 7.227 | 7.191 | 7.339 |
| 5 | Babi | 253.726 | 253.912 | 250.993 | 268.524 | 279.236 |

Sumber data :Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Tana Toraja

Salah satu penunjang utama peningkatan produksi hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) adalah kemampuan sumber daya manusia petani dan peternak dalam mengorganisasikan diri dalam bentuk kelembagaan kelompok tani. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Tana Toraja, bahwa jumlahkelompok tani di Kabupaten Tana Toraja yang dibina kurun waktu 2010-2014 semakin meningkat yaitu 1.179 kelompok pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 1.744 kelompok pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, perkembangan kelompok tani di Kab. Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2.56
Perkembangan Kelompok Tani di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Klasifikasi Kelompok Tani | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Pemula | 821 | 831 | 833 | 835 | 1.386 |
| 2 | Lanjut | 236 | 237 | 239 | 239 | 236 |
| 3 | Madya | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 4 | Utama | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 1.179 | 1.190 | 1.194 | 1.196 | 1.744 |

Sumber data : Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Kab.Tana Toraja

2.3.3.4 Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja membudidayakan jenis tanaman kayu seperti Gaharu, Jati Unggul dan lain sebagainya yang dapat memberikan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2.57
Perkembangan sektor kehutanan di Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha) | 100 | 125 | 130 | 120 | 110 |
| 2 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%) | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 3 | Bibit Pohon yang disalurkan : | | | | | |
| | • Bibit Kayu-kayuan | 80.000 | | 5.000 | 130.000 | 50.000 |
| | • Bibit Jati Unggul | | 6.300 | | | |
| | • Bibit Cemara | | 25.700 | | | |
| | • Bibit Angsana | | 20.000 | | | |
| | • Bibit Glodokan Tiang | | 3.000 | | | |
| | • Bibit Jabon | | | 110.000 | | 44.000 |
| | • Bibit Bambu Petung | | | 7.620 | | 1.000 |
| | • Bibit Pucuk Merah | | | 150 | | |
| | • Bibit Jati | | | 13.000 | | |
| | • Bibit Gaharu | | | 14.000 | 20.000 | 10.000 |

Sumber data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Tana Toraja

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Tana Toraja memiliki sektor pertambangan yang sangat potensial untuk dikembangkan meliputi material, logam, batuan dan sirtu. Potensi pertambangan yang terkandung di Kabupaten Tana Toraja hanya sebagian yang diketahui secara pasti potensinya, sehingga kandungan kekayaan alam tersebut masih diteliti oleh Pemerintah Daerah. Jenis potensi sumber daya alam tersebut berupa potensi bahan galian emas dan tembaga di Kecamatan Bittuang dan Masanda kemudian potensi bahan galian galena di Kecamatan Masanda dan potensi batu bara di Kecamatan Rantetayo dan Mengkendek serta potensi galian besi di Kecamatan Malimbong Balepe. Potensi bahan galian yang telah dikelola sebagai tambang rakyat baru berupa galian pasit dan batu di Kecamatan Rembon, Saluputti dan Makale Selatan.

Dalam hal kelistrikan, seluruh kecamatan telah dialiri listrik, baik itu melalui layanan PLN maupun oleh PLTS dan PLTMH yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik di daerah terpencil.

2.3.3.6 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar kedua dalam PDRB setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor-sektor lainnya.

Presentase kontribusi sektor perdagangan dalam dua tahun terakhir sedikit mengalami penurunan yang disebabkan karena meningkatnya nilai presentase dari sektor pendukung PDRB lainnya. Capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Sektor Perdagangan | 15.84 | 15.99 | 16.86 | 16.77 | 16.52 |

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tana Toraja

2.3.3.7 Perindustrian

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam hal pembangunan industri lebih diarahkan pada peningkatan aktivitas industri kecil dan rumah tangga. Jumlah industri kecil dan rumah tangga dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu dari 200 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi 357 unit pada tahun 2014 yang artinya mengalami peningkatan sebesar 15.70 % pertahun. Jumlah pengrajin binaan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 5 pengrajin pada tahun 2010 menjadi 9 pengrajin pada tahun 2014.

Selama tahun 2010 – 2014, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 6.92 % pertahun. Data mengenai perkembangan sektor industri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Indikator Urusan Perindustrian Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Harga Berlaku (%) | 6.90 | 6.95 | 6.78 | 6.96 | 7.03 |
| 2 | Pertumbuhan Industri (%) | 11.00 | 11.50 | 11.03 | 11.17 | 12.98 |
| 3 | Cakupan Binaan Pengrajin (%) | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | Jumlah Industri Kecil & Rumah Tangga (buah) | 200 | 223 | 246 | 275 | 357 |

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tana Toraja

2.3.3.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan melalui pemerataan jumlah penduduk, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Tana Toraja sampai saat ini masih merupakan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS). Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melakukan dua kali pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi di Kecamatan Mengkendek yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti rumah ibadah, balai desa, sekolah dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Jumlah Transmigran dan Sarana Prasarana di lokasi Transmigrasi
Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--------|------|--------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Jumlah Transmigrasi Penduduk Setempat (KK) | 60 | - | - | 90 | - |
| 2 | Fasilitas Sarana dan Prasarana di lokasi transmigrasi | | | | | |
| | a. Gereja | 1 Unit | - | 1 Unit | - | - |
| | b. Masjid | - | - | 1 Unit | - | - |
| | c. Balai Desa | 1 Unit | - | - | - | - |
| | d. Sekolah | - | - | 3 RKB | - | - |
| | e. Rumah Petugas | - | - | 1 Unit | - | - |
| | f. Puskesmas | - | - | 1 Unit | - | - |
| | g. Gudang | 1 Unit | - | - | - | - |

Sumber data : Dinas Kesos dan Transnaker Kab. Tana Toraja, 2015

2.3.4 FOKUS LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 dan perencanaan jangka menengah berdasarkan pada Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2010-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.61
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4 | Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%) | 59.12 | 59.12 | 60.50 | 63.40 | 70.50 |

Sumber data : Bappeda Kab. Tana Toraja

2.3.4.2 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Toraja yang tugas pokoknya menangani keamanan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap gangguan keamanan seperti demonstrasi, perselisihan kegiatan usaha, peredaran minuman keras, pedagang kaki lima dan sebagainya. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengerurusan perizinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah membentuk satu SKPD pengelola perizinan yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan.

Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Tana Toraja masih sangat kecil terlebih jika bencana kebakaran terjadi pada wilayah kecamatan yang diakibatkan karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu hal yang dilakukan pemerintah daerah adalah melaksanakan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat untuk semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menghindari bahaya kebakaran serta meningkatkan sarana dan prasarana kebakaran yang ada dan meningkatkan profesionalisme petugas pemadam kebakaran.

Tabel 2.62
Indikator Urusan Otonomi Daerah Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Polisi Pamong Praja | 69 | 63 | 62 | 62 | 62 |
| 2 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | 7.67 | 7.78 | 8.58 | 7.28 | 6.56 |
| 4 | Jumlah Pos Kamling | 172 | 159 | 240 | 240 | 240 |
| 5 | Jumlah Anggota Linmas | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 6 | Rasio Linmas per 10.000 penduduk | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.56 |
| 7 | Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah | Ada | Ada | Ada | Ada | ada |
| 8 | Cakupan Patrol Petugas Satpol PP | 2 hari sekali | 2 hari sekali | 2 hari sekali | 2 hari sekali | 2 hari sekali |
| 9 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10 | Tingkat Tanggap Waktu (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WWK) | 10 menit | 10 menit | 10 menit | 10 menit | 10 menit |
| 11 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran (Kec.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 12 | Jumlah Pegawai (Orang) | | | | | |

Sumber data : disadur dari beberapa sumber

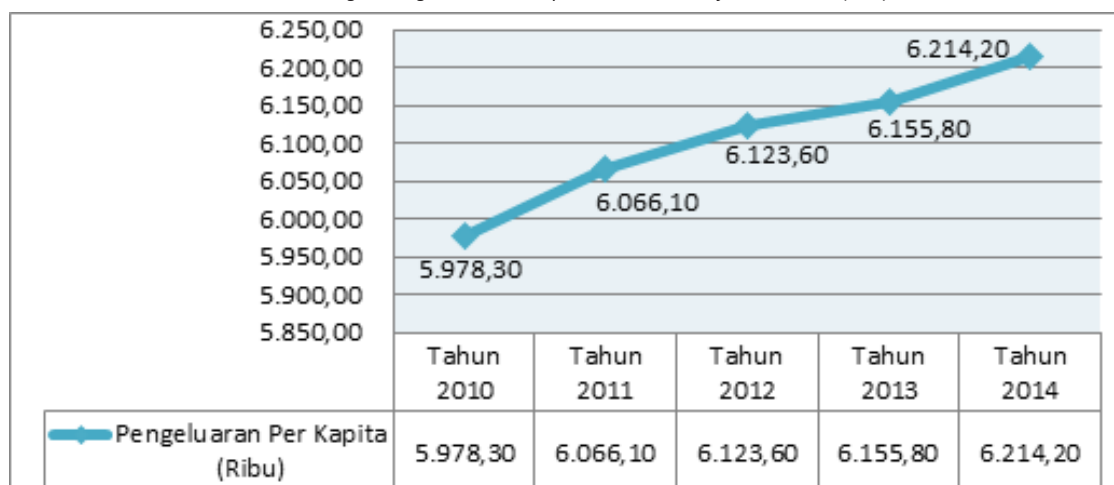
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan pendapatan masyarakat akan cenderung berbanding lurus dengan pengeluaran masyarakat itu sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Tana Toraja selama tahun 2010 - 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 0.99 persen pertahun yaitu dari Rp. 5.978.300 pada tahun 2010 menjadi Rp. 6.214.200 pada tahun 2014. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Tana Toraja adalah salah satu dampak yang disebabkan oleh peningkatan PDRB Tana Toraja. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita juga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa.

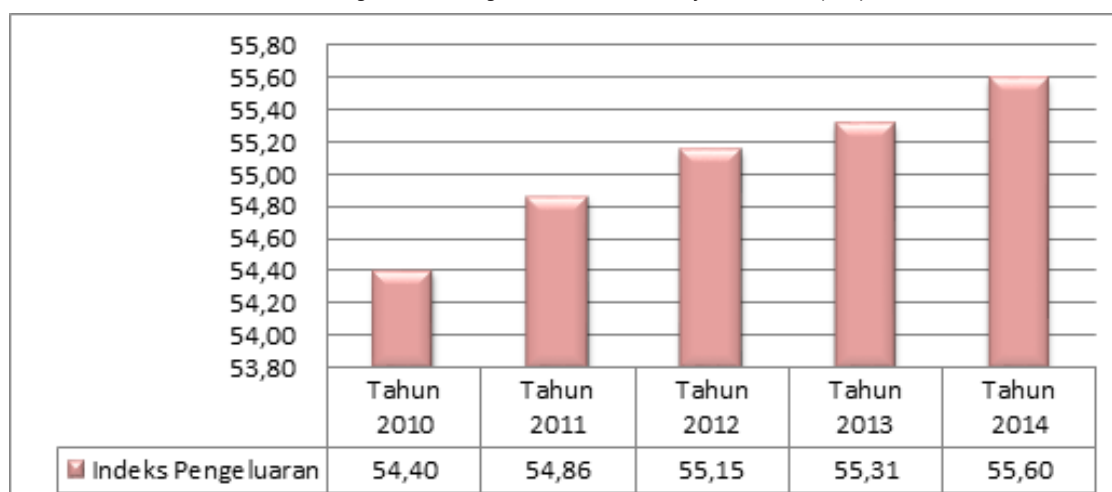
Indeks Pengeluaran Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2010 angka Indeks Pengeluaran Kabupaten Tana Toraja sebesar 54.42 dan meningkat menjadi 55.60 pada tahun 2014 dengan pertumbuhan 0.54 persen pertahun. Hal ini menunjukkan kinerja bidang ekonomi yang semakin membaik seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.20
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kab. Tana Toraja, 2010-2014 (ribu)



Sumber data: BPS Kab.Tana Toraja, 2015

Grafik 2.21
Perkembangan Indeks Pengeluaran Kab. Tana Toraja, 2010-2014 (ribu)



Sumber data: BPS Kab.Tana Toraja, 2015

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya:

a. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal
Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan | 85 m/unit | 80 m/unit | 77 m/unit | 75 m/unit | 74 m/unit |
| 2 | Jumlah Orang/Barang melalui Terminal Tahunan | 2.806.113 | 2.818.520 | 2.830.950 | 2.843.367 | 2.855.774 |

Sumber data : Dinas Perhubungan, Infor & Postel Kab. Tana Toraja

b. Ketersediaan Hotel dan Restoran/Rumah Makan

Jumlah hotel di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dari 9 unit pada tahun 2010 menjadi 15 unit pada tahun 2014. Seiring dengan peningkatan jumlah hotel, jumlah kamar dan tempat tidur juga menunjukkan peningkatan dari 225 kamar dan 395 tempat tidur pada tahun 2010 menjadi 290 kamar dan 461 tempat tidur pada tahun 2014. Jumlah restoran/rumah makan di Kabupaten Tana Toraja juga mengalami peningkatan dari 9 buah pada tahun 2010 menjadi 15 buah pada tahun 2014. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Banyaknya Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| Tahun | Hotel | | | | Restoran/Rumah Makan |
|-------|------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Berbintang | Non Bintang | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | |
| 2010 | 3 | 7 | 225 | 395 | 9 |
| 2011 | 3 | 8 | 233 | 420 | 9 |
| 2012 | 3 | 10 | 243 | 430 | 9 |
| 2013 | 3 | 12 | 290 | 461 | 16 |
| 2014 | 2 | 13 | 290 | 461 | 15 |

c. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mengatasi masalah kelistrikan di daerah perbatasan adalah dengan membangun PLTHM dan PLTS yang akan melayani kebutuhan listrik masyarakat.

2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Investasi merupakan katalisator dalam mempercepat perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan dunia investasi di daerah membutuhkan iklim usaha yang mendukung baik dari sisi keamanan, kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan. Perkembangan investasi di Kabupaten Tana Toraja secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui upaya penyederhanaan regulasi dan prosedur pelayanan perijinan, perbaikan/pengembangan infrastruktur investasi, pengembangan sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat penataan kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan perijinan satu pintu.

Investor yang ada di Kabupaten Tana Toraja merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah PMDN yang ada di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2014 sebanyak empat investo yakni PT. Malea Energy yang bergerak di bidang kelistrikan, PT. Sulotco dan PT. Agrowatia yang bergerak di bidang perkebunan kopi dan PT. Panca Usaha Palopo Playwood yang bergerak di bidang kehutanan. Nilai investasi dari PMDN tersebut menurut data tahun 2014 sebesar Rp. 882.146.820.000 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 761 orang.

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 mencapai angka 73 %, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 73 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di tahun 2014 rasio ketergantungan mencapai angka 69 % berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 69 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.65
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kab. Tana Toraja, 2010-2014

| Tahun | Penduduk Kelompok Umum | | | Rasio Ketergantungan (%) | | |
|-------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|-------|
| | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | ≥ 65 Tahun | Anak | Lansia | Total |
| 2010 | 79.503 | 127.975 | 14.317 | 62 | 11 | 73 |
| 2011 | 79.569 | 129.781 | 13.956 | 61 | 11 | 72 |
| 2012 | 80.803 | 130.422 | 13.627 | 62 | 10 | 72 |
| 2013 | 77.580 | 133.449 | 15.183 | 58 | 11 | 69 |
| 2014 | 77.178 | 134.884 | 15.526 | 57 | 12 | 69 |

Sumber data : BPS Kab. Tana Toraja



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan gambaran umum tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan maksud dan tujuan memperlihatkan :

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, sehingga dapat digunakan untuk mengamati perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor potensial yang memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan dimaksud dan untuk mengamati struktur perekonomian daerah, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan umum anggaran bagi sector yang mengalami dinamika pertumbuhan yang paling tinggi;
2. Kecenderungan peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka memudahkan perumusan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli daerah maupun dari dana transfer Pemerintah Pusat;
3. Memberikan gambaran Kebijakan belanja daerah, Pembiayaan daerah dan pengelolaan asset, sehingga dapat digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan alokasi anggaran.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkualitas, yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menjadi sala satu target penting yang harus dicapai dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam memproduksi

karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam memproduksi, karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi oleh besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka pertumbuhan maupun angka perkembangan, keduanya selalu menunjukkan kondisi perubahan.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah masa lalu maupun kebijakan-kebijakan yang mendasari pengelolaannya.

a. Kinerja Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Yang dimaksud dana Transfer adalah (1) Transfer dari Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. (2) Transfer Antar Daerah terdiri atas : Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memenuhi kebutuhan fiskal dalam memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015

| No | Rincian Pendapatan Daerah | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Rata-rata pertumbuhan 2010-2015 (%) |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| I. | PENDAPATAN | 465.030.470.945,00 | 588.681.440.600,72 | 589.610.948.131,35 | 659.885.050.055,80 | 757.374.394.190,70 | 952.584.752.565,64 | 12,06 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 20.283.615.778,05 | 19.686.833.802,76 | 31.720.677.572,15 | 38.776.667.265,57 | 82.506.082.709,11 | 79.256.819.867,15 | 25,50 |
| 1.1 | Pajak Daerah | 1.811.302.161,00 | 2.356.018.513,00 | 3.736.529.606 | 3.882.204.835,00 | 6.516.318.116,29 | 7.392.079.442,50 | 26,41 |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 13.486.190.040,00 | 11.572.395.784,75 | 22.338.063.489 | 27.834.717.233,30 | 59.960.987.370,61 | 48.781.134.003,50 | 23,89 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 819.344.341,12 | 1.043.035.417,00 | 1.038.700.633,83 | 1.675.382.181,00 | 2.198.848.136,00 | 3.530.011.784,54 | 27,56 |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang sah | 4.166.779.235,93 | 4.715.384.088,01 | 4.607.383.842,63 | 5.384.363.016,27 | 13.829.929.086,21 | 19.553.594.636,61 | 29,39 |
| 2 | Dana Perimbangan | 370.357.428.510,00 | 404.382.210.841,00 | 477.282.522.438,00 | 521.032.009.267,00 | 566.516.703.355,00 | 707.739.275.652,00 | 11,40 |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan pajak | 23.656.030.500,00 | 23.606.611.841,00 | 23.346.060.438,00 | 20.335.230.267,00 | 21.121.300.355,00 | 13.261.851.702,00 | -9,19 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 297.364.598.000,00 | 322.759.399.000,00 | 389.286.812.000,00 | 444.741.329.000,00 | 486.447.423.000,00 | 510.857.220.000,00 | 9,43 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 49.336.800.000,00 | 58.016.200.000,00 | 64.649.650.000,00 | 55.955.450.000,00 | 58.947.980.000,00 | 183.620.203.950,00 | 24,49 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 10.976.148.840,00 | 54.464.717.120,00 | 64.281.517.430,00 | 16.545.359.000,00 | 12.264.995.440,00 | 165.588.657.046,49 | 10,30 |
| 3.1 | Hibah | - | 22.987.239.000 | 50.478.933.000,00 | 759.088.000,00 | - | - | - |
| 3.2 | Dana Darurat | | | | | | | |
| 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 9.414.577.342 | 13.901.043.196,96 | 16.326.230.691,00 | 17.091.986.523,23 | 21.006.844.686,59 | 28.148.784.446,49 | 20,03 |
| 3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 53.998.700.475,00 | 96.246.635.640,00 | - | 66.439.028.000,00 | 75.079.786.000,00 | 93.797.616.000,00 | 9,64 |
| 3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 10.976.148.840,00 | 31.477.478.120,00 | 13.802.584.430,00 | 15.786.271.000,00 | 12.264.995.440,00 | 12.011.557.600,00 | 1,51 |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Dalam kurun waktu tertentu 2010-2015, pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar 465,030 milyar dan meningkat menjadi Rp. 952.584 milyar pada tahun 2015. Selama kurun waktu tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja bertumbuh rata-rata 12,06 persen per tahun.

Struktur pendapatan dana daerah terdiri dari pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. dana perimbangan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah Tana Toraja. Selama periode 2010-2015, rata-rata kontribusi dana perimbangan mencapai 76,65 persen. Pada tahun 2010, dana perimbangan sebesar Rp.370,357 milyar (79,64 persen dari total pendapatan daerah) dan menjadi Rp. 707.739 milyar (76,85 persen) di tahun 2015 atau bertumbuh rata-rata 11,40 persen per tahun. Jenis dana perimbangan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang betumbuh rata-rata 9,43 persen per tahun. Pada periode yang sama (2010-2015), PAD betumbuh rata-rata sebesar 25,50 persen, khusus pada tahun 2014 PAD mengalami peningkatan signifikan dari 38,7 milyar tahun 2013 menjadi 82,5 pada tahun 2014, namun kontribusinya terhadap APBD hanya rata-rata 6,41 persen per tahun. Sementara kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,94 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja. Besarnya sumbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah terutama dikontribusi oleh dana penyesuaian. Dengan mencermati kondisi struktur pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja, mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Tana Toraja masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan mobilisasi pendapatan yang bersumber dari PAD yang hanya menyumbang sekitar 6,41 persen petahun.

Meskipun peran PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih cukup rendah, namun realisasi PAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 sebesar Rp. 79,256 milyar meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 20,28 milyar atau bertumbuh rata-rata 25,20 persen per tahun. Ini menunjukkan ada upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Tana Toraja untuk mendorong peningkatan PAD. Diantara keempat objek penerimaan yang bersumber dari PAD, retribusi daerah merupakan sumber utama PAD, kemudian disusul oleh lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah serta hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan terbesar bagi PAD adalah pajak penerangan jalan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,2 milyar dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 2,94 milyar atau rata-rata naik 19,03 persen setiap tahun. beberapa jenis pajak daerah yang mempunyai prospek cukup baik adalah pajak mineral bukan logam yang mencapai Rp. 1,181 milyar di tahun, pajak restoran yang mencapai Rp. 312,049 juta di tahun 2015, dan BPHTB sejak tahun 2010 telah memberikan penerimaan sebesar Rp. 41,670 juta dan meningkat menjadi Rp. 510,566 juta pada tahun 2015, khusus pada PBB Pedesaan dan perkotaan memberikan kontribusi Rp. 1,925 milyar pada tahun 2015.

Tabel 3.2
Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Kabupaten Tana Toraja, 2011-2015

| No. | Jenis Pajak Daerah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 121.664.386,00 | 106.886.609,00 | 167.394.118,00 | 219.814.837,00 | 333.481.643,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 195.937.237,00 | 251.445.994,00 | 275.172.781,00 | 289.860.027,00 | 312.049.790,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 6.150.000,00 | 1.250.000,00 | 750.000,00 | 2.312.400,00 | 2.600.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 70.650.399,00 | 136.155.322,00 | 151.723.147,00 | 177.006.571,00 | 176.538.968,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan (PPJ) | 1.234.132.809,00 | 1.882.250.969,00 | 2.123.222.635,00 | 2.554.450.374,00 | 2.949.849.344,00 |
| 6 | Pajak Golongan C | 685.813.332,00 | 251.445.994,00 | - | - | - |
| 7 | Pajak Mineral bukan Logam | | 691.423.469,00 | 912.509.604,00 | 1.185.886.900,00 | 1.181.678.019,50 |
| 8 | Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 41.670.350,00 | 667.117.243,00 | 251.432.550,00 | 208.122.775,00 | 510.566.550,00 |
| 9 | PBB Pedesaan dan Perkotaan | - | - | - | 1.878.864.232,29 | 1.925.315.128,00 |
| Total | | 2.356.018.513,00 | 3.736.529.606 | 3.882.204.835,00 | 6.516.318.116,29 | 7.392.079.442,50 |

Sumber data : DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Pada periode yang sama, peningkatan penerimaan retribusi daerah dikontribusikan oleh ketiga jenis retribusi daerah, namun yang terbesar retribusi jasa umum sebesar 89,04 persen per tahun. Pada tahun 2011, retribusi jasa umum sebesar Rp. 22,5 milyar meningkat menjadi Rp. 45,3 milyar pada tahun 2015 atau bertumbuh rata-rata 15,02 persen pertahun selama periode 2011-2015. Penerimaan retribusi jasa umum terbesar berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, yang mencapai 85,22 persen, disusul oleh retribusi jalan sebesar 9,41 persen.

b. Kinerja Belanja Daerah

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang cenderung linear. Pada tahun 2010, realisasi belanja sebesar Rp. 438,691 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp. 908,653 milyar pada tahun 2015. Selama periode 2010-2015, belanja daerah bertumbuh rata-rata 12,90

persen per tahun. Porsi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja tidak langsung rata-rata 55,65 persen per tahun.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2010-2014

| No. | Jenis Belanja Daerah | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|-----|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A | Belanja Tidak Langsung | 296,136,551,162.26 | 326,874,937,762.21 | 360,096,709,719.05 | 378,812,290,863.38 | 430,002,766,139.03 | 505,683,980,955.31 |
| 1 | Belanja Pegawai | 268,321,602,564.00 | 292,021,803,213.00 | 336,131,197,761.00 | 366,305,716,050.02 | 405,910,690,997.00 | 399,506,479,152.31 |
| 2 | Belanja Bunga | 171,894,255.26 | 149,712,390.96 | 127,895,160.05 | 105,348,662.36 | 83,166,798.03 | 60,984,933.00 |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Hibah | 14,765,545,968.00 | 17,819,081,500.00 | 7,164,828,000.00 | 10,612,036,237.00 | 8,232,494,942.00 | 19,686,623,633.00 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 4,733,095,375.00 | 4,090,726,615.25 | 1,625,600,000.00 | 90,600,000.00 | 3,322,308,152.00 | 116,500,000.00 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | 7,623,035,500.00 | 1,085,798,161.00 | 1,984,637,214.00 | 1,042,522,750.00 | 12,454,105,250.00 | 1,131,873,909.00 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | | 11,590,820,882.00 | 12,254,794,404.00 | 449,980,464.00 | 0,00 | 85,030,159,548.00 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 521,377,500.00 | 116,995,000.00 | 807,757,180.00 | 206,086,700.00 | 0,00 | 151,359,780.00 |
| B | Belanja Langsung | 117,689,938,429.00 | 235,174,262,690.00 | 232,978,955,255.00 | 213,823,760,775.55 | 304,423,075,522.50 | 374,274,517,238.29 |
| 1 | Belanja Pegawai | 7,321,306,061.25 | 10,353,270,481.95 | 11,989,599,783.30 | 14,372,049,559.13 | 17,409,126,716.33 | 16,921,945,593.79 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 41,487,401,013.75 | 58,668,532,731.05 | 67,941,065,438.70 | 81,441,614,168.42 | 98,651,718,059.18 | 95,891,025,031.50 |
| 3 | Belanja Modal | 68,881,231,354.00 | 166,152,459,477.00 | 153,048,290,033.00 | 118,010,097,048.00 | 188,362,230,747.00 | 261,461,546,613.00 |
| | Total | 413,826,489,591.26 | 562,049,200,452.21 | 593,075,664,974.05 | 592,636,051,638.93 | 734,425,841,661.53 | 879,958,498,193.60 |

Sumber data : DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.4
Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Tana Toraja, 2010-2015

| No | Uraian Belanja Tidak Langsung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 268,321,602,564.00 | 292,021,803,213.00 | 336,131,197,761.00 | 366,305,716,050.02 | 405,910,690,997.00 | 399,506,479,152.31 |
| 2 | Belanja Bunga | 171,894,255.26 | 149,712,390.96 | 127,895,160.05 | 105,348,662.36 | 83,166,798.03 | 60,984,933.00 |
| 3 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Hibah | 14,765,545,968.00 | 17,819,081,500.00 | 7,164,828,000.00 | 10,612,036,237.00 | 8,232,494,942.00 | 19,686,623,633.00 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 4,733,095,375.00 | 4,090,726,615.25 | 1,625,600,000.00 | 90,600,000.00 | 3,322,308,152.00 | 116,500,000.00 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil | 7,623,035,500.00 | 1,085,798,161.00 | 1,984,637,214.00 | 1,042,522,750.00 | 12,454,105,250.00 | 1,131,873,909.00 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 0.00 | 11,590,820,882.00 | 12,254,794,404.00 | 449,980,464.00 | 0,00 | 85,030,159,548.00 |
| 8 | Belanja tidak terduga | 521,377,500.00 | 116,995,000.00 | 807,757,180.00 | 206,086,700.00 | 0,00 | 151,359,780.00 |

Sumber data : DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Realisasi belanja tidak langsung untuk enam tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, dimana pada tahun 2010 jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 296,136 milyar, meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.326,874 milyar dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi Rp.505,683 milyar. Peningkatan tersebut terutama dikontibusi oleh peningkatan belanja pegawai. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, porsi belanja pegawai cenderung menurun dari 90,60 persen pada tahun 2010 berubah menjadi 79,00 persen pada tahun 2015. Pada periode yang sama, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 6,85 persen pertahun. Belanja bantuan keuangan kepada desa juga memperoleh alokasi belanja cukup besar terutama pada tahun 2015 yakni sebesar Rp.85,03 milyar .

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja langsung merupakan alokasi pembiayaan

strategis yang sifatnya direct fund atau terarah secara spesifik terhadap target-target pembangunan yang telah diprioritaskan. Dalam kurun waktu empat tahun (2010-2015) belanja langsung mengalami peningkatan dari Rp.117,8 milyar menjadi Rp.304,3 milyar atau bertumbuh rata-rata 15,39 persen per tahun.

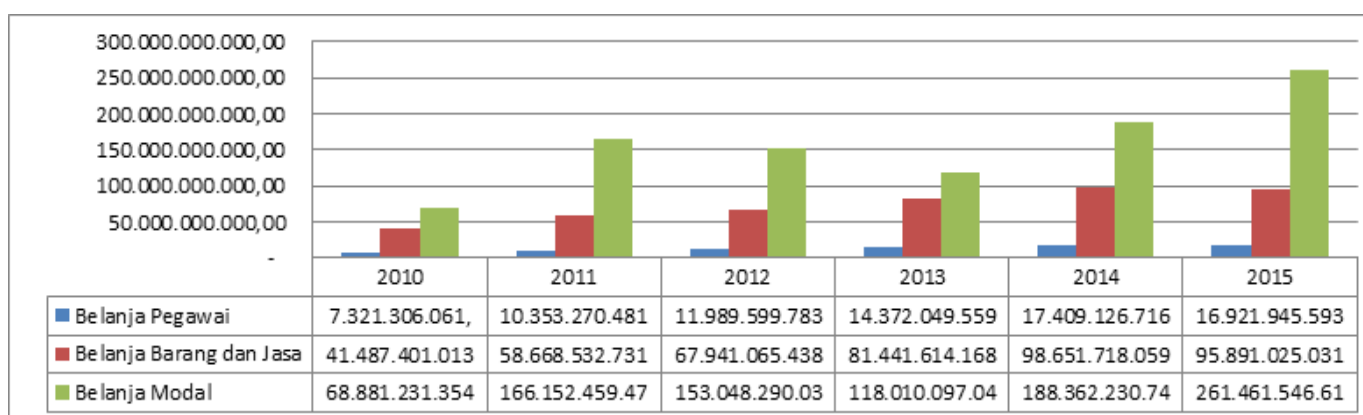
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Tana Toraja, 2010-2015

| No | Uraian Belanja Langsung | Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 7,321,306,061.25 | 10,353,270,481.95 | 11,989,599,783.30 | 14,372,049,559.13 | 17,409,126,716.33 | 16,921,945,593.79 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 41,487,401,013.75 | 58,668,532,731.05 | 67,941,065,438.70 | 81,441,614,168.42 | 98,651,718,059.18 | 95,891,025,031.50 |
| 3 | Belanja Modal | 68,881,231,354.00 | 166,152,459,477.00 | 153,048,290,033.00 | 118,010,097,048.00 | 188,362,230,747.00 | 261,461,546,613.00 |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Belanja langsung terbesar dialokasikan untuk belanja modal. Rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja langsung mencapai 56,56 persen per tahun. Proporsi belanja barang dan jasa menempati urutan kedua dengan rata-rata 30,91 persen per tahun sedangkan proporsi belanja pegawai menempati urutan terakhir dengan rata-rata 12,53 persen.

Grafik 3.1
Proporsi Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Tana Toraja, 2010-2015



Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Kecenderungan penurunan proporsi belanja modal di tahun 2013 turut dipengaruhi oleh rendahnya capaian realisasi belanja modal yang hanya sebesar 86,27 persen dari target. Ketidakmampuan pencapaian tersebut antara lain dipicu oleh realisasi belanja modal tanah yang hanya Rp. 396.618.954, sementara alokasi anggaran yang disiapkan mencapai 9,4 milyar.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Modal Menurut Jenisnya Kabupaten Tana Toraja 2013-2015

| No | Uraian Belanja Modal | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Tanah | 9.400.735.270 | 396.618.954 | 9.104.930.270 | 0,00 | 7.000.000.000 | 0,00 |
| 2 | Peralatan & Mesin | 28.994.309.235 | 27.004.736.279 | 38.051.408.160 | 33.165.046.063 | | |
| 3 | Gedung & Bangun | 26.178.168.661 | 23.494.599.738 | 49.931.545.361 | 35.017.231.346 | | |
| 4 | Jalan & Jar.Irigasi | 81.762.293.660 | 66.608.168.187 | 136.183.670.836 | 120.015.758.838 | | |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 654.990.000 | 505.973.890 | 4.339.235.000 | 164.194.500 | | |

Sumber data : DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Terdapat lima jenis rencana peruntukkan belanja modal di tahun 2013-2015, namun tidak satupun yang terealisasi 100 persen dari yang ditargetkan. Yang paling rendah capaian realisasinya adalah belanja tanah yang hanya terealisasi 4,21 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, alokasi belanja modal untuk tanah semakin menurun dari tahun sebelumnya, yaitu hanya 0 persen.

3.1.2 NERACA DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan atandar akuntansi pemerintah daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian objek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Dengan adanya neraca daerah, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Dari data yang tersedia, tampak jelas bahwa asset pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam kurun waktu 2010-2015 bertumbuh rata-rata 31.09 persen pertahun.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam hal pinjaman kepada lembaga perbankan sebesar Rp. 2.375.300,000,00 pada tahun 2001 menjadi Rp. 372.391.542,88 pada akhir tahun 2015 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu 2010-2015 selalu dapat melaksanakan kewajiban jangka pendek finansialnya dengan tepat waktu.

Tabel 3.7
Neraca Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2010-2014

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Pertumbuhan (%) |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ASET | 1.078,31 | 1.007,62 | 1.333,57 | 1.472,54 | 1.682,92 | 1.478,33 | 5,40 |
| 1,1 | ASET LANCAR | 24,48 | 35,74 | 23,26 | 84,27 | 103,57 | 150,84 | 35,40 |
| 1.1.1 | Kas | 16,39 | 28,04 | 16,01 | 72,46 | 91,69 | 136,66 | |
| 1.1.2 | Piutang | 4,88 | 3,85 | 2,23 | 6,49 | 3,59 | 6,49 | |
| 1.1.3 | Persediaan | 3,21 | 3,85 | 5,02 | 5,32 | 8,29 | 7,69 | |
| | INVESTASI JANGKA PANJANG | 7,94 | 10,44 | 10,59 | 12,36 | 14,75 | 16,25 | 12,68 |
| | Investasi Non Permanen | 4,38 | 6,38 | 5,01 | 4,78 | 4,67 | 4,67 | 1,07 |
| | Investasi dalam Dana Bergulir | 4,38 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,02 | 2,02 | |
| | Infestasi Non permanen lainnya | - | 4,35 | 2,98 | 2,75 | 2,65 | 2,65 | |
| | Investasi Permanen | 3,56 | 4,06 | 5,58 | 7,58 | 10,08 | 11,58 | 21,72 |
| | Penyertaan Modal | 3,56 | 4,06 | 5,58 | 7,58 | 10,08 | 11,58 | |
| | Pemda pada bank Sulsel | | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Pemda pada Perusahaan Daerah | | | | | | | |
| | Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Kab. TanaToraja | | | | | | | |
| 1.2 | ASET TETAP | 1.045,01 | 960,58 | 1.297,59 | 1.374,18 | 1.562,98 | 1.301,29 | 3,72 |
| 1.2.1 | Tanah | 175,65 | 99,87 | 254,00 | 231,92 | 231,92 | 229,21 | |
| 1.2.2 | Peralatan dan mesin | 160,49 | 179,52 | 186,99 | 224,26 | 258,32 | 274,07 | |
| 1.2.3 | Gedung dan Bangunan | 307,03 | 269,63 | 311,08 | 350,40 | 377,96 | 438,42 | |
| 1.2.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 359,56 | 304,46 | 409,35 | 529,00 | 646,80 | 816,46 | |
| 1.2.5 | Aset tetap lainnya | 16,71 | 22,53 | 28,98 | 30,76 | 30,92 | 30,94 | |
| 1.2.6 | Konstruksi dalam pengerjaan | 25,57 | 84,57 | 107,19 | 7,84 | 17,06 | 31,42 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.7 | Akumulasi Penyusutan | - | - | - | - | - | (519,23) | |
| 1.3 | ASET LAINNYA | 0,88 | 0,86 | 2,13 | 1,73 | 1,62 | 9,95 | 49,83 |
| 1.3.1 | Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 | Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah | - | - | 0,09 | - | 0,02 | 0,01 | |
| 1.3.3 | Kemitraan dengan pihak ketiga | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | 0,25 | |
| 1.3.4 | Aset tak Berwujud | 0,38 | 0,23 | 0,37 | | 0,38 | 0,48 | |
| 1.3.5 | Aset lainnya | 0,25 | 0,38 | 1,42 | 1,73 | 0,97 | 9,21 | |
| | JUMLAH ASET DAERAH | 1.078,31 | 1.007,62 | 1.333,57 | 1.472,54 | 1.682,92 | 1.478,33 | 5,40 |
| 2 | KEWAJIBAN | 15,07 | 10,91 | 11,60 | 10,30 | 20,11 | 35,41 | 15,30 |
| 2,1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 13,96 | 9,98 | 10,86 | 9,75 | 19,74 | 35,13 | 16,63 |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan pihak ketiga | - | - | - | - | 0,18 | 0,15 | |
| 2.1.2 | Bagian Lancar utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat | 3,68 | 1,63 | 1,06 | 0,23 | - | - | |
| 2.1.3 | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah daerah Lainnya | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.4 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | |
| 2.1.5 | Utang jangka Pendek Lainnya-Utang Pajak | 10,10 | 8,17 | 9,62 | 9,34 | 19,36 | 34,78 | |
| 2,2 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 1,11 | 0,93 | 0,74 | 0,55 | 0,37 | 0,28 | (20,51) |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri | 1,11 | 0,93 | 0,74 | 0,55 | 0,37 | 0,28 | |
| 2.2.2 | Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat | | | | | | | |
| 2.2.3 | Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya | | | | | | | |
| 3 | EKUITAS DANA | 1.063,24 | 996,71 | 1.321,97 | 1.462,24 | 1.662,81 | 1.442,92 | 9,36 |
| 3,1 | EKUITAS DANA LANCAR | 10,51 | 25,76 | 12,41 | 74,50 | | - | |
| 3.1.1 | SILPA | 16,33 | 27,60 | 15,27 | 72,10 | | | |
| 3.1.2 | Cadangan piutang | 4,88 | 3,85 | 2,24 | 6,49 | | | |
| 3.1.3 | Cadangan Persediaan | 3,20 | 3,85 | 5,02 | 5,32 | | | |
| 3.1.4 | Pendapatan yang ditangguhkan | 0,06 | 0,38 | 0,31 | 0,14 | | | |
| 3.1.5 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek. | (13,96) | (9,92) | (10,43) | (9,55) | | | |
| 3,2 | EKUITAS DANA INVESTASI | 1.052,73 | 970,95 | 1.309,56 | 1.387,74 | | - | (100,00) |
| 3.2.1 | Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang | 7,95 | 10,45 | 10,60 | 12,36 | | | |
| 3.2.2 | Diinvestasikan dalam Aset tetap | 1.045,03 | 960,61 | 1.297,55 | 1.374,10 | | | |
| 3.2.3 | Diinvestasikan dalam asset lainnya | 0,86 | 0,82 | 2,15 | 1,83 | | | |
| 3.2.4 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang | (1,11) | (0,93) | (0,74) | (0,55) | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1.078,31 | 1.007,62 | 1.333,57 | 1.472,54 | 1.682,92 | 1.478,33 | 9,31 |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Adapun total hutang yang masih menjadi tanggungan pemerintah Kabupaten TanaToraja pada akhir tahun 2015 sebesar Rp.372.391.542,88. Beberapa rasio dapat diterapkan untuk menilai kemampuan keuangan pemerintah daerah, diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang. Rasio likuiditas atau rasio lancar menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek berdasarkan nilai aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 3.8
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten TanaToraja, 2010-2014

| No | Uraian | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Rasio lancar (current ratio) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 2 | Rasio cepat (quick ratio) | 2,270 | 3,546 | 1,744 | 5,722 | 6,160 | |
| 3 | Rasio total hutang terhadap total asset | 1,22 | 0,99 | 0,81 | 0,66 | 1,17 | |
| 4 | Rasio hutang terhadap modal | 0,012 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,011 | |
| 5 | Rata-rata umur piutang (hari) | | | | | | |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan mencermati gambaran umum pendapatan daerah, terlihat pada kebijakan pendapatan daerah lebih diarahkan pada upaya mobilisasi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PAD cukup cepat sebesar 25,50 persen per tahun dalam periode tahun 2010-2015, meskipun proporsinya terhadap total pendapatan relatif kecil. Sumber PAD yang terbesar adalah retribusi daerah dan pajak daerah. Ini menggambarkan bahwa penekanan arah kebijakan peningkatan PAD berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Pada periode yang sama, penerimaan dari dana perimbangan cenderung meningkat hingga tahun 2015 dengan laju pertumbuhan yang cukup lambat sekitar 11.40 persen per tahun. Dengan memperhatikan kebijakan pendapatan daerah di masa lalu peningkatan pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan tetap melanjutkan kebijakan pendapatan yang potensial dan menyempurnakan kelemahan sistem pengelolaan pendapatan pada periode yang lalu. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang diarahkan pada peningkatan PAD pada masa sebelumnya adalah:

1. Peningkatan penerimaan dari objek pajak yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar dengan melakukan penagihan lebih intens kepada subjek pajak;
2. Menggali sumber-sumber pendapatan baru;
3. Mengoptimalkan penerimaan dari objek-objek pajak yang belum tergarap dengan baik;
4. Melakukan pendampingan dan asistensi SKPD dalam proses penetapan target-target penerimaan retribusi;
5. Melakukan uji petik terhadap sumber-sumber PAD potensial untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan;
6. Melakukan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah;
7. Memberikan reward and punishment kepada wajib pajak atas ketaatan dalam membayar pajak;
8. Memberikan kampanye "Taati Pajak" agar masyarakat semakin mengerti akan posisi dan peran strategis pajak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan;
9. Melakukan pelayanan mobile kepada wajib pajak secara periodik;
10. Melakukan konsolidasi internal berupa perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan SDM, dan peningkatan kualitas layanan.

Selain kebijakan peningkatan PAD, pemerintah daerah tetap melakukan langkah-langkah strategis yang terkait dengan sumber pendapatan daerah yang lain seperti lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah cukup berarti.

3.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten TanaToraja Tahun 2010-2015, belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, dan berbagai pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (core competency).

Mencermati perkembangan realisasi belanja daerah pada periode 2010-2015 tergambar bahwa kebijakan

belanja daerah diarahkan pada belanja tidak langsung dengan proporsi yang lebih besar daripada belanja langsung. Kebijakan belanja tidak langsung tetap didominasi oleh pembayaran gaji pegawai sebagai belanja wajib dan mengikat. Sementara pada belanja langsung, kebijakan diarahkan pada pembiayaan program prioritas sebagaimana termuat dalam RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2015. Adapun bentuk kebijakan pada program prioritas adalah :

- Peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengembangan sistem pelayanan publik, peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan dan aset, penataan organisasi dan tata kerja birokrasi daerah, serta peningkatan sistem pengendalian intern pemerintahan daerah;
- Pembangunan daya saing ekonomi daerah akan diarahkan kepada peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi, peningkatan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, serta perwilayahan komoditas unggulan, peningkatan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan daya saing usaha masyarakat, penguatan lembaga keuangan mikro, koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan pertambangan, pengembangan home-industry dan IKM, promosi dan penanaman modal, pengembangan sarana dan prasarana BLK, optimalisasi pengelolaan potensi kepariwisataan, peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
- Peningkatan pendayagunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan kepada optimalisasi pengawasan tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup;
- Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial diarahkan pada penguatan implementasi nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, pemeliharaan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan APK dan APM pada semua tingkat satuan pendidikan berbasis kinerja, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan indeks pemberdayaan gender, peningkatan angka usia harapan hidup, penurunan prevalensi kurang gizi anak balita, penurunan angka kematian anak dan ibu, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah, peningkatan kualitas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan kehidupan sosial bagi penyandang cacat, anak terlantar, yatim piatu dan fakir miskin;
- Penguatan demokrasi, politik, hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada peningkatan pemahaman dan penegakan hukum dan HAM, perwujudan kehidupan politik yang demokratis dan kondusif.

3.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk memberi gambaran atau informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintahan daerah pada periode 2016-2021 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis pendapatan dan belanja daerah pada bagian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa pada periode sebelumnya pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganut anggaran defisit pada tahun 2012, kemudian anggaran surplus pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014. Dengan memperhitungkan komponen pembiayaan, besaran pengeluaran pembiayaan terjadi pada tahun 2012, sehingga turut mempengaruhi perolehan defisit riil. Pada tahun 2010, defisit riil Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.3,4 milyar menurun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2014 terjadi surplus sebesar 22,9 milyar .

Tabel 3.9
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Toraja, 2011-2015

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi Belanja | 465.030.470.945 | 588.681.440.600 | 589.610.948.131 | 659.885.050.055 | 757.374.394.190 | 952.584.752.565,64 |
| 2 | Belanja Daerah | 413.826.489.591 | 562.471.095.671 | 593.075.664.974 | 592.636.051.638 | 734.425.841.661 | 905.654.498.944,34 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 42.825.119.331 | 14.948.856.105 | 8.714.812.494 | 10.336.602.389 | 3.686.195.771 | 1.686.195.771,44 |
| 4 | Surplus/Defisit riil | 51.203.981.354 | 26.210.344.929 | (3.464.716.842) | 67.248.998.416 | 22.948.552.529 | 46.930.253.621,30 |
| 5 | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: | 7.954.918.694 | 16.339.780.717 | 27.449.333.995 | 15.195.865.278 | 72.108.261.305 | 91.370.618.063,61 |
| 6 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 16.333.780.717 | 27.601.269.541 | 15.269.804.658 | 72.108.261.305 | 91.370.618.063 | 136.614.675.913,47 |
| 7 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 8 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Surplus yang terjadi pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015 menggambarkan bahwa seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya. Akan tetapi, di tahun 2012 belanja daerah harus ditutupi dari penerimaan pembiayaan. Dari seluruh komponen penerimaan pembiayaan, SiLPA tahun lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan terbesar dimana pada tahun 2014 mencapai Rp. 72,108 milyar. Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010, 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 namun meningkat lagi pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tana Toraja, 2011-2014

| No. | Uraian | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Rata-rata pertumbuhan (%) |
|-----|--|----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------------------------|
| | | milyar | % dari SILPA | milyar | % dari SILPA | Milyar | % dari SILPA | milyar | % dari SILPA | milyar | % dari SILPA | |
| 1 | Jumlah SiLPA | 16,333 | 100 | 27,449 | 100 | 15,195 | 100 | 72,108 | 100 | 136,614 | 100 | |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | (7,7 m) | -28,3 | 1,9 | 6,6 | 2,3 | 7,5 | 15,259 | 19,5 | | | |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | (15,2 m) | -56,5 | (10,8) | -33,6 | (3,4) | -11,5 | 6,4 | 8,5 | | | |
| 4 | Pelampauan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | (1,02 m) | 3,9 | (3,3) | -9,6 | (1,3) | -3,8 | (11,1) | -15,5 | | | |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya | 1,3 | 8,5 | 1,1 | 3,1 | 2,4 | 7,7 | 1,7 | 1,9 | | | |

Sumber data : DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

Pada periode 2011, terlihat bahwa PAD selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan komponen Dana Perimbangan, hanya pada tahun 2014, realisasi penerimaan berada di atas target, sementara periode lainnya tidak melampaui target. Ini berarti, beberapa komponen dana perimbangan tidak terealisasi 100 persen.

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa SiLPA yang terjadi pada tahun 2011-2014 disebabkan oleh adanya penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berada di atas target dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sisa penghematan belanja berlangsung fluktuasi hingga tahun 2014 dengan besaran nilai yang cenderung meningkat dari Rp.1,3 milyar di tahun 2011 menjadi Rp.1,7 milyar di tahun 2014.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2016-2020.

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama Kabupaten Tana Toraja pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisis proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi asumsi

makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan disamping dipengaruhi oleh asumsi makro juga dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Pada bagian ini akan dijelaskan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun ke depan yaitu tahun anggaran 2016-2020 yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung maupun belanja langsung, serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.

Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun ke depan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa tren pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi ke depan, prediksi belanja-belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun ke depan.

3.3.1 ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Pada periode tahun 2012-2014, terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, total pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah Kabupaten Tana Toraja rata-rata Rp.360,23 milyar atau bertumbuh dengan rata-rata 11,47 persen. Untuk komponen belanja tidak langsung wajib dan mengikat rata-rata per tahunnya sebesar Rp.336,13 milyar (11,44 persen) selama tiga tahun terakhir (2012-2014). Belanja gaji dan tunjangan mendominasi struktur belanja tidak langsung wajib dan mengikat dengan rata-rata 95,15 persen dan sebesar rata-rata 4,85 persen teralokasi pada belanja bantuan keuangan, serta selebihnya teralokasi pada belanja anggota DPRD dan belanja bunga. Sementara belanja langsung wajib dan mengikat rata-rata Rp.5,5 milyar atau bertumbuh dengan rata-rata 9,45 persen. Dalam periode tahun 2012-2014, belanja wajib dan mengikat pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan adalah pembayaran pokok utang, dimana pada tahun 2011-2014 besarnya tidak sama.

Tabel 3.11
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Tana Toraja, 2011-2015 (Milyar)

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | Belanja Tidak Langsung | | | | | | |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 268,32 | 292,02 | 336,13 | 366,30 | 405,91 | 290,69 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | | | | | | 2,03 |
| 3 | Belanja Bunga | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,83 | 0,60 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,04 | 1,5 | 1,13 |
| 5 | Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 0,00 | 11,59 | 12,25 | 0,45 | 0,00 | 85,03 |
| B | Belanja Langsung | | | | | | |
| 1 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | | | | | | 0,15 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor (khusus) tagihan bulanan kantor seperti Listrik, Air, Telpon, dan sejenisnya) | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 14,4 |
| C | Pembiayaan Pengeluaran | | | | | | |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | 0,50 | 2,0 | 2,50 | 2,50 | |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | 42,82 | 14,44 | 6,71 | 7,83 | 1,18 | |
| | TOTAL (A+B+C) | | | | | | |

Sumber data: DPPKAD Kab. Tana toraja, 2016

3.3.2 ANALISIS PROYEKSI DATA

a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2020

Selama periode tahun 2010-2014, ketergantungan fiskal pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap pemerintah pusat cukup besar. Hal ini ditandai oleh proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar 81,19 persen, sementara proporsi pendapatan asli daerah hanya sebesar 3,21 persen. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan

yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PAD dan Dana perimbangan.

Selama periode tahun 2010-2014, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 4,92 persen dan 10,55 persen atau rata-rata 8,76 persen per tahun. Prestasi pertumbuhan ekonomi tersebut dikontribusi oleh sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Untuk periode lima tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi diprediksikan lebih akseleratif dengan kisaran rata-rata 10-11 persen per tahun dengan harapan bahwa kebijakan nasional tetap konsisten dalam mendukung penganggaran Kabupaten Tana Toraja melalui dana perimbangan, kebijakan pemerintah daerah Tana Toraja terkait dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta kebijakan yang mendukung kerjasama dengan sektor swasta. Selain itu, asumsi tersebut juga harus diiringi oleh tingkat inflasi yang relatif stabil dan tingkat pengangguran berada pada rata-rata 3-4 persen per tahun. Meskipun pada periode sebelumnya kecenderungan tingkat pengangguran menurun, namun dengan mencermati kondisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat relatif lebih cepat terhadap tingkat kesempatan kerja. Hal ini berarti jumlah angkatan kerja yang mampu terserap ke dalam lapangan kerja relatif lebih lambat. Prediksi pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan terutama peningkatan PAD.

Tabel 3.12
Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020

| Variabel Makro-Ekonomi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata pertumbuhan |
|----------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 0,1 |
| Inflasi (%) | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 0,01 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | (0,2) |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 14 | 12,5 | 11 | 9,5 | 8 | (1,5) |
| PAD (Milyar) | 76,97 | 82,67 | 88,87 | 95,53 | 102,69 | 7,5 |
| Dana Perimbangan (Milyar) | 918,61 | 973,72 | 1.032,14 | 1.094,06 | 1.159,70 | 6 |

Sumber data : Data Proyeksi

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, maka PAD diprediksikan meningkat dari Rp.70 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 90 milyar pada tahun 2020 atau bertumbuh dengan rata-rata 7,5 persen. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (2010-2014) yang mencapai 25,5 persen per tahun.

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020

| Uraian | 2016 (Milyar) | 2017 (Milyar) | 2018 (Milyar) | 2019 (Milyar) | 2020 (Milyar) | Rata-rata pertumbuhan (%) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Pendapatan Daerah | 1.101,43 | 1.171,23 | 1.245,61 | 1.324,78 | 1.409,07 | 7,45 |
| PAD | 76,97 | 82,67 | 88,87 | 95,53 | 102,69 | 7,5 |
| Dana Perimbangan | 918,61 | 973,72 | 1.032,14 | 1.094,06 | 1.159,70 | 6,0 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 105,85 | 114,84 | 124,60 | 135,19 | 146,68 | 8,5 |

Sumber data: Data Proyeksi

Untuk mencapai angka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan berbagai upaya yang signifikan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain : melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi, dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif dapat menjadi upaya kongkrit bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan BPHTB yang menurut Undang-Undang Pajak yang baru dialihkan pengelolaannya

kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan berbagai upaya tersebut, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah diprediksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata 7,5 persen per tahun.

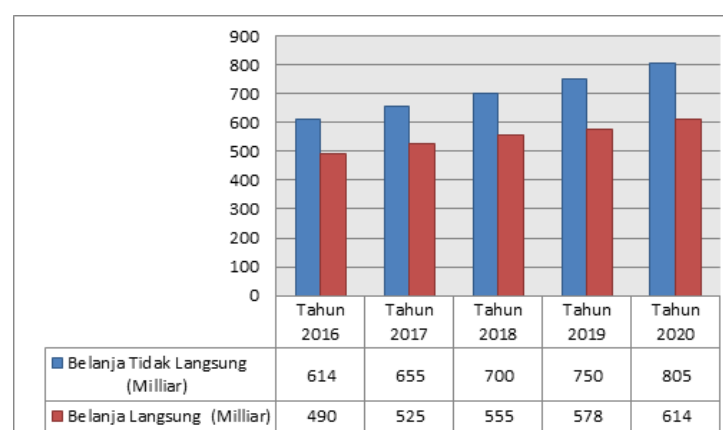
Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan meskipun sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, namun diprediksikan masih tetap mengalami peningkatan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja. Peningkatannya diprediksi sebesar 7,45 persen akibat dari kebijakan dana bagi hasil pajak PBB dan BPHTB yang diserahkan kepada daerah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8,5 persen per tahun. Secara keseluruhan, pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, namun diproyeksikan secara proporsional akan mengalami penurunan. Hal ini proporsinya direncanakan diganti dari kontribusi PAD dengan prediksi yang cenderung meningkat. Total pendapatan daerah diprediksikan mencapai rata-rata Rp.1,35 triliun pada periode 2016-2020 atau bertumbuh rata-rata sebesar 9,87 persen per tahun.

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Tana Toraja lima tahun ke depan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SiLPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Hingga tahun 2012, komposisi belanja daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri atas pos belanja tidak langsung (62,28 persen) dan pos belanja langsung (37,72 persen).

Total belanja keseluruhan diprediksikan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi, kebijakan dan strategis kepala daerah. Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja langsung yaitu rata-rata 35,35 persen per tahun dari total belanja daerah yang direncanakan, sedangkan belanja tidak langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata 64,65 persen per tahun. Hal ini berarti pada periode tahun 2010-2015, kebijakan belanja daerah masih didominasi belanja tidak langsung dengan proporsi yang relatif sama dengan periode sebelumnya. Alokasi belanja langsung tetap diarahkan pada belanja modal dengan proporsi yang lebih besar melebihi rata-rata proporsi belanja modal pada periode sebelumnya. Pada periode yang sama, belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis belanja wajib lainnya. Pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan rata-rata sebesar 9,52 persen per tahun, yang terdiri atas pertumbuhan belanja langsung rata-rata sebesar 9,13 persen per tahun dan pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 9,75 persen per tahun selama periode 2016-2021.

Grafik 3.2
Proyeksi Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020



Sumber data: Data Proyeksi

Pada periode tahun 2016-2020, belanja wajib mengikat yang setiap tahun harus dianggarkan oleh pemerintah dikelompokkan ke dalam dua komponen, yaitu: (i) belanja wajib pada belanja tidak langsung seperti belanja gaji pegawai dan tunjangan serta belanja untuk pejabat pemerintah dan legislatif, (ii) belanja langsung seperti belanja telepon, listrik, dan air bersih. Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat pada periode tahun 2010-2014, tergambar total belanja (langsung dan tidak langsung) dan pembiayaan mengalami peningkatan

dari Rp.316,91 milyar menjadi Rp.417,74 milyar. Dengan mengacu pada data realisasi periode sebelumnya disertai dengan kebijakan pemerintah daerah, baik pada aspek pembiayaan maupun pada aspek belanja, yang mempengaruhi belanja wajib dibidang pendidikan serta dukungan asumsi ekonomi makro, maka untuk periode lima tahun ke depan, belanja dan pembiayaan wajib dan mengikat diprediksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata 8,57 persen per tahun (Rp. 504,03 milyar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 709,15 milyar pada tahun 2020). Dari angka proyeksi tersebut, porsi terbesar ditempati oleh belanja tidak langsung terutama belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 (Milyar Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| A | Belanja Tidak Langsung (gaji & tunjangan) | 494,53 | 544,12 | 594,35 | 644,50 | 694,65 | | 7,5 |
| B | Belanja Langsung | 7,50 | 8,50 | 9,30 | 10,20 | 11,50 | | 10,0 |
| C | Pengeluaran Pembiayaan | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | | 13,5 |
| | Total Belanja dan Pembiayaan wajib mengikat serta prioritas utama. | 504,03 | 554,87 | 606,15 | 657,45 | 709,15 | | 10,3 |

Sumber data: Data Proyeksi

b. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5(lima) tahun ke depan (2016-2020). Selama periode lima tahun ke depan, pertumbuhan pendapatan daerah diprediksikan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran pemerintah RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2020 daerah yang mengarah kepada kebijakan surplus anggaran. Pemanfaatan surplus diarahkan pada penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok hutang. Setelah memperhitungkan seluruh komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat dan perkiraan perolehan pendapatan daerah, maka kapasitas fiskal riil pemerintah Kabupaten Tana dapat dilihat dalam Tabel 3.15. Kapasitas fiskal riil direncanakan mengalami peningkatan dari Rp. 601,04 milyar pada tahun 2016 menjadi menjadi Rp. 691,20 milyar pada tahun 2020 atau meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,5 persen per tahun. Besaran kapasitas riil fiskal tersebut dialokasikan sesuai dengan skala prioritas. Total rencana pengeluaran untuk Prioritas I yang meliputi belanja langsung setelah diperkurangkan dengan belanja langsung wajib dan pengeluaran pembiayaan berkisar antara Rp. 580,95 milyar sampai dengan Rp. 660,90 milyar pada periode tahun 2016-2020. Sementara untuk total belanja prioritas II yang meliputi belanja tidak langsung setelah dikurangi belanja tidak langsung mengikat berkisar antara Rp. 19,99 milyar hingga Rp. 30,30 milyar. Ini berarti kebijakan penggunaan kapasitas fiskal riil diarahkan pada bobot yang lebih besar pada belanja langsung. Setelah memperkurangkan kapasitas fiskal riil dan rencana seluruh pengeluaran baik pada prioritas I maupun pada prioritas II, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja menetapkan rencana surplus anggaran dalam masa periode 2016-2020 dengan rata-rata Rp. 0,05 milyar per tahun.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 (Milyar)

| No | Uraian | Tahun Proyeksi | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| A | Pendapatan | 1.101,43 | 1.171,23 | 1.245,61 | 1.324,78 | 1.409,07 |
| 1 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sisa Lebih Riil Perhitungan | 3,64 | 8,94 | 9,60 | 4,16 | 10,28 |
| | Total Penerimaan | 1.105,07 | 1.180,17 | 1.255,21 | 1.328,94 | 1.419,35 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B | Dikurangi : | | | | | |
| 1 | Belanja dan Pengeluaran | | | | | |
| 2 | Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | 504,03 | 554,87 | 606,15 | 657,45 | 709,15 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 601,04 | 625,30 | 649,06 | 671,49 | 710,20 |

Sumber data: Data Proyeksi

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja, 2016-2020 (Milyar)

| No. | Uraian | Tahun Proyeksi | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Kapasitas riil kemampuan Keuangan | 601,04 | 625,30 | 649,06 | 671,49 | 710,20 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas I | | | | | |
| | Belanja Langsung | 490,45 | 515,80 | 532,79 | 555,50 | 594,40 |
| | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - |
| | Dikurangi: | | | | | |
| | Belanja langsung yang wajib Dan mengikat serta prioritas utama | 7,50 | 8,50 | 9,30 | 10,20 | 11,50 |
| | Pengeluaran pembiayaan yang wajib Mengikat serta prioritas utama | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| | Total Rencana Pengeluaran I | 480,95 | 505,05 | 520,99 | 542,55 | 579,90 |
| | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah setelah menghitung alokasi Prioritas I (I-II) | 120,09 | 120,25 | 128,07 | 128,94 | 130,30 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas II | | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | 614,52 | 664,37 | 722,42 | 773,44 | 824,95 |
| | Dikurangi: | | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung yang wajib Dan mengikat serta prioritas utama | 494,53 | 544,12 | 594,35 | 644,65 | 694,65 |
| | Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a – III.b) | 119,99 | 120,25 | 128,07 | 128,79 | 130,30 |
| | Surplus anggaran riil (I-II-III)* | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |

Sumber data: Data Proyeksi

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 persen. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2020 daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, serta berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan, tunjangan kinerja, reward dan insentif PNS dan tenaga kontrak, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Milyar)

| Jenis Dana | Alokasi | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp | % | Rp |
| Prioritas I | 45 | 270,47 | 45 | 281.38 | 40 | 259,62 | 40 | 268,60 | 35 | 248.57 |
| Prioritas II | 30 | 180,31 | 27.5 | 171.96 | 30 | 194.72 | 25 | 168.87 | 25 | 177.55 |
| Prioritas III | 25 | 150,26 | 27,5 | 171.96 | 30 | 194.72 | 35 | 235.02 | 40 | 284.08 |
| Total | 100 | 601,04 | 100 | 625,30 | 100 | 649,06 | 100 | 671,49 | 100 | 710,20 |

Sumber data: Data Proyeksi



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Tana Toraja kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2016-2021.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian permasalahan pembangunan berikut merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar (Berbasis Standar Pelayanan Minimal/SPM) maupun urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan (berbasisi keunggulan daerah). Dari kedua urusan tersebut kemudian dianalisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tana Toraja.

4.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

4.1.1.1 Pendidikan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar pendidikan pada semua jenjang/tingkatan pendidikan baik bangunan sekolah/RKB, perpustakaan dan laboratorium terutama di daerah/wilayah terpencil;
- b. Kurangnya ketersediaan literatur buku-buku tertentu pada semua jenjang pendidikan;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan manajemen sekolah diakibatkan kapasitas dan kualitas sumber daya tenaga pendidik termasuk penempatan dan pemerataan tenaga guru terutama di daerah/wilayah terpencil;
- d. Masih rendahnya inovasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi PAUD dan Play Grup, Taman Bermain dan Pembinaan Murid dan Siswa;
- e. Masih rendahnya animo minat baca termasuk proses pendidikan/penelusuran bakat dan minat anak usia dini juga ketersediaan sarana dan prasarana seni dan olahraga;
- f. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat dalam mengakses pendidikan pada program Strata I, II dan III;
- g. Masih rendahnya muatan pendidikan lokal dan pendampingan masuk perguruan tinggi
- h. Masih rendahnya kebijakan beasiswa, insentif dan reward prestasi pendidikan;
- i. Masih rendahnya kerjasama/kemitraan baik antar lembaga maupun antar daerah dalam bidang pendidikan;
- j. Masih tingginya angka putus sekolah dan drop-out terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) khususnya di daerah/wilayah terpencil;
- k. Masih rendahnya fasilitas/sarana penunjang pendidikan yang mendorong penelusuran bakat dan minat serta kegiatan diluar sekolah;
- l. Terdapatnya kesenjangan pelayanan pendidikan diakibatkan terbatasnya guru yang memperoleh sertifikat/agreditasi pendidikan;
- m. Terdapatnya kesenjangan antar wilayah dalam mengakses percepatan pelayanan pendidikan termasuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
- n. Masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan keterampilan pada bidang mata pelajaran tertentu;
- o. Rendahnya fungsi struktural lembaga pendidikan dalam mendorong pelayanan pendidikan dan administrasi kepegawaian;

4.1.1.2 Kesehatan

- a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar, khususnya di daerah/wilayah terpencil;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan rujukan dan rawat inap di kecamatan, khususnya di daerah/wilayah terpencil;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan manajemen kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas diakibatkan kapasitas dan kualitas serta minat paramedis dan tenaga medis yang tinggal di puskesmas atau perdesaan;
- d. Masih rendahnya ketersediaan, penempatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis, bidan desa khususnya di daerah/wilayah terpencil ;
- e. Masih rendahnya fungsi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan polindes;
- f. Masih rendahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, manula, ibu hamil, bayi dan balita di perdesaan khususnya daerah/wilayah terpencil;
- g. Rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat pendampingan ASI dan makanan tambahan;
- h. Masih kurangnya tenaga medis/dokter sesuai bidang keahlian;
- i. Belum optimalnya pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja;
- j. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan terlihat dari Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan 23/1000KH
- k. Masih kurangnya fasilitas alat kesehatan dan obat-obatan/kefarmasian khususnya daerah/wilayah terpencil;
- l. Rendahnya dukungan mobilitas layanan kesehatan rujukan dan kereta merta serta infrastruktur khususnya di daerah/wilayah terpencil;

- m. Rendahnya Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk belum memadai;
- n. Rendahnya pelayanan intervensi kesehatan dan insiden kesehatan bagi masyarakat pada wilayah tertentu.

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih terdapatnya kesenjangan antar wilayah;
- b. Rendahnya sistem perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam mendorong pembukaan keterisolasian, pertumbuhan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, produksi pertanian dalam arti luas serta peluang investasi khususnya di daerah/wilayah terpencil;
- c. Lemahnya sistem perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung secara langsung akses ke destinasi pariwisata, kawasan wisata dan akses pedestrian dalam objek destinasi;
- d. Lemahnya sistem perencanaan pemanfaatan sumber daya air yang multi fungsi;
- e. Belum optimalnya pencapaian target sasaran layanan umum dan umur rencana konstruksi infrastruktur;
- f. Rendahnya optimalisasi dukungan layanan infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan air baku, kelistrikan dan lainnya terhadap pusat pertumbuhan, peluang berusaha dan investasi;
- g. Belum terbangunnya infrastruktur perkotaan yang memadai sebagai daerah penyangga kota (kota satelit Ge'tengan, Bittuang, Rembon, Buakayu, Kondoran, Rantetayo, Ulusalu, Salubarani dan pusat pertumbuhan Lekke' Simbuang);
- h. Rendahnya penanganan pedestrian, drainase, Ruang Terbuka Hijau, Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan, Pelayanan Air Minum, Program Kali Bersih, Pertamanan dan Penerangan.

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Rendahnya sistem perencanaan pemanfaatan ruang/kawasan yang mendukung kepariwisataan;
- b. Rendahnya sistem perencanaan pemanfaatan ruang/kawasan publik, pemukiman, usaha dan investasi, ruang terbuka hijau, lahan pertanian dalam arti luas;
- c. Rendahnya revitalisasi sarana perumahan dan kawasan pemukiman;
- d. Masih rendahnya penataan perumahan, kebersihan lingkungan dan jalur hijau dengan pendekatan kearifan lokal;
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesesuaian fungsi dan manfaat lahan serta garis sempadan sungai dan jalan;
- f. Tingginya alih fungsi dari lahan pertanian dalam arti luas menjadi fungsi permukiman, kawasan usaha dan industri serta fungsi lainnya;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang regulasi pemanfaatan ruang;
- h. Belum adanya lahan pekuburan umum/muslim yang representatif;
- i. Belum adanya penataan ruang/kawasan fasilitas seni dan olah raga.

4.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi;
- b. Masih kurangnya Sarana dan prasarana pendukung keamanan dan ketertiban politik;
- c. Masih rendahnya sosialisasi kebijakan publik dan politik;
- d. Rendahnya koordinasi pembinaan kesatuan bangsa, pelayanan organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat.
- e. Rendahnya pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;

4.1.1.6 Sosial

- a. Rendahnya data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan perlindungan anak dan perempuan;
- b. Rendahnya pemetaan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Lansia, penyandang cacat, anak jalanan dan wanita rawan sosial;
- c. Rendahnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) dan PMKS;

- d. Kurangnya fasilitasi penguatan permodalan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi fasilitas bantuan sosial;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi PMKS;
- g. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 12,27 % dibandingkan target capaian nasional sebesar 7%;
- h. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan social;
- i. Masih rendahnya kepedulian sosial rumah tidak layak huni /miskin, penyaluran beras raskin, PKH, BPJS, BPJS Tenaga Kerja dan bantuan akibat bencana;
- j. Rendahnya fasilitas dan penanganan rehabilitasi sosial, panti asuhan, penitipan anak dan korban kekerasan rumah tangga serta ibu melahirkan;

4.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

4.1.2.1 Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya angka pengangguran dan kesempatan kerja dan peluang berusaha;
- b. Masih rendahnya sarana pendukung keterampilan tenaga kerja ;
- c. Kurangnya data dan informasi kebutuhan dan keterampilan tenaga kerja dan lapangan kerja;

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih rendahnya sosialisasi pemberdayaan perlindungan anak dan perempuan;
- b. Masih rendahnya akses pengarusutamaan gender;
- c. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mengakses pembangunan dan politik;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- e. Rendahnya fasilitas dan tenaga untuk mendorong pertumbuhan anak;
- f. Lemahnya Up-dating data jumlah perempuan dan anak dari setiap lembang/kelurahan;
- g. Masih rendahnya keterlibatan perempuan atau kesetaraan gender dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- h. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat menyangkut pengarusutamaan gender;
- i. Masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak;
- j. Belum optimalnya peranan lembaga Pusat Pelayanan Tindak Pidana Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- k. Masih rendahnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Tingginya animo masyarakat mempekerjakan anak di bawah umur.

4.1.2.3 Ketahanan Pangan

- a. Berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian akibat alih fungsi atau konversi lahan pertanian;
- b. Rendahnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal khususnya daerah terpencil;
- c. Belum optimalnya peran penyuluh pertanian, perikanan ,dan kehutanan terhadap upaya diseminasi dan peningkatan produksi;
- d. Masih rendahnya data dan informasi kesesuaian potensi lahan;
- e. Rendahnya sosialisasi varietas lokal/unggul dan bernilai produksi;
- f. Belum adanya pemetaan varietas lokal untuk dijadikan tanaman unggulan yang bernilai produksi;
- g. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pola konsumsi masyarakat khususnya bahan pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi.

4.1.2.4 Pertanian

- a. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan;
- b. Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan sebagai lahan persawahan berkelanjutan sebagai penopang ketersediaan pangan;
- c. Penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan belum memenuhi kebutuhan, sehingga berkembang rumah kumuh di perkotaan dengan intensitas yang tidak terkendali.

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan cinta lingkungan, bersih, indah dan sehat;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah secara ekonomis, antara sampah organik dan anorganik;
- c. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, pemanfaatan sarana kebersihan termasuk sanitasi lingkungan;
- d. Lemahnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hijau, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- e. Belum terciptanya regulasi dan sistem perencanaan pengelolaan penataan lingkungan hidup dan penanganan kebersihan lingkungan;
- f. Belum optimalnya fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan pola cut and fill;
- g. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan air limbah;
- h. Belum optimalnya sosialisasi AMDAL terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
- i. Masih rendahnya penanganan konservasi, ruang terbuka hijau dan lahan kritis;
- j. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana operasional kebersihan lingkungan.

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Masih rendahnya pelayanan e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah, Akte Kelahiran;
- b. Lemahnya akses pelayanan informasi penyediaan Kartu Identitas Pribadi dan Kartu Identitas Keluarga;
- c. Rendahnya sosialisasi terhadap fungsi dan peran kependudukan dan catatan sipil;
- d. Lemahnya keterampilan/penguasaan sarana pendukung pelayanan identitas penduduk;
- e. Belum tersedianya tenaga profesional dan terampil secara merata untuk mengakses layanan kependudukan dan catatan sipil;
- f. Lemahnya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil.

4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang

- a. Masih lemahnya penguatan lembaga dan kelembagaan di perdesaan;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan di perdesaan;
- c. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengakses data dan informasi;
- d. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pengelolaan sumber-sumber keuangan dan belanja keuangan lembang/desa;
- e. Belum optimalnya peran/fasilitasi aparat lembang dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- f. Masih rendahnya perencanaan pembangunan dan sosial ekonomi dalam mendorong sinergitas, keterpaduan dengan perencanaan daerah.

4.1.2.8 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan KB;
- c. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga petugas lapangan penyuluh KB;
- e. Kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi dibanding dengan jumlah akseptor KB;
- f. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- h. Lemahnya Up-dating data dalam mengakses informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

4.1.2.9 Perhubungan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung fasilitas perhubungan darat maupun udara;
- b. Kurangnya fasilitas sarana keselamatan jasa lalu lintas;
- c. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap disiplin dan kepatuhan berlalu lintas termasuk pemanfaatan ruang jalan sebagai tempat usaha;
- d. Belum berkembangnya terminal pasar dan tempat permukiman;

- e. Masih kurangnya tanda-tanda lalu lintas antara lain marka jalan, cermin cembung, guard rail dan zebra cross;
- f. Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik untuk mendorong layanan jasa pariwisata dan pertumbuhan ekonomi;
- g. Lemahnya aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan transportasi udara.

4.1.2.9 Komunikasi dan Informasi

- a. Belum terbangunnya sistem informasi teknologi;
- b. Masih minimnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika;
- c. Masih rendahnya akses terhadap informasi.

4.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

- a. Masih rendahnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Masih rendahnya fasilitasi penguatan kelembagaan usaha termasuk kelompok tani/GAPOKTAN dalam mengakses permodalan;
- c. Masih lemahnya sosialisasi pemberdayaan ekonomi dalam mengakses potensi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hortikultura, industri kerajinan tangan, pertenunan, tata boga, jasa kecantikan, menjahit dll;
- d. Masih rendahnya sosialisasi terhadap peran UMKM sebagai soko guru ekonomi bangsa;
- e. Belum adanya pemetaan potensi produksi, jasa distribusi dan akses pasar;
- f. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- g. Masih rendahnya keberpihakan pelaku usaha jasa keuangan terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

4.1.2.11 Penanaman Modal

- a. Kurangnya inovasi kerjasama/kemitraan kelembagaan usaha dan investasi ;
- b. Lemahnya kemudahan peluang berusaha dan investasi;
- c. Lemahnya data dan informasi peluang berusaha dan investasi.

4.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

- a. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga;
- b. Belum optimalnya penelusuran bakat dan minat keolahragaan;
- c. Masih rendahnya sistem dan skala pembinaan olahraga;
- d. Belum terbangunnya motivasi untuk mendorong prestasi olahraga;
- e. Masih rendahnya pembinaan terhadap prestasi klub atau kelompok olahraga.

4.1.2.13 Statistik

- a. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun antar instansi dalam proses pengumpulan dan analisa data bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan data base yang valid dan akurat;
- c. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah.

4.1.2.14 Kebudayaan

- a. Masih rendahnya sosialisasi peran adat dan budaya etnik Toraja;
- b. Masih rendahnya upaya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya;
- c. Belum tertatanya penelusuran nilai-nilai dan situs, cerita rakyat, legenda dan seni budaya;
- d. Belum adanya sarana dan prasarana pustaka dan benda-benda bersejarah;
- e. Masih rendahnya penataan wilayah adat dan peran lembaga adat termasuk aliansi masyarakat adat;
- f. Belum optimalnya perlindungan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan peran Hakim Pendamai;
- g. Masih kurangnya perhatian terhadap kawasan cagar budaya.

4.1.2.15 Perpustakaan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan;
- b. Kurangnya literatur bahan bacaan perpustakaan;
- c. Rendahnya minat baca masyarakat.

4.1.2.16 Kearsipan

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana kearsipan;
- b. Rendahnya tata kelola kearsipan;
- c. Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan.

4.1.3 URUSAN PILIHAN

4.1.3.1 Pertanian

- a. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
- b. Berkurangnya kesuburan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan;
- c. Menurunnya keseimbangan ekosistem akibat penggunaan pestisida kimia berlebihan;
- d. Masih banyak lahan terlantar karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan usaha tani dan jalan produksi yang baik;
- e. Sebagian petani enggan untuk menerapkan teknologi baru budidaya tanaman.

4.1.3.2 Pariwisata

- a. Belum optimalnya pemetaan dan klasifikasi daya tarik objek wisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal dan belanja wisatawan;
- b. Kurangnya informasi dan kelayakan objek wisata;
- c. Belum optimalnya sistem perencanaan pembangunan kepariwisataan;
- d. Belum optimalnya perencanaan, penanganan dan pengelolaan lokasi objek wisata;
- e. Belum optimalnya promosi dan pemasaran kepariwisataan dan hasil produksi kekayaan khas Toraja;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerima dan mendorong kepariwisataan;
- g. Masih lemahnya kemampuan masyarakat dalam layanan komunikasi terutama bahasa Inggris dan Mandarin;
- h. Belum memadainya dukungan infrastruktur jalan, pedestrian, penataan ruang kawasan objek/destinasi pariwisata;
- i. Belum tersusunnya kalender event promosi pariwisata;
- j. Belum terbangunnya kelompok pengrajin, pertunjukan dan sanggar seni tradisional;
- k. Masih rendahnya peran pemandu wisata dalam mengakses nilai-nilai adat dan budaya.

4.1.3.3 Perikanan

- a. Rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia perikanan;
- b. Kurangnya kemampuan perikanan mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi;
- c. Rendahnya upaya pengembangan perikanan darat khususnya daerah terpencil;
- d. Kurangnya budidaya untuk peningkatan produktivitas dan mutu produk perikanan;
- e. Rendahnya budidaya ikan air tawar untuk pemanfaatan lahan berair;
- f. Minimnya upaya promosi usaha dan potensi-potensi komoditi unggulan lokal;
- g. Rendahnya peran dan fungsi kerjasama/kemitraan usaha perikanan.

4.1.3.4 Kehutanan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk gemar menanam dan memelihara pohon;
- b. Masih kurangnya persentase luasan kawasan terbuka hijau;
- c. Rendahnya kapasitas tenaga penyuluh sektor kehutanan.

4.1.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani listrik;
- b. Masih banyaknya penambang yang tidak memiliki izin;
- c. Rendahnya kesadaran penambang terhadap resiko dampak lingkungan dan keselamatan kerja.

4.1.3.6 Perdagangan

- a. Rendahnya data dan informasi pasar dan peluang pasar;
- b. Rendahnya kemampuan manajemen pelaku usaha perdagangan;
- c. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merek dagang beberapa produk;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- e. Belum tersedianya infrastruktur pasar dan gudang penampungan barang dan produksi.

4.1.3.7 Perindustrian

- a. Rendahnya kemampuan dan keterampilan pelaku usaha industry kerajinan dan pertenunan yang berdaya saing;
- b. Rendahnya kualitas produk unggulan daerah dan kemasan;
- c. Masih rendahnya perencanaan ruang dan magang untuk mengakses sentra kerajinan dan pertenunan berskala lembang/kelurahan;
- d. Rendahnya pengembangan kawasan pemasaran produksi yang berbasis sumber daya lokal;
- e. Masih rendahnya dukungan dan fasilitas pengembangan kerajinan dan pertenunan;
- f. Belum adanya pengakuan terhadap hasil karya seni atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- g. Rendahnya promosi dan pemasaran hasil produksi kerajinan rakyat;
- h. Rendahnya fasilitas sarana dan prasarana kerajinan/ pertenunan dan *Home industry*.

4.1.3.8 Transmigrasi

- a. Belum optimalnya bimbingan dan penyuluhan kepada para transmigran;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pemukiman dan sarana penunjang transmigrasi.

4.1.4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1.4.1 Perencanaan Pembangunan

- a. Kurangnya aparat perencana yang bersertifikasi untuk mengelola data dan informasi sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. Lemahnya pemanfaatan data hasil monitoring dan evaluasi untuk mendukung skala perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan, penetapan target, sasaran dan manfaat secara efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel;
- c. Masih lemahnya data dan informasi yang menjadi isu-isu permasalahan yang menjadi salah satu acuan sistem perencanaan pembangunan daerah;
- d. Lemahnya pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dalam mendorong sinergitas antara kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten tetangga;
- e. Kurangnya data perencanaan dalam menyusun master plan kawasan;
- f. Lemahnya akses data dan informasi sistem perencanaan musrenbang, dalam mendorong partisipasi masyarakat, instansi vertikal, SKPD, perguruan tinggi, perempuan, pemuda, diaspora, Tokoh Masyarakat, agama, Adat, LSM dan pers;
- g. Lemahnya data dan aktualisasi perencanaan pembangunan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- h. Lemahnya up-dating data dalam mengakses informasi sistem perencanaan pembangunan daerah dalam menetapkan skala prioritas, target dan tolak ukur, sasaran dan manfaat;
- i. Lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektoral dan SKPD serta kajian pendekatan penetapan skala program prioritas.

4.1.4.2 Badan Kepegawaian dan Persandian.

- a. Masih kurangnya sistem informasi berbasis data base yang dikembangkan oleh SKPD;
- b. Belum optimalnya pemerataan distribusi PNS dan pengembangan karir PNS;
- c. Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi yang diharapkan;

4.1.4.3 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a. Rendahnya pengembangan dan optimalisasi sumber-sumber PAD;
- b. Lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum berjalan secara optimal dan merata;
- c. Masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola aset daerah dan SKPD termasuk hibah.

4.1.4.4 Sekretariat Daerah

- a. Penataan batas wilayah administrasi antar desa/kelurahan dan kecamatan serta kabupaten yang belum tertata dengan baik;
- b. Penataan kelembagaan instansi Pemerintah yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan yang merupakan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat.

4.1.4.5 Bencana Alam

Degrasi lingkungan sebagaimana halnya masalah Internasional strategis juga dirasakan secara nasional. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi lebih besar akan intensitas terjadinya bencana alam berupa Gempa Bumi, Tanah Lonsor, Kebakaran dan Banjir.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

4.2.1 ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI LUAR KABUPATEN TANA TORAJA

Dalam era globalisasi saat ini, kejadian dan kecenderungan yang ada ditingkat dunia akan mempengaruhi kondisi ditingkat nasional maupun lokal dan memunculkan isu-isu dan permasalahan strategis baik yang berdampak positif maupun negatif. Beberapa kondisi yang menjadi dasar dalam analisis isu strategis adalah sebagai berikut :

4.2.1.1 Isu Strategis Lingkungan Internasional

A. Isu Perdagangan Bebas

Isu global terkait perdagangan bebas yang memperketat persaingan perdagangan antar negara yang berimplikasi pada persaingan perdagangan dalam daerah, sehingga dibutuhkan kualitas IPTEK dan SDM (tenaga kerja) yang mampu menghasilkan produk-produk ekspor (barang dan jasa) yang unggul dan berdaya saing. Kelemahan daya saing produk perdagangan dalam daerah akan berakibat pada devisa neraca perdagangan.

B. Degradasi Lingkungan

Pemanasan global berdampak pada terjadinya pencairan es/salju yang menambah kenaikan permukaan air laut (rob). Akibat lainnya adalah terjadinya anomali musim, bencana alam dan kerusakan alam yang menurunkan produktivitas pertanian. Krisis pangan dunia mesti disikapi dengan peningkatan swasembada pangan guna terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

C. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang Internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi kepentingan (defisit) neraca pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah Kabupaten.

4.2.1.2 Isu Strategis Lingkungan Nasional

A. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria MDG's yaitu yang berpenghasilan kurang dari 1 US\$ lebih kurang sebanyak 7,5 % Penduduk.

B. Hambatan Perdagangan antar Daerah

Hambatan perdagangan antar daerah biasanya berkaitan dengan perijinan, transportasi, komunikasi, informasi dan sarana prasarana pendukung. Hal yang dirasakan oleh dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah adalah kurangnya akses ke pasar diluar daerah maupun ekspor.

C. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Indikator Pembangunan gender secara resmi adalah peningkatan peran dan kesempatan bagi perempuan sebagaimana peran dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kesempatan tersebut adalah kesempatan dalam berusaha, pendidikan dan lain-lain serta dalam menduduki jabatan/posisi strategis tertentu.

D. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Tujuan dari isu adalah untuk menjamin dan melindungi anak akan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perilaku salah, pelantaran dan eksploitasi. Kasus Gisi Buruk, partisipasi sekolah, putus sekolah, kekerasan terhadap anak.

4.1.2.3 Isu Strategis Lingkungan Propinsi

- Memperhatikan RTRW dan RTRWK dan penetapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- Pada Sektor pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan antara lain dengan pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk organik, pemakaian benih rendah emisi dan pengelolaan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dalam masing-masing program atau membuat kegiatan berupa Sosialisasi dan menerapkan pertanian ramah lingkungan. Disamping itu disarankan pula dengan menerapkan Pertanian dengan menggunakan sistem SRI yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta mengembangkan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif;
- Pada Sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka direkomendasikan pula untuk memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik dan mengembangkan biogas yang dapat menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaian energi fosil.

4.1.2.4 Isu - Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tana Toraja

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting dan mendasar, mendesak berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan dimasa mendatang, khususnya selama periode 5 (lima) Tahun ke depan. Pemilihan isu strategis di Kabupaten Tana Toraja mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Merupakan Tugas dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
- Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
- Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
- Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan daerah;
- Janji politik harus diwujudkan.

Dengan berdasar pada pertimbangan diatas, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja periode 5 (lima) tahun 2016-2021 mendatang adalah sebagai berikut :

A. Pendidikan

Pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan disisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. **Penunjang pada sisi yang pertama** adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Sedangkan **penunjang pada sisi yang kedua** adalah Pembentukan manusia yang cerdas, berkarakter, berbudi luhur, berintegritas dan berakhlak.

B. Kesehatan

Selain pendidikan juga kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, menghadapi tantangan dan masalah terutama ketersediaan tenaga medis dan paramedis, fasilitas kesehatan dan rendahnya animo tenaga medis untuk melayani dan menetap di daerah pelayanannya khususnya di daerah/wilayah terpencil.

C. Infrastruktur

Ketersediaan dan daya dukung infrastruktur wilayah menjadi salah satu potret kemajuan daerah dalam mendorong pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan, layanan umum, pariwisata, distribusi barang dan jasa, peluang berusaha dan investasi, namun demikian mengalami kendala dan masalah terutama pembiayaan, sistem dan pendekatan perencanaan.

D. Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata pada posisi ke dua puluh lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) selain memiliki potensi pariwisata destinasi adat dan budaya, religi juga memiliki potensi destinasi alam. Namun demikian mengalami berbagai tantangan dan masalah terutama upaya penelusuran dan pelestarian benda, situs dan kesenian, kawasan cagar budaya dan kerajinan rakyat, pembiayaan, sistem dan pendekatan perencanaan.

E. Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura

Pemanfaatan potensi lahan di Kabupaten Tana Toraja cukup produktif untuk berdaya saing namun demikian sangat dipengaruhi oleh musim dan kelatihan petani, pemetaan kesesuaian potensi lahan, sehingga belum memberikan hasil produksi yang optimal.

F. Perlindungan Anak dan Perempuan

Isu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan. Kondisi tersebut dilatar belakangi masih kurang maksimalnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

G. Pengentasan Kemiskinan

Ketersediaan sumber daya alam yang cukup potensial di Kabupaten Tana Toraja belum bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran koperasi dan UMKM, industri kecil/rumah tangga dan produksi lainnya, perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Orientasi pembesaran skala ekonomi dan peningkatan produktivitas dan daya saing harus menjadi isu pokok agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan tahun 2021. Oleh karena itu didalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021 memuat Visi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yaitu :

“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksudkan dengan **Unggul** adalah masyarakat Tana Toraja yang cerdas, berintegritas, berkarakter, berakhlak dan berdaya saing. Sedangkan yang dimaksudkan dengan **Sejahtera** adalah terciptanya kearifan dan kesejukan, hubungan harmonis inter dan antar umat beragama, ketersediaan dan terpenuhinya sandang, pangan dan papan, meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan kesetaraan PMKS serta menurunnya angka kemiskinan.

Pendekatan arah kebijakan dan strategi dalam konteks unggul dengan mendorong program prioritas melalui pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan politik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan pendekatan arah kebijakan dan strategi dalam konteks sejahtera hendaknya

dipandang sebagai satu kesatuan dengan keunggulan untuk mendorong program prioritas melalui pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan sehingga diperlukan upaya – upaya untuk mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktifitas pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan permasalahan ekonomi, budaya dan politik yang semakin dinamis dan terbuka, Kabupaten Tana Toraja dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat terpercaya dan akuntabel dalam perkembangan penataan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, juga merupakan sebuah keharusan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang juga semakin kompleks.

Berdasarkan pengertian tersebut indikator adalah tercukupinya kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi : Pangan, kesehatan, pendidikan, Pekerjaan, perumahan. Air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau acaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

5.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera melalui Misi yang dijabarkan lebih lanjut sebagai arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021 yang bertitik tolak pada *Money Follow Program Priority* dengan pendekatan Holistik, Integrated and Sustainable, Priority dan Kearifan Lokal sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing;
2. Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama diperdesaan;
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat;
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;

Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja.

| No | Pokok Visi | Misi |
|----|------------|---|
| 1. | Unggul : | Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan |
| | | Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah |
| 2. | Sejahtera: | Meningkatkan upaya Penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro Rakyat |
| | | Meningkatkan posisi kabupaten tana toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul |
| | | Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan diperdesaan dan harmonisasi hubungan inter dan antar umat beragama |

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui proses dalam jangka waktu 1- 5 tahun. RPJMD disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sinergitas RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, juga didasarkan isu-isu yang berkembang dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan dan program dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan memiliki manfaat yang luas. Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, maka setiap sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dan target capaian per tahun selama 5 (lima) tahun.

Misi 1 :

Meningkatkan Posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Berdaya Saing

Tujuan :

Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatkan mutu pendidik, manajemen dan tenaga pendidik;
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta pembinaan dan pendampingan masuk perguruan tinggi;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik;
4. Meningkatkan pengembangan penjaminan mutu dan sekolah model/unggulan di setiap jenjang pendidikan;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah;
6. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bidang pendidikan dan beasiswa prestasi;
7. Meningkatkan pelayanan terpadu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan reward, prestasi dan beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga pendidik dan daya tarik sekolah khususnya di daerah/wilayah terpencil;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Tujuan :

Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah dan swasta;
2. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis serta bidan desa khususnya di daerah/wilayah terpencil dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan status pelayanan kesehatan puskesmas menjadi rawat inap dan rumah sakit pratama;
4. Meningkatkan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran;
5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, kesiagaan layanan intervensi kesehatan dan kerjasama/kemitraan bidang kesehatan;
7. Meningkatkan ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk di Kota Makassar secara gratis;
8. Meningkatkan insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis dipuskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga medis, paramedis dan bidan desa dan dokter puskesmas khususnya di daerah/wilayah terpencil;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Misi 2 :

Percepatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Lembaga dan Kelembagaan Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kerjasama dan Kemitraan terutama di Perdesaan

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan dan Kelembagaan Perdesaan (Lembang/Kelurahan).

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatkan pembinaan peran dan fungsi lembaga adat dan Komunitas adat terpencil (KAT)
2. Meningkatkan pembinaan politik dan sosial politik kemasyarakatan;

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat diperdesaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan diperdesaan;
5. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerjasama/kemitraan antar lembaga;
6. Meningkatnya pendekatan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pendelegasian kewenangan serta ketersediaan dan pelayanan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, Akte nikah dan akte lainnya secara gratis;
7. Meningkatnya pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok dan usaha tani berbasis lingkungan.

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi dan *Good Governance*;
2. Meningkatnya disiplin ASN, standar pelayanan prima dan Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas ASN melalui diklat struktural, fungsional dan teknis;
4. Meningkatnya pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS;
5. Meningkatnya peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK Bupati Tana Toraja;
6. Meningkatnya revolusi mental terutama pada ASN;
7. Meningkatnya regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN;
8. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset;
9. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah;
10. Meningkatnya peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah;
11. Meningkatnya data dan informasi kependudukan;
12. Meningkatnya kualitas layanan informasi berbasis IT.

Tujuan :

Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketentraman dan Kedamaian Masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif;
2. Meningkatnya perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum;
3. Meningkatnya kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama;
5. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian;
6. Meningkatnya pembinaan dan sarana peribadatan;
7. Meningkatnya sosialisasi Peraturan Daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan perundang-undangan lainnya;
8. Meningkatnya kualitas penanganan Hukum dan HAM.

Misi 3 :

Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Peluang Berusaha dan Bekerja serta Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat

Tujuan :

Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama fakir miskin dan PMKS;
2. Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin;

3. Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas;
4. Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin;
5. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis Diakonia, BAAZ/Zakat Fitrah dan Pemerintah Lembang/Kel.;
6. Meningkatnya kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS;
7. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif.
8. Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa;
9. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

Tujuan :

Peluang Berusaha dan Bekerja.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi;
2. Meningkatnya sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan;
3. Meningkatnya fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas;
4. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja;
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja;
6. Meningkatnya peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan.

Tujuan :

Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
2. Meningkatnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dalam mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas;
3. Meningkatnya sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha;
4. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat;

Misi 4 :

Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan dalam Arti Luas, Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan Pendekatan Kawasan

Tujuan :

Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dalam Mendorong Ketahanan Pangan, Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya peran pemetaan pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas;
2. Meningkatnya daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam arti luas;
3. Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dan hortikultura yang berdaya saing dengan pupuk organik;
4. Meningkatnya budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraya, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, umbi-umbian, dll berbasis perdesaan;
5. Meningkatnya budidaya produksi maskisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (*welcome drink*);
6. Meningkatnya populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik berbasis perdesaan;
7. Meningkatnya budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair;

8. Meningkatnya fasilitasi ketersediaan pupuk organik;
9. Meningkatnya pendampingan dan pemberdayaan serta kerjasama penyuluh pertanian dan perkebunan dalam air luas;
10. Meningkatnya produksi pertanian hortikultura, perkebunan dan laboratorium hayati dalam mendukung agrowisata.
11. Meningkatnya data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas;
12. Meningkatnya reboisasi, penghijauan, penanggulangan lahan kritis dan ruang terbuka hijau;
13. Meningkatnya ketersediaan lahan percontohan produksi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis pembiayaan 200 juta Per lembang/kelurahan;
14. Meningkatnya peran kerjasama/kemitraan lembaga keumatan, sosial masyarakat dalam mendorong produktivitas pertanian
15. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi pertanian;

Tujuan :

Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Peran pemetaan potensi sumber daya alam;
2. Meningkatnya potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll;
3. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya;
4. Meningkatnya pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arung jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll;
5. Meningkatnya kerjasama/kemitraan wisata alam dengan gondola /trem (kawasan religi Buntu Burake-Agrowisata Pango Pango-Wisata Para Layang Batusura');

Misi 5 :

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang untuk Mendorong Pelayanan, Pembangunan, Kepariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Berusaha/Investasi dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

Tujuan :

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.

Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya sistem informasi status administrasi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan perdesaan;
2. Meningkatnya status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/wilayah terpencil sepanjang 1.800 Km;
3. Meningkatnya status penanganan jalan propinsi tembusan khususnya Paso'bo – Matangli – Masuppu dan Kondodewata – Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang;
4. Meningkatnya penanganan jalan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata dan dalam destinasi pariwisata;
5. Meningkatnya status penanganan jalan penghubung dalam ibukota kabupaten, kota penyanggah/satelit, ibukota kecamatan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik;
7. Meningkatnya pengendalian, peran dan fungsi Penataan Ruang (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL);
8. Meningkatnya pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman;
9. Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas;
10. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik;
11. Meningkatnya fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraya dan daerah tujuan wisata lainnya;
12. Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah;

13. Meningkatnya penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat;
14. Meningkatnya penataan destinasi pariwisata dengan pendekatan kawasan;
15. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan kerjasama/kemitraan kepariwisataan;
16. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penanganan bencana social, mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat;
17. Meningkatnya revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh;
18. Meningkatnya fungsi dan layanan terminal;
19. Meningkatnya penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja, sarana olahraga, Pengelolaan sampah/TPA, tempat pemakaman umum/Islam, kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau berbasis lingkungan/kampung;
20. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas;
21. Meningkatnya infrastruktur pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern Kota Makale;
22. Meningkatnya status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M;
23. Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur;
24. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Reduce, Reuse and Recycle (3R);
25. Meningkatnya sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, Fisibility Study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
26. Meningkatnya revitalisasi dan pemeliharaan Pemukiman dan Perumahan.

Tabel 5.2
Keterkaitan RPJMN, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMD Kab. Tana Toraja

| RPJMN 2015-2019 | RPJMD SULSEL 2013-2018 | RPJMD KABUPATEN TANA TORAJA 2016-2021 |
|---|---|--|
| VISI | VISI | VISI |
| “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG” | “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” | “MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” |
| MISI | MISI | MISI |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang Religius dan Kerukunan intra dana antar umat beragama. 2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah. 4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. 5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum. 6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa 7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Berdaya Saing 2. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Penguatan Lembaga dan Kelembagaan Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kerjasama dan Kemitraan terutama di Perdesaan 3. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Peluang Berusaha dan Bekerja serta Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat 4. Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan dalam Arti Luas, Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan Pendekatan Kawasan 5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang untuk Mendorong Pelayanan, Pembangunan, Kepariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Berusaha/ Investasi dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah. |

| RPJMN 2015-2019 | RPJMD SULSEL 2013-2018 | RPJMD KABUPATEN TANA TORAJA 2016-2021 |
|---|---|---|
| 9 AGENDA PRIORITAS | TUJUAN | TUJUAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warna Negara. 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan religious masyarakat dan kerukunan intra dan antar umat beragama. 2. Meningkatkan kualitas ke-makmuran ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. 5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur. 8. Meningkatkan daya saing daerah 9. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global. 10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum. 11. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. 12. Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. 13. Memelihara harmoni social dan kesatuan bangsa 14. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. 15. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan 3. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan dan Kelembagaan Perdesaan (Lembang/Kelurahan) 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. 5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketenteraman dan Kedamaian Masyarakat. 6. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan 7. Peluang Berusaha dan Bekerja 8. Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat. 9. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dalam Mendorong Ketahanan Pangan, Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi. 10. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam. 11. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang. |

Tabel 5.3

Keterkaitan : Visi, Misi 1, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| MISI | PENJABARAN VISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
| Misi 1: Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul | Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidikan | 1 Meningkatkan Pelayanan kualitas pendidikan | a. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; b. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta pembinaan dan pendampingan masuk perguruan tinggi; c. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik; d. Meningkatnya pengembangan penjaminan mutu dan sekolah model/unggulan disetiap jenjang pendidikan e. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah; f. Meningkatnya kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa prestasi; g. Meningkatnya pelayanan terpadu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan reward, prestasi dan beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga pendidik dan daya tarik sekolah khususnya di daerah /wilayah terpencil. h. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi Presentase Presentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah Angka siswa melanjutkan ke perguruan tinggi Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah Menciptakan sekolah model dan kerjasama manajemen pendidikan APK SD/MI/SDLB/Paket B Reward study lanjut ke perguruan tinggi terkemuka dan bantuan kepada perguruan tinggi Reward dan insentif guru dan siswa prestasi pendidikan Presentase Gedung sekolah dan perlengkapannya dalam kondisi baik/cukup | 80 100 50 1:250 1:20 74 sekolah 120 30 8.669org 90% |
| | | 2 Meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan | a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta b. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dn para medis serta bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil; c. Meningkatnya status pelayanan kesehatan puskesmas menjadi rawat inap dan Rumah Sakit Pratama d. Meningkatnya dukungan menjadi PNS, Beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran; e. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; f. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, kesiagaan layanan investasi kesehatan dan kerjasama/ kemitraan bidang kesehatan; | <ul style="list-style-type: none"> Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis dan para medis terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil Rasio tenaga Bidan terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil Presentase puskesmas yang dapat melayani rawat inap Jumlah dokter yang melanjutkan Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan Cakupan PHBS Rumah Tangga | 22/100.000 22/100.000 56/100.000 95% 10org 35% 70% |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------|
| | | | g Meningkatnya ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk dikota makassar secara gratis; | • Jumlah Ambulance, kendaraan dokter dan kendaraan operasional puskesmasRSUD serta kereta merta | 80 Unit |
| | | | h Meningkatnya insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis di puskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga medis, paramedis dan bidan desa dan dokter puskesmas khususnya di daerah/wilayah tertentu | • Jumlah penerima insentif bagi tenaga medis dan para medis • Jumlah penerima beasiswa dari wilayah/daerah tertentu | 30 5 |
| | | | i Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan | • Presentase Rumah Sakit, Puskemas, Pustu dan Polindes yang memiliki sarana dan parasaran yang memadai | 85 |

Tabel 5.4

Keterkaitan : Visi, Misi 2, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | |
|--|---|--|---|--|--------|
| MISI | PENJABARAN VISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
| Misi 2: Percepatan Reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kerjasama dan Kemitraan terutama di Perdesaan | Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan sistem pelayanan, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah | 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan perdesaan (Lembang/Kelurahan) | a Meningkatnya pembinaan peran dan fungsi lembaga adat dan komunitas adat terpencil (KAT); | - Jumlah Komunitas adat terpencil | 16 |
| | | | b Meningkatnya pembinaan politik dan sosial politik kemasyarakatan; | - Presentase Lembaga kemasyarakatan yang di bina | 90 |
| | | | c Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat diperdesaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah ; | - Fasilitasi pelaksanaan musyawara pembangunan desa (Musrenbang) | 159 |
| | | | d Meningkatnya sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan di perdesaan | - Jumlah Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) | 60 |
| | | | e Meningkatnya Penguatan kelembagaan pengrusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerjasama/ kemitraan antar lembaga; | - Jumlah kelembagaan pengarusutamaan gender, kelompok wanita tani dan dasa wisma serta lembaga sosial masyarakat | 100 |
| | | | f Meningkatnya pendekatan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pendelegasian kewenangan serta ketersediaan dan pelayanan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, kte nikah dan akte lainnya secara gratis; | - Jumlah Lembang dan Kelurahan yang dapat melayani | 159 |
| | | | g Meningkatnya pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok dan usaha tani berbasis lingkungan | - Jumlah kelompok tani yang berbasis lingkungan | 280 |
| | | 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah | a Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi dan Good Governance; | - Persentase SKPD yang sesuai PP | 100 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | <p>b Meningkatkan disiplin ASN, standar pelayanan prima dan standard Operational Procedure (SOP) pelayanan publik;</p> <p>c Meningkatkan kapasitas ASN melalui diklat struktural, fungsional dan teknis;</p> <p>d Meningkatkan pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS;</p> <p>e Meningkatkan peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK Bupati Tana Toraja</p> <p>f Meningkatkan revolusi mental terutama pada ASN;</p> <p>g Meningkatkan regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN;</p> <p>h Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset</p> <p>i Meningkatkan kapasitas aparatur perencana, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah</p> <p>j Meningkatkan peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>k Meningkatkan data dan informasi kependudukan;</p> <p>l Meningkatkan kualitas layanan informasi berbasis IT</p> | <p>- Presentase Tingkat kedisiplinan ASN</p> <p>- Persentase Pejabat struktural yang sudah mengikuti Latpim</p> <p>- Jumlah pejabat fungsional yang sudah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis</p> <p>- Persentase ASN yang mendapat Tunjangan Kinerja</p> <p>- Persentase tenaga kontrak yang memperoleh SK Bupati Tana Toraja</p> <p>- Presentase tingkat kedisiplinan ASN</p> <p>- Presentase Penegakan hukum dan pemberantasan KKN</p> <p>- Presentase pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah</p> <p>- Presentase aparatur perencana, keuangan dan pengawasan</p> <p>- Presentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>- Presentase kecamatan yang memiliki data dan informasi kependudukan</p> <p>- Presentase layanan informasi berbasis IT yang dimanfaatkan</p> | <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>100</p> <p>75</p> <p>80</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> |
| | | 3 Meningkatkan ketertiban dan keamanan, ketentraman dan kedamaian masyarakat | <p>a Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif ;</p> <p>b Meningkatkan perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum ;</p> <p>c Meningkatkan kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa ;</p> <p>d Meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama ;</p> <p>e Meningkatkan pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian ;</p> <p>f Meningkatkan pembinaan dan sarana peribadatan ;</p> <p>g Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan perundang</p> | <p>- Presentase kasus yang tertangani</p> <p>- Jumlah supremasi hukum, HAM dan pemberantasan KKN</p> <p>- Presentase hubungan harmonisasi antar umat beragama</p> <p>- Jumlah lembaga keagamaan yang dibina</p> <p>- Pemberian insentif kepada gur sekolah minggu dan kelompok pengajian</p> <p>- Persentase rumah ibadah yang menerima bantuan</p> <p>- Kerjasama TP4D, Advokasi dan pendampingan Hukum</p> | <p>100</p> <p>6</p> <p>100</p> <p>5</p> <p>100%</p> <p>75</p> <p>3</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| | | | h Meningkatnya kualitas penanganan Hukum dan HAM; | - Peningkatan supremasi hukum | 6 |
|--|--|--|---|-------------------------------|---|

Tabel 5.5

Keterkaitan : Visi, Misi 3, Tujuan Sasaran Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | |
|---|--|--|---|---|--------------|
| MISI | PENJABARAN VISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
| Misi 3: Meningkatkan Penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat | Peningkatan produktifitas dan produksi perekonomian, peningkatan dan pemetaan pendapatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. | 1 Meningkatnya Penanggulangan kemiskinan | a Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama fakir miskin dan PMKS; | - Persentase penduduk diatas garis kemiskinan | 9 |
| | | | b Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin | - Kerjasama pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) | 60 |
| | | | c Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas; | - Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 8.5 |
| | | | d Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin; | - Jumlah lembaga masyarakat miskin yang ditangani | 50 |
| | | | e Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis Diakonia, BAAZ/Zakat Fitrah dan Pemerintah Lembang/Kel.; | - Jumlah Lembang/Kelurahan yang menerima bantuan sosial | 159 |
| | | | f Meningkatnya kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS; | - Jumlah pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | 8.500org |
| | | | g Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif; | - Penganekaragaman konsumsi pangan | 159 Klp |
| | | | h Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa; | - Presentase penanganan bencana Sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | 5 lokasi |
| | | | i Meningkatnya kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial | - Kerjasama pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | 60 kelompok |
| | | 2 Peluang Berusaha dan Bekerja | a Meningkatnya peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | - Perda yang mendukung iklim usaha dan investasi | 2 Perda |
| | | | b Meningkatnya sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | - Indeks kepuasan masyarakat | 100 % |
| | | | c Meningkatnya fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | - Peningkatan ketersediaan informasi pasar | 159 Lemb/kel |
| | | | d Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | - Rasio tenaga kerja terampil di bandingkan dengan yang tidak terampil | 50:10 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------------|
| | | | e Meningkatkan sarana dan prasarana | - Pengembangan fasilitas BLK dan penitipan anak terlantar | 2 Unit |
| | | | f Meningkatkan peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | - Pengusaha mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja | 5 |
| | | 3 Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; - Meningkatkan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dalam mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas; - Meningkatkan sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha; - Meningkatkan partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat; | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan kelembagaan UMKM Gapoktan dan KUBE - Fasilitasi akses permodalan UMKM - | 100 unit 500 UMKM |

Tabel 5.6

Keterkaitan : Visi, Misi 4, Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| MISI | PENJABARAN VISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
| Misi 4: Revitalisasi Pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan. | Peningkatan akselerasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri, pembangunan pariwisata, pengembangan wira usaha lokal, penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. | 1. Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dalam mendorong Ketahanan pangan, Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi. | a Meningkatkan peran pemerataan pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | Produksi Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi padi - Jumlah produksi jagung - Jumlah produksi kedelai - Jumlah produksi ubi jalar - Jumlah produksi sayur-sayuran Produksi Perkebunan: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi kopi - Jumlah produksi Merica | 154.448,0 8.606,5 499 ton 2.579,5 331,765,2 |
| | | | b Meningkatkan daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | - Presentase hasil produksi pertanian dan perkebunan yang unggul | 85% |
| | | | c Meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dan hortikultura yang berdaya saing dengan pupuk organik; | - Keamanan pangan segar asal tumbuhan tanpa pupuk organik | 250 ha |
| | | | d Meningkatkan budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraya, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, umbi-umbian, dll berbasis perdesaan; | - Luasan budidaya perkebunan | 120 ha |
| | | | e Meningkatkan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (<i>welcome drink</i>); | - Luasan budidaya perkebunan markisa dan tamarillo | 10 ha |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | <p>f Meningkatkan populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik berbasis perdesaan</p> <p>g Meningkatkan budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair;</p> <p>h Meningkatkan fasilitasi ketersediaan pupuk organik;</p> <p>i Meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan serta kerjasama penyuluh pertanian dan perkebunan dalam air luas</p> <p>j Meningkatkan produksi pertanian hortikultura, perkebunan dan laboratorium hayati dalam mendukung agrowisata;</p> <p>k Meningkatkan data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas;</p> <p>l Meningkatkan reboisasi, penghijauan, penanggulangan lahan kritis dan ruang terbuka hijau;</p> <p>m Meningkatkan ketersediaan lahan percontohan produksi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis pembiayaan 200 juta Per lembang/kelurahan;</p> <p>n Meningkatkan peran kerjasama/kemitraan lembaga keumatan, sosial masyarakat dalam mendorong produktivitas pertanian;</p> <p>o Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian;</p> | <p>Jumlah populasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Babi - Kambing <p>- Penebaran bibit ikan pada perairan umum (sungai dan embung)</p> <p>- Persentase kelompok yang menerima pupuk organik</p> <p>- Jumlah kelompok tani yang di bina</p> <p>- Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura di kawasan agrowisata</p> <p>-</p> <p>- Luas areal terbuka hijau dan lahan kritis</p> <p>- Luasan hektar lahan percontohan</p> <p>- Penguatan kelembagaan petani</p> <p>- Pengadaan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>- Pengadaan sarana produksi pertanian</p> | <p>60 klp 30 klp</p> <p>70.000 ekor</p> <p>75%</p> <p>280 klp</p> <p>10 ha</p> <p>8 ha</p> <p>159 L/K</p> <p>280 klp 744 unit</p> <p>744 Unit</p> |
| | | 2. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam | <p>a Meningkatkan Peran pemerataan potensi sumber daya alam</p> <p>b Meningkatkan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll;</p> <p>c Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya;</p> | <p>- Jumlah desa yang terakses air bersih</p> <p>- Jumlah desa yang terakses listrik</p> <p>- Jumlah pertambangan yang memperoleh ijin</p> | <p>100 %</p> <p>112 desa</p> <p>5</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------|
| | | | d Meningkatkan pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arung jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll; | - Kawasan destinasi pariwisata | 12 lokasi |
| | | | e Meningkatnya kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola /trem (kawasan religi Buntu Burake-Agrowisata Pango Pango-Wisata Para Layang Batusura') | - Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan | 12 lembaga |

Tabel 5.7

Keterkaitan : Visi, Misi 5, Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------|
| MISI | PENJABARAN VISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
| Misi 5: Percepatan pembangunan infrastruktur dan Tata Ruang untuk mendorong Pelayanan, pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. | Peningkatan pembangunan Infrastruktur perhubungan darat, udara, sarana dan prasarana serta pengembangan pariwisata | Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang, | a Meningkatkan sistem informasi status administrasi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan perdesaan ; | - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 1500 |
| | | | b Meningkatnya status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 Km; | - Panjang jalan Penghubung kabupaten, Kecamatan, Lembang/Kelurahan dalam kondisi baik | 1800 |
| | | | c Meningkatnya status penanganan jalan propinsi tembusan khususnya Paso'bo – Matangli – Masuppu dan Kondodewata – Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang ; | - Panjang jalan propinsi dalam kondisi baik | 100 km |
| | | | d Meningkatnya penanganan jalan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata dan dalam destinasi pariwisata; | - Panjang jalan ke destinasi pariwisata | 100 km 50 km |
| | | | e Meningkatnya status penanganan jalan penghubung dalam ibukota kabupaten, kota penyanggah/satelit, ibukota kecamatan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | - Panjang jalan penghubung kota satelit | |
| | | | f Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik ; | - Persentase sarana dan prasarana aparatur pendidikan, kesehatan dan layanan public | |
| | | | g Meningkatnya pengendalian, peran dan fungsi Penataan Ruang (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); | Revisi (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); | 4 dokumen |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------|
| | | | h | Meningkatnya pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman | - Perencanaan RTBL | 1 dokumen |
| | | | i | Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas; | - Persentase kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang terpenuhi | 75% |
| | | | j | Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik; | - Persentase terbangunnya bandar udara yang bertaraf internasional | 100% |
| | | | k | Meningkatnya fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraja dan daerah tujuan wisata lainnya; | - Jumlah daerah tujuan wisata | |
| | | | l | Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah; | - Persentase wilayah Kab.Tana Toraja yang dijangkau layanan informasi dan informatika | 80% |
| | | | m | Meningkatnya penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat; | - Penelusuran situs-situs budaya adat istiadat, legenda/ceritera rakyat | 20 paket |
| | | | n | Meningkatnya penataan destinasi pariwisata dengan pendekatan kawasan; | - Pengembangan kawasan destinasi pariwisata | 12 lokasi |
| | | | o | Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan kerjasama/kemitraan kepariwisataan | - Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan | 12 lembaga |
| | | | p | Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penanganan bencana social, mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; | - Persentase penanganan bencana | 100 |
| | | | q | Meningkatnya revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | - Revitalisasi kawasan kumuh dan permukiman | 6 kawasan |
| | | | r | Meningkatnya fungsi dan layanan terminal; | - Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun dan di revitalisasi | 3 unit |
| | | | s | Meningkatnya penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja, sarana olahraga, Pengelolaan sampah/TPA, tempat pemakaman umum/Islam, kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau berbasis lingkungan/kampung | - Presentase kegiatan Pemuda dan Olah raga, Persentase pengelolaan sampah/TPA dan tempat pemakaman | 75% 65% |
| | | | t | Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas; | - Persentase pelayanan transportasi darat | 80% |
| | | | u | Meningkatnya infrastruktur pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern Kota Makale ; | - Jumlah pasar hewan | 2 Unit |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--------------|
| | | | v | Meningkatnya status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M ; | - Panjang jembatan dalam kondisi baik | 500 m |
| | | | w | Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur | - Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi | 10.810 ha |
| | | | x | Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Reduce, Reuse and Recycle (3R) | - Cakupan pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan hidup, R3 berbasis lembang/kelurahan | 19 kecamatan |
| | | | y | Meningkatnya sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, Fisibility Study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat; | - Sistem informasi penataan ruang | 1 paket |
| | | | z | Meningkatnya revitalisasi dan pemeliharaan Pemukiman dan Perumahan | - Peningkatan pengembangan perumahan | 3 paket |



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan pelaku usaha. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah dan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfungsi mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2021

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|------|------|------|------|------|--|
| MISI 1 : Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan | a. Meningkatnya mutu pendidik, manajemen dan tenaga pendidik | - Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan | Pengembangan kapasitas SDM dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan | | | | | | | |
| | b. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta pembinaan dan pendampingan masuk perguruan tinggi | - Perluasan pelayanan penyandang disabilitas, anak jalanan/ terlantar dan kerawanan penyakit sosial | Pelayanan penyandang disabilitas, anak jalanan/ terlantar dan kerawanan penyakit sosial | | | | | | | |
| | | | Mengedukasi pencapaian angka partisipasi kasar kebutaaksaraan | | | | | | | |
| | c. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik | - Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah termasuk proses belajar mengajar | | | | | | | |
| | d. Meningkatnya pengembangan penjaminan mutu dan sekolah model/ unggulan disetiap jenjang pendidikan | - Pengembangan sekolah model / unggulan pada semua jenjang | Pengembangan sekolah model / unggulan SD/MI, SMP/MTs minimal didukung oleh 3 (tiga) SD/MI, dan SMU/ SMK/MA maksimal didukung 4 (empat) SMP/MTs | | | | | | | |
| | e. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | - Peningkatan pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | Pengembangan peluang kerjasama manajemen pendidikan dan beasiswa prestasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan | | | | | | | |
| | f. Meningkatnya kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa prestasi; | - Peningkatan prestasi pendidikan reward, beasiswa dan stimulan masuk perguruan tinggi yang berskala nasional | Pengembangan reward/ prestasi pendidikan, beasiswa dan stimulan masuk perguruan tinggi nasional berakreditasi A | | | | | | | |
| | g. Meningkatnya pelayanan terpadu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan reward pendidikan, prestasi dan beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga pendidik khususnya di daerah/ wilayah terpencil | - Peningkatan pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dan struktur pelayanan pendidikan | Pengembangan pola pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dan struktur pelayanan pendidikan | | | | | | | |
| | | - Peningkatan pelayanan penelusuran bakat dan minat anak usia dini, sekolah minggu dan kelompok pengajian anak | Penelusuran bakat dan minat anak usia dini, sekolah minggu dan kelompok pengajian anak | | | | | | | |
| | | - Peningkatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan lokal | Pengembangan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan lokal | | | | | | | |
| | h. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan | - Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan | Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis jumlah murid dan populasi penduduk | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|---|--|---|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatkan Pelayanan dan kualitas kesehatan | a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah dan swasta; | - Peningkatan keterjangkauan akses layanan kesehatan | Peningkatan pelayanan kesehatan dan manajemen Rumah Sakit Umum dan Swasta serta Puskesmas | | | | | | |
| | b. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis serta bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil dengan pendekatan kearifan lokal | - Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis serta bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil dengan pendekatan kearifan lokal | Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di daerah terpencil | | | | | | |
| | c. Meningkatkan status pelayanan kesehatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan rumah sakit pratama; | - Perluasan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap | Pemerataan distribusi tenaga medis dan para medis/bidan desa serta peningkatan status administrasi kesehatan dari puskesmas menjadi puskesmas rawat inap/ RS. Pratama | | | | | | |
| | | | Pengembangan kualitas pelayanan bagi ibu hamil, bayi, ibu melahirkan dan anak serta pendampingan Air Susu Ibu (ASI) | | | | | | |
| | d. Meningkatkan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | - Peningkatan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | Mendorong potensi sumber daya manusia berbasis kearifan lokal bidang kedokteran menjadi PNS dan beasiswa pendidikan dan keahlian kedokteran | | | | | | |
| | e. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; | - Dukungan anggaran pengadaan obat dan alat-alat kesehatan | Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; | | | | | | |
| | | | Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) | | | | | | |
| | f. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesiagaan layanan intervensi kesehatan dan kerjasama/ kemitraan bidang kesehatan | - Peningkatan kerja sama pelayanan dan intervensi kesehatan | Pengembangan pola kerjasama/ kemitraan pelayanan dan intervensi kesehatan | | | | | | |
| | | | Pengembangan sistem kesehatan berbasis Informasi Teknologi dan Politeknik kesehatan serta ketersediaan obat herbal berbasis kearifan lokal | | | | | | |
| | g. Meningkatkan ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk di Kota Makassar secara gratis; | - Peningkatan mobilitas pelayanan kesehatan dan kereta merta | Pengembangan mobilitas pelayanan kesehatan dan kereta merta | | | | | | |
| | h. Meningkatkan insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis dipuskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada paramedis dan bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil | - Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan para medis/bidan desa serta apoteker termasuk domisili, khususnya di daerah/wilayah terpencil | Pengembangan insentif tenaga kesehatan dan para medis/bidan desa serta apoteker termasuk domisili, khususnya di daerah/wilayah terpencil | | | | | | |
| | i. Meningkatkan Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan; | - Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan berbasis populasi penduduk dan keterjangkauan pelayanan | Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan berbasis populasi penduduk dan keterjangkauan pelayanan | | | | | | |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|------|------|------|------|------|
| MISI 2 : Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan, kerjasama/ kemitraan terutama diperdesaan | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan perdesaan (lembang/ kelurahan) | a. Meningkatkan pembinaan peran dan fungsi lembaga adat dan komunitas adat terpencil (KAT) | - Peningkatan pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Hak Ulayat | | | | | | |
| | b. Meningkatkan pembinaan politik dan sosial politik kemasyarakatan | - Peningkatan pembinaan parpol dan politik masyarakat | Pembinaan parpol dan politik masyarakat | | | | | | |
| | c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat di perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah | - Peningkatan stimulan keswadayaan masyarakat prestasi desa dan lembaga sosial masyarakat dalam mengakses pembangunan daerah | Penguatan kelembagaan keuangan mikro, koperasi dan UMKM, usaha kelompok/tani, KUBE, BUMdes, koperasi serba usaha (KSU), usaha pemuda dan perempuan, tempt pelayanan kegiatan usaha (TPKU) terutama di Perdesaan | | | | | | |
| | | | Pengembangan sistem pelayanan dan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan, lembang/ kel;urahan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | | | | | | |
| | d. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan diperdesaan | - Memperkuat kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, usaha lembaga keumatan dan kerjasama lembaga pemberdayaan lainnya | Penguatan peran kelembagaan keswadayaan masyarakat, usaha lembaga keumatan, kemitraan dan kerjasama lembaga, pemuda, perempuan, PKK, pramuka, karang taruna dan perlindungan anak | | | | | | |
| | | | Pengembangan muatan dan ide dasar pelaksanaan Lovely Desember | | | | | | |
| | | | Penguatan lembaga dibidang pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pemerintahan desa | | | | | | |
| | e. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerjasama/kemitraan antar lembaga | - Perluasan pembinaan lembaga keagamaan, lembaga kesetaraan gender, lembaga perlindungan anak, lembaga kepemudaan dan sosial kemasyarakatan 200 juta per lembang/kelurahan | Pembinaan lembaga keagamaan, lembaga kesetaraan gender, lembaga perlindungan anak, lembaga kepemudaan dan sosial kemasyarakatan 200 juta per lembang/kelurahan | | | | | | |
| | f. Meningkatkan pendekatan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pendelegasian kewenangan serta ketersediaan dan pelayanan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte nikah dan akte lainnya secara gratis | - Peningkatan pelayanan gratis pelayanan identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan | Pelayanan gratis pelayanan identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|--|---|--|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | g. Meningkatkan pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok dan usaha tani berbasis lingkungan | - Pembentukan dan Penguatan kelompok usaha pertanian dan gapoktan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbadan hukum berbasis lingkungan | Penguatan kelompok usaha pertanian dan gapoktan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbadan hukum berbasis lingkungan | | | | | | |
| | | | Penguatan kelembagaan kerajinan, pertenunan, anyaman, handy craft dan lainnya di Lembang Tonglo dan Simbuang | | | | | | |
| Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah | a. Meningkatkan disiplin ASN, standar pelayanan prima dan Standar Operational Procedure (SOP) pelayanan publik | - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif | | | | | | |
| | b. Meningkatkan kapasitas ASN melalui diklat struktural, fungsional dan teknis | - Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi aparatur sipil negara | Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara | | | | | | |
| | c. Meningkatkan pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS | - Peningkatan kesejahteraan aparatur atas prestasi kinerja dan beban kinerja | Pengembangan kesejahteraan aparatur atas prestasi kinerja dan beban kinerja | | | | | | |
| | d. Meningkatkan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | - Peningkatan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | Mendorong potensi sumber daya manusia berbasis kearifan lokal bidang kedokteran menjadi PNS dan beasiswa pendidikan dan keahlian kedokteran | | | | | | |
| | e. Meningkatkan peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK. Bupati Tana Toraja | - Peningkatan legitimasi tenaga kontrak | Mendorong kompetensi K2 dan perubahan status menjadi PNS | | | | | | |
| | f. Meningkatkan revolusi mental terutama pada ASN | - Peningkatan revolusi mental terutama pada ASN | Revolusi mental terutama pada ASN | | | | | | |
| | g. Meningkatkan regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN | Peningkatan regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum & pemberantasan KKN | Regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN | | | | | | |
| | h. Meningkatkan sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | Peningkatan sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | Pengembangan sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | | | | | | |
| | i. Meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah | Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah | Peningkatan kapasitas aparat perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk aparat kecamatan dan kelurahan/lembang | | | | | | |
| | j. Meningkatkan peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah | Peningkatan peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah | Peningkatan pengembangan sistem perencanaan, data dan informasi keuangan, pengawasan dan pembangunan daerah | | | | | | |
| | k. Meningkatkan data dan informasi kependudukan | - Peningkatan pendataan dan informasi kependudukan yang akurat | Pelayanan gratis identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan dan lainnya | | | | | | |
| | | | Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana (KB) | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | I Meningkatkan kualitas layanan informasi berbasis IT | Peningkatan kapasitas SDM aparat pengelola layanan informasi berbasis IT | Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efesiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT | | | | | | |
| Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketentraman dan Kedamaian masyarakat Pemberdayaan Ekonomi yang partisipasi dan pro rakyat | a. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif | - Pengendalian kondisi keamanan dan kedamaian masyarakat | Terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat | | | | | | |
| | b. Meningkatnya perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum; | - Peningkatan layanan keamanan dan kedamaian serta kepastian hukum. | Pelayanan keamanan dan kedamaian serta kepastian hukum. | | | | | | |
| | c. Meningkatnya kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa; | - Peningkatan kerukunan dan toleransi beragama, harmonisasi inter dan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah dan syariah | Kerukunan dan toleransi beragama, harmonisasi inter dan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah dan syariah | | | | | | |
| | d. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama; | - Peningkatan dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keumatan, antar daerah, lembaga diaspora, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya | Pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keumatan, antar daerah, lembaga diaspora, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya | | | | | | |
| | e. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian; | - Peningkatan pembinaan spritual bagi kelompok sekolah minggu dan pegajian anak | Pembinaan spritual bagi kelompok sekolah minggu dan pegajian anak | | | | | | |
| | f. Meningkatnya pembinaan dan sarana peribadatan; | - Peningkatan pembinaan sarana peribadatan | Pembinaan sarana peribadatan | | | | | | |
| | g. Meningkatnya sosialisasi Peraturan Daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan perundang-undangan lainnya | - Peningkatan penegakan Perda / regulasi kebijakan daerah | Meningkatkan regulasi kebijakan daerah | | | | | | |
| | h. Meningkatnya jumlah dan kualitas penanganan Hukum dan HAM | - Peningkatan akses layanan bantuan / perlindungan hukum dan HAM. | Pelayanan bantuan / perlindungan hukum dan HAM. | | | | | | |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|--|
| MISI 3 : Meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro Rakyat | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Meningkatnya Penanggulungan kemiskinan | a. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama fakir miskin dan PMKS | - Peningkatan penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial kemasyarakatan | Penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial kemasyarakatan | | | | | | | |
| | b. Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin; | - Peningkatan bantuan permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin | Peningkatan bantuan permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin | | | | | | | |
| | c. Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas | - Peningkatan pendidikan, kemampuan / keterampilan masyarakat miskin | Pemberdayaan masyarakat miskin | | | | | | | |
| | d. Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | - Peningkatan pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | Pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | | | | | | | |
| | e. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | - Dukungan pemerintah dalam ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | Peningkatan ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | | | | | | | |
| | f. Meningkatnya kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | - Peningkatan kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | Pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | | | | | | | |
| | g. Meningkatnya sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | - Peningkatan sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | Sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | | | | | | | |
| | h. Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | - Peningkatan penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | | | | | | | |
| | i. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | - Peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | Pengembangan kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | | | | | | | |
| Peluang Berusaha dan Bekerja | a. Meningkatnya peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | - Peningkatan peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | Pengembangan peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | | | | | | | |
| | b. Meningkatnya sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | - Peningkatan sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | Pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|--|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | c. Meningkatnya fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | - Dukungan fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | Peningkatan fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | | | | | | |
| | d. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | - Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | Pengembangan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | | | | | | |
| | e. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | - Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | Pembangunan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | | | | | | |
| | f. Meningkatnya peran dan fungsi kerjasama/ kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | - Peningkatan peran dan fungsi kerjasama/ kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | Pengembangan peran dan fungsi kerjasama/ kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | | | | | | |
| Pemberdayaan Ekonomi yang partisipasi dan pro rakyat | a. Meningkatnya pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | - Peningkatan pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | Pengembangan pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | | | | | | |
| | b. Meningkatnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | - Peningkatan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | | | | | | |
| | c. Meningkatnya sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | - Peningkatan sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | Pengembangan sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | | | | | | |
| | d. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | - Dukungan partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | Peningkatan partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | | | | | | |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|--|
| MISI 4 : Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing produksi | a. Meningkatnya peran pemetaan pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | - Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan pemetaan kesesuaian potensi lahan | Pemetaan dan Pengembangan potensi lahan | | | | | | | |
| | b. Meningkatnya daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | - Peningkatan kualitas, daya saing dan peluang pasar hasil produksi pertanian | Pengembangan pola pertumbuhan ekonomi pemasaran, nilai tambah dan produktivitas yang berdaya saing | | | | | | | |
| | c. Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dan hortikultura yang berdaya saing dengan pupuk organik; | - Membangun pola tanam semusim dan tumpang sari terutama penyediaan hand tractor | Pengembangan pola tanam semusim dan tumpang sari terutama penyediaan hand tractor | | | | | | | |
| | | - Perluasan pengembangan pencetakan sawah baru | Pengembangan pencetakan sawah baru | | | | | | | |
| | d. Meningkatnya budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraja, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, umbi-umbian, dll berbasis perdesaan | - Peningkatan pengembangan tanaman unggulan padi lokal, kopi, cacao, markisa, tamarillo, manggis, marica, vanili, jagung, umbi-umbian dan tanaman hortikultura lainnya berbasis luasan lahan dan perdesaan | Pengembangan tanaman unggulan padi lokal, kopi, cacao, markisa, tamarillo, manggis, marica, vanili, jagung, umbi-umbian dan tanaman hortikultura lainnya berbasis luasan lahan dan perdesaan | | | | | | | |
| | e. Meningkatnya budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Dayang Toraja (welcome drink) | - Peningkatan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Dayang Toraja (welcome drink) | Pengembangan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Dayang Toraja (welcome drink) | | | | | | | |
| | f. Meningkatnya populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik berbasis perdesaan | - Peningkatan budidaya perikanan/peternakan benih ikan mas, lele, gabus, babi, kambing, sapi, ayam dan kerbau belang | Pengembangan pola budidaya perikanan/peternakan benih ikan mas, lele, gabus, babi, kambing, sapi, ayam dan kerbau belang | | | | | | | |
| | g. Meningkatnya budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair | - Pengembangan budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair; | Peningkatan produksi benih ikan mas (karappe), ikan gabus, ikan nila dan ikan lele dengan pemanfaatan sebaran lahan berair | | | | | | | |
| | h. Meningkatnya ketersediaan pupuk organik; | - Peningkatan ketersediaan pupuk organik; | Ketersediaan pupuk organik; | | | | | | | |
| | i. Meningkatnya pendampingan dan pemberdayaan serta kerjasama penyuluh pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | - Peningkatan kapasitas dan keterampilan serta insentif bagi tenaga penyuluh lapangan pertanian | Pengembangan kapasitas dan keterampilan serta insentif bagi tenaga penyuluh lapangan pertanian | | | | | | | |
| | j. Meningkatnya produksi pertanian hortikultura, perkebunan dan laboratorium hayati dalam mendukung agrowisata. | - Peningkatan pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura di kawasan Agrowisata | Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura di kawasan Agrowisata | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | k Meningkatkan Jumlah data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | - Membangun pusat data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | Pelayanan data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | | | | | | |
| | l Meningkatkan reboisasi, penghijauan, penanggulangan lahan kritis dan ruang terbuka hijau; | - Peningkatan penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur dan ruang terbuka hijau | Penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur dan ruang terbuka hijau | | | | | | |
| | | | Desentralisasi penanganan persampahan, kebersihan lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau | | | | | | |
| | m Meningkatkan ketersediaan lahan percontohan produksi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis pembiayaan 200 juta per lembang/kelurahan | - Peningkatan ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | Intensifikasi dan diversifikasi serta sarana produksi perkebunan/ pertanian dalam arti luas | | | | | | |
| | n Meningkatkan peran kerjasama/ kemitraan lembaga keumatan, sosial masyarakat dalam mendorong produktivitas pertanian | - Peningkatan ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | Ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | | | | | | |
| Pengembangan potensi sumber daya alam | o Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana produksi | - Dukungan anggaran pengadaan sarana produksi pertanian dalam arti luas dan jalan tani | Pembangunan sarana dan prasarana produksi | | | | | | |
| | a. Meningkatkan peran pemetaan potensi sumber daya alam | - Peningkatan peran pemetaan potensi sumber daya alam | Pengembangan peran pemetaan potensi sumber daya alam | | | | | | |
| | b. Meningkatkan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | - Peningkatan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | Pengembangan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | | | | | | |
| | c. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya | - Peningkatan pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya | Pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya | | | | | | |
| | d. Meningkatkan pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | - Peningkatan pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | Pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | | | | | | |
| | e. Meningkatkan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu- Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | - Peningkatan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu- Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | Pengembangan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu- Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | | | | | | |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|--|
| MISI 5 : Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang | a. Meningkatkan sistem informasi status administrasi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan perdesaan | - Peningkatan status jalan dan jembatan, jalan nasional dan provinsi | Pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan status jalan nasional, provinsi, Kabupaten dan jalan desa (L/K) | | | | | | | |
| | b. Meningkatkan status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 km | - Peningkatan status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 km | Pengembangan sistem jaringan jalan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang didorong dengan pengadaan excavator dan bulldozer | | | | | | | |
| | c. Meningkatkan status penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | - Peningkatan status penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | Penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | | | | | | | |
| | d. Meningkatkan penanganan jalan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata dan dalam destinasi pariwisata; | - Peningkatan jalan dan jembatan jalan penghubung ke dan dalam kawasan destinasi pariwisata | Pengembangan jaringan jalan akses kepariwisataan, pertumbuhan wilayah, sentra produksi dan perdagangan | | | | | | | |
| | e. Meningkatkan status penanganan jalan penghubung dalam ibukota kabupaten, kota penyanggah/ satelit, ibukota kecamatan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | - Peningkatan anggaran penanganan jalan dan jembatan penghubung ke sentra produksi pertanian/ perkebunan, pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | Penanganan jalan dan jembatan penghubung ke sentra produksi pertanian/ perkebunan, pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | | | | | | | |
| | f. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana pemerintahan dan sarana umum | Pengembangan penyediaan fasilitas sarana pemerintahan, pemuda dan olahraga, sarana umum dan sosial | | | | | | | |
| | g. Meningkatkan pengendalian peran dan fungsi penataan ruang (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); | - Peningkatan pemanfaatan peran dan fungsi tata ruang wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); | Pengendalian peran dan fungsi tata ruang wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); | | | | | | | |
| | h. Meningkatkan pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | - Peningkatan pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | Pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | | | | | | | |
| | i. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas | - Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat dan udara | Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat dan udara | | | | | | | |
| | j. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik; | - Peningkatan dukungan pembiayaan pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik | Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik | | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|--------|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | k. Meningkatkan fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraya dan daerah tujuan wisata lainnya; | - Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata | Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata | | | | | | |
| | l. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah | - Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi kesemua wilayah | Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi kesemua wilayah | | | | | | |
| | m. Meningkatkan penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | - Peningkatan penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | Meningkatkan penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | | | | | | |
| | n. Meningkatkan penataan destinasi pariwisata dengan pendekatan kawasan | - Peningkatan penataan kawasan destinasi pariwisata, cagar budaya, wisata religi, agrowisata, air terjun, air panas, arung jeram dan wisata alam lainnya | Penataan kawasan destinasi pariwisata, cagar budaya, wisata religi, agrowisata, air terjun, air panas, arung jeram dan wisata alam lainnya | | | | | | |
| | | - Peningkatan revitalisasi kawasan pariwisata | Revitalisasi kawasan pariwisata | | | | | | |
| | o. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata | - Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan sosialisasi taman bahasa inggris | Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan sosialisasi taman bahasa inggris | | | | | | |
| | | | Pengembangan kepariwisataan dengan pendekatan minat khusus antara lain gandola, paralayang dan lainnya | | | | | | |
| | p. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; | - Peningkatan kemampuan dan keterampilan mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; | Pengembangan kemampuan dan penanganan bencana sosial, mitigasi, penanggulangan bencana alam, serta tanggap darurat; | | | | | | |
| | q. Meningkatkan revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | - Peningkatan revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | Revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | | | | | | |
| | | - Revitalisasi jaringan air baku, air bersih dan sanitasi lingkungan | Pengembangan jaringan air baku, air bersih dan sanitasi lingkungan | | | | | | |
| | r. Meningkatkan fungsi dan layanan terminal; | - Peningkatan fungsi dan layanan terminal; | Pengembangan fungsi dan layanan terminal; | | | | | | |
| | s. Meningkatkan penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja, sarana olahraga, Pengelolaan sampah/TPA, tempat pemakaman umum/ islam, kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau berbasis lingkungan/ kampung | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana keterampilan tenaga kerja | Penyediaan fasilitas sarana keterampilan tenaga kerja | | | | | | |
| | | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana olahraga | Penyediaan fasilitas sarana olahraga | | | | | | |
| | | - Peningkatan penyediaan fasilitas tempat Pengelolaan sampah, pemakaman umum/ islam | Pengembangan tempat Pengelolaan sampah/ TPA dan pemakaman umum/ islam | | | | | | |
| | | - Peningkatan penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau | Penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau | | | | | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | TAHUN | | | | | |
|--------|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | t Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | | | | | | |
| | u Meningkatkan jumlah pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern kota Makale; | - Peningkatan infrastruktur pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan | Peningkatan pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan | | | | | | |
| | v Meningkatkan status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | - Peningkatan status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | Penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | | | | | | |
| | w Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur; | - Peningkatan pemeliharaan infrastruktur; | Pemeliharaan infrastruktur; | | | | | | |
| | | - Peningkatan revitalisasi kawasan pariwisata | Revitalisasi kawasan pariwisata | | | | | | |
| | x Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi (TPA) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Reduce, Reuse dan Recycle (3R); | - Meningkatkan dukungan anggaran sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi TPA dan pembangunan IPAL dan IPLT dan 3R | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi TPA dan pembangunan IPAL dan IPLT dan 3R | | | | | | |
| | y Meningkatkan sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | - Peningkatan sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | Pengembangan sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | | | | | | |
| | z Meningkatkan revitalisasi dan permukiman dan perumahan | - Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman dan perumahan | Pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan | | | | | | |



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi dalam pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang dirumuskan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Rumusan kebijakan umum yang ada menghasilkan berbagai program yang efektif untuk mencapai sasaran, sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan merupakan pernyataan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja selama periode Tahun 2016-2021.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program kerjasama/kemitraan manajemen pendidikan, reward dan beasiswa prestasi
- Program pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas/divabel, anak terlantar dan kerawanan penyakit sosial.
- Program pendidikan non formal dan kebuta aksaraan
- Program manajemen pelayanan pendidikan
- Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- Program pengembangan sekolah unggulan/model SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
- Program pengembangan reward dan insentif pendidikan khususnya di daerah/wilayah terpencil
- Program pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan pendidikan tinggi di Kabupaten Tana Toraja dan program Polres Polwan mengajar
- Program pengembangan pendidikan tinggi politeknik kesehatan dan politeknik umum
- Program pemberian penghargaan dan beasiswa bagi siswa yang masuk perguruan tinggi Negeri berakreditasi A
- Program pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan
- Program penelusuran bakat dan minat anak
- Program penataan kurikulum local dan peningkatan minat baca masyarakat
- Program peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat
- Program peningkatan pelayanan dan manajemen rumah sakit dan puskesmas
- Program peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, apoteker, para medis/bidan desa
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan
- Program penyediaan sarana pelayanan kesehatan dan kereta merta
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- Program peningkatan status puskesmas
- Program obat dan pembekalan kesehatan
- Program Keluarga Berencana
- Program pemberian insentif tenaga kesehatan khususnya di daerah/wilayah terpencil
- Program pendekatan pelayanan kesehatan berbasis Informasi dan Teknologi, *SMS Centre*

2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama di perdesaan.

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- Program percepatan reformasi birokrasi dan remunerasi ASN
- Program peningkatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- Program peningkatan keamanan dan ketertiban yang kondusif
- Program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Program peningkatan kualitas dan kompetensi aparat
- Program pendampingan kerjasama/kemitraan Pengamanan, Pengawasan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- Program penyesuaian kompetensi dan legitimasi status tenaga kontrak
- Program peningkatan dan pendelegasian kewenangan kecamatan
- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Program penguatan kelembagaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- Program pembinaan lembaga adat dan KAT (Komunitas Adat Terpencil)
- Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
- Program peningkatan tertib pengembangan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
- Program peningkatan dan pengelolaan retribusi daerah
- Program Pembinaan Peran Politik Masyarakat
- Program pemberdayaan masyarakat dan lembaga social masyarakat
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan, lembaga pengarusutamaan gender dan anak, serta lembaga kepemudaan dan social kemasyarakatan
- Program pelayanan gratis administrasi kependudukan
- Program penguatan kelompok usaha pertanian, gapoktan dan UMKM berbasis lingkungan
- Program Pemberdayaan kelompok kerajinan rakyat
- Program pelayanan data dan informasi kepada masyarakat
- Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

- Program pengembangan sistim perencanaan pembangunan daerah
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah lembang/kelurahan
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan dan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pembinaan dan pengembangan kerukunan organisasi inter dan antar umat beragama
- Program kemitraan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan
- Program pembinaan keagamaan anak
- Program peningkatan dan pembinaan sarana peribadatan
- Program peningkatan regulasi kebijakan daerah
- Program peningkatan advokasi, perlindungan hukum dan HAM

3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusahadan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- Program penanggulangan kemiskinan
- Program pemberdayaan masyarakat miskin
- Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejashteraan sosial (PMKS) lainnya
- Program penanggulangan bencana
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan lembaga ekonomi perdesaan
- Program pemberdayaan kelompok usaha dan kesenian
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Program peluang berusaha dan investasi
- Program fasilitasi dan informasi peluang pasar
- Program pembangunan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja
- Program pengembangan kerjasama/ kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan

4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumberdaya alam dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- Program peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan pupuk organik
- Program peningkatan daya saing hasil produksi pertanian/perkebunan
- Program pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dalam arti luas
- Program pengembangan percontohan produksi pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan
- Program pengembangan percontohan tanaman padi unggulan lokal pendekatan kawasan
- Program budidaya perikanan dan pengembangan populasi ternak (daging berkualitas)
- Program peningkatan produksi perikanan dan optimalisasi pemanfaatan lahan berair
- Program pemberdayaan dan kemitraan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- Program optimalisasi pemanfaatan lahan tidur dan lahan kritis
- Program peningkatan kerjasama/kemitraan kelembagaan agama, sosial kemasyarakatan, tenaga ahli/ profesional dan lembaga pendidikan termasuk SMK Pertanian Pala'- pala', KODIM dan POLRES Tana Toraja bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan

5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- Program pengembangan sistem penanganan jalan dan jembatan
- Program pembangunan kawasan destinasi pariwisata dan wisata alam
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan, sentra produksi dan pertumbuhan wilayah
- Program peningkatan fasilitas sarana pemerintahan dan umum
- Program perencanaan tata ruang dan kawasan
- Program pemetaan dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan areal pemakaman
- Program peningkatan fasilitas keselamatan transportasi
- Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Program pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata
- Program pengembangan informasi dan komunikasi
- Program pelestarian dan penelusuran nilai budaya dan situs-situs budaya
- Program pengembangan kerjasama/kemitraan pariwisata
- Program peningkatan kesiagaan mitigasi, penanggulangan bencana alam dan tanggap darurat

- Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
- Program peningkatan pelayanan angkutan
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program peningkatan penyediaan fasilitas sarana olahraga
- Program pengelolaan areal sarana umum
- Program peningkatan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
- Program peningkatan pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan
- Program peningkatan penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan telekomunikasi
- Program pemeliharaan dan penanganan darurat
- Program pengembangan pengelolaan air baku, air bersih dan air limbah
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program perencanaan pengembangan wilayah
- Program pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arung jeram dan wisata alam lainnya
- Program pembangunan kawasan destinasi pariwisata
- Program pengembangan kerjasama/kemitraan pariwisata
- Program pembangunan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 m
- Program pemeliharaan infrastruktur
- Program revitalisasi permukiman dan perumahan

Tabel. 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 -2021

| VISI : | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|---|--|--|
| Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | |
| MISI 1 : | | | | | | | |
| Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan | a. Meningkatnya mutu pendidik, manajemen dan tenaga kependidikan | Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi | 34,64% | 80% | - Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan | Pengembangan kapasitas SDM dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | Presentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 | 90,73% | 100% | | | |
| | b. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta pembinaan dan pendampingan masuk perguruan tinggi | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah | 1;278 | 1;250 | - Perluasan pelayanan penyandang disabilitas, anak jalanan/ terlantar dan kerawanan penyakit sosial | Pelayanan penyandang disabilitas, anak jalanan/terlantar dan kerawanan penyakit sosial | Program Pelayanan penyandang disabilitas, anak jalanan/terlantar dan kerawanan penyakit sosial |
| | | Angka siswa melanjutkan ke perguruan tinggi | 40% | 50% | | Mengedukasi pencapaian angka partisipasi kasar kebutaaksaraan | Program pendidikan non formal dan kebutaaksaraan |
| | c. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik | Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar | 1;23 | 1;20 | - Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah termasuk proses belajar mengajar | Program manajemen pelayanan pendidikan |
| | | Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah | 1;28 | 1;24 | | | |
| | d. Meningkatnya pengembangan penjaminan mutu dan sekolah model/ unggulan disetiap jenjang pendidikan | Menciptakan sekolah model dan kerjasama manajemen pendidikan | 1 | 74 | - Pengembangan sekolah model / unggulan pada semua jenjang | Pengembangan sekolah model / unggulan SD/MI, SMP/ MTs minimal didukung oleh 3 (tiga) SD/MI,dan SMU/SMK/MA maksimal didukung 4 (empat) SMP/MTs | Program Pengembangan sekolah model / unggulan SD/ MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA |
| | | | sekolah | sekolah | | | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|---|---|----------------|-------------|---|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan | e. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | APK SD/MI/SDLB/ Paket A | 117% | 120% | - Peningkatan pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah | Pengembangan peluang kerjasama manajemen pendidikan dan beasiswa prestasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan | Program Kerjasama/ kemitraan manajemen pendidikan, reward dan beasiswa prestasi |
| | f. Meningkatnya kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa prestasi; | Reward studi lanjut ke perguruan tinggi terkemuka & Bantuan kepada Perguruan Tinggi | 20 orang | 30 orang | - Peningkatan prestasi pendidikan reward, beasiswa dan stimulan masuk perguruan tinggi yang berskala nasional | Pengembangan reward/ prestasi pendidikan, beasiswa dan stimulan masuk perguruan tinggi nasional berakreditasi A | Program pemberian penghargaan dan beasiswa bagi siswa yang masuk perguruan tinggi negeri berakreditasi A |
| | g. Meningkatnya pelayanan terpadu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan reward pendidikan, prestasi dan beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga pendidik khususnya di daerah/wilayah terpencil | Reward dan insentif guru dan siswa prestasi pendidikan | 344 orang | 8.669 orang | - Peningkatan pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dan struktur pelayanan pendidikan | Pengembangan pola pelayanan administrasi bagi tenaga pendidik dan struktur pelayanan pendidikan | Program pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan |
| | | | | | - Peningkatan pelayanan penelusuran bakat dan minat anak usia dini, sekolah minggu dan kelompok pengajian anak | Penelusuran bakat dan minat anak usia dini, sekolah minggu dan kelompok pengajian anak | Program pengembangan pendidikan tinggi politeknik kesehatan dan politeknik umum |
| | | | | | - Peningkatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan lokal | Pengembangan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan lokal | Program penataan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan lokal |
| | h. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan | Presentase Gedung sekolah dan perlengkapannya dalam kondisi baik/ cukup | 75,00% | 90% | - Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan | Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis jumlah murid dan populasi penduduk | Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan |
| Meningkatkan Pelayanan dan kualitas kesehatan | a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah dan swasta; | Rasio dokter per satuan penduduk | 17/ 100.000 | 22/ 100.000 | - Peningkatan keterjangkauan akses layanan kesehatan | Peningkatan pelayanan kesehatan dan manajemen Rumah Sakit Umum dan Swasta serta Puskesmas | Program peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat |
| | b. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis serta bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil dengan pendekatan kearifan lokal | Rasio tenaga medis dan para medis terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil | 17/ 100.000 | 22/ 100.000 | - Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis serta bidan desa khususnya di daerah/ wilayah terpencil dengan pendekatan kearifan lokal | Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di daerah terpencil | Program standarisasi pelayanan kesehatan |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|--|--|-------------------|----------------|---|---|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | | Rasio tenaga bidan terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil | 56/ 100.000 | 60/ 100.000 | | | |
| | c. Meningkatnya status pelayanan kesehatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap dan rumah sakit pratama; | Presentase puskesmas yang dapat melayani rawat inap | - | 95% | - Perluasan sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap | Pemerataan distribusi tenaga medis dan para medis/bidan desa serta peningkatan status administrasi kesehatan dari puskesmas menjadi puskesmas rawat inap/ RS. Pratama | Program peningkatan pelayanan dan manajemen rumah sakit dan puskesmas |
| | | | | | | | Program peningkatan status puskesmas |
| | | | | | | Pengembangan kualitas pelayanan bagi ibu hamil, bayi, ibu melahirkan dan anak serta pendampingan Air Susu Ibu (ASI) | Program perbaikan gizi masyarakat |
| | d. Meningkatnya dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | Jumlah dokter yang melanjutkan studi spesialis | 2 orang | 10 orang | - Peningkatan dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran | Mendorong potensi sumber daya manusia berbasis kearifan lokal bidang kedokteran menjadi PNS dan beasiswa pendidikan dan keahlian kedokteran | Program peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, apoteker, para medis/ bidan desa |
| | e. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; | Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan | 30% | 35% | - Dukungan anggaran pengadaan obat dan alat-alat kesehatan | Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan; | Program obat dan pembekalan kesehatan |
| | | | | | | Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) | Program Keluarga Berencana |
| | f. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan kesiagaan layanan intervensi kesehatan dan kerjasama/ kemitraan bidang kesehatan | Cakupan PHBS Rumah Tangga | 60% | 70% | - Peningkatan kerja sama pelayanan dan intervensi kesehatan | Pengembangan pola kerjasama/ kemitraan pelayanan dan intervensi kesehatan | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan |
| | | | | | | Pengembangan sistem kesehatan berbasis Informasi Teknologi dan Politeknik kesehatan serta ketersediaan obat herbal berbasis kearifan lokal | Program pendekatan pelayanan kesehatan berbasis informasi dan teknologi, sms centre |
| | g. Meningkatnya ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk di Kota Makassar secara gratis; | Jumlah ambulance, kendaraan dokter dan kendaraan operasional puskesmas, RSUD & Kerta merta | - | 80 buah | - Peningkatan mobilitas pelayanan kesehatan dan kereta merta | Pengembangan mobilitas pelayanan kesehatan dan kereta merta | Program penyediaan sarana pelayanan kesehatan dan kereta merta |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|---|--|----------------|----------|---|--|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | h. Meningkatnya insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis dipuskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada paramedis dan bidan desa khususnya di daerah/wilayah terpencil | Jumlah penerima insentif bagi tenaga medis dan para medis | - | 30 orang | - Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan para medis/ bidan desa serta apoteker termasuk domisili, khususnya di daerah/wilayah terpencil | Pengembangan insentif tenaga kesehatan dan para medis/bidan desa serta apoteker termasuk domisili, khususnya di daerah/wilayah terpencil | Program pemberian insentif tenaga kesehatan khususnya di daerah/wilayah terpencil |
| | | Jumlah penerima beasiswa dari wilayah/ daerah tertentu | | 5 orang | | | |
| | i. Meningkatnya Jumlah Sarana dan prasarana kesehatan; | Presentase Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu & Polindes yang memiliki sarana & prasarana memadai | 50% | 85% | - Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan berbasis populasi penduduk dan keterjangkauan pelayanan | Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan berbasis populasi penduduk dan keterjangkauan pelayanan | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan |

| VISI : | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------|--|--|---|
| Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | |
| MISI 2 : | | | | | | | |
| Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan, kerjasama/ kemitraan terutama diperdesaan | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan perdesaan (lembang/ kelurahan) | a. Meningkatnya pembinaan peran dan fungsi lembaga adat dan komunitas adat terpencil (KAT) | Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 2 lembaga | 16 lembaga | - Peningkatan pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta Hak Ulayat | Program Pembinaan lembaga adat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) |
| | b. Meningkatnya pembinaan politik dan sosial politik kemasyarakatan | Presentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina | - | 90% | - Peningkatan pembinaan parpol dan politik masyarakat | Pembinaan parpol dan politik masyarakat | Program Pembinaan peran politik masyarakat |
| | | | | | | Pengembangan penguatan dan pemberdayaan berbasis lingkungan perdesaan/ Kel yang partisipatif dan pro rakyat | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah lembang/ kelurahan |
| | | | | | | Pengarusutamaan gender dalam mendorong penguatan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, PMKS, ekonomi, kebijakan dan politik | Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| | c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat di perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah | Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Musrembang) | 159 L/K | 159 L/K | - Peningkatan stimulan keswadayaan masyarakat prestasi desa dan lembaga sosial masyarakat dalam mengakses pembangunan daerah | Penguatan kelembagaan keuangan mikro, koperasi dan UMKM, usaha kelompok/ tani, KUBE, BUMdes, koperasi serba usaha (KSU), usaha pemuda dan perempuan, tempt pelayanan kegiatan usaha (TPKU) terutama di Perdesaan | Program penguatan kelompok usaha pertanian, gapoktan dan UMKM berbasis lingkungan |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|--|--|-------------------|-------------|---|---|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | | | | | | Pengembangan sistem pelayanan dan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan, lembang/kelurahan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat | Program peningkatan dan pendelegasian kewenangan kecamatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah lembang/kelurahan |
| | d. Meningkatnya sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan diperdesaan | Jumlah badan Permusyawaratan Lebang (BPL) | - | 60 Buah | - Memperkuat kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, usaha lembaga keumatan dan kerjasama lembaga pemberdayaan lainnya | Penguatan peran kelembagaan keswadayaan masyarakat, usaha lembaga keumatan, kemitraan dan kerjasama lembaga, pemuda, perempuan, PKK, pramuka, karang taruna dan perlindungan anak | Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan, lembaga pengarusutamaan gender dan anak, serta lembaga kepemudaan dan sosial kemasyarakatan Program penguatan kelembagaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan |
| | | | | | | Pengembangan muatan dan ide dasar pelaksanaan Lovely Desember | Program pengembangan pariwisata |
| | | | | | | Penguatan lembaga dibidang pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan pemerintahan desa | Program pendampingan kerjasama/kemitraan pengamanan, pengawalan, pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) |
| | e. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerjasama/kemitraan antar lembaga | Jumlah kelembagaan pengarusutamaan gender, kelompok wanita tani dan dasa wisma serta lembaga sosial masyarakat | - | 100 lembaga | - Perluasan pembinaan lembaga keagamaan, lembaga kesetaraan gender, lembaga perlindungan anak, lembaga kepemudaan dan sosial kemasyarakatan 200 juta per lemb./kel. | Pembinaan lembaga keagamaan, lembaga kesetaraan gender, lembaga perlindungan anak, lembaga kepemudaan dan sosial kemasyarakatan 200 juta per lembang/kelurahan | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak |
| | f. Meningkatnya pendekatan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pendelegasian kewenangan serta ketersediaan dan pelayanan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte nikah dan akte lainnya secara gratis | Jumlah lembang dan kelurahan yang dapat dilayani | 159 L/K | 159 L/K | - Peningkatan pelayanan gratis pelayanan identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan | Pelayanan gratis pelayanan identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan | Program penataan administrasi kependudukan |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|--|--|----------------|----------|--|--|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | g. Meningkatnya pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok dan usaha tani berbasis lingkungan | Jumlah kelompok tani yang berbasis lingkungan | - | 280 kel | - Pembentukan dan Penguatan kelompok usaha pertanian dan gapoktan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbadan hukum berbasis lingkungan | Penguatan kelompok usaha pertanian dan gapoktan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbadan hukum berbasis lingkungan | Program penguatan kelompok usaha pertanian, gapoktan dan UMKM berbasis lingkungan |
| | | | | | | Penguatan kelembagaan kerajinan, pertununan, anyaman, handy craft dan lainnya di Lembang Tonglo dan Simbuang | Program pemberdayaan kelompok kerajinan rakyat |
| Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah | a. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi dan good governance | Persentase SKPD yang sesuai PP | 100% | 100% | - Percepatan reformasi birokrasi dan good governance | Sosialisasi revolusi mental aparatur sipil negara dan masyarakat | Program percepatan birokrasi dan remunerasi ASN |
| | b. Meningkatnya disiplin ASN, standar pelayanan prima dan Standar Operational Procedure (SOP) pelayanan publik | Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN | 50% | 100% | - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif | Program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |
| | c. Meningkatnya kapasitas ASN melalui diklat struktural, fungsional dan teknis | Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Latpim | 50% | 100% | - Peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi aparatur sipil negara | Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara | Program kualitas dan kompetensi aparat |
| | | Jumlah pejabat fungsional yang sudah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis | - | 30 orang | | | |
| | d. Meningkatnya pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS | Persentase ASN yang mendapat tunjangan kinerja | - | 100% | - Peningkatan kesejahteraan aparatur atas prestasi kinerja dan beban kinerja | Pengembangan kesejahteraan aparatur atas prestasi kinerja dan beban kinerja | Program peningkatan kualitas dan kompetensi aparat |
| | e. Meningkatnya peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK. Bupati Tana Toraja | Persentase tenaga kontrak yang memperoleh SK. Bupati | - | 100% | - Peningkatan legitimasi tenaga kontrak | Mendorong kompetensi K2 dan perubahan status menjadi PNS | Program penyesuaian kompetensi dan legitimasi status tenaga kontrak |
| | f. Meningkatnya revolusi mental terutama pada ASN | Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN | 50% | 75% | - Peningkatan revolusi mental terutama pada ASN | Revolusi mental terutama pada ASN | Program peningkatan kualitas dan kompetensi aparat |
| | g. Meningkatnya regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN | Persentase penegakan hukum dan pemberantasan KKN | - | 80% | Peningkatan regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN | Regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN | Program peningkatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|--|--|----------------|--------|--|--|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | h. Meningkatnya sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | Persentase pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah | - | 100% | Peningkatan sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | Pengembangan sistim pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset | Program peningkatan tertib pengembangan, pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| | i. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah | Presentase aparatur perencana, keuangan dan pengawasan | - | 90% | Peningkatan kapasitas aparatur perencana, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah | Peningkatan kapasitas aparat perencana, pengawasan, pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk aparat kecamatan dan kelurahan/lembang | Program pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur |
| | j. Meningkatnya peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah | Presentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan pembangunan daerah | - | 100% | Peningkatan peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah | Peningkatan pengembangan sistem perencanaan, data dan informasi keuangan, pengawasan dan pembangunan daerah | Program pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah |
| | k. Meningkatnya data dan informasi kependudukan | Presentase kecamatan yang memiliki data dan informasi kependudukan | 100% | 100% | - Peningkatan pendataan dan informasi kependudukan yang akurat | Pelayanan gratis identitas pribadi dan identitas keluarga serta kemudahan perizinan dan lainnya | Program pelayanan data dan informasi kepada masyarakat |
| | | | | | | Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana (KB) | Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi |
| | l. Meningkatnya kualitas layanan informasi berbasis IT | Presentase layanan informasi berbasis IT yang dimanfaatkan | 30% | 100% | Peningkatan kapasitas SDM aparat pengelola layanan informasi berbasis IT | Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efesiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT | Program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur |
| Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan, Ketentraman dan Kedamaian masyarakat | a. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif | Presentase kasus yang tertangani | 100% | 100% | - Pengendalian kondisi keamanan dan kedamaian masyarakat | Terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan |
| | b. Meningkatnya perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum; | Jumlah supremasi hukum, HAM dan pemberantasan KKN | - | 6 buah | - Peningkatan layanan keamanan dan kedamaian serta kepastian hukum. | Pelayanan keamanan dan kedamaian serta kepastian hukum. | Program pemeliharaan dan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |
| | c. Meningkatnya kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa; | Persentase hubungan harmonisasi antar umat beragama | - | 100% | - Peningkatan kerukunan dan toleransi beragama, harmonisasi inter dan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah dan syariah | Kerukunan dan toleransi beragama, harmonisasi inter dan antar umat beragama dalam menjalankan ibadah dan syariah | Program pembinaan dan pengembangan kerukunan organisasi inter dan antar umat beragama |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|--|--|----------------|-----------|--|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | d. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama; | Jumlah lembaga keagamaan yang dibina | - | 5 lembaga | - Peningkatan dan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keumatan, antar daerah, lembaga diaspora, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya | Pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keumatan, antar daerah, lembaga diaspora, lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya | Program kemitraan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan |
| | e. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian; | Pemberian insentif kepada guru sekolah minggu & kel. Pengajian | - | 100% | - Peningkatan pembinaan spritual bagi kelompok sekolah minggu dan pegajian anak | Pembinaan spritual bagi kelompok sekolah minggu dan pegajian anak | Program pembinaan keagamaan anak |
| | f. Meningkatnya pembinaan dan sarana peribadatan; | Persentase rumah ibadah yang menerima bantuan | - | 75% | - Peningkatan pembinaan sarana peribadatan | Pembinaan sarana peribadatan | Program peningkatan dan pembinaan sarana peribadatan |
| | g. Meningkatnya sosialisasi Peraturan Daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan perundang-undangan lainnya | Kerjasama TP4D, Advokasi dan pendampingan hukum | - | 3 | - Peningkatan penegakan Perda / regulasi kebijakan daerah | Meningkatkan regulasi kebijakan daerah | Program peningkatan regulasi kebijakan daerah |
| | h. Meningkatnya jumlah dan kualitas penanganan Hukum dan HAM | Peningkatan supremasi hukum | - | 6 | - Peningkatan akses layanan bantuan / perlindungan hukum dan HAM. | Pelayanan bantuan / perlindungan hukum dan HAM. | Program peningkatan advokasi, perlindungan hukum dan HAM |

VISI :
Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera

MISI 3:
Meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro Rakyat

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|---|---|----------------|-------------|--|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatnya Penanggulangan kemiskinan | a. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama fakir miskin dan PMKS | Persentase penduduk di atas garis kemiskinan | 13,7% | 9% | - Peningkatan penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial kemasyarakatan | Penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial kemasyarakatan | Program penanggulangan kemiskinan |
| | b. Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin; | Kerjasama pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) | - | 60 Kube | - Peningkatan bantuan permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin | Peningkatan bantuan permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin | Program pemberdayaan masyarakat miskin |
| | c. Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas | Jumlah Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | 6.700 orang | 8.500 orang | - Peningkatan pendidikan, kemampuan / keterampilan masyarakat miskin | Pemberdayaan masyarakat miskin | Program pemberdayaan masyarakat miskin |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|---|---|-------------------|-------------|---|---|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | c. Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas | Jumlah Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | 6.700 orang | 8.500 orang | - Peningkatan pendidikan, kemampuan / keterampilan masyarakat miskin | Pemberdayaan masyarakat miskin | Program pemberdayaan masyarakat miskin |
| | d. Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | Jumlah lembaga masyarakat miskin yang ditangani | - | 50 lembaga | - Peningkatan pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | Pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin | Program pemberdayaan masyarakat miskin |
| | e. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | Jumlah Lembang/ Kelurahan yang menerima bantuan sosial | 159 L/K | 159 L/K | - Dukungan pemerintah dalam ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | Peningkatan ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis diakonia, BAAZ/ Zakat Fitra dan Pemerintah Lembang/ Kelurahan | Program pemberdayaan kelompok usaha dan kesenian |
| | f. Meningkatnya kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | Jumlah Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya | 6.700 orang | 8.500 orang | - Peningkatan kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | Pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS | Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya |
| | g. Meningkatnya sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | Penganekaragaman konsumsi pangan | - | 159 L/K | - Peningkatan sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | Sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| | h. Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | Presentase penanganan bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | 5 lokasi | 5 lokasi | - Peningkatan penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa | Program penanggulangan bencana |
| | i. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | Kerjasama pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) | - | 60 Klp | - Peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | Pengembangan kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesenjangan sosial | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan lembaga ekonomi perdesaan |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|---|---|----------------|----------|---|---|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Peluang Berusaha dan Bekerja | a. Meningkatnya peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | Perda yang mendukung iklim usaha dan investasi | - | 2 Perda | - Peningkatan peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | Pengembangan peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi | Program peluang berusaha dan investasi |
| | b. Meningkatnya sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | Indeks kepuasan masyarakat | - | 100% | - Peningkatan sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | Pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan | Program peluang berusaha dan investasi |
| | c. Meningkatnya fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | Peningkatan ketersediaan informasi pasar | - | 159 L/K | - Dukungan fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | Peningkatan fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas | Program fasilitasi dan informasi peluang pasar |
| | d. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan yang tidak terampil | 50;10 | 50;10 | - Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | Pengembangan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja | Program pemberdayaan masyarakat |
| | e. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | Pengembangan fasilitas BLK dan penitipan anak terlarang | - | 2 unit | - Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | Pembangunan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja | Program pembangunan sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja |
| | f. Meningkatnya peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | Pengusaha mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja | 10% | 5% | - Peningkatan peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | Pengembangan peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan | Program Pengembangan kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan |
| Pemberdayaan Ekonomi yang partisipasi dan pro rakyat | a. Meningkatnya pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | | | | - Peningkatan pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | Pengembangan pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| | b. Meningkatnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | Pemberdayaan kelembagaan UMKM, Gapoktan dan KUBE | - | 100 unit | - Peningkatan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dan mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| | c. Meningkatnya sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | Fasilitasi akses permodalan UMKM | - | 50 UMKM | - Peningkatan sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | Pengembangan sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| | d. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | | | | - Dukungan partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | Peningkatan partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------|--|--|--|
| MISI 4: Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing produksi | a. Meningkatnya peran pemetaan pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | Jumlah produksi padi | 142.686 ton | 154.448 ton | - Optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan pemetaan kesesuaian potensi lahan | Pemetaan dan Pengembangan potensi lahan | Program peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan pupuk organik |
| | b. Meningkatnya daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | Jumlah produksi jagung | 4.150,5 ton | 8.606 ton | - Peningkatan kualitas, daya saing dan peluang pasar hasil produksi pertanian | Pengembangan pola pertumbuhan ekonomi pemasaran, nilai tambah dan produktivitas yang berdaya saing | Program peningkatan daya saing hasil produksi pertanian/ perkebunan |
| | | Jumlah produksi kedelai | 276 ton | 499 ton | | | |
| | | Jumlah produksi ubi jalar | 2.383 ton | 2.579,5 ton | | | |
| | | Jumlah produksi sayur | 306.500 ton | 331.765 ton | | | |
| | | Jumlah produksi kopi | 3120 ton | 3450 ton | | | |
| | c. Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dan hortikultura yang berdaya saing dengan pupuk organik; | Jumlah produksi merica | 260 ton | 300 ton | - Membangun pola tanam semusim dan tumpang sari terutama penyediaan hand tractor | Pengembangan pola tanam semusim dan tumpang sari terutama penyediaan hand tractor | Program pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dalam arti luas |
| | | Keamanan pangan segar asal tumbuhan tanpa pupuk organik | - | 250 ha | - Perluasan pengembangan pencetakan sawah baru | Pengembangan pencetakan sawah baru | |
| | d. Meningkatnya budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraya, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, umbi-umbian, dll berbasis perdesaan | Luasan budidaya perkebunan | - | 120 ha | - Peningkatan pengembangan tanaman unggulan padi lokal, kopi, cacao, markisa, tamarillo, manggis, marica, vanili, jagung, umbi-umbian dan tanaman hortikultura lainnya berbasis luasan lahan dan perdesaan | Pengembangan tanaman unggulan padi lokal, kopi, cacao, markisa, tamarillo, manggis, marica, vanili, jagung, umbi-umbian dan tanaman hortikultura lainnya berbasis luasan lahan dan perdesaan | Program Pengembangan percontohan tanaman unggulan padi lokal pendekatan kawasan |
| | e. Meningkatnya budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (welcome drink) | Luasan budidaya perkebunan markisa dan tamarillo | - | 10 ha | - Peningkatan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (welcome drink) | Pengembangan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (welcome drink) | Program Pengembangan budidaya produksi markisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (welcome drink) |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|--|--|----------------|-------------|---|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | f. Meningkatnya populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik berbasis perdesaan | Jumlah populasi ternak babi | - | 60 klp | - Peningkatan budidaya perikanan/ peternakan benih ikan mas, lele, gabus, babi, kambing, sapi, ayam dan kerbau belang | Pengembangan pola budidaya perikanan/ peternakan benih ikan mas, lele, gabus, babi, kambing, sapi, ayam dan kerbau belang | Program peningkatan produksi perikanan dan optimalisasi pemanfaatan sebaran pada lahan berair; |
| | | Jumlah populasi ternak kambing | - | 30 klp | | | |
| | g. Meningkatnya budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair | Penebaran bibit ikan pada perairan umum (sungai dan embung) | - | 70.000 ekor | - Pengembangan budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair; | Peningkatan produksi benih ikan mas (karappe), ikan gabus, ikan nila dan ikan lele dengan pemanfaatan sebaran lahan berair | |
| | h. Meningkatnya ketersediaan pupuk organik; | Persentase kelompok yang menerima pupuk organik | - | 75% | - Peningkatan ketersediaan pupuk organik; | Ketersediaan pupuk organik; | Program Ketersediaan pupuk organik; |
| | i. Meningkatnya pendampingan dan pemberdayaan serta kerjasama penyuluh pertanian dan perkebunan dalam arti luas; | Jumlah kelompok tani yang dibina | - | 280 klp | - Peningkatan kapasitas dan keterampilan serta insentif bagi tenaga penyuluh lapangan pertanian | Pengembangan kapasitas dan keterampilan serta insentif bagi tenaga penyuluh lapangan pertanian | Program pemberdayaan dan kemitraan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan |
| | j. Meningkatnya produksi pertanian holtikultura, perkebunan dan laboratorium hayati dalam mendukung agrowisata. | Pengembangan tanaman perkebunan dan holtikultura di kawasan agrowisata | 2 ha | 10 ha | - Peningkatan pengembangan tanaman perkebunan dan holtikultura di kawasan Agrowisata | Pengembangan tanaman perkebunan dan holtikultura di kawasan Agrowisata | Program Pengembangan tanaman perkebunan dan holtikultura di kawasan Agrowisata |
| | k. Meningkatnya Jumlah data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | | | | - Membangun pusat data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | Pelayanan data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; | Program Pelayanan data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; |
| | l. Meningkatnya reboisasi, penghijauan, penanggulangan lahan kritis dan ruang terbuka hijau; | Luas areal terbuka hijau dan lahan kritis | - | 8 ha | - Peningkatan penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur dan ruang terbuka hijau | Penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur dan ruang terbuka hijau | Program Penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur dan ruang terbuka hijau |
| | | | | | | Desentralisasi penanganan persampahan, kebersihan lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau | Program desentralisasi penanganan persampahan, kebersihan lingkungan, pertamanan dan ruang terbuka hijau |
| | m. Meningkatnya ketersediaan lahan percontohan produksi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis pembiayaan 200 juta per lembang/kelurahan | Luasan hektar lahan percontohan | - | 159 L/K | - Peningkatan ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | Intensifikasi dan diversifikasi serta sarana produksi perkebunan/ pertanian dalam arti luas | Program pengembangan pola intensifikasi dan diversifikasi pertanian dalam arti luas |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------|--|---|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | n Meningkatkan peran kerjasama/ kemitraan lembaga keumatan, sosial masyarakat dalam mendorong produktivitas pertanian | Penguatan kelembagaan petani | - | 280 klp | - Peningkatan ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | Ketersediaan lahan percontohan produksi pertanian dalam arti luas; | Program peningkatan kerjasama/kemitraan kelembagaan agama, sosial kemasyarakatan, tenaga ahli/profesional dan lembaga pendidikan termasuk SMK Pertanian Pala'-Pala', KODIM dan POLRES Tana Toraja bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan |
| | o Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian | Pengadaan sarana dan prasarana pertanian | - | 744 unit | - Dukungan anggaran pengadaan sarana produksi pertanian dalam arti luas dan jalan tani | Pembangunan sarana dan prasarana produksi | Program optimalisasi pemanfaatan lahan tidur dan lahan kritis |
| Pengembangan potensi sumber daya alam | a. Meningkatkan peran pemetaan potensi sumber daya alam | | | | - Peningkatan peran pemetaan potensi sumber daya alam | Pengembangan peran pemetaan potensi sumber daya alam | Program pengembangan peran pemetaan potensi sumber daya alam |
| | b. Meningkatkan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | Jumlah desa yang terakses air bersih | 30% | 100% | - Peningkatan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | Pengembangan potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll | Program pengembangan sumber daya air dan surya sebagai tenaga listrik |
| | | Jumlah desa yang terakses listrik | 112 L/K | 159 L/K | | | |
| | c. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan tambang golongan C dan kandungan mineral lainnya | Jumlah pertambangan yang memperoleh ijin | 5 unit | 5 unit | - Peningkatan pengendalian dan pengelolaan tambang golongan C dan kandungan mineral lainnya | Pengendalian dan pengelolaan tambang golongan C dan kandungan mineral lainnya | Program pengendalian dan pengelolaan tambang |
| | d. Meningkatkan pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | Kawasan destinasi pariwisata | 4 lokasi | 12 lokasi | - Peningkatan pengemb. agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | Pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll | Program pengemb. agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll |
| | e. Meningkatkan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu-Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan | 7 lembaga | 12 lembaga | - Peningkatan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu-Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | Pengembangan kerjasama/ kemitraan wisata alam dengan gondola / trem (kawasan religi Buntu-Agrowisata Pango-pango-Wisata para layang Batusura') | Program pembangunan kawasan destinasi pariwisata dan wisata alam |

| VISI : Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|---------|--|---|--|
| MISI 5: Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah | | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang | a. Meningkatnya sistem informasi status administrasi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan perdesaan | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 1252 km | 1500 km | - Peningkatan status jalan dan jembatan, jalan nasional dan provinsi | Pengembangan sistem informasi jalan dan jembatan status jalan nasional, provinsi, kab. dan jalan desa (L/K) | Program pengembangan sistem penanganan jalan dan jembatan |
| | b. Meningkatnya status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 km | Panjang jalan penghubung kabupaten, kecamatan, lembang/kelurahan dalam kondisi baik | 1200 km | 1800 km | - Peningkatan status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 km | Pengembangan sistem jaringan jalan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang didorong dengan pengadaan excavator dan buldozer | |
| | c. Meningkatnya status penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik | - | 100 km | - Peningkatan status penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | Penanganan jalan provinsi tembusan khususnya Paso'bo - Matangli - Masuppu dan Kondodewata - Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang | |
| | d. Meningkatnya penanganan jalan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata dan dalam destinasi pariwisata; | Panjang jalan ke destinasi pariwisata | - | 100 km | - Peningkatan jalan dan jembatan jalan penghubung ke dan dalam kawasan destinasi pariwisata | Pengembangan jaringan jalan akses kepariwisataan, pertumbuhan wilayah, sentra produksi dan perdagangan | Program pengembangan jaringan jalan akses kepariwisataan. |
| | e. Meningkatnya status penanganan jalan penghubung dalam ibukota kabupaten, kota penyanggah/ satelit, ibukota kecamatan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | Panjang jalan penghubung kota satelit | - | 50 km | - Peningkatan anggaran penanganan jalan dan jembatan penghubung ke sentra produksi pertanian/ perkebunan, pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | Penanganan jalan dan jembatan penghubung ke sentra produksi pertanian/ perkebunan, pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; | Program pembangunan infrastruktur perdesaan, sentra produksi dan pertumbuhan wilayah |
| | f. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik | Persentase sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik | 65% | 75% | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana pemerintahan dan sarana umum | Pengembangan penyediaan fasilitas sarana pemerintahan, pemuda dan olahraga, sarana umum dan sosial | Program peningkatan fasilitas sarana pemerintahan dan umum |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|--|---|-------------------|-----------|--|--|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | g. Meningkatnya pengendalian peran dan fungsi penataan ruang (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); | Revisi (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL) | 3 dok | 4 dok | - Peningkatan pemanfaatan peran dan fungsi tata ruang wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); | Pengendalian peran dan fungsi tata ruang wilayah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); | Program perencanaan tata ruang dan kawasan |
| | h. Meningkatnya pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | Perencanaan RTBL | 7 dok | 23 dok | - Peningkatan pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | Pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman. | Program pemetaan dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan areal pemakaman |
| | i. Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas | Persentase kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang terpenuhi | 50% | 75% | - Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat dan udara | Penyediaan fasilitas keselamatan transportasi darat dan udara | Program peningkatan fasilitas keselamatan transportasi |
| | j. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik; | Persentase terbangunnya bandar udara yang bertaraf internasional | 19,40% | 100% | - Peningkatan dukungan pembiayaan pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik | Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik | Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan |
| | k. Meningkatnya fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraja dan daerah tujuan wisata lainnya; | Jumlah daerah tujuan wisata | 19 kec | 19 kec | - Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata | Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata | Program pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata |
| | l. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah | Persentase wil. Kab. Tana Toraja yang dijangkau layanan informasi dan informatika | 60% | 80% | - Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi kesemua wilayah | Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi kesemua wilayah | Program pengembangan informasi dan komunikasi |
| | m. Meningkatnya penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | Penelusuran situs-situs budaya adat istiadat, legenda/cerita rakyat | 1 paket | 20 paket | - Peningkatan penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | Meningkatkan penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat | Program pelestarian dan penelusuran nilai-nilai budaya dan situs-situs budaya |
| | n. Meningkatnya penataan destinasi pariwisata dengan pendekatan kawasan | Pengembangan kawasan destinasi pariwisata | 4 lokasi | 12 lokasi | - Peningkatan penataan kawasan destinasi pariwisata, cagar budaya, wisata religi, agrowisata, air terjun, air panas, arung jeram dan wisata alam lainnya | Penataan kawasan destinasi pariwisata, cagar budaya, wisata religi, agrowisata, air terjun, air panas, arung jeram dan wisata alam lainnya | Program pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arum jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll |
| | | | | | - Peningkatan revitalisasi kawasan pariwisata | Revitalisasi kawasan pariwisata | Program pembangunan kawasan destinasi pariwisata dan wisata alam |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|---|---|----------------|------------|--|---|---|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | o. Meningkatnya kapasitas pelaku pariwisata | Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan | 7 lembaga | 12 lembaga | - Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan sosialisasi taman bahasa inggris | Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan sosialisasi taman bahasa inggris | Program pengembangan kerjasama/ kemitraan pariwisata |
| | | | | | | Pengembangan kepariwisataan dengan pendekatan minat khusus antara lain gondola, paralayang dan lainnya | Program pengembangan kerjasama/ kemitraan pariwisata |
| | p. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; | Persentase penanganan bencana | 100% | 100% | - Peningkatan kemampuan dan keterampilan mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; | Pengembangan kemampuan dan penanganan bencana sosial, mitigasi, penanggulangan bencana alam, serta tanggap darurat; | Program peningkatan kesiagaan mitigasi, penanggulangan bencana alam dan tanggap darurat |
| | q. Meningkatnya revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | Revitalisasi kawasan kumuh dan permukiman | - | 6 kaw | - Peningkatan revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | Revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; | Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman |
| | | | | | - Revitalisasi jaringan air baku, air bersih dan sanitasi lingkungan | Pengembangan jaringan air baku, air bersih dan sanitasi lingkungan | Program pengembangan pengelolaan air baku, air bersih dan air limbah |
| | | | | | - Penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan telekomunikasi | Peningkatan penyediaan fasilitas ketenagalistrikan dan telekomunikasi | Program peningkatan fasilitas ketenagalistrikan dan telekomunikasi |
| | r. Meningkatnya fungsi dan layanan terminal; | Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun dan direvitalisasi | - | 3 unit | - Peningkatan fungsi dan layanan terminal; | Pengembangan fungsi dan layanan terminal; | Program peningkatan pelayanan angkutan |
| | s. Meningkatnya penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja, sarana olahraga, Pengelolaan sampah/TPA, tempat pemakaman umum/ islam, kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau berbasis lingkungan/ kampung | Presentase kegiatan Pemuda dan Olah raga | 25% | 75% | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana keterampilan tenaga kerja | Penyediaan fasilitas sarana keterampilan tenaga kerja | Program peningkatan penyediaan fasilitas sarana keterampilan tenaga kerja |
| | | Presentase pengelolaan sampah/ TPA dan tempat pemakaman | 30% | 65% | - Peningkatan penyediaan fasilitas sarana olahraga | Penyediaan fasilitas sarana olahraga | Program peningkatan penyediaan fasilitas sarana olahraga |
| | | | | | - Peningkatan penyediaan fasilitas tempat Pengelolaan sampah/ TPA, pemakaman umum/ islam | Pengembangan tempat Pengelolaan sampah/ TPA dan pemakaman umum/ islam | Program Pengembangan tempat Pengelolaan sampah/ TPA dan pemakaman umum/ islam |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--------|---|---|-------------------|-----------|--|--|--|
| | | | 2016 | 2021 | | | |
| | | | | | - Peningkatan penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau | Penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau | Program Penyediaan fasilitas kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau |
| | t Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | Persentase pelayanan transportasi darat | 60% | 80% | - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas | Program Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas |
| | u Meningkatnya jumlah pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern kota Makale; | Jumlah pasar hewan | - | 2 unit | - Peningkatan infrastruktur pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan | Peningkatan pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan | Program peningkatan pasar tradisional, pasar modern dan pasar hewan |
| | v Meningkatnya status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | Panjang jembatan dalam kondisi baik | - | 500 m | - Peningkatan status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | Penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M | Program Pembangunan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M |
| | w Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur; | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi | 2.810 ha | 10.810 ha | - Peningkatan pemeliharaan infrastruktur; | Pemeliharaan infrastruktur; | Program Pemeliharaan infrastruktur; |
| | x Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi (TPA) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Reduce, Reuse dan Recycle (3R); | Cakupan pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan hidup, R3 berbasis lembang/ kelurahan | - | 19 kec | - Meningkatnya dukungan anggaran sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi TPA dan pembangunan IPAL dan IPLT dan 3R | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi TPA dan pembangunan IPAL dan IPLT dan 3R | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan |
| | y Meningkatnya sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | Sistem informasi penataan ruang | - | 1 paket | - Peningkatan sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | Pengembangan sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, fisibility study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. | Program perencanaan pengembangan wilayah |
| | z Meningkatnya revitalisasi dan permukiman dan perumahan | Peningkatan pengembangan perumahan | - | 3 paket | - Peningkatan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman dan perumahan | Pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan | Program revitalisasi dan permukiman dan perumahan |



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM

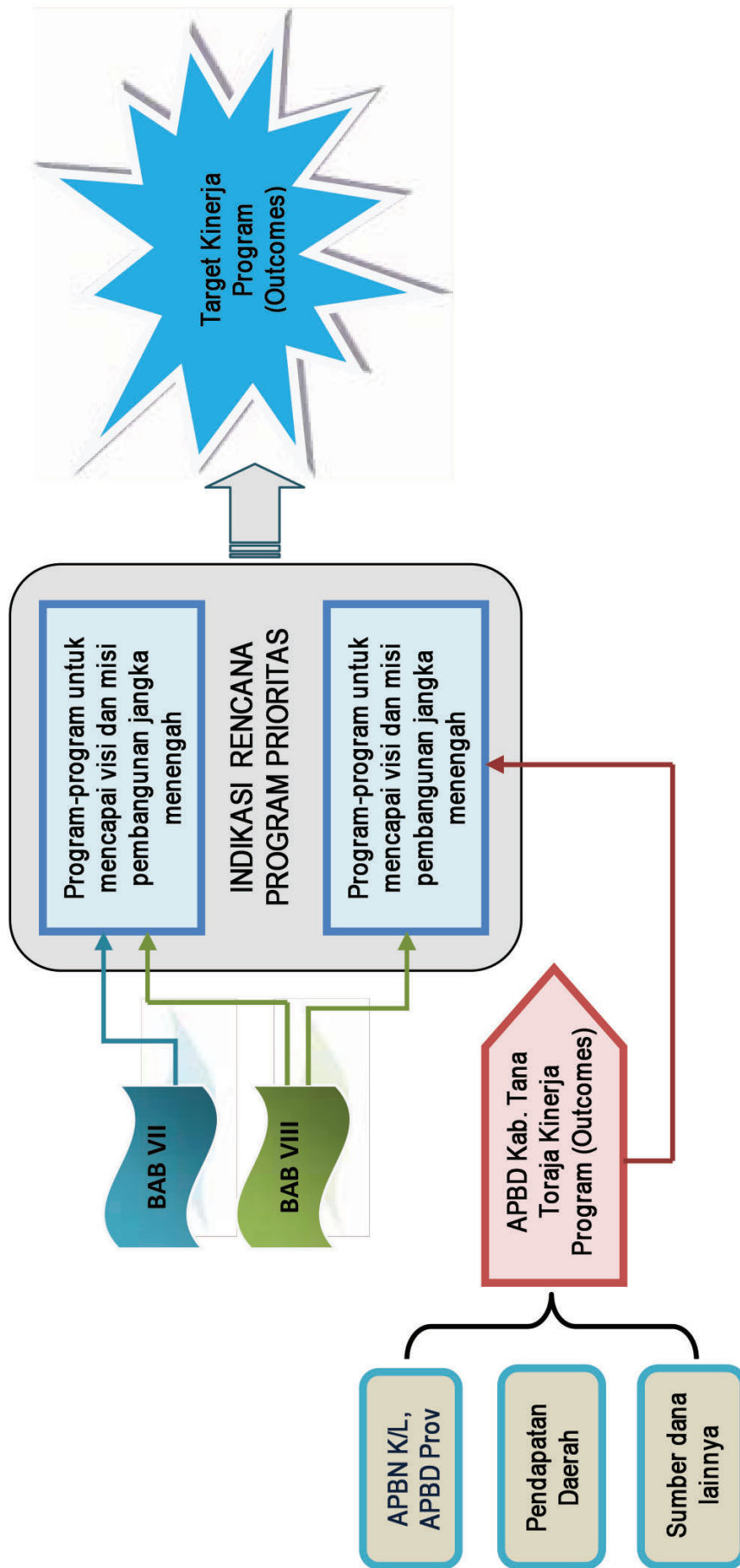
PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif terdiri dari pendapatan dan belanja sebagai pedoman kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcomes) dimasing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja namun juga dari sumber pendanaan APBN dari K/L, APBD Provinsi dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk alur rencana pendanaan prioritas RPJMD dapat dilihat pada gambar 8.1 berikut ini :

Gambar 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD



Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi dan evaluasi terhadap rencana program/kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, sebagai daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah, berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat dan pendanaan indikator dari setiap rancangan Renstra SKPD.

Seluruh rencana program tersebut diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan yang disertai dengan rincian pendanaan tahunan selama rentang waktu lima tahun ke depan. Adapun klasifikasi urusan dituangkan dalam bentuk program prioritas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1
Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

| No | Program Prioritas Visi Misi | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program | Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD | | SKPD Penanggung Jawab | | |
|-----|-----------------------------|--|---------------------------|--|---|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------------|------|--------|
| | | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (8) | (9) | | | | (10) | (11) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Pendidikan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | 35.836.000.000 | 1.014.000.000 | 39.419.600.000 | 1.115.400.000 | 43.361.560.000 | 1.226.940.000 | 1.349.634.000 | 1.484.597.400 | 1.633.057.140 | 52.467.487.600 | 57.714.236.360 | 101.992.648.590 | 7.823.628.540 | | Diknas |
| 1 | 1 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | 951.000.000 | 951.000.000 | 1.046.100.000 | 1.150.710.000 | 1.265.781.000 | 1.392.359.100 | 1.531.595.010 | | | | | | | | Diknas |
| 1 | 1 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Cakupan pelayanan peningkatan disiplin aparatur | 95% | 88.000.000 | 88.000.000 | 96.800.000 | 106.480.000 | 117.128.000 | 128.840.800 | 141.724.880 | | | | | | | | Diknas |
| 1 | 1 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | 188.000.000 | 188.000.000 | 206.800.000 | 227.480.000 | 250.228.000 | 275.250.800 | 302.775.880 | | | | | | | | Diknas |
| 1 | 1 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.400.000 | 16.940.000 | 18.634.000 | 20.497.400 | 22.547.140 | | | | | | | | Diknas |
| 1 | 1 | 15 | | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.Angka Melek Huruf 2. APM - SD -SMP -SMU 3. APK - SD -SMP -SMU/SMK 4. Angka Rata Lama Sekolah 5. Angka Melanjutkan ke SMP 6. Angka Melanjutkan ke SMA | 93,20% | 2.692.000.000 | 2.692.000.000 | 2.961.200.000 | 3.257.320.000 | 3.583.052.000 | 3.941.357.200 | 4.335.492.920 | | | | | | | | Diknas |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|--|--------------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| 1 | 1 | 16 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 1. Rasio guru terhadap murid SD, SMP, SMA 2. Rasio Sekolah terhadap murid SD, SMP, SMA | 1:23 | | 19.636.000.000 | | 21.599.600.000 | | 23.759.560.000 | | 26.135.516.000 | | 28.749.067.600 | | 31.623.974.360 | | 108.018.540 | Diknas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 17 | | Program Pendidikan Menengah | | 1:28 | | 8.491.000.000 | | 9.340.100.000 | | 10.274.110.000 | | 11.301.521.000 | | 12.431.673.100 | | 13.674.840.410 | | 65.513.244.510 | Diknas |
| 1 | 1 | 18 | | Program Pendidikan Non Formal | 1. Angka Melekat Huruf 2. APM - SD - SMP - SMU 3. APK - SD - SMP - SMU/SMK 4. Angka Rata Lama Sekolah 5. Angka Melanjutkan ke SMP 6. Angka Melanjutkan ke SMA | 150 orang | | 116.000.000 | | 127.600.000 | | 140.360.000 | | 154.396.000 | | 169.835.600 | | 186.819.160 | | 108.018.540 | Diknas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 20 | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. Rasio guru terhadap murid SD, SMP, SMA 2. Rasio Sekolah terhadap murid SD, SMP, SMA | 1:23 1:28 | | 229.000.000 | | 251.900.000 | | 277.090.000 | | 304.799.000 | | 335.278.900 | | 368.806.790 | | 108.018.540 | Diknas |
| 1 | 1 | 22 | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | 942.000.000 | | 1.036.200.000 | | 1.139.820.000 | | 1.253.802.000 | | 1.379.182.200 | | 1.517.100.420 | | 7.268.104.620 | Diknas |
| 1 | 1 | 16 | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 332.750.000 | | 366.025.000 | | 402.627.500 | | 1.928.902.500 | Diknas |
| 1 | 1 | 33 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah | | | | 1.100.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.331.000.000 | | 1.464.100.000 | | 1.610.510.000 | | 1.771.561.000 | | 8.487.171.000 | Diknas |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | | | 125.000.000 | | 137.500.000 | | 151.250.000 | | 166.375.000 | | 183.012.500 | | 201.313.750 | | 964.451.250 | Diknas |

| 1 | 2 | 1 | KESEHATAN | | 57.086.999.982 | 62.795.699.978 | 69.075.269.974 | 75.982.796.970 | 83.581.076.666 | 91.939.184.332 | 357.263.605.398 | |
|---|---|----|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Kesehatan | | 1.851.000.000 | 2.036.100.000 | 2.239.710.000 | 2.463.681.000 | 2.710.049.100 | 2.981.054.010 | 14.281.594.110 | Dinas Kesehatan |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | 6.049.000.000 | 7.319.290.000 | 8.051.219.000 | 8.856.340.900 | 9.741.974.990 | 46.671.724.890 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | 57.000.000 | 62.700.000 | 75.867.000 | 83.453.700 | 91.799.070 | 439.789.770 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | 131.000.000 | 144.100.000 | 174.361.000 | 191.797.100 | 210.976.810 | 1.010.744.910 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | 32.000.000 | 35.200.000 | 42.592.000 | 46.851.200 | 51.536.320 | 246.899.520 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pelayanan obat dan makanan yang memenuhi syarat | 95% | 45.000.000 | 49.500.000 | 59.895.000 | 65.884.500 | 72.472.950 | 347.202.450 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase pelayanan kesehatan yang distandarisasi terhadap seluruh pelayanan kesehatan | 25% | 362.000.000 | 398.200.000 | 481.822.000 | 530.004.200 | 583.004.620 | 964.451.250 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase dokumen standar kesehatan yang disusun | | | | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 15 | Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat terhadap kebutuhan obat | 95% | 4.179.000.000 | 4.596.900.000 | 5.562.249.000 | 6.118.473.900 | 6.730.321.290 | 32.243.534.190 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Mengendalikan angka kesakitan sampai di bawah 15% dari jumlah penduduk | 15% | 10.671.000.000 | 11.738.100.000 | 14.203.101.000 | 15.623.411.100 | 17.185.752.210 | 964.451.250 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Persentase tenaga kesehatan yang mendapat jasa pelayanan | | | | | | | | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 29 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita | | 45.000.000 | 49.500.000 | 54.450.000 | 59.895.000 | 65.884.500 | 72.472.950 | 347.202.450 | Dinas Kesehatan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|-----------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 20 | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase kenaikan berat badan anak balita sampai dengan di atas 80% | 43% | | 102.000.000 | | 112.200.000 | | 123.420.000 | | 135.762.000 | | 149.338.200 | | 164.272.020 | | 786.992.220 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 12 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase ODF sampai diatas 60% | 65% | | 484.000.000 | | 532.400.000 | | 585.640.000 | | 644.204.000 | | 708.624.400 | | 779.486.840 | | 3.734.355.240 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 22 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penjarangan kasus penyakit menular sampai diatas 80% | 25% | | 369.000.000 | | 405.900.000 | | 446.490.000 | | 491.139.000 | | 540.252.900 | | 594.278.190 | | 2.847.060.090 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 25 | | Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM, Pustu dan Jaringannya | Rasio poskesdes/ pustu terhadap jumlah penduduk | 131319444 | | 15.846.000.000 | | 17.430.600.000 | | 19.173.660.000 | | 21.091.026.000 | | 23.200.128.600 | | 25.520.141.460 | | 122.261.556.060 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 15 | | Program Pengembangan Obat asli Indonesia | Angka harapan hidup | 74 | | 42.000.000 | | 46.200.000 | | 50.820.000 | | 55.902.000 | | 61.492.200 | | 67.641.420 | | 324.055.620 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 19 | | Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Persentase PHBS rumah tangga | 11,37 | | 805.000.000 | | 885.500.000 | | 974.050.000 | | 1.071.455.000 | | 1.178.600.500 | | 1.296.460.550 | | 6.211.066.050 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 17 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Penurunan angka kesakitan usia lanjut (< 20%) | 45% | | 129.000.000 | | 141.900.000 | | 156.090.000 | | 171.699.000 | | 188.868.900 | | 207.755.790 | | 995.313.690 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 28 | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas) dengan pelayanan JKN standar | 18 | | 10.338.000.000 | | 11.371.800.000 | | 12.508.980.000 | | 13.759.878.000 | | 15.135.865.800 | | 16.649.452.380 | | 79.763.976.180 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 19 | | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase sanitasi TTU,TPM yang direkomendasikan memenuhi syarat | 75% | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 32.210.200 | | 154.312.200 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 20 | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana RSUD | | | 5.000.000.000 | | 5.500.000.000 | | 6.050.000.000 | | 6.655.000.000 | | 7.320.500.000 | | 8.052.550.000 | | 38.578.050.000 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 33 | | Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur. | Tersedianya tenaga medis | 50 orang | | 232.000.000 | | 255.200.000 | | 280.720.000 | | 308.792.000 | | 339.671.200 | | 373.638.320 | | 1.790.021.520 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 32 | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | - | | 72.000.000 | | 79.200.000 | | 87.120.000 | | 95.832.000 | | 105.415.200 | | 115.956.720 | | 555.523.920 | Rumah Sakit Umum Daerah |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|---------------|---|--|-----|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 34 | | Program Kesehatan Khusus | | | | 101.000.000 | | 111.100.000 | | 122.210.000 | | 134.431.000 | | 147.874.100 | | 162.661.510 | | 779.276.610 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | | | 125.000.000 | | 137.500.000 | | 151.250.000 | | 166.375.000 | | 183.012.500 | | 201.313.750 | | 964.451.250 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | RSUD LAKIPADADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 24 | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | | | | 81.728.000.000 | | 87.635.800.000 | | 93.916.130.000 | | 100.700.330.500 | | 108.032.580.425 | | 115.961.166.186 | | 587.974.007.111 | |
| | | | | | | | | 9.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 11.000.000.000 | | 12.100.000.000 | | 13.310.000.000 | | 14.641.000.000 | | 70.051.000.000 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 26 | Kesehatan | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Angka Harapan Hidup | | | 25.428.000.000 | | 27.970.800.000 | | 30.767.880.000 | | 33.844.668.000 | | 37.229.134.800 | | 40.952.048.280 | | 196.192.531.080 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 1 | 2 | 35 | | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | | | | 47.300.000.000 | | 49.665.000.000 | | 52.148.250.000 | | 54.755.662.500 | | 57.493.445.625 | | 60.368.117.906 | | 321.730.476.031 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | Infrastruktur | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 793.000.000 | | 872.300.000 | | 959.530.000 | | 1.055.483.000 | | 1.161.031.300 | | 1.277.134.430 | | 6.118.478.730 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 218.000.000 | | 239.800.000 | | 263.780.000 | | 290.158.000 | | 319.173.800 | | 351.091.180 | | 1.682.002.980 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana pemerintahan dalam Kondisi baik | 70% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 97% | | 35.000.000 | | 38.500.000 | | 42.350.000 | | 46.585.000 | | 51.243.500 | | 56.367.850 | | 270.046.350 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 80% | | 185.000.000 | | 203.500.000 | | 223.850.000 | | 246.235.000 | | 270.858.500 | | 297.944.350 | | 1.427.387.850 | Dinas PU dan Penataan Ruang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|-----|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 12.100.000 | | 13.310.000 | | 14.641.000 | | 16.105.100 | | 77.156.100 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 6 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinarmargaan | 70% | | 2.978.000.000 | | 3.275.800.000 | | 3.603.380.000 | | 3.963.718.000 | | 4.360.089.800 | | 4.796.098.780 | | 22.977.086.580 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 15 | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Panjang jalan kabupaten | 1000 km | 200 | 139.271.000.000 | 200 | 153.198.100.000 | 200 | 168.517.910.000 | 200 | 185.369.701.000 | 200 | 203.906.671.100 | 200 | 224.297.338.210 | | 6.118.478.730 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 16 | | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | Persentase drainase dalam kondisi baik, data base kondisi drainase | 41% | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | 100 | 1.210.000.000 | | 1.331.000.000 | 100 | 1.464.100.000 | | 1.610.510.000 | | 7.715.610.000 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 17 | | Program Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong | Persentase pemasangan turap/talud/ bronjong pada bantaran sungai | 9,89% | | 1.500.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.815.000.000 | | 1.996.500.000 | | 2.196.150.000 | | 2.415.765.000 | | 11.573.415.000 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 18 | | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan kondisinya (rusak menjadi baik) | 427 km | | 1.344.000.000 | | 1.478.400.000 | | 1.626.240.000 | | 1.788.864.000 | | 1.967.750.400 | | 2.164.525.440 | | 10.369.779.840 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 28 | | Program Pengendalian Banjir | Persentase daerah genangan banjir | 90% | | 1.500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.420.000.000 | | 2.662.000.000 | | 2.928.200.000 | | 13.710.200.000 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 24 | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Persentase pengelolaan jaringan irigasi, dan infrastruktur Rawa dan Jaringan sumber daya air lainnya | 64% | | 25.451.000.000 | | 27.996.100.000 | | 30.795.710.000 | | 33.875.281.000 | | 37.262.809.100 | | 40.989.090.010 | | 196.369.990.110 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 13 | | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | Persentase wilayah yang terlayani air minum perpipaan | 36% | | 2.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.420.000.000 | | 2.662.000.000 | | 2.928.200.000 | | 3.221.020.000 | | 15.431.220.000 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 23 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan | Meningkatnya Sarana dan prasarana kebinarmargaan | | | 700.000.000 | | 799.328.000 | | 879.260.800 | | 967.186.880 | | 1.063.905.568 | | 1.170.296.125 | | 5.579.977.373 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 21 | | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan | Persentase kondisi Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan yang dibenahi | 60% | 65 | 3.000.000.000 | 67% | 3.300.000.000 | 71% | 3.630.000.000 | 75% | 3.993.000.000 | 77% | 4.392.300.000 | 80% | 4.831.530.000 | | 23.146.830.000 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 3 | 16 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 175.000.000 | 75% | 192.500.000 | 78% | 211.750.000 | 80% | 232.925.000 | 78% | 256.217.500 | 85% | 281.839.250 | | 1.350.231.750 | Dinas PU dan Penataan Ruang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|---------------|--|--|-----|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|--|
| 1 | 5 | | | PENATAAN RUANG | | | | 6.073.000.000 | | 7.573.740.000 | | 8.331.114.000 | | 9.164.225.400 | | 10.080.647.940 | | 11.088.712.794 | | 52.311.440.074 | |
| 1 | 5 | 18 | | Program Perencanaan Tata Ruang | Cakupan wilayah perencanaan penataan ruang | | | 2.029.000.000 | | 2.231.900.000 | | 2.455.090.000 | | 2.700.599.000 | | 2.970.658.900 | | 3.267.724.790 | | 15.654.972.690 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 5 | 19 | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | 149.000.000 | | 163.900.000 | | 180.290.000 | | 198.319.000 | | 218.150.900 | | 239.965.990 | | 1.149.625.890 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 5 | 36 | | Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum | | | | 3.000.000.000 | | 4.185.000.000 | | 4.603.500.000 | | 5.063.850.000 | | 5.570.235.000 | | 6.127.258.500 | | 28.549.843.500 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 175.000.000 | 75% | 192.500.000 | 78% | 211.750.000 | 80% | 232.925.000 | 78% | 256.217.500 | 85% | 281.839.250 | | 1.350.231.750 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 8 | 15 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | 600.000.000 | | 668.440.000 | | 735.284.000 | | 808.812.400 | | 889.693.640 | | 978.663.004 | | 4.680.893.044 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 8 | 28 | | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | | | | 120.000.000 | | 132.000.000 | | 145.200.000 | | 159.720.000 | | 175.692.000 | | 193.261.200 | | 925.873.200 | Dinas PU dan Penataan Ruang |
| 1 | 4 | | | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | 39.663.000.000 | | 43.663.830.000 | | 48.030.213.000 | | 52.833.234.300 | | 58.116.557.730 | | 63.928.213.503 | | 306.235.048.533 | |
| 1 | 4 | 1 | Infrastruktur | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 803.000.000 | | 883.300.000 | | 971.630.000 | | 1.068.793.000 | | 1.175.672.300 | | 1.293.239.530 | | 6.195.634.830 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 9.289.000.000 | | 10.217.900.000 | | 11.239.690.000 | | 12.363.659.000 | | 13.600.024.900 | | 14.960.027.390 | | 71.670.301.290 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 90% | | 26.000.000 | | 28.600.000 | | 31.460.000 | | 34.606.000 | | 38.066.600 | | 41.873.260 | | 200.605.860 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 80% | | 283.000.000 | | 311.300.000 | | 342.430.000 | | 376.673.000 | | 414.340.300 | | 455.774.330 | | 2.183.517.630 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 90% | | 35.000.000 | | 38.500.000 | | 42.350.000 | | 46.585.000 | | 51.243.500 | | 56.367.850 | | 270.046.350 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|--------|-----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|--|
| 1 | 4 | 16 | | Program lingkungan sehat perumahan | Persentase ketersediaan lingkungan sehat perumahan | 82% | | 16.262.000.000 | | 17.888.200.000 | | 19.677.020.000 | | 21.644.722.000 | | 23.809.194.200 | | 26.190.113.620 | | 125.471.249.820 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 15 | | Program pengembangan perumahan | Persentase ketersediaan perumahan | 98% | | 1.672.000.000 | | 1.839.200.000 | | 2.023.120.000 | | 2.225.432.000 | | 2.447.975.200 | | 2.692.772.720 | | 12.900.499.920 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 17 | | Program Pemberdayaan komunitas perumahan | Cakupan wilayah pemanfaatan ruang | - | | 6.268.000.000 | | 6.894.800.000 | | 7.584.280.000 | | 8.342.708.000 | | 9.176.978.800 | | 10.094.676.680 | | 48.361.443.480 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 19 | | Pendataan dan Pengembangan Sistem Informasi | Cakupan data sistem informasi | 19 Kec | | 1.688.000.000 | | 1.786.755.000 | | 1.965.430.500 | | 2.161.973.550 | | 2.378.170.905 | | 2.615.987.996 | | 12.596.317.951 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 20 | | Program Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan Permukiman | Cakupan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman | | | 900.000.000 | | 1.035.000.000 | | 1.138.500.000 | | 1.252.350.000 | | 1.377.585.000 | | 1.515.343.500 | | 7.218.778.500 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 5 | 15 | | Program Pemanfaatan Ruang | | | | 500.000.000 | | 609.575.000 | | 670.532.500 | | 737.585.750 | | 811.344.325 | | 892.478.758 | | 4.221.516.333 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 5 | 16 | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | 149.000.000 | | 163.900.000 | | 180.290.000 | | 198.319.000 | | 218.150.900 | | 239.965.990 | | 1.149.625.890 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 4 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 100.000.000 | 75% | 110.000.000 | 78% | 121.000.000 | 80% | 133.100.000 | 78% | 146.410.000 | 85% | 161.051.000 | | 771.561.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | 4 | 16 | | Program Pengembangan destinasi pariwisata | Cakupan wilayah pengembangan destinasi pariwisata | 19 Kec | | 1.688.000.000 | | 1.856.800.000 | | 2.042.480.000 | | 2.246.728.000 | | 2.471.400.800 | | 2.718.540.880 | | 13.023.949.680 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 1 | 6 | | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | 4.295.000.000 | | 5.224.500.000 | | 6.196.950.000 | | 6.216.645.000 | | 7.288.309.500 | | 7.417.140.450 | | 36.638.544.950 | |
| 1 | 6 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 1.067.000.000 | | 1.173.700.000 | | 1.291.070.000 | | 1.420.177.000 | | 1.562.194.700 | | 1.718.414.170 | | 8.232.555.870 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 230.000.000 | | 253.000.000 | | 278.300.000 | | 306.130.000 | | 336.743.000 | | 370.417.300 | | 1.774.590.300 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|-----------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 6 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 31.000.000 | | 34.100.000 | | 37.510.000 | | 41.261.000 | | 45.387.100 | | 49.925.810 | | 239.183.910 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumberdaya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | | 166.000.000 | | 182.600.000 | | 200.860.000 | | 220.946.000 | | 243.040.600 | | 267.344.660 | | 1.280.791.260 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 162.000.000 | | 178.200.000 | | 196.020.000 | | 215.622.000 | | 237.184.200 | | 260.902.620 | | 1.249.928.820 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 15 | | Program Pengembangan Data/ Informasi | Cakupan data base yang telah dikembangkan | 18 peta tematik | | 95.000.000 | | 104.500.000 | | 114.950.000 | | 126.445.000 | | 139.089.500 | | 152.998.450 | | 732.982.950 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 17 | | Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Tingkat kinerja perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 90% | | 222.000.000 | | 244.200.000 | | 268.620.000 | | 295.482.000 | | 325.030.200 | | 357.533.220 | | 1.712.865.420 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 19 | | Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. | Tingkat kinerja perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar | 90% | | 145.000.000 | | 159.500.000 | | 175.450.000 | | 192.995.000 | | 212.294.500 | | 233.523.950 | | 1.118.763.450 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 200.000.000 | 75% | 220.000.000 | 78% | 242.000.000 | 80% | 266.200.000 | 78% | 292.820.000 | 85% | 322.102.000 | | 1.543.122.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat kinerja perencanaan pembangunan daerah | 80% | | 1.452.000.000 | | 1.597.200.000 | | 1.756.920.000 | | 1.932.612.000 | | 2.125.873.200 | | 2.338.460.520 | | 11.203.065.720 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Tingkat kinerja perencanaan bidang ekonomi | 90% | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 332.750.000 | | 366.025.000 | | 402.627.500 | | 442.890.250 | | 2.121.792.750 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 6 | 23 | | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Tingkat kinerja perencanaan bidang sosial budaya | 90% | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 332.750.000 | | 366.025.000 | | 402.627.500 | | 1.928.902.500 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 1 | 5 | 15 | | Program Perencanaan Tata Ruang | Tingkat kinerja perencanaan bidang sosial budaya | 90% | | - | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 500.000.000 | | 1.000.000.000 | | 500.000.000 | | 3.500.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 7 | | | PERHUBUNGAN | | | | 3.730.000.000 | | 4.103.000.000 | | 4.513.300.000 | | 4.964.630.000 | | 5.461.093.000 | | 6.007.202.300 | | 28.779.225.300 | |
| 1 | 7 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 614.000.000 | | 675.400.000 | | 742.940.000 | | 817.234.000 | | 898.957.400 | | 988.853.140 | | 4.737.384.540 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 1.267.000.000 | | 1.393.700.000 | | 1.533.070.000 | | 1.686.377.000 | | 1.855.014.700 | | 2.040.516.170 | | 9.775.677.870 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 6 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | - | | 49.000.000 | 100% | 53.900.000 | | 59.290.000 | | 65.219.000 | | 71.740.900 | | 78.914.990 | | 378.064.890 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 85% | | 62.000.000 | | 68.200.000 | | 75.020.000 | | 82.522.000 | | 90.774.200 | | 99.851.620 | | 478.367.820 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 6.000.000 | | 6.600.000 | | 7.260.000 | | 7.986.000 | | 8.784.600 | | 9.663.060 | | 46.293.660 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 15 | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Persentase sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang terbangun | 34% | | 939.000.000 | | 1.032.900.000 | | 1.136.190.000 | | 1.249.809.000 | | 1.374.789.900 | | 1.512.268.890 | | 7.244.957.790 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 16 | | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan marka jalan | Persentase ketersediaan prasaran dan fasilitas LLAJ | 79,17% | | 355.000.000 | | 390.500.000 | | 429.550.000 | | 472.505.000 | | 519.755.500 | | 571.731.050 | | 2.739.041.550 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 17 | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Frekuensi operasi penerbitan angkutan umum | 21 Kali | | 250.000.000 | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 332.750.000 | | 366.025.000 | | 402.627.500 | | 1.928.902.500 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 7 | 20 | | Program Peningkatan Kelangkaan operasional kendaraan bermotor | Tersedianya perlengkapan operasional LLAJR dan tertibnya arus LLAJ | - | | 88.000.000 | | 96.800.000 | | 106.480.000 | | 117.128.000 | | 128.840.800 | | 141.724.880 | | 678.973.680 | Dinas Perhubungan |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 100.000.000 | 75% | 110.000.000 | 78% | 121.000.000 | 80% | 133.100.000 | 78% | 146.410.000 | 85% | 161.051.000 | | 771.561.000 | Dinas Perhubungan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------------------------|
| 1 | 8 | | | LINGKUNGAN HIDUP | | | | 2.221.000.000 | | 2.443.100.000 | | 2.687.410.000 | | 2.956.151.000 | | 3.251.766.100 | | 3.576.942.710 | | 17.136.369.810 | |
| 1 | 8 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 95% | | 302.000.000 | | 332.200.000 | | 365.420.000 | | 401.962.000 | | 442.158.200 | | 486.374.020 | | 2.330.114.220 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 114.000.000 | | 125.400.000 | | 137.940.000 | | 151.734.000 | | 166.907.400 | | 183.598.140 | | 879.579.540 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 14.000.000 | | 15.400.000 | | 16.940.000 | | 18.634.000 | | 20.497.400 | | 22.547.140 | | 108.018.540 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | | 211.000.000 | | 232.100.000 | | 255.310.000 | | 280.841.000 | | 308.925.100 | | 339.817.610 | | 1.627.993.710 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 32.210.200 | | 35.431.220 | | 169.743.420 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 15 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase volume sampah yang tertangani | 94% | | 150.000.000 | | 165.000.000 | | 181.500.000 | | 199.650.000 | | 219.615.000 | | 241.576.500 | | 1.157.341.500 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Cakupan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | 80% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan pengelolaan ruang terbuka hijau | 11% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 16 | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase usaha /kegiatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis | 84% | | 131.000.000 | | 144.100.000 | | 158.510.000 | | 174.361.000 | | 191.797.100 | | 210.976.810 | | 1.010.744.910 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 17 | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Cakupan penghijauan/ penanaman vegetasi untuk produksi bio massa | 24% | | 1.116.000.000 | | 1.227.600.000 | | 1.350.360.000 | | 1.485.396.000 | | 1.633.935.600 | | 1.797.329.160 | | 8.610.620.760 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 1 | 8 | 18 | | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Kajian Lingkuagn Hidup Strategis (KLHS) | | | 86.000.000 | | 94.600.000 | | 104.060.000 | | 114.466.000 | | 125.912.600 | | 138.503.860 | | 663.542.460 | Dinas Lingkungan Hidup |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|---|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 75.000.000 | 75% | 82.500.000 | 78% | 90.750.000 | 80% | 99.825.000 | 78% | 109.807.500 | 85% | 120.788.250 | | 578.670.750 | Dinas Lingkungan Hidup |
| KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | | | | | | | 1.364.000.000 | | 1.500.400.000 | | 1.650.440.000 | | 1.815.484.000 | | 1.997.032.400 | | 2.196.735.640 | | 10.524.092.040 | |
| 1 | 10 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 478.000.000 | | 525.800.000 | | 578.380.000 | | 636.218.000 | | 699.839.800 | | 769.823.780 | 1 | 3.688.061.580 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 10 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 163.000.000 | | 179.300.000 | | 197.230.000 | | 216.953.000 | | 238.648.300 | | 262.513.130 | 1 | 1.257.644.430 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 10 | 4 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 90% | | 92.000.000 | | 101.200.000 | | 111.320.000 | | 122.452.000 | | 134.697.200 | | 148.166.920 | 1 | 709.836.120 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 10 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 80% | | 111.000.000 | | 122.100.000 | | 134.310.000 | | 147.741.000 | | 162.515.100 | | 178.766.610 | 1 | 856.432.710 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 10 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 90% | | 9.000.000 | | 9.900.000 | | 10.890.000 | | 11.979.000 | | 13.176.900 | | 14.494.590 | 1 | 69.440.490 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 10 | 15 | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan penataan administrasi kependudukan | 95% | | 436.000.000 | | 479.600.000 | | 527.560.000 | | 580.316.000 | | 638.347.600 | | 702.182.360 | 1 | 3.364.005.960 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 75.000.000 | 75% | 82.500.000 | 78% | 90.750.000 | 80% | 99.825.000 | 78% | 109.807.500 | 85% | 120.788.250 | | 578.670.750 | Dinas Kependudukan & Catatan Sipil |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | | | | | | | 529.000.000 | | 1.398.350.000 | | 1.538.185.000 | | 1.692.003.500 | | 1.861.203.850 | | 2.047.324.235 | | 9.066.066.585 | |
| 1 | 11 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | - | | 242.385.000 | | 266.623.500 | | 293.285.850 | | 322.614.435 | | 354.875.879 | 1 | 1.479.784.664 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 11 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | - | | 225.600.000 | | 248.160.000 | | 272.976.000 | | 300.273.600 | | 330.300.960 | 1 | 1.377.310.560 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|------------------|-----|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| 1 11 | 4 | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 90% | | - | | 30.000.000 | 33.000.000 | | | 36.300.000 | | 39.930.000 | | 43.923.000 | 1 | 183.153.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 11 | 18 | | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Capaian IDG menjadi 71,75% | 68,76% | | 406.000.000 | | 446.600.000 | 491.260.000 | | | 540.386.000 | | 594.424.600 | | 653.867.060 | 73,76% | 3.132.537.660 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 11 | 21 | | | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Presentase kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 100% | | - | | 156.125.000 | 171.737.500 | | | 188.911.250 | | 207.802.375 | | 228.582.613 | 100% | 953.158.738 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 11 | 16 | | | Program Penguatan Kelengkapan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Capaian IPG menjadi 78,26 % Jumlah desa layak anak yang terbentuk | 64,75% 2 Desa | | 123.000.000 | | 297.640.000 | 327.404.000 | | | 360.144.400 | | 396.158.840 | | 435.774.724 | 69,75% 7 Desa | 1.940.121.964 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 12 | | | | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 3.779.000.000 | | 3.356.307.000 | 3.691.937.700 | | | 4.061.131.470 | | 4.467.244.617 | | 4.913.969.079 | | 24.269.589.866 | |
| 1 12 | 1 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 590.000.000 | | 649.000.000 | 713.900.000 | | | 785.290.000 | | 863.819.000 | | 950.200.900 | | 4.552.209.900 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 12 | 2 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat | 95% | | 95.000.000 | | 104.500.000 | 114.950.000 | | | 126.445.000 | | 139.089.500 | | 152.998.450 | | 732.982.950 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 12 | 3 | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 31.000.000 | | 34.100.000 | 37.510.000 | | | 41.261.000 | | 45.387.100 | | 49.925.810 | | 239.183.910 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 12 | 4 | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 85% | | 40.000.000 | | 44.000.000 | 48.400.000 | | | 53.240.000 | | 58.564.000 | | 64.420.400 | | 308.624.400 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 12 | 5 | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 90% | | 13.000.000 | | 14.300.000 | 15.730.000 | | | 17.303.000 | | 19.033.300 | | 20.936.630 | | 100.302.930 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 12 | 6 | | | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Jumlah PPKBD/ sub PPKBD/ PLKB/ kader KB yang dilatih | 224 orang | | 80.000.000 | | 88.000.000 | 96.800.000 | | | 106.480.000 | | 117.128.000 | | 128.840.800 | | 617.248.800 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|--|--|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|
| 1 | 12 | 7 | | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan | Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita yang dilatih | - | | 153.000.000 | | 168.300.000 | | 185.130.000 | | 203.643.000 | | 224.007.300 | | 246.408.030 | | 1.180.488.330 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | 12 | 15 | | Program Keluarga Berencana | Frekuensi pelayanan KIE KB | - | | 2.054.000.000 | | 1.458.807.000 | | 1.604.687.700 | | 1.765.156.470 | | 1.941.672.117 | | 2.135.839.329 | | 10.960.162.616 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | 12 | 9 | | Program Pelayanan Kontrasepsi | Persentase pembinaan keluarga berencana Persentase pelayanan pemasangan kontrasepsi | 30% | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 771.561.000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | 12 | 10 | | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Jumlah balai penyuluh KB dan perlengkapannya Jumlah PPKBD / Sub PPKB yang akan diberi insentif Frekuensi pelaksanaan Harganas Jumlah dokumen hasil pendataan keluarga dan laporan pengolahan data program KB Jumlah dokumen pemuktahiran data keluarga | 2 unit balai 167PPKBD /703 sub PPKBD 3 kali 2 dokumen 3 Dokumen | | 504.000.000 | | 554.400.000 | | 609.840.000 | | 670.824.000 | | 737.906.400 | | 811.697.040 | | 3.888.667.440 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | 12 | 12 | | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan PMS | | | | 44.000.000 | | 48.400.000 | | 53.240.000 | | 58.564.000 | | 64.420.400 | | 70.862.440 | | 339.486.840 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | 12 | 13 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 75.000.000 | 75% | 82.500.000 | 78% | 90.750.000 | 80% | 99.825.000 | 78% | 109.807.500 | 85% | 120.788.250 | | 578.670.750 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|------|-----|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|--------------|
| 1 | 13 | | | SOSIAL | | | | 1.851.000.000 | | 2.036.100.000 | 2.239.710.000 | | | 2.463.681.000 | | 2.710.049.100 | | 2.981.054.010 | 100% | 14.281.594.110 | |
| 1 | 13 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 499.000.000 | | 548.900.000 | 603.790.000 | | | 664.169.000 | | 730.585.900 | | 803.644.490 | 100% | 3.850.089.390 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 258.000.000 | | 283.800.000 | 312.180.000 | | | 343.398.000 | | 377.737.800 | | 415.511.580 | 100% | 1.990.627.380 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 72.000.000 | | 79.200.000 | 87.120.000 | | | 95.832.000 | | 105.415.200 | | 115.956.720 | 100% | 555.523.920 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 90% | | 60.000.000 | | 66.000.000 | 72.600.000 | | | 79.860.000 | | 87.846.000 | | 96.630.600 | 100% | 462.936.600 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 15.000.000 | | 16.500.000 | 18.150.000 | | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | 100% | 115.734.150 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 15 | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan (PMKS) lainnya | Jumlah penurunan PMKS | - | | 122.000.000 | | 134.200.000 | 147.620.000 | | | 162.382.000 | | 178.620.200 | | 196.482.220 | 100% | 941.304.420 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 16 | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | | 331.000.000 | | 364.100.000 | 400.510.000 | | | 440.561.000 | | 484.617.100 | | 533.078.810 | 100% | 2.553.866.910 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 21 | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase pelaku usaha terkait dan masyarakat calon penerima UKS | - | | 321.000.000 | | 353.100.000 | 388.410.000 | | | 427.251.000 | | 469.976.100 | | 516.973.710 | | 2.476.710.810 | Dinas Sosial |
| 1 | 13 | 17 | | Program Pembinaan Anak Terlantar | -Jumlah Penduduk Miskin -Jumlah Keluarga Prasejahtera | | | 73.000.000 | | 80.300.000 | 88.330.000 | | | 97.163.000 | | 106.879.300 | | 117.567.230 | | 563.239.530 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 100.000.000 | 75% | 110.000.000 | 121.000.000 | 80% | | 133.100.000 | 78% | 146.410.000 | 85% | 161.051.000 | | 771.561.000 | Dinas Sosial |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|--|----------------------------------|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 14 | | | KETENAGAKERJAAN | | | | 162.000.000 | | 724.474.000 | | 796.921.400 | | 876.613.540 | | 964.274.894 | | 1.060.702.383 | | 4.584.986.217 | |
| 1 | 14 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | - | | 302.449.000 | | 332.693.900 | | 365.963.290 | | 402.559.619 | | 442.815.581 | 100% | 1.846.481.390 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 14 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | - | | 85.825.000 | | 94.407.500 | | 103.848.250 | | 114.233.075 | | 125.656.383 | 100% | 523.970.208 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 14 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | - | | 30.000.000 | | 33.000.000 | | 36.300.000 | | 39.930.000 | | 43.923.000 | 100% | 183.153.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 14 | 15 | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja terampil dan berkualitas | 2%(dari 1129 pencaker) | | 52.000.000 | | 57.200.000 | | 62.920.000 | | 69.212.000 | | 76.133.200 | | 83.746.520 | | 401.211.720 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 14 | 16 | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase tenaga kerja yang terserap lapangan kerja | 11,12% (dari 1129) | | 20.000.000 | | 150.000.000 | | 165.000.000 | | 181.500.000 | | 199.650.000 | | 219.615.000 | | 935.765.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 14 | 17 | | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase TKI yang dilindungi dan PPTKIS yang di bina | 2% (dari 199 jiwa dan 17 PPTKIS) | | 90.000.000 | | 99.000.000 | | 108.900.000 | | 119.790.000 | | 131.769.000 | | 144.945.900 | | 694.404.900 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2 | 8 | | | TRANSMIGRASI | | | | - | | 44.870.000 | | 49.357.000 | | 54.292.700 | | 59.721.970 | | 65.694.167 | | 273.935.837 | |
| 2 | 8 | 16 | | Program Transmigrasi Lokal | Persentase penduduk lokal yang transmigrasi | | | - | | 44.870.000 | | 49.357.000 | | 54.292.700 | | 59.721.970 | | 65.694.167 | | 273.935.837 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1 | 15 | | | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | 1.298.000.000 | | 1.427.800.000 | | 1.570.580.000 | | 1.727.638.000 | | 1.900.401.800 | | 2.090.441.980 | | 10.014.861.780 | |
| 1 | 15 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 307.000.000 | | 337.700.000 | | 371.470.000 | | 408.617.000 | | 449.478.700 | | 494.426.570 | | 2.368.692.270 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 | | 194.871.710 | | 933.588.810 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 24.000.000 | | 26.400.000 | | 29.040.000 | | 31.944.000 | | 35.138.400 | | 38.652.240 | | 185.174.640 | Dinas Koperasi & UKM |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|--|------------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 15 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 | | 194.871.710 | | 933.588.810 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 5 | | Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 90% | | 34.000.000 | | 37.400.000 | | 41.140.000 | | 45.254.000 | | 49.779.400 | | 54.757.340 | | 262.330.740 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 15 | | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Persentase UKM unggulan yang dikembangkan | 50% | | 81.000.000 | | 89.100.000 | | 98.010.000 | | 107.811.000 | | 118.592.100 | | 130.451.310 | | 624.964.410 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 16 | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Persentase wirausaha baru yang berkembang | 1% (dari 384 UKM) | | 130.000.000 | | 143.000.000 | | 157.300.000 | | 173.030.000 | | 190.333.000 | | 209.366.300 | | 1.003.029.300 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah | Persentase UKM yang melakukan kemitraan usaha | 1% (dari 384 UKM) | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 | | 194.871.710 | | 933.588.810 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase koperasi aktif khususnya sektor riil | 74% (dari 60 koperasi) | | 284.000.000 | | 312.400.000 | | 343.640.000 | | 378.004.000 | | 415.804.400 | | 457.384.840 | 100% | 2.191.233.240 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 75.000.000 | 75% | 82.500.000 | 78% | 90.750.000 | 80% | 99.825.000 | 78% | 109.807.500 | 85% | 120.788.250 | | 578.670.750 | Dinas Koperasi & UKM |
| 1 | 16 | | | PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | 857.000.000 | | 942.700.000 | | 1.036.970.000 | | 1.140.667.000 | | 1.254.733.700 | | 1.380.207.070 | | 6.612.277.770 | |
| 1 | 16 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 601.932.000 | | 662.125.200 | | 728.337.720 | | 801.171.492 | | 881.288.641 | | 969.417.505 | | 4.644.272.559 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 94.028.000 | | 103.430.800 | | 113.773.880 | | 125.151.268 | | 137.666.395 | | 151.433.034 | | 725.483.377 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | 17.600.000 | | 19.360.000 | | 21.296.000 | | 23.425.600 | | 25.768.160 | | 28.344.976 | | 135.794.736 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|---|--------|-----|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 16 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 4.845.000 | | 5.329.500 | | 5.862.450 | | 6.448.695 | | 7.093.565 | | 7.802.921 | | 37.382.130 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 15 | | Program Peningkatan dan Promosi Kerjasama Investasi | Persentase izin yang dikeluarkan Persentase promosi dan kerjasama investasi | - - | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | 100% | 385.780.500 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 16 | | Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Presentase Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 385.780.500 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan dan perizinan serta proporsi pemenuhan Kompetensi Aparatur yang memenuhi standar | | | 18.325.000 | | 20.157.500 | | 22.173.250 | | 24.390.575 | | 26.829.633 | | 29.512.596 | | 141.388.553 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 23 | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | | 6.000.000 | | 6.600.000 | | 7.260.000 | | 7.986.000 | | 8.784.600 | | 9.663.060 | | 46.293.660 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 26 | | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 5.060.000 | | 5.566.000 | | 6.122.600 | | 6.734.860 | | 7.408.346 | | 8.149.181 | | 39.040.987 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| 1 | 16 | 64 | | Program Pengembangan Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah | | | | 9.210.000 | | 10.131.000 | | 11.144.100 | | 12.258.510 | | 13.484.361 | | 14.832.797 | | 71.060.768 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | | | KEBUDAYAAN | | | | 170.746.959.685 | | 225.561.845.215 | | 228.382.601.145 | | 248.944.461.247 | | 271.395.187.367 | | 295.973.050.106 | | 1.423.882.097.578 | |
| 1 | 17 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 725.000.000 | | 797.500.000 | | 877.250.000 | | 964.975.000 | | 1.061.472.500 | | 1.167.619.750 | 100% | 5.593.817.250 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 181.000.000 | | 199.100.000 | | 219.010.000 | | 240.911.000 | | 265.002.100 | | 291.502.310 | 100% | 1.396.525.410 | Dinas Kebudayaan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|----------|-----|-------------|------|--------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 17 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | 100% | 115.734.150 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 90% | | 91.000.000 | | 100.100.000 | | 110.110.000 | | 121.121.000 | | 133.233.100 | | 146.556.410 | 100% | 702.120.510 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 125.000.000 | | 137.500.000 | | 151.250.000 | | 166.375.000 | | 183.012.500 | | 201.313.750 | 100% | 964.451.250 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 6 | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Persentase keragaman budaya yang dikelola | 96% | | 608.000.000 | | 668.800.000 | | 735.680.000 | | 809.248.000 | | 890.172.800 | | 979.190.080 | 100% | 4.691.090.880 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 15 | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Persentase budaya yang dikembangkan | 80% | | - | | 251.840.000 | | 277.024.000 | | 304.726.400 | | 335.199.040 | | 368.718.944 | 100% | 1.537.508.384 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 17 | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 85% | | - | | 208.700.000 | | 229.570.000 | | 252.527.000 | | 277.779.700 | | 305.557.670 | 100% | 1.274.134.370 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 75.000.000 | 75% | 75.000.000 | 78% | 82.500.000 | 80% | 90.750.000 | 78% | 99.825.000 | 85% | 109.807.500 | | 532.882.500 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 20 | | Program Pengembangan Wisata Budaya | - Jumlah Penerimaan Devisa Wisatawan Nusantara | 2-3 hari | | 185.000.000 | | 203.500.000 | | 223.850.000 | | 246.235.000 | | 270.858.500 | | 297.944.350 | | 1.427.387.850 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 18 | | | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | - | | 881.953.000 | | 1.470.148.300 | | 1.617.163.130 | | 1.778.879.443 | | 1.956.767.387 | | 7.704.911.260 | |
| 1 | 18 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | - | | 248.310.000 | | 273.141.000 | | 300.455.100 | | 330.500.610 | | 363.550.671 | | 1.515.957.381 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 18 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | - | | 446.883.000 | | 491.571.300 | | 540.728.430 | | 594.801.273 | | 654.281.400 | | 2.728.265.403 | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|----------------------------|
| 1 | 18 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | - | | 30.000.000 | | 33.000.000 | | 36.300.000 | | 39.930.000 | | 43.923.000 | | 183.153.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 18 | 16 | | Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan | Persentase peran serta pemuda dalam pembangunan | 30% | | - | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | 80% | 122.102.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 18 | 20 | | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Persentase peningkatan prestasi dalam bidang olahraga | 40% | | - | | 136.760.000 | | 150.436.000 | | 165.479.600 | | 182.027.560 | | 200.230.316 | 75% | 834.933.476 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 18 | 21 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Persentase penyediaan sarana olahraga | - | | - | | - | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 605.000.000 | | 665.500.000 | | 2.320.500.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 18 | 21 | | Program Pengembangan Wasasan Kebangsaan | Meningkatnya wawasan kebangsaan | - | | 750.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 850.000.000 | | 4.900.000.000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 19 | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 297.000.000 | | 326.700.000 | | 359.370.000 | | 395.307.000 | | 434.837.700 | | 478.321.470 | | 2.291.536.170 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat | 95% | | 86.000.000 | | 94.600.000 | | 104.060.000 | | 114.466.000 | | 125.912.600 | | 138.503.860 | | 663.542.460 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 14.000.000 | | 15.400.000 | | 16.940.000 | | 18.634.000 | | 20.497.400 | | 22.547.140 | | 108.018.540 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 90% | | 30.000.000 | | 33.000.000 | | 36.300.000 | | 39.930.000 | | 43.923.000 | | 48.315.300 | | 231.468.300 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 24.000.000 | | 26.400.000 | | 29.040.000 | | 31.944.000 | | 35.138.400 | | 38.652.240 | | 185.174.640 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 90% | | 383.000.000 | | 421.300.000 | | 463.430.000 | | 509.773.000 | | 560.750.300 | | 616.825.330 | | 2.955.078.630 | Kantor Kesbangpol & Linmas |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------------------|
| 1 | 19 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Cakupan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan | 98% | | 771.000.000 | | 150.000.000 | | 165.000.000 | | 181.500.000 | | 199.650.000 | | 219.615.000 | | 1.686.765.000 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 18 | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Cakupan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat | - | | 90.000.000 | | 99.000.000 | | 108.900.000 | | 119.790.000 | | 131.769.000 | | 144.945.900 | | 694.404.900 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 20 | | Program Kesadaran Bela Negara | Meningkatnya kesadaran bela negara | | | 100.000.000 | | 110.000.000 | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 771.561.000 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 19 | 22 | | Program Keitraan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama | Terpeliharanya kerukunan umat beragama | | | 200.000.000 | | 220.000.000 | | 242.000.000 | | 266.200.000 | | 292.820.000 | | 322.102.000 | | 1.543.122.000 | Kantor Kesbangpol & Linmas |
| 1 | 20 | 3 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 90% | | 7.005.892.000 | | 7.356.186.600 | | 7.723.995.930 | | 8.110.195.727 | | 8.515.705.513 | | 8.941.490.788 | | 47.653.466.558 | Setda |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 7.890.134.300 | | 8.679.147.730 | | 9.547.062.503 | | 10.501.768.753 | | 11.551.945.629 | | 12.707.140.191 | | 60.877.199.106 | Setda |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 217.000.000 | | 238.700.000 | | 262.570.000 | | 288.827.000 | | 317.709.700 | | 349.480.670 | | 1.674.287.370 | Setda |
| 1 | 20 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 90% | | 418.000.000 | | 459.800.000 | | 505.780.000 | | 556.358.000 | | 611.993.800 | | 673.193.180 | | 3.225.124.980 | Setda |
| 1 | 20 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 120.000.000 | | 132.000.000 | | 145.200.000 | | 159.720.000 | | 175.692.000 | | 193.261.200 | | 925.873.200 | Setda |
| 1 | 20 | 16 | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan wakil KDH | 95% | | 1.717.000.000 | | 1.888.700.000 | | 2.077.570.000 | | 2.285.327.000 | | 2.513.859.700 | | 2.765.245.670 | | 13.247.702.370 | Setda |
| 1 | 20 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan | | | 51.000.000 | | 56.100.000 | | 61.710.000 | | 67.881.000 | | 74.669.100 | | 82.136.010 | | 393.496.110 | Setda |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|---|---|-------------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|-------|
| 1 | 20 | 18 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana Toraja | | | | 65.000.000 | | 71.500.000 | | 78.650.000 | | 86.515.000 | | 95.166.500 | | 104.683.150 | | 501.514.650 | Setda |
| 1 | 20 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase SKPD yang menerapkan standar pengendalian internal | 80% | | 665.000.000 | | 731.500.000 | | 804.650.000 | | 885.115.000 | | 973.626.500 | | 1.070.989.150 | | 5.130.880.650 | Setda |
| 1 | 20 | 26 | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan dan perizinan serta proporsi pemenuhan Kompetensi Aparatur yang memenuhi standar | | | 881.000.000 | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 605.000.000 | | 665.500.000 | | 732.050.000 | | 3.933.550.000 | Setda |
| 1 | 20 | 27 | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Cakupan wilayah penyelesaian tapal batas wilayah administrasi | 1 Kec. dan 9 Kel. | | 6.000.000 | | 21.000.000 | | 23.100.000 | | 25.410.000 | | 27.951.000 | | 30.746.100 | | 134.207.100 | Setda |
| 1 | 20 | 53 | | Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan | | | | 95.000.000 | | 104.500.000 | | 114.950.000 | | 126.445.000 | | 139.089.500 | | 152.998.450 | | 732.982.950 | Setda |
| 1 | 20 | 56 | | Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | | | | - | | 570.000.000 | | 598.500.000 | | 628.425.000 | | 659.846.250 | | 692.838.563 | | 3.149.609.813 | Setda |
| 1 | 20 | 59 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | -Produksi Pertanian Tanaman Pangan -Produksi Holtikultura | | | 464.000.000 | | 510.400.000 | | 561.440.000 | | 617.584.000 | | 679.342.400 | | 747.276.640 | | 3.580.043.040 | Setda |
| 1 | 20 | 64 | | Program Pengembangan Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah | Persentase SKPD yang dilengkapi standar dan prosedur kerja Prosentase tingkat pengawasan internal dan kebijakan Kepala Daerah | 2% | | 62.000.000 | | 68.200.000 | | 75.020.000 | | 82.522.000 | | 90.774.200 | | 99.851.620 | | 478.367.820 | Setda |
| 1 | 25 | 18 | | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | | | | 556.000.000 | | 611.600.000 | | 672.760.000 | | 740.036.000 | | 814.039.600 | | 895.443.560 | | 4.289.879.160 | Setda |
| 2 | 6 | 15 | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Pertumbuhan Ekonomi | | | 27.000.000 | | 43.360.000 | | 45.528.000 | | 47.804.400 | | 50.194.620 | | 52.704.351 | | 266.591.371 | Setda |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|-------|
| 1 | 11 | 21 | | Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | - | | 150.000.000 | | 157.500.000 | | 165.375.000 | | 173.643.750 | | 182.325.938 | | 828.844.688 | Setda |
| 1 | 19 | 17 | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | -Jumlah Konflik -Jumlah Lembaga Keagamaan yang Dibina | | | 536.000.000 | | 749.400.000 | | 786.870.000 | | 826.213.500 | | 867.524.175 | | 910.900.384 | | 4.676.908.059 | Setda |
| 1 | 20 | 46 | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Prosentase tingkat kinerja tenaga pemeriksa | - | | 190.000.000 | | 209.000.000 | | 229.900.000 | | 252.890.000 | | 278.179.000 | | 305.996.900 | | 1.465.965.900 | Setda |
| 1 | 20 | 47 | | Program Penanganan Pasca Bencana | Cakupan penanganan pasca bencana | 98% | | 611.000.000 | | 672.100.000 | | 739.310.000 | | 813.241.000 | | 894.565.100 | | 984.021.610 | | 4.714.237.710 | Setda |
| 1 | 20 | 16 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | -Angka Melek Huruf -Rata-rata Lama Sekolah | | | 9.000.000 | | 9.900.000 | | 10.890.000 | | 11.979.000 | | 13.176.900 | | 14.494.590 | | 69.440.490 | Setda |
| 1 | 20 | 21 | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Data Perencanaan | | | 141.000.000 | | 155.100.000 | | 170.610.000 | | 187.671.000 | | 206.438.100 | | 227.081.910 | | 1.087.901.010 | Setda |
| 1 | 20 | 17 | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | 31.000.000 | | 34.100.000 | | 37.510.000 | | 41.261.000 | | 45.387.100 | | 49.925.810 | | 239.183.910 | Setda |
| 1 | 20 | 17 | | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase Angka Kemiskinan dan Pengangguran | | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 32.210.200 | | 154.312.200 | Setda |
| 1 | 20 | 17 | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah Usaha Perdagangan | | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 32.210.200 | | 154.312.200 | Setda |
| 1 | 20 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | | 115.734.150 | Setda |
| 1 | 20 | 15 | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Jumlah Kegiatan Penyebaran Informasi | | | 28.000.000 | | 30.800.000 | | 33.880.000 | | 37.268.000 | | 40.994.800 | | 45.094.280 | | 216.037.080 | Setda |
| 1 | 20 | 18 | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | -Meningkatnya Produksi Perkebunan | | | 65.000.000 | | 71.500.000 | | 78.650.000 | | 86.515.000 | | 95.166.500 | | 104.683.150 | | 501.514.650 | Setda |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-------------------------|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------------------|
| 1 | 20 | 22 | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | -Meningkatnya Populasi Ternak -Meningkatnya Produksi Perikanan Air Tawar | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | | 115.734.150 | Setda |
| 1 | 20 | 20 | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | -Meningkatnya Konsumsi Ikan Perkapita Per Tahun | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | | 115.734.150 | Setda |
| 1 | 20 | 30 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | | 115.734.150 | Setda |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 04 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 4.098.000.000 | | 4.507.800.000 | | 4.958.580.000 | | 5.454.438.000 | | 5.999.881.800 | | 6.599.869.980 | | 31.618.569.780 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 2.517.000.000 | | 2.642.955.000 | | 2.907.250.500 | | 3.197.975.550 | | 3.517.773.105 | | 3.869.550.416 | | 18.652.504.571 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | 313.000.000 | | 344.300.000 | | 378.730.000 | | 416.603.000 | | 458.263.300 | | 504.089.630 | | 2.414.985.930 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | 295.000.000 | | 324.500.000 | | 356.950.000 | | 392.645.000 | | 431.909.500 | | 475.100.450 | | 2.276.104.950 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 12.000.000 | | 13.200.000 | | 14.520.000 | | 15.972.000 | | 17.569.200 | | 19.326.120 | | 92.587.320 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 15 | | Program Pengembangan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | 4.783.000.000 | | 5.261.300.000 | | 5.787.430.000 | | 6.366.173.000 | | 7.002.790.300 | | 7.703.069.330 | | 36.903.762.630 | Sekretariat DPRD |
| 1 | 20 | 26 | | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan dan perizinan serta proporsi pemenuhan Kompetensi Aparatur yang memenuhi standar | | | 45.000.000 | | 49.500.000 | | 54.450.000 | | 59.895.000 | | 65.884.500 | | 72.472.950 | | 347.202.450 | Sekretariat DPRD |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|-------|
| 1 | 20 | 05 | | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | 19.983.033.500 | | 22.839.904.450 | | 15.865.894.895 | | 17.452.484.385 | | 19.197.732.823 | | 21.117.506.105 | | 111.627.761.762 | |
| 1 | 20 | | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 1.299.000.000 | | 1.428.900.000 | | 1.571.790.000 | | 1.728.969.000 | | 1.901.865.900 | | 2.092.052.490 | | 10.022.577.390 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 990.000.000 | | 1.089.000.000 | | 1.197.900.000 | | 1.317.690.000 | | 1.449.459.000 | | 1.594.404.900 | | 7.638.453.900 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | 342.000.000 | | 376.200.000 | | 413.820.000 | | 455.202.000 | | 500.722.200 | | 550.794.420 | | 2.638.738.620 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 24.157.650 | | 115.734.150 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan | | | 3.875.345.500 | | 4.262.880.050 | | 4.689.168.055 | | 5.158.084.861 | | 5.673.893.347 | | 6.241.282.681 | | 29.900.654.493 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 18 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana Toraja | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan | | | 442.204.000 | | 486.424.400 | | 535.066.840 | | 588.573.524 | | 647.430.876 | | 712.173.964 | | 3.411.873.604 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 19 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan | | | - | | 400.000.000 | | 440.000.000 | | 484.000.000 | | 532.400.000 | | 585.640.000 | | 2.442.040.000 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 36 | Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum | -Jumlah Pemeliharaan LPU -LPU | | | 3.599.668.000 | | - | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.331.000.000 | | 3.411.873.604 | BKKAD |
| 1 | 20 | | 18 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Baru Tana Toraja | | | 8.205.816.000 | | - | | 3.000.000.000 | | 3.300.000.000 | | 3.630.000.000 | | 3.993.000.000 | | 22.128.816.000 | BKKAD |
| 1 | 9 | | 16 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase tertib penguasaan dan pemanfaatan tanah | | | 1.214.000.000 | | 14.780.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.300.000.000 | | 3.630.000.000 | | 3.993.000.000 | | 29.917.000.000 | BKKAD |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|-------------|
| 1 | 20 | 06 | | INSPEKTORAT | | | | 2.025.000.000 | | 2.225.000.000 | | 2.447.500.000 | | 2.692.250.000 | | 2.961.475.000 | | 3.257.622.500 | | 11.876.637.200 | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 497.473.000 | | 547.220.300 | | 601.942.330 | | 662.136.563 | | 728.350.219 | | 801.185.241 | | 3.838.307.654 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 182.510.000 | | 200.761.000 | | 220.837.100 | | 242.920.810 | | 267.212.891 | | 293.934.180 | | 1.408.175.981 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | 21.060.000 | | 23.166.000 | | 25.482.600 | | 28.030.860 | | 30.833.946 | | 33.917.341 | | 162.490.747 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 9.962.000 | | 10.958.200 | | 12.054.020 | | 13.259.422 | | 14.585.364 | | 16.043.901 | | 76.862.907 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembinaan Desa | | | 226.200.000 | | 248.820.000 | | 273.702.000 | | 301.072.200 | | 331.179.420 | | 364.297.362 | | 1.745.270.982 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 20 | | Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | -Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan dan perizinan serta proporsi pemenuhan kompetensi Aparatur yang memenuhi standar -Terciptanya Pengawasan Internal secara Berkala -Terciptanya Pengawasan Internal Melalui Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat | | | 981.195.000 | | 1.079.314.500 | | 1.187.245.950 | | 1.305.970.545 | | 1.436.567.600 | | 1.580.224.359 | | 3.838.307.654 | Inspektorat |
| 1 | 20 | 21 | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pemeriksa dan Pengawas | | | 81.600.000 | | 89.760.000 | | 98.736.000 | | 108.609.600 | | 119.470.560 | | 131.417.616 | | 629.593.776 | Inspektorat |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 73% | 25.000.000 | 75% | 25.000.000 | 78% | 27.500.000 | 80% | 30.250.000 | 78% | 33.275.000 | 85% | 36.602.500 | | 177.627.500 | Inspektorat |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|--|
| 1 | 20 | 07 | | KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | 2.019.800.000 | | 2.221.780.000 | | 2.443.958.000 | | 2.688.353.800 | | 2.957.189.180 | | 3.252.908.098 | | 15.583.989.078 | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 775.011.700 | | 852.512.870 | | 937.764.157 | | 1.031.540.573 | | 1.134.694.630 | | 1.248.164.093 | | 5.979.688.023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 34.850.000 | | 38.335.000 | | 42.168.500 | | 46.385.350 | | 51.023.885 | | 56.126.274 | | 268.889.009 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | 163.500.000 | | 179.850.000 | | 197.835.000 | | 217.618.500 | | 239.380.350 | | 263.318.385 | | 1.261.502.235 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 5.440.000 | | 5.984.000 | | 6.582.400 | | 7.240.640 | | 7.964.704 | | 8.761.174 | | 41.972.918 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 47 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | 266.750.700 | | 293.425.770 | | 322.768.347 | | 355.045.182 | | 390.549.700 | | 429.604.670 | | 2.058.144.368 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 48 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Jumlah Pegawai yang Mengikuti pelatihan penjenjangan dan teknis | | | 758.877.600 | | 834.765.360 | | 918.241.896 | | 1.010.066.086 | | 1.111.072.694 | | 1.222.179.964 | | 5.855.203.599 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 63 | | Program Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian | -Rasio aparatur berijazah minimal sederajat S1 -Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan penjenjangan dan teknis | | | 15.370.000 | | 16.907.000 | | 18.597.700 | | 20.457.470 | | 22.503.217 | | 24.753.539 | | 118.588.926 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 1 | 20 | 08 | | PENDAPATAN DAERAH | | | | - | | 3.130.869.000 | | 3.443.955.900 | | 3.788.351.490 | | 4.167.186.639 | | 4.583.905.303 | | 19.114.268.332 | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | - | | 1.261.455.000 | | 1.387.600.500 | | 1.526.360.550 | | 1.678.996.605 | | 1.846.896.266 | | 7.701.308.921 | Badan Pendapatan Daerah |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | - | | 825.727.000 | | 908.299.700 | | 999.129.670 | | 1.099.042.637 | | 1.208.946.901 | | 5.041.145.908 | Badan Pendapatan Daerah |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | - | | 60.000.000 | | 66.000.000 | | 72.600.000 | | 79.860.000 | | 87.846.000 | | 366.306.000 | Badan Pendapatan Daerah |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------------------|
| 1 | 20 | 17 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan | | | - | | 657.770.000 | | 723.547.000 | | 795.901.700 | | 875.491.870 | | 963.041.057 | | 4.015.751.627 | Badan Pendapatan Daerah |
| 1 | 9 | 16 | | Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase tertib penguasaan dan pemanfaatan tanah | | | - | | 325.917.000 | | 358.508.700 | | 394.359.570 | | 433.795.527 | | 477.175.080 | | 1.989.755.877 | Badan Pendapatan Daerah |
| PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | | | | | | | 1.450.539.000 | | 8.660.113.900 | | 9.165.380.290 | | 9.703.136.069 | | 10.275.728.313 | | 10.885.693.714 | | 50.140.591.287 | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 390.797.000 | | 429.876.700 | | 472.864.370 | | 520.150.807 | | 572.165.888 | | 629.382.476 | | 3.015.237.241 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 164.505.000 | | 180.955.500 | | 199.051.050 | | 218.956.155 | | 240.851.771 | | 264.936.948 | | 1.269.256.423 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | 67.750.000 | | 74.525.000 | | 81.977.500 | | 90.175.250 | | 99.192.775 | | 109.112.053 | | 522.732.578 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 9.127.000 | | 10.039.700 | | 11.043.670 | | 12.148.037 | | 13.362.841 | | 14.699.125 | | 70.420.372 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 39 | | Program Penanggulangan Bencana | Mitigasi, Pengurangan Risiko Bencana, Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat Bencana | | | 274.390.000 | | 151.450.000 | | 166.595.000 | | 183.254.500 | | 201.579.950 | | 221.737.945 | | 1.199.007.395 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 40 | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Mitigasi, Pengurangan Risiko Bencana, Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat Bencana | | | 411.870.000 | | 453.057.000 | | 498.362.700 | | 548.198.970 | | 603.018.867 | | 663.320.754 | | 3.177.828.291 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 13 | 16 | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Mitigasi, Pengurangan Risiko Bencana, Penanggulangan Bencana Alam dan Tanggap Darurat Bencana | | | 132.100.000 | | 145.310.000 | | 159.841.000 | | 175.825.100 | | 193.407.610 | | 212.748.371 | | 1.019.232.081 | Badan Penanggulangan Bencana |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----------|--|--|-----|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|--|
| 1 | 3 | 18 | | Program Penanggulangan Bencana | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | - | | 7.214.900.000 | | 7.575.645.000 | | 7.954.427.250 | | 8.352.148.613 | | 8.769.756.043 | | 39.866.876.906 | Badan Penanggulangan Bencana |
| 1 | 20 | 10 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | | | | 1.517.750.000 | | 1.669.525.000 | | 1.836.477.500 | | 2.020.125.250 | | 2.222.137.775 | | 2.444.351.553 | | 11.710.367.078 | |
| 1 | 20 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | | | 369.470.000 | | 406.417.000 | | 447.058.700 | | 491.764.570 | | 540.941.027 | | 595.035.130 | | 2.850.686.427 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | | | 68.915.000 | | 75.806.500 | | 83.387.150 | | 91.725.865 | | 100.898.452 | | 110.988.297 | | 531.721.263 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | | | 81.450.000 | | 89.595.000 | | 98.554.500 | | 108.409.950 | | 119.250.945 | | 131.176.040 | | 628.436.435 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | | 40.000.000 | | 44.000.000 | | 48.400.000 | | 53.240.000 | | 58.564.000 | | 64.420.400 | | 308.624.400 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 6.050.000 | | 6.655.000 | | 7.320.500 | | 8.052.550 | | 38.578.050 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 15 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Persentase organisasi antar dan intra umat yang dibina | | | 711.673.000 | | 782.840.300 | | 861.124.330 | | 947.236.763 | | 1.041.960.439 | | 1.146.156.483 | | 5.490.991.316 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 20 | 16 | | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | | | | 241.242.000 | | 265.366.200 | | 291.902.820 | | 321.093.102 | | 353.202.412 | | 388.522.653 | | 1.861.329.188 | Kantor Satpol - pp dan Pemadam Kebakaran |
| 1 | 21 | 1 | | KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | | | | 6.044.468.200 | | 6.682.695.020 | | 7.350.964.522 | | 8.086.060.974 | | 8.894.667.072 | | 9.784.133.779 | | 46.842.989.567 | |
| 1 | 21 | 1 | Pertanian | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 1 | | 841.571.000 | | 925.728.100 | | 1.018.300.910 | | 1.120.131.001 | | 1.232.144.101 | | 1.355.358.511 | | 6.493.233.623 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 21 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 1 | | 92.193.000 | | 101.412.300 | | 111.553.530 | | 122.708.883 | | 134.979.771 | | 148.477.748 | | 711.325.233 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|--------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | 21 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 1 | | 61.200.000 | | 67.320.000 | | 74.052.000 | | 81.457.200 | | 89.602.920 | | 98.563.212 | | 472.195.332 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 22 | 22 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 1 | | 129.000.000 | | 141.900.000 | | 156.090.000 | | 171.699.000 | | 188.868.900 | | 207.755.790 | | 995.313.690 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 21 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 1 | | 25.770.000 | | 28.347.000 | | 31.181.700 | | 34.299.870 | | 37.729.857 | | 41.502.843 | | 198.831.270 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 21 | 16 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | -Produksi Pertanian Tanaman Pangan -Produksi Holtikultura -Meningkatnya Produksi Perkebunan | | | 619.705.000 | | 681.675.500 | | 749.843.050 | | 824.827.355 | | 907.310.091 | | 998.041.100 | | 4.781.402.095 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 1 | 17 | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Persentase komoditi hasil produksi pertanian yang berdaya saing | 0 | | | | 43.780.000 | | 48.158.000 | | 52.973.800 | | 58.271.180 | | 64.098.298 | | 267.281.278 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 21 | 8 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase kelompok tani yang terbentuk dan dibina | 22,63% | | 355.878.800 | | 391.466.680 | | 430.613.348 | | 473.674.683 | | 521.042.151 | | 573.146.366 | | 2.745.822.028 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 21 | 9 | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan | Persentase kelompok tani - nelayan yang didampingi | 22,63% | | 1.142.880.400 | | 1.257.168.440 | | 1.382.885.284 | | 1.521.173.812 | | 1.673.291.194 | | 1.840.620.313 | | 8.818.019.443 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 17 | | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | Persentase kelompok masyarakat perikanan yang mendapat penyuluhan/ bimbingan | 80% | | 121.000.000 | | 133.100.000 | | 146.410.000 | | 161.051.000 | | 177.156.100 | | 194.871.710 | | 933.588.810 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 20 | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi bandeng | 8.180,50 Ton | | 451.500.000 | | 496.650.000 | | 546.315.000 | | 600.946.500 | | 661.041.150 | | 727.145.265 | | 3.483.597.915 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2 | 5 | 23 | | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan | Persentase hasil produksi perikanan yang berdaya saing | 70% | | 98.220.000 | | 108.042.000 | | 118.846.200 | | 130.730.820 | | 143.803.902 | | 158.184.292 | | 757.827.214 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|---|-----|-----|-----|--|--|-----------|---------------|-----|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--------------------------------------|
| 2 | 5 | 24 | | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Produksi Ikan | 1.110 Ton | 2.005.550.000 | | | 2.206.105.000 | | 2.426.715.500 | | 2.669.387.050 | | 2.936.325.755 | | 3.229.958.331 | | 15.474.041.636 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | 70% | 100.000.000 | 75% | | 100.000.000 | 78% | 110.000.000 | 80% | 121.000.000 | 78% | 133.100.000 | 85% | 146.410.000 | | 710.510.000 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| BADAN PEMERINTAHAN LEMBANG (BPMPL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 1 | 485.641.000 | | | 534.205.100 | | 587.625.610 | | 646.388.171 | | 711.026.988 | | 782.129.687 | | 3.747.016.556 | BPMPL |
| 1 | 22 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 1 | 62.100.000 | | | 68.310.000 | | 75.141.000 | | 82.655.100 | | 90.920.610 | | 100.012.671 | | 479.139.381 | BPMPL |
| 1 | 22 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 1 | 15.500.000 | | | 17.050.000 | | 18.755.000 | | 20.630.500 | | 22.693.550 | | 24.962.905 | | 119.591.955 | BPMPL |
| 1 | 22 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 1 | 124.900.000 | | | 137.390.000 | | 151.129.000 | | 166.241.900 | | 182.866.090 | | 201.152.699 | | 963.679.689 | BPMPL |
| 1 | 22 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 1 | 7.701.000 | | | 8.471.100 | | 9.318.210 | | 10.250.031 | | 11.275.034 | | 12.402.538 | | 59.417.913 | BPMPL |
| 1 | 22 | 15 | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase desa yang memiliki lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang aktif | 0 | 699.631.000 | | | 769.594.100 | | 846.553.510 | | 931.208.861 | | 1.024.329.747 | | 1.126.762.722 | | 5.398.079.940 | BPMPL |
| 1 | 22 | 16 | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Persentase desa yang memiliki BUMDes | 0 | 170.702.000 | | | 187.772.200 | | 206.549.420 | | 227.204.362 | | 249.924.798 | | 274.917.278 | | 1.317.070.058 | BPMPL |
| 1 | 22 | 17 | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Pedesaan | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang desa/kelurahan | 1 | 243.625.000 | | | 267.987.500 | | 294.786.250 | | 324.264.875 | | 356.691.363 | | 392.360.499 | | 1.879.715.486 | BPMPL |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-------------------------------|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|-------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 22 | 18 | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Persentase aparat desa yang telah dilatih | - | | 97.195.000 | | 106.914.500 | | 117.605.950 | | 129.366.545 | | 142.303.200 | | 156.533.519 | | 749.918.714 | BPMPL |
| 1 | 22 | 19 | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase desa yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar pengelolaan keuangan daerah | 1 | | 83.100.000 | | 91.410.000 | | 100.551.000 | | 110.606.100 | | 121.666.710 | | 133.833.381 | | 641.167.191 | BPMPL |
| 1 | 1 | 20 | | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | Meningkatnya Bimbingan-bimbingan teknis dan Pelatihan Formal | | | 109.905.000 | | 120.895.500 | | 132.985.050 | | 146.283.555 | | 160.911.911 | | 177.003.102 | | 847.984.117 | BPMPL |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 385.780.500 | BPMPL |
| ARSIP DAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 24 | | | | | | | 593.375.000 | | 972.497.300 | | 1.069.747.030 | | 1.176.721.733 | | 1.294.393.906 | | 1.423.833.297 | | 6.530.568.266 | |
| 1 | 24 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 1 | | 300.000.000 | | 309.193.000 | | 340.112.300 | | 374.123.530 | | 411.535.883 | | 452.689.471 | | 2.187.654.184 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 | 24 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 1 | | 86.945.000 | | 95.639.500 | | 105.203.450 | | 115.723.795 | | 127.296.175 | | 140.025.792 | | 670.833.711 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 | 24 | 3 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat disiplin aparat yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 1 | | 9.400.000 | | 10.340.000 | | 11.374.000 | | 12.511.400 | | 13.762.540 | | 15.138.794 | | 72.526.734 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 | 24 | 4 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 1 | | 6.000.000 | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 128.102.000 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 | 24 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 1 | | 15.750.000 | | 17.325.000 | | 19.057.500 | | 20.963.250 | | 23.059.575 | | 25.365.533 | | 121.520.858 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 | 24 | 17 | | Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Jumlah sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara | 1 | | - | | 21.000.000 | | 23.100.000 | | 25.410.000 | | 27.951.000 | | 30.746.100 | | 128.207.100 | Kantor Arsip & Perpustakaan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|------|-----|-----|-----|--|--|--------|-----|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|--------------------------------|
| 1 24 | 18 | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Persentase Layanan yang dipublikasikan | 1 | | 17.534.000 | | 48.220.000 | | 53.042.000 | | 58.346.200 | | 64.180.820 | | 70.598.902 | | 311.921.922 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 24 | 21 | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah perpustakaan sekolah (SD, SMP/SMK) yang terbina | 109 SD | | 76.748.000 | | 338.920.000 | | 372.812.000 | | 410.093.200 | | 451.102.520 | | 496.212.772 | | 2.145.888.492 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 26 | 15 | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah | -Angka Melek Huruf -Rata-rata Lama Sekolah | | | 80.998.000 | | 89.097.800 | | 98.007.580 | | 107.808.338 | | 118.589.172 | | 130.448.089 | | 624.948.979 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 26 | 16 | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah | Jumlah dokumen yang terpelihara | | | - | | 22.762.000 | | 25.038.200 | | 27.542.020 | | 30.296.222 | | 33.325.844 | | 138.964.286 | Kantor Arsip & Perpustakaan |
| 1 25 | 1 | | | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 25 | 1 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 74.000.000 | | 200.752.000 | | 220.827.200 | | 242.909.920 | | 267.200.912 | | 293.921.003 | | 1.225.611.035 | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 1 25 | 2 | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | - | | 128.948.000 | | 141.842.800 | | 156.027.080 | | 171.629.788 | | 188.792.767 | | 787.240.435 | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 1 25 | 3 | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | - | | - | 100% | 15.000.000 | | 16.500.000 | | 18.150.000 | | 19.965.000 | | 21.961.500 | | 91.576.500 | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 1 25 | 15 | | | Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa | Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan | - | | 53.000.000 | | 90.000.000 | | 99.000.000 | | 108.900.000 | | 119.790.000 | | 131.769.000 | | 602.459.000 | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 1 25 | 16 | | | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi | Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan | - | | - | | 72.000.000 | | 79.200.000 | | 87.120.000 | | 95.832.000 | | 105.415.200 | | 439.567.200 | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 1 25 | 18 | | | Program ketrjasama informasi dan media massa | Tersedianya panduan pengembangan sistem transportasi Tana Toraja | - | | 21.000.000 | | 23.100.000 | | 25.410.000 | | 27.951.000 | | 30.746.100 | | 33.820.710 | | 162.027.810 | Dinas Komunikasi & Informatika |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|--------------------|-----|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------------|
| 2 | | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | PERTANIAN | | | | 7.530.133.000 | | 14.976.615.300 | | 16.208.754.880 | | 17.550.832.321 | | 19.013.177.603 | | 20.607.120.516 | | 95.886.633.619 | |
| 2 | 1 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 1 | | 789.089.000 | | 867.997.900 | | 954.797.690 | | 1.050.277.459 | | 1.155.305.205 | | 1.270.835.725 | | 6.088.302.979 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 1 | | 155.352.000 | | 170.887.200 | | 187.975.920 | | 206.773.512 | | 227.450.863 | | 250.195.950 | | 1.198.635.445 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | - | | 24.600.000 | | 27.060.000 | | 29.766.000 | | 32.742.600 | | 36.016.860 | | 39.618.546 | | 189.804.006 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | - | | 307.156.000 | | 337.871.600 | | 371.658.760 | | 408.824.636 | | 449.707.100 | | 494.677.810 | | 2.369.895.905 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 1 | | 6.740.000 | | 7.414.000 | | 8.155.400 | | 8.970.940 | | 9.868.034 | | 10.854.837 | | 52.003.211 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 15 | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Populasi Ternak | 15 % (29.721 ekor) | | 138.346.000 | | 152.180.600 | | 167.398.660 | | 184.138.526 | | 202.552.379 | | 222.807.616 | | 1.067.423.781 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 16 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Fasilitasi kelompok tani dan kelompok agribisnis | - | | 581.920.000 | | 2.051.439.000 | | 2.154.010.950 | | 2.261.711.498 | | 2.374.797.072 | | 2.493.536.926 | | 11.917.415.446 | Dinas Pertanian TPH |
| | | | | | Prosentase peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan | - | | | | | | - | | - | | - | | - | | - | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 18 | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan | Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) pertanian yang diterapkan | 5 TTG | | 816.640.000 | | 3.259.000.000 | | 3.421.950.000 | | 3.593.047.500 | | 3.772.699.875 | | 3.961.334.869 | | 18.824.672.244 | Dinas Pertanian TPH |
| | | | | | Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) perkebunan yang diterapkan | 3 TTG | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Dinas Pertanian TPH |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|---|-------------|-----|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus KTNA dalam penerapan teknologi pertanian / perkebunan | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 19 | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Produksi padi | 233,861 Ton | | 4.059.450.000 | | 4.465.395.000 | | 4.911.934.500 | | 5.403.127.950 | | 5.943.440.745 | | 6.537.784.820 | | 31.321.133.015 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 25 | | Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian | Presentase sawah terlayani jaringan irigasi pertanian | - | | - | | 2.901.446.000 | | 3.191.590.600 | | 3.510.749.660 | | 3.861.824.626 | | 4.248.007.089 | | 17.713.617.975 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 32 | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | Persentase kelompok tani - nelayan yang didampingi | 3 TTG | | - | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 122.102.000 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 19 | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Produksi padi | 233,861 Ton | | 4.059.450.000 | | 4.465.395.000 | | 4.911.934.500 | | 5.403.127.950 | | 5.943.440.745 | | 6.537.784.820 | | 31.321.133.015 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 25 | | Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian | Presentase sawah terlayani jaringan irigasi pertanian | - | | - | | 2.901.446.000 | | 3.191.590.600 | | 3.510.749.660 | | 3.861.824.626 | | 4.248.007.089 | | 17.713.617.975 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 32 | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | Persentase kelompok tani - nelayan yang didampingi | 3 TTG | | - | | 20.000.000 | | 22.000.000 | | 24.200.000 | | 26.620.000 | | 29.282.000 | | 122.102.000 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 12 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Persentase ternak yang dilayani | 0 | | 382.905.000 | | 421.195.500 | | 463.315.050 | | 509.646.555 | | 560.611.211 | | 616.672.332 | | 2.954.345.647 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 22 | | Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan | Meningkatnya Populasi Ternak | | | 193.960.000 | | 213.356.000 | | 234.691.600 | | 258.160.760 | | 283.976.836 | | 312.374.520 | | 1.496.519.716 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 1 | 14 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | -Fasilitasi pelaku agribisnis -Persentase peningkatan kesejahteraan petani | - | | 32.300.000 | | 35.530.000 | | 39.083.000 | | 42.991.300 | | 47.290.430 | | 52.019.473 | | 249.214.203 | Dinas Pertanian TPH |
| 2 | 4 | | | PARIWISATA | | | | 4.716.355.000 | | 5.150.600.500 | | 5.665.660.550 | | 6.232.226.605 | | 6.855.449.266 | | 7.540.994.192 | | 36.161.286.113 | |
| 2 | 4 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 740.000.000 | | 776.610.000 | | 854.271.000 | | 939.698.100 | | 1.033.667.910 | | 1.137.034.701 | | 5.481.281.711.00 | Diknas |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|------------------------------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | 4 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 385.780.500,00 | Diknas |
| 2 | 4 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 385.780.500,00 | Diknas |
| 2 | 4 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Cakupan pelayanan peningkatan disiplin aparatur | 95% | | 25.000.000 | | 27.500.000 | | 30.250.000 | | 33.275.000 | | 36.602.500 | | 40.262.750 | | 192.890.250,00 | Diknas |
| 2 | 4 | 15 | | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase wisatawan yang berkunjung | | | 617.300.000 | | 679.030.000 | | 746.933.000 | | 821.626.300 | | 903.788.930 | | 994.167.823 | | 4.762.846.053,00 | Dinas Pariwisata |
| 2 | 4 | 16 | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Persentase destinasi wisata yang dikelola | 80% | | 1.932.830.000 | | 2.126.113.000 | | 2.338.724.300 | | 2.572.596.730 | | 2.829.856.403 | | 3.112.842.043 | | 14.912.962.476,30 | Dinas Pariwisata |
| 2 | 4 | 17 | | Program Pengembangan Kemitraan | Persentase pengembangan kemitraan yang dikembangkan | 85% | | 116.225.000 | | 127.847.500 | | 140.632.250 | | 154.695.475 | | 170.165.023 | | 187.181.525 | | 896.746.772,25 | Dinas Pariwisata |
| 1 | 17 | 19 | | Program Pengembangan Promosi Pariwisata yang Berbasis Seni dan Budaya Toraja | - Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara - Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara - Rata-Rata Lama Tinggal - Jumlah Event | 25.000 Wisman 125.000 Winus | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.210.000.000 | | 1.331.000.000 | | 1.464.100.000 | | 1.610.510.000 | | 7.715.610.000 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 17 | 20 | | Program Pengembangan Wisata Budaya | - Jumlah Penerimaan Devisa Wisatawan Nusantara | 2-3 hari | | 185.000.000 | | 203.500.000 | | 223.850.000 | | 246.235.000 | | 270.858.500 | | 297.944.350 | | 1.427.387.850 | Dinas Kebudayaan |
| 1 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan | | | 50.000.000 | | 55.000.000 | | 60.500.000 | | 66.550.000 | | 73.205.000 | | 80.525.500 | | 385.780.500,00 | Dinas Pariwisata |
| 2 | 6 | | | PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran secara tepat waktu | 95% | | 380.653.000 | | 418.718.300 | | 460.590.130 | | 506.649.143 | | 557.314.057 | | 613.045.463 | | 2.936.970.093 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|-----|-----|-----|-----|--|--|------------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 95% | | 183.830.000 | | 202.213.000 | | 222.434.300 | | 244.677.730 | | 269.145.503 | | 296.060.053 | | 1.418.360.586 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 3 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas dan pakaian hari tertentu | 95% | | 25.600.000 | | 28.160.000 | | 30.976.000 | | 34.073.600 | | 37.480.960 | | 41.229.056 | | 197.519.616 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 4 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 95% | | 129.000.000 | | 141.900.000 | | 156.090.000 | | 171.699.000 | | 188.868.900 | | 207.755.790 | | 995.313.690 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 5 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 95% | | 9.970.000 | | 10.967.000 | | 12.063.700 | | 13.270.070 | | 14.597.077 | | 16.056.785 | | 76.924.632 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 15 | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Persentase kasus peredaran barang ilegal yang tertangani | - | | 72.215.000 | | 79.436.500 | | 87.380.150 | | 96.118.165 | | 105.729.982 | | 116.302.980 | | 557.182.776 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 18 | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Proporsi usaha perdagangan yang telah memiliki legalitas usaha | - | | 41.427.000 | | 45.569.700 | | 50.126.670 | | 55.139.337 | | 60.653.271 | | 66.718.598 | | 319.634.575 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 20 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan | | | 2.014.690.000 | | 2.216.159.000 | | 2.437.774.900 | | 2.681.552.390 | | 2.949.707.629 | | 3.244.678.392 | | 15.544.562.311 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 7 | 15 | | Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi | Peningkatan produksi | | | - | | 333.045.000 | | 366.349.500 | | 402.984.450 | | 443.282.895 | | 487.611.185 | | 2.033.273.030 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 6 | 17 | | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp. 000) | 172.815.056 | | 13.490.000 | | 14.839.000 | | 16.322.900 | | 17.955.190 | | 19.750.709 | | 21.725.780 | | 104.083.579 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 7 | 19 | | Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial | Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri | 13073 orang | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2 | 7 | 19 | | Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial | Jumlah sentra industri | - | | 1.137.050.000 | | 1.250.755.000 | | 1.375.830.500 | | 1.513.413.550 | | 1.664.754.905 | | 1.831.230.396 | | 8.773.034.351 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |
| 2 | 7 | 20 | | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | Persentase usaha industri yang aktif | 28 % (6788 Unit) | | 80.515.000 | | 88.566.500 | | 97.423.150 | | 107.165.465 | | 117.882.012 | | 129.670.213 | | 621.222.339 | Dinas Perdagangan & Perindustrian |



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun dengan para pemangku kepentingan daerah.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 meliputi indikator kinerja pembangunan daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010. Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan arahan RPJPD Kabupaten Tana Toraja 2010-2030 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Menurut Sasaran Strategis

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|
| MISI I | | |
| Meningkatkan Posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah Pendidikan dan Kesehatan yang Berdaya Saing | | |
| 1. | <p>1. Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;</p> <p>2. Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta pembinaan dan pendampingan masuk perguruan tinggi;</p> <p>3. Meningkatnya ketersediaan dan pemetaan tenaga pendidik</p> <p>4. Meningkatnya pengembangan penjaminan mutu dan sekolah model/unggul disetiap jenjang pendidikan;</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang setara pada semua jenjang dan status akreditasi sekolah</p> <p>6. Meningkatnya kerjasama bidang pendidikan dan beasiswa prestasi</p> <p>7. Meningkatnya pelayanan terpadu administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan reward pendidikan, prestasi dan beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga pendidik khususnya di daerah /wilayah terpencil.</p> <p>8. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah dan swasta;</p> <p>2. Meningkatnya ketersediaan pemerataan tenaga medis dan para medis serta bidan desa khususnya di daerah/wilayah terpencil;</p> <p>3. Meningkatnya status pelayanan kesehatan puskesmas menjadi rawat inap dan rumah sakit pratama;</p> <p>4. Meningkatnya dukungan menjadi PNS, beasiswa dan insentif program bidang kedokteran terutama spesialis kedokteran;</p> <p>5. Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan;</p> <p>6. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, kesiagaan layanan intervensi kesehatan dan kerjasama/kemitraan bidang kesehatan;</p> <p>7. Meningkatnya ketersediaan layanan ambulance, kendaraan operasional dokter dan kereta merta termasuk di Kota Makassar secara gratis;</p> <p>8. Meningkatnya insentif pelayanan bagi tenaga medis dan paramedis dipuskesmas, spesialis, farmasi dan pemberian beasiswa pendidikan serta insentif kepada tenaga medis, paramedis dan bidan desa dan dokter puskesmas khususnya di daerah/wilayah terpencil;</p> <p>9. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi • Presentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 • Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah • Angka siswa melanjutkan ke perguruan tinggi • Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar • Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah • Menciptakan sekolah model dan kerjasama manajemen pendidikan • APK SD/MI/SDLB/Paket B • Reward study lanjut ke perguruan tinggi terkemuka dan bantuan kepada perguruan tinggi • Reward dan insentif guru dan siswa prestasi pendidikan • Presentase Gedung sekolah dan perlengkapannya dalam kondisi baik/cukup • Rasio dokter per satuan penduduk • Rasio tenaga medis dan para medis terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil • Rasio tenaga Bidan terhadap jumlah penduduk di daerah terpencil • Presentase puskesmas yang dapat melayani rawat inap • Jumlah dokter yang melanjutkan • Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan • Cakupan PHPS Rumah Tangga • Jumlah Ambulance, kendaraan dokter dan kendaraan operasional puskesmasRSUD serta kereta merta • Jumlah penerima insentif bagi tenaga medis dan para medis • Jumlah penerima beasiswa dari wilayah/daerah tertentu • Presentase Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Polindes yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|
| MISI II | | |
| Percepatan Reformasi Birokrasi, Penguatan Lembaga dan Kelembagaan Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kerjasama dan Kemitraan terutama Diperdesaan | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pembinaan peran dan fungsi lembaga adat dan Komunitas adat terpencil (KAT) 2. Meningkatnya pembinaan politik dan sosial politik masyarakat; 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat diperdesaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Meningkatnya sosialisasi peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan diperdesaan; 5. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemuda dan sosial kemasyarakatan serta kerjasama/kemitraan antar lembaga; 6. Meningkatnya pendekatan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat dan pendelegasian kewenangan serta ketersediaan dan pelayanan e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, Akte nikah dan akte lainnya secara gratis; 7. Meningkatnya pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok dan usaha tani berbasis lingkungan. 8. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi dan <i>Good Governance</i>; 9. Meningkatnya disiplin ASN, standar pelayanan prima dan Standard Operational Procedure (SOP) pelayanan publik; 10. Meningkatnya kapasitas ASN melalui diklat struktural, fungsional dan teknis; 11. Meningkatnya pengembangan tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan PNS; 12. Meningkatnya peran dan fungsi tenaga kontrak dengan SK Bupati Tana Toraja; 13. Meningkatnya revolusi mental terutama pada ASN; 14. Meningkatnya regulasi dan peraturan daerah, penegakan hukum dan pemberantasan KKN; 15. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta aset; 16. Meningkatnya kapasitas aparatur perencana, keuangan dan pengawasan pembangunan daerah; 17. Meningkatnya peran dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah; 18. Meningkatnya data dan informasi kependudukan; 19. Meningkatnya kualitas layanan informasi berbasis IT. 20. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif; 21. Meningkatnya perlindungan keamanan dan ketertiban serta kepastian hukum; 22. Meningkatnya kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan syariah dan agama kepada Tuhan Yang Maha Esa; 23. Meningkatnya hubungan yang harmonis antar lembaga keagamaan dan inter dan antar umat beragama; 24. Meningkatnya pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian; 25. Meningkatnya pembinaan dan sarana peribadatan; 26. Meningkatnya sosialisasi Peraturan Daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan perundang-undangan lainnya; 27. Meningkatnya kualitas penanganan Hukum dan HAM. | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Komunitas adat terpencil • Presentase Lembaga kemasyarakatan yang di bina • Fasilitasi pelaksanaan musyawara pembangunan desa (Musrenbang) • Jumlah Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) • Jumlah kelembagaan pengarusutamaan gender, kelompok wanita tani dan dasa wisma serta lembaga sosial masyarakat • Jumlah Lembang dan Kelurahan yang dapat melayani • Jumlah kelompok tani yang berbasis lingkungan • Persentase SKPD yang sesuai PP • Presentase Tingkat kedisiplinan ASN • Persentase Pejabat struktural yang sudah mengikuti Latpim • Jumlah pejabat fungsional yang sudah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis • Persentase ASN yang mendapat Tunjangan Kinerja. • Persentase tenaga kontrak yang memperoleh SK Bupati Tana Toraja • Presentase tingkat kedisiplinan ASN • Persentase pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah • Persentase aparatur perencana, keuangan dan pengawasan • Persentase ketepatan waktu penyusunan perencana pembangunan daerah • Persentase kecamatan yang memiliki data dan informasi kependudukan • Persentase layanan informasi berbasis IT yang dimanfaatkan • Persentase kasus yang tertangani • Jumlah Supremasi hukum, HAM dan pemberantasan KKN • Persentase hubungan harmonisasi antar umat beragama • Jumlah lembaga keagamaan yang dibina • Pemberian insentif kepada guru sekolah minggu dan kelompok pengajian • Persentase rumah ibadah yang menerima bantuan • Kerjasama TP4D, Advokasi dan pendampingan Hukum • Peningkatan supremasi hukum |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|--|--|--|
| MISI III | | |
| <i>Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Peluang Berusaha dan Bekerja serta Pemberdayaan Ekonomi yang Partisipatif dan Pro Rakyat</i> | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama fakir miskin dan PMKS; 2. Meningkatnya dukungan, fasilitas dan kemudahan dalam mengakses permodalan dan peralatan produksi bagi masyarakat miskin; 3. Meningkatnya pola pemberdayaan masyarakat miskin dalam mengakses produktivitas pertanian dalam arti luas; 4. Meningkatnya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat miskin; 5. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pelayanan raskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial lainnya berbasis Diakonia, BAAZ/ Zakat Fitrah dan Pemerintah Lembang/Kel.; 6. Meningkatnya kesetaraan pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS; 7. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap peluang berusaha dan pola hidup yang konsumtif menjadi produktif. 8. Meningkatnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut bencana sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa; 9. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan usaha ekonomi, KUBE terutama keluarga miskin, keluarga rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 10. Meningkatnya peran regulasi dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi; 11. Meningkatnya sistem pelayanan perizinan peluang berusaha dan kemudahan akses permodalan; 12. Meningkatnya fasilitasi dan informasi peluang pasar, nilai tambah dan produktivitas; 13. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dan informasi lapangan kerja; 14. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan keterampilan kerja; 15. Meningkatnya peran dan fungsi kerjasama/kemitraan lembaga usaha dan ketenagakerjaan. 16. Meningkatnya pola dan peran pemberdayaan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; 17. Meningkatnya penguatan dan pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi dalam mengelola potensi sumber daya pertanian dan perkebunan dalam arti luas; 18. Meningkatnya sistem dan pola akses keterampilan dan permodalan usaha; 19. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam kerjasama pembangunan daerah dan lembaga mitra usaha pro rakyat; | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk diatas garis kemiskinan • Kerjasama pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) • Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya • Jumlah lembaga masyarakat miskin yang ditangani • Jumlah Lembang/Kelurahan yang menerima bantuan sosial • Jumlah pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Penganekaragaman konsumsi pangan • Presentase penanganan bencana Sosial, mitigasi, tanggap darurat dan kejadian luar biasa • Kerjasama pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) • Perda yang mendukung iklim usaha dan investasi • Indeks kepuasan masyarakat • Peningkatan ketersediaan informasi pasar • Rasio tenaga kerja terampil di bandingkan dengan yang tidak terampil • Pengembangan fasilitas BLK dan penitipan anak terlantar • Pengusaha mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja • Pemberdayaan kelembagaan UMKM Gapoktan dan KUBE • Fasilitasi akses permodalan UMKM |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|--|---|---|
| MISI IV | | |
| <i>Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan dalam Arti Luas, Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dengan Pendekatan Kawasan.</i> | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran pemetaan pemanfaatan potensi lahan terhadap produksi pertanian dan perkebunan dalam arti luas; 2. Meningkatnya daya saing dan peluang pasar hasil produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam arti luas; 3. Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi tanaman varietas padi lokal dan hortikultura yang berdaya saing dengan pupuk organik; 4. Meningkatnya budidaya, produksi tanaman kopi arabika toraya, kopi arabika persilangan, kopi robusta, cacao, vanili, marica, jagung, umbi-umbian, dll berbasis perdesaan; 5. Meningkatnya budidaya produksi maskisa dan tamarillo (terung belanda) selaku minuman Selamat Datang Toraya (welcome drink); 6. Meningkatnya populasi ternak babi, kambing, kerbau, sapi, ayam kampung/broiler dan itik berbasis perdesaan; 7. Meningkatnya budidaya perikanan darat dengan memanfaatkan sebaran pada lahan berair; 8. Meningkatnya fasilitasi ketersediaan pupuk organik; 9. Meningkatnya pendampingan dan pemberdayaan serta kerjasama penyuluh pertanian dan perkebunan dalam air luas; 10. Meningkatnya produksi pertanian hortikultura, perkebunan dan laboratorium hayati dalam mendukung agrowisata. 11. Meningkatnya data dan informasi produksi pertanian dalam arti luas; 12. Meningkatnya reboisasi, penghijauan, penanggulangan lahan kritis dan ruang terbuka hijau; 13. Meningkatnya ketersediaan lahan percontohan produksi bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan berbasis pembiayaan 200 juta Per lembang/kelurahan; 14. Meningkatnya peran kerjasama/kemitraan lembaga keumatan, sosial masyarakat dalam mendorong produktivitas pertanian 15. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi pertanian; 16. Meningkatnya Peran pemetaan potensi sumber daya alam; 17. Meningkatnya potensi sumber daya air dan surya untuk pemenuhan kebutuhan air baku pertanian, penyediaan air bersih, penyediaan energy listrik (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dll; 18. Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan tambang galian golongan C dan kandungan mineral lainnya; 19. Meningkatnya pengembangan agrowisata, wisata alam, air terjun, arung jeram, panjat tebing, terbang layang, permandian air panas dll; 20. Meningkatnya kerjasama/kemitraan wisata alam dengan gondola /trem (kawasan religi Buntu Burake-Agrowisata Pango Pango-Wisata Para Layang Batusura'); | <p>Produksi Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi padi • Jumlah produksi jagung • Jumlah produksi kedelai • Jumlah produksi ubi jalar • Jumlah produksi sayur-sayuran • Produksi Perkebunan: • Jumlah produksi kopi • Jumlah produksi Merica • Presentase hasil pertaniandan perkebunan yang unggul <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan pangan segar asal tumbuhan tanpa pupuk organik • Luasan budidaya perkebunan • Luasan budidaya perkebunan markisa dan tamarillo <p>Jumlah populasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Babi • Kambing • Kerbau • Sapi • Ayam kampung/broiler • Itik • Penebaran bibit ikan pada perairan umum (sungau dan embing) • Persentase kelompok yang menerima pupuk organik • Jumlah kelompok tani yang di bina • Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura di kawasan agrowisata • Luas areal terbuka hijau dan lahan kritis • Luasan hektar lahan percontohan • Penguatan kelembagaan petani • Pengadaan Saran dan prasarana pertanian • Pengadaan sarana dan prasarana pertanian • Jumlah desa yang terakses air bersih • Jumlah desa yang terakses listrik • Jumlah pertambangan yang memperoleh ijin • Kawasan destinasi pariwisata • Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|---|---|--|
| MISI V | | |
| Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata Ruang untuk Mendorong Pelayanan, Pembangunan, Kepariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Berusaha / Investasi dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sistem informasi status administrasi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan perdesaan; 2. Meningkatnya status penanganan jalan kabupaten penghubung utama antar wilayah ibukota dan antar kecamatan, jalan perdesaan, pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah/ wilayah terpencil sepanjang 1.800 Km; 3. Meningkatnya status penanganan jalan propinsi tembusan khususnya Paso'bo – Matangli – Masuppu dan Kondodewata – Sampeparikan/ Kabupaten Pinrang; 4. Meningkatnya penanganan jalan penghubung ke kawasan destinasi pariwisata dan dalam destinasi pariwisata; 5. Meningkatnya status penanganan jalan penghubung dalam ibukota kabupaten, kota penyanggah/satelit, ibukota kecamatan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah; 6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik; 7. Meningkatnya pengendalian, peran dan fungsi Penataan Ruang (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); 8. Meningkatnya pemetaan ruang sarana olahraga, ruang terbuka hijau, industri, permukiman dan pemakaman; 9. Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana pendukung dan fasilitas keamanan lalu lintas; 10. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan udara terutama pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik; 11. Meningkatnya fasilitas layanan penerbangan udara antar Toraja dan daerah tujuan wisata lainnya; 12. Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah; 13. Meningkatnya penelusuran situs dan pelestarian nilai-nilai budaya/adat istiadat; 14. Meningkatnya penataan destinasi pariwisata dengan pendekatan kawasan; 15. Meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata dan kerjasama/kemitraan kepariwisataan; 16. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penanganan bencana social, mitigasi, penanggulangan bencana alam, dan tanggap darurat; 17. Meningkatnya revitalisasi permukiman dan kawasan kumuh; 18. Meningkatnya fungsi dan layanan terminal; 19. Meningkatnya penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja, sarana olahraga, Pengelolaan sampah/TPA, tempat pemakaman umum/Islam, kebersihan lingkungan dan ruang terbuka hijau berbasis lingkungan/kampung; 20. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pengendalian dan pengamanan berlalu lintas; 21. Meningkatnya infrastruktur pasar tradisional, pasar hewan dan pasar modern Kota Makale; 22. Meningkatnya status penanganan jembatan beton, rangka baja, jembatan gantung dan jembatan darurat sepanjang 500 M; 23. Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur; 24. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pertamanan, pengelolaan kebersihan dan persampahan terutama ketersediaan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Reduce, Reuse and Recycle (3R); 25. Meningkatnya sistem perencanaan infrastruktur, kajian pendekatan program prioritas, Fisibility Study secara terukur dan memberi manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat; 26. Meningkatnya revitalisasi dan pemeliharaan Pemukiman dan Perumahan. | <ul style="list-style-type: none"> • Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik • Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik • Panjang jalan propinsi dalam kondisi baik • Panjang jalan ke destinasi pariwisata • Panjang jalan penghubung kota satelit • Persentase sarana dan prasarana aparatur pendidikan, kesehatan dan layanan public • Revisi (RTRW, RDTR, RTRKSK, RTBL); • Perencanaan RTBL • Persentase kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang terpenuhi • Persentase terbangunnya bandar udara yang bertaraf internasional • Jumlah daerah tujuan wisata • Persentase wilayah Kab.Tana Toraja yang dijangkau layanan informasi dan informatika • Penelusuran situs-situs budaya adat istiadat, legenda/ ceritera rakyat • Pengembangan kawasan destinasi pariwisata • Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan • Persentase penanganan bencana • Revitalisasi kawasan kumuh dan permukiman • Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun dan di revitalisasi • Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun dan direvitalisasi • Jumlah pasar hewan • Panjang jembatan dalam kondisi baik Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi • Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi • Cakupan pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan hidup, R3 berbasis lembang/kelurahan • Sistem informasi penataan ruang • Peningkatan pengembangan perumahan |

Tabel 9.2
*Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Urusan Pemerintahan Wajib pelayanan Dasar
Kabupaten Tana Toraja 2016 - 2021*

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERI- ODE RPJMD |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| ASPEK KESEJAHTERAAN | | | | | | | | | |
| I | Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | Persen | 7.56 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 |
| 2 | Laju Inflasi | Persen | - | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.10 |
| 3 | PDRB Per Kapita | Rp. | 18.750.000 | 19.250.000 | 20.500.000 | 21.750.000 | 22.250.000 | 23.800.000 | 24.500.000 |
| 4 | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 12.27 | 13.7 | 11.20 | 11 | 10.2 | 10 | 9 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 65.08 | 66.10 | 67.00 | 67.90 | 68.25 | 69.00 | 70.00 |
| 6 | PDRB (HB) | Rp. | 4.267.516 | 4.900.000 | 5.395.500 | 6.517.000 | 7.315.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| II | Pendidikan | | | | | | | | |
| | Angka Harapan Lama Sekolah | | | | | | | | |
| 1 | Angka melek huruf seluruh penduduk | Persen | 93.20 | 93.50 | 94.90 | 94.10 | 94.60 | 94.85 | 95.00 |
| 2 | Angka melek huruf pada usia 15 thn – 24 thn | Persen | 98.00 | 98.10 | 98.30 | 98.50 | 98.80 | 98.90 | 99.00 |
| 3 | Angka melek huruf pada usia dewasa (usia 25 thn-74 thn) | Persen | 95.93 | 96.40 | 96.70 | 97.20 | 97.55 | 97.80 | 98.00 |
| 4 | Pendidikan non formal kebutaaksaraan | Orang | 150 | 600 | 2.300 | 4.000 | 5.600 | 6.100 | 7.400 |
| 5 | Kerjasama lembaga keumatan, babinsa dan babinkamtibmas | Lembaga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Angka pendidikan yang ditamatkan/ angka lulusan (AL) | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata nilai UN SD/MI | Nilai | 57.60 | 59.20 | 61.60 | 63.90 | 65.70 | 67.90 | 70.00 |
| 2 | Rata-rata Nilai UN SMP/MTs | Nilai | 53.73 | 56.40 | 59.30 | 61.70 | 64.60 | 67.45 | 70.00 |
| 3 | Rata-rata Nilai UN SMA/SMK | Nilai | 58.15 | 60.05 | 62.30 | 64.20 | 66.15 | 68.40 | 70.00 |
| 4 | Angka partisipasi sekolah (APS) | Persen | 92.00 | 93,78 | 94,08 | 94,38 | 94,68 | 94,98 | 95.00 |
| 5 | Angka mengulang kelas | Persen | 1.12 | 0.95 | 0.77 | 0.60 | 0.43 | 0.25 | 0.08 |
| 6 | Angka putus sekolah | Persen | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| 7 | Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru | Orang | 1.422 | 450 | 1.100 | 1.750 | 2.400 | 3.050 | 3.700 |
| 8 | Reward dan insentif guru dan siswaprestasi pendidikan | Orang | - | 344 | 1.769 | 5.219 | 8.669 | 8.669 | 8.669 |
| 9 | Ketersediaan dan keterjangkauan tenaga pendidik | Orang | 2.560 | 2.567 | 3.103 | 3.639 | 4.175 | 4711 | 5.260 |
| 10 | Manajemen kependidikan dengan pendekatan kawasan | Persen | 56.50 | 59.58 | 62.66 | 65.74 | 68.82 | 71.90 | 75 |
| 11 | Sistem pengembangan Taman Pendidikan | Unit | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Pendidikan muatan local | Jenis | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Menciptakan sekolah model dan kerjasama manajemen pendidikan | Sekolah | 1 | 1 | 16 | 30 | 44 | 58 | 74 |
| 14 | Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan | Persen | 73.20 | 75.00 | 77.80 | 80.60 | 83.30 | 86.10 | 90 |
| 15 | Pembinaan Sekolah Luar Biasa | Unit | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Angka melanjutkan sekolah | | | | | | | | |
| 1 | Angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK | Persen | 95.00 | 95.40 | 95.80 | 96.10 | 96.35 | 96.70 | 97.00 |
| | Rata-rata lama penyelesaian pendidikan: | | | | | | | | |
| 1 | Rata-rata lama penyelesaian pendidikan dasar | Tahun | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Rata-rata lama penyelesaian pendidikan menengah | Tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Kondisi Sekolah : | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Gedung SD/MI dalam kondisi baik | Persen | 68.70 | 72.25 | 75.90 | 79.40 | 82.70 | 86.80 | 90.00 |
| 2 | Persentase gedung SMP/MTs dalam kondisi baik | Persen | 77.40 | 79.50 | 81.80 | 83.70 | 85.70 | 87.90 | 90.00 |
| 3 | Persentase gedung SMA/SMK dalam kondisi baik | Persen | 73.60 | 76.30 | 79.10 | 81.90 | 84.70 | 87.25 | 90.00 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Rasio siswa per guru (R-S/G) | | | | | | | | |
| 1 | Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar | Rasio | 1:23 | 1:23 | 1:22 | 1:22 | 1:21 | 1:21 | 1:20 |
| 2 | Rasio Guru terhadap murid pada pendidikan menengah | Rasio | 1:28 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:26 | 1:25 | 1:24 |
| | Persentase siswa per guru (R-S/G) | | | | | | | | |
| 1 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada pendidikan dasar | Rasio | 1:26 | 1:25 | 1:24 | 1:23 | 1:23 | 1:21 | 1:20 |
| 2 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada pendidikan menengah | Rasio | 1:31 | 1:30 | 1:29 | 1:28 | 1:27 | 1:26 | 1:25 |
| 3 | Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 | Persen | 90,73 | 90,73 | 92.80 | 94.75 | 96.70 | 98.00 | 100 |
| 4 | Pemberian kesempatan untuk melanjutkan studibagi guru yang belum memenuhi kualifikasi | Orang | - | - | 171 | 342 | 513 | 684 | 855 |
| 5 | Reward studi lanjut ke Perguruan Tinggi terkemuka dan bantuan kepada Perguruan Tinggi | Orang | 88 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| 6 | Persentase dosen guru yang memenuhi kualifikasi S2/S3 | Persen | 2,53 | 2,44 | 7,97 | 10,9 | 13.8 | 16.7 | 20 |
| 7 | Persentase SMP/SMA/MA yang terakreditasi | Persen | 67,55 | 67,55 | 73.25 | 80.85 | 88.50 | 95.50 | 100 |
| 8 | Persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | 34,64 | 34,64 | 44.60 | 55.50 | 65.50 | 76.50 | 80 |
| | Angka partisipasi murni (APM) | | | | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar | Persen | 95,89 | 96,61 | 97.00 | 97.70 | 98.50 | 99.00 | 100 |
| 2 | Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah | Persen | 77.00 | 77,26 | 80.00 | 83.50 | 85.60 | 88.50 | 90 |
| | Angka partisipasi kasar (APK) | | | | | | | | |
| 1 | APK pada pendidikan anak usia dini (PAUD) | Persen | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2 | Penelusuran bakat dan minat anak usia dini | Jenis | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Kerjasama pengelolaan Satuan PAUD Sejenis (Sekolah Minggu dan Taman Pengajian Anak Masjid) | Lembaga | 294 | 294 | 435 | 576 | 717 | 858 | 999 |
| 4 | Peningkatan kompetensi guru PAUD | Orang | 1.512 | 1.676 | 1.840 | 2.004 | 2.168 | 2.332 | 2.498 |
| 5 | Peningkatan sarana dan prasarana PAUD | Lembaga | 1 | 192 | 328 | 460 | 596 | 736 | 875 |
| 6 | Peningkatan Kesejahteraan guru PAUD | Orang | - | 384 | 657 | 894 | 1.167 | 1.440 | 1.750 |
| 7 | APK SD/MI/SDLB/Paket A | Persen | 116,53 | 117,11 | 117.69 | 118.27 | 118.84 | 119.42 | 120 |
| 8 | APK SMP/MTs/SMPLB/paket B | Persen | 108.90 | 109.08 | 109.27 | 109.45 | 109.63 | 109.82 | 110 |
| 9 | APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C | Persen | 105.20 | 105.50 | 105.80 | 106.10 | 106.40 | 106.70 | 107 |
| | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah : | | | | | | | | |
| 1 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar | Rasio | 1 : 176 | 1:172 | 1:168 | 1:163 | 1:158 | 1:154 | 1:150 |
| 2 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah | Rasio | 1:285 | 1:278 | 1:270 | 1:265 | 1:260 | 1:255 | 1:250 |
| 3 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Sekolah | 1:285 | 1:278 | 1:270 | 1:265 | 1:260 | 1:255 | 1:250 |
| 1 | Persentase Gedung SD/MI dalam kondisi baik | Persen | 68.70 | 72.25 | 75.90 | 79.40 | 82.70 | 86.80 | 90.00 |
| 2 | Persentase gedung SMP/MTs dalam kondisi baik | Persen | 77.40 | 79.50 | 81.80 | 83.70 | 85.70 | 87.90 | 90.00 |
| 3 | Persentase gedung SMA/SMK dalam kondisi baik | Persen | 73.60 | 76.30 | 79.10 | 81.90 | 84.70 | 87.25 | 90.00 |
| III | Kesehatan | | | | | | | | |
| 1 | Angka usia harapan hidup | Tahun | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 76 |
| | Angka prevalensi penyakit : | | | | | | | | |
| 1 | Angka prevalensi penyakit malaria | | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
| 2 | Angka prevalensi penyakit TBC | Persen | 63.3 | 69.0 | 78.7 | 90.8 | 79.6 | 79.9 | 79.9 |
| 3 | Angka prevalensi penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Angka prevalensi penyakit HIV/AIDS | Orang | 47 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| 5 | Angka acute flaccid paralysis (AFP) | Persen | 76 | 76 | 80 | 86 | 90 | 100 | 100 |
| | Angka kematian : | | | | | | | | |
| 1 | Angka kematian karena penyakit malaria | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angka kematian karena penyakit TBC | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angka kematian karena penyakit DBD | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Angka kematian karena penyakit HIV/AIDS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Angka kesembuhan : | | | | | | | | |
| 1 | Angka kesembuhan penderita TB paru BTA | Persen | 85 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| 2 | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 1000 KH | 23/1000KH | 23/1000KH | 23/1000KH | 22/1000KH | 21/1000KH | 21/1000KH | 21/1000KH |
| 3 | Angka kematian balita | 1000 KH | 32/1000 KH | 32/1000 KH | 31/1000 KH | 31/1000 KH | 30/1000 KH | 30/1000 KH | 30/1000 KH |
| 4 | Angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup | 100.000KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH | 102/100.000 KH |
| 5 | Presentase balita gizi buruk | Persen | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Prevalensi gizi kurang pada anak balita | Persen | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 7 | Prevalensi anak-anak dibawah berat badan normal | Persen | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
| 8 | Prevalensi bayi yang mendapat ASI Eksklusif | Persen | 57 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 52 |
| 9 | Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan | Persen | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 10 | Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan | Persen | 95 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 11 | Proporsi bayi yang mendapat imunisasi campak | Persen | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 12 | Proporsi penemuan kasus (case detection rate) tuberculosi paru | Kasus | 475 | 483 | 486 | 489 | 491 | 494 | 494 |
| 13 | Presentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe | Pesen | 85 | 85 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 |
| 14 | Presentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas | Orang | 33.9 | 33.9 | 33.49 | 36.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| 15 | Presentase desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) | Persen | 85 | 85 | 90 | 93 | 97 | 100 | 100 |
| 16 | Presentase desa terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 jam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Presentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan mulut dan gigi | Persen | 50 | 50 | 65 | 78 | 88 | 100 | 100 |
| 18 | Presentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja | Persen | 30 | 30 | 45 | 60 | 75 | 85 | 85 |
| 19 | Presentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | Persen | 58 | 58 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 20 | Presentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan | Peren | 44.65 | 44.65 | 67.52 | 67.52 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Presentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan kesehatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Presentase keluhan pelayanan kesehatan primer yang dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi | Persen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 23 | Rasio dokter per satuan penduduk | Rasio | 17/100.000 | 17/100.000 | 18/100.000 | 19/100.000 | 20/100.000 | 22/100.000 | 22/100.000 |
| 24 | Rasio dokter umum per 100.000 penduduk | Rasio | 17/100.000 | 17/100.000 | 18/100.000 | 19/100.000 | 20/100.000 | 22/100.000 | 22/100.000 |
| 25 | Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | Rasio | 6/100.000 | 6/100.000 | 6/100.000 | 6/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 |
| 26 | Rasio apoteker per 100.000 penduduk | Rasio | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 | 7/100.000 |
| 27 | Rasio bidan per 100.000 penduduk | Rasio | 56/100.000 | 56/100.000 | 57/100.000 | 58/100.000 | 59/100.000 | 60/100.000 | 60/100.000 |
| 28 | Rasio perawat per 100.000 penduduk | Rasio | 51/100.000 | 51/100.000 | 51/100.000 | 53/100.000 | 54/100.000 | 56/100.000 | 56/100.000 |
| 29 | Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk | Rasio | 5/100.000 | 5/100.000 | 6/100.000 | 5/100.000 | 5/100.000 | 5/100.000 | 5/100.000 |
| 30 | Rasio ahli sanitasi per 100.000 penduduk | Rasio | 9/100.000 | 9/100.000 | 10/100.000 | 9/100.000 | 9/100.000 | 9/100.000 | 9/100.000 |
| 31 | Rasio sarjana kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk | Rasio | 5/100.000 | 5/100.000 | 6/100.000 | 7/100.000 | 8/100.000 | 10/100.000 | 10/100.000 |
| 32 | Rasio posyandu persatuan satuan balita | Rasio | 265/22.124 | 266/22.122 | 274 | 277/22.876 | 283/22.242 | 303/22.191 | 314/18.156 |
| 33 | Rasio puskesmas poliklinik, pustu per satuan penduduk | Rasio | 54/229.945 | 54/229.945 | | | | | |
| 34 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk | Rasio | 2/229.945 | 2/229.945 | | | | | |
| 35 | Persentase obat generic berlogo dalam persediaan obat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Persentase posyandu purnama dan mandiri | Persen | 76/305 | 61/266 | 106/274 | 110/274 | 100/283 | 122/303 | 145/314 |
| 37 | Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan | Persen | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 38 | Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak untuk konsumsi | Persen | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 |
| 39 | Akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar baru | Persen | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 40 | Akses rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat | Persen | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 41 | Persentase rumah sehat | Persen | 80 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| IV | RSUD Lakipadada | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (I K M), Rawat Jalan/Rawat Inap | Persen | 79,4/80,17 | 80/82,00 | 82/84,00 | 83/85 | 84/85 | 85/85 | 86/85 |
| 2 | Bed Occuppancy Rate (BOR) | Persen | 80,33 | 80,5 | 81.00 | 81,4 | 82.00 | 84.00 | 84.00 |
| 3 | Averenge Length Of Stay (ALOS) | Hari | 5,21 | 5,76 | 6 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Bed Turn Over (BTO) | Kali | 62,06 | 62 | 62,5 | 62,6 | 62,65 | 62,78 | 62,78 |
| 5 | Turn Over Internal (TOI) | Hari | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,19 | 1,3 |
| 6 | Net Date Rate (NDR) | Pasien/ 1000 | 13,9 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 13 | 13 |
| 7 | Gros Date Rate (GDR) | Pasien/ 1000 | 24,29 | 24,1 | 24,05 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| V | Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah dokumen | Dokumen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Panjang jalan di kabupaten Tana Toraja | km | 1.252 | 1252 | 1272 | 1302 | 1372 | 1430 | 1500 |
| 3 | Pembangunan dan Peningkatan jalan kab. | km | 428.45 | 501.45 | 702 | 965 | 1240 | 1335 | 1430 |
| 4 | Pembangunan jembatan | m | 25 | 105 | 245 | 285 | 335 | 425 | 500 |
| 5 | Pemeliharaan jalan kabupaten | Km | - | 25 | 75 | 275 | 495 | 720 | 945 |
| 6 | Pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan | unit | - | - | 5 | 8 | 15 | 18 | 20 |
| 7 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi | Ha | 2.365 | 2.810 | 3.810 | 5.310 | 7.010 | 8.810 | 10.810 |
| 8 | Pembangunan air baku pertanian/air minum | unit | - | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 27 |
| 9 | Pengadaan alat berat | Unit | - | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Supervisi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah | L/K | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 11 | Perencanaan RTBL | Dokumen | - | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 |
| 12 | Sistem informasi penataan ruang | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Revitalisasi kawasan kumuh dan permukiman | Kawasan | 58 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 14 | Cakupan layanan penerangan jalan | Kec. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Cakupan layanan pemakaman jenazah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Pengembangan fasilitas pemakaman | Kec. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| VI | Perumahan Rakyat dan Pemukiman | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan sarana aparatur | Unit | - | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2 | Renovasi rumah tidak layak huni | Unit | 40 | 10 | 60 | 135 | 210 | 300 | 400 |
| 3 | Peningkatan/pengembangan perumahan | Paket | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Revitalisasi kawasan pariwisata | Destinasi | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 5 | Pembangunan jaringan air minum perdesaan | L/K | - | 5 | 15 | 30 | 40 | 55 | 55 |
| 6 | Supervisi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah, ADD | L/K | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 7 | Pembangunan Normalisasi Sungai | Km | 0,342 | 0,917 | 1,717 | 2,967 | 4,467 | 6,767 | 6,767 |
| 8 | Pengembangan taman rakyat kolam makale | Persen | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| 9 | Cakupan layanan pemeliharaan Taman | Kec. | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| VII | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah angka kriminal tertangani | Kasus | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | Persen kriminal yang tertangani | Kasus | 100 | 75 | 65 | 45 | 25 | 15 | 15 |
| 3 | Jumlah demo yang diamankan | Kasus | 24 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 13 |
| 4 | Presentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Penegakan perda | Persen | 75 | 50 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 6 | Pengembangan pola tindak keamanan dan ketertiban masyarakat | Persen | 65 | 60 | 40 | 35 | 15 | 10 | 10 |
| 7 | Penanganan Disiplin pegawai | Persen | 80 | 75 | 50 | 35 | 20 | 15 | 15 |
| 8 | Penanganan Masalah Kebakaran | Persen | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 91 | 93 |
| VIII | Kesbangpol dan Linmas | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Tahun | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Peningkatan koordinasi penyelesaian masalah | Tahun | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Peningkatnya kerukunan antar umat beragama | Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | Peningkatan rasa persatuan diantara masyarakat | Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| IX | Sosial | | | | | | | | |
| 1 | Penduduk miskin | Persen | 12.27 | 13,7 | 11,2 | 11 | 10,2 | 10 | 9 |
| 2 | Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Orang | 7.933 | 6.700 | 7.500 | 7.600 | 7.900 | 8.000 | 8.500 |
| 3 | Jumlah fakir miskin yang ditangani | Orang | 400 | 400 | 100 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 4 | Kerja sama pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Klp | - | - | 50 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| 5 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Klp | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 |
| 6 | Pembinaan dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni | unit | - | 10 | 30 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| 7 | Pembinaan penyandang cacat, panti asuhan, PSK, Anak Jalanan, terlantar, Lansia dan fakir miskin | orang | 15 | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 385 |
| 8 | Pembinaan dan pemberdayaan warga transmigrasi di UPT Supi' | orang | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

Tabel 9.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kabupaten Tana Toraja, 2016 - 2020

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERI- ODE RPJMD |
|-----|--|----------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Tenaga Kerja | | | | | | | | |
| 1 | Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan TK tidak terampil | Rasio | 50:10 | 50:10 | 50:10 | 50:10 | 50:10 | 50:10 | 50:10 |
| 2 | Pengusaha yang mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Persen | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Supervisi dan pengendalian masalah social dan ketenagakerjaan | L/K | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| II | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peran serta anak dan perempuan dalam pembangunan | Persen | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 85 | 85 |
| 2 | Persentase kelembagaan pengerasutamaan gender dan anak yang berfungsi dengan optimal | Persen | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 95 | 95 |
| 3 | Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani | Persen | 40 | 50 | 55 | 60 | 75 | 90 | 100 |
| III | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah peserta akseptor KB | Orang | 26.072 | 27.376 | 28.680 | 29.984 | 31.288 | 32.592 | 32.592 |
| 2 | Jumlah kader keluarga Berencana | Orang | 3.533 | 3.747 | 3.961 | 4.176 | 4.390 | 4.605 | 4.605 |
| 3 | Jumlah penduduk yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera | Orang | 1.422 | 1.422 | 1.458 | 1.494 | 1.530 | 1.566 | 1.566 |
| 4 | Jumlah kelembagaan kampung KB | L/K | - | 1 | 40 | 79 | 118 | 159 | 159 |
| 5 | Angka Kelahiran Total (TFR) | Persen | 2,8 | 2,66 | 2,52 | 2,38 | 2,24 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Laju pertumbuhan penduduk | Persen | 0,84 | 0,77 | 0,7 | 0,63 | 2,56 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Angka prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur | Persen | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| 8 | Rata-rata kawin pertama perempuan dibawah 21 tahun | Orang | 12.308 | 11.693 | 11.078 | 10.463 | 9.848 | 9.233 | 9.233 |
| IV | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | | | | | | | | |
| 1 | Penganekaragaman konsumsi pangan | Kel. | | 12 | 30 | 37 | 40 | 40 | 159 |
| 2 | Keamanan pangan segar asal tumbuhan | Ha | | - | 50 | 60 | 70 | 70 | 250 |
| 3 | Penguatan kelembagaan petani dan usaha produksi pertanian | Kel. | - | 35 | 70 | 100 | 146 | 174 | 280 |
| 4 | Peningkatan kapasitas dan keterampilan serta penguatan kelembagaan petani | Penyuluh | - | 47 | 79 | 99 | 128 | 142 | 159 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | Indeks kepuasan masyarakat | Persen | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| 6 | Database dan system informasi kependudukan | Persen | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 95 |
| 7 | Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelola data kependudukan dan capil | Keg. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI | Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan pos pelayanan teknologi tepat guna | Orang | 50 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
| 2 | PIN desa/kelurahan nasional/gelar teknologi tepat guna | Jenis | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Jumlah peserta pelatihan BP-SPAMS (PAMSIMAS) | Orang | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Jumlah peserta pelatihan pengurus BUMDES | Orang | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Jumlah peserta keterampilan usaha industri kerajinan dan ekonomi di perdesaan | Orang | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Jumlah peserta pelatihan kader pemberdayaan Lembang dan Kelurahan | Orang | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Pameran jenis produksi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Usaha | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Fasilitasi Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) | Lembang | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 9 | Pendampingan penjaringan, pemilihan dan pelantikan kepala lembang | Lemb. | 50 | 2 | - | 9 | 53 | - | - |
| 10 | Pelaksanaan BBGRM dan HKG PKK | Lemb/Kel. | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 11 | Perlombaan desa dan kelurahan | Lemb./Kel. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Fasilitasi dan koordinasi penyusunan data profil Lembang/kelurahan | Lemb/Kel. | 50 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 13 | Komunitas adat terpencil | Lembaga | - | - | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 14 | Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, kelompok wanita tani dan dasa wisma serta lembaga sosial masyarakat | Kel. | 60 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 15 | Peningkatan kapasitas Hakim Adat Pendamai | Orang | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 16 | Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) | Orang | 50 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan sarana air minum BP-SPAM | Orang | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 18 | Peningkatan kapasitas lembaga dan kelembagaan perdesaan | Lembaga | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 19 | Fasilitasi pembentukan BUMDES | Unit | 5 | 15 | 40 | 60 | 89 | 119 | 159 |
| 20 | Peningkatan Kapasitas perangkat Lembang | Orang | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| VII | Perhubungan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah kendaraan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang beroperasi dan teregistrasi | Unit | 520 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 600 |
| 2 | Jumlah kendaraan yang lulus uji | Unit | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.750 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | Jumlah jaringan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan | Trayek | 23 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 4 | Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas | Kasus | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 50 |
| 5 | Jumlah kasus pengendalian operasional (DALOPS) angkutan umum (pembinaan dan penindakan) | Kasus | 275 | 275 | 250 | 225 | 200 | 150 | 150 |
| 6 | Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor dalam kota | Km/Jam | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor luar kota | Km/Jam | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 8 | Persentase kebutuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan yang terpenuhi | Persen | 25 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 |
| 9 | Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun dan direvitalisasi | Unit | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Persentase terbangunnya bandar udara yang bertaraf internasional | Persen | 19,4 | 19,4 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VIII | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | |
| 1 | Persentase wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informatika | Persen | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | |
| IX | Lingkungan Hidup | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian dan Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup | Persen | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Cakupan pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan hidup, R3 berbasis Lembang/Kelurahan | Kec. | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | Penghargaan ADIWiyata bagi sekolah | Sekolah | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | Pengendalian pencemaran air dan limbah | Persen | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Konservasi lahan kritis dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pencemaran sumber-sumber air | Persen | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 6 | Cakupan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam | Persen | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 7 | Luas areal terbuka hijau dan lahan kritis | Ha. | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | Regulasi lingkungan hidup | buku | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA | Persen | 85 | 85 | 87 | 87 | 90 | 93 | 95 |
| 10 | Pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan dan pertamanan | Persen | 85 | 85 | 87 | 87 | 90 | 93 | 95 |
| 11 | Pengembangan partisipatif kebersihan lingkungan | Persen | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 95 |
| 12 | Pengembangan recycle persampahan (R3) | Persen | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 85 |
| 13 | Persentase perusahaan yang telah mempunyai system pengolahan limbah | Persen | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Jumlah perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat AMDAL | Jumlah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| X | Koperasi dan UKM | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah koperasi | Koperasi | 170 | 170 | 175 | 179 | 186 | 190 | 195 |
| 2 | Jumlah koperasi aktif | Koperasi | 149 | 149 | 154 | 160 | 167 | 172 | 177 |
| 3 | Jumlah anggota koperasi | orang | 67.887 | 67.887 | 67.988 | 68.171 | 68.211 | 68.292 | 68.395 |
| 4 | Fasilitasi pembinaan koperasi | orang | 200 | 165 | 200 | 200 | 150 | 150 | 1.065 |
| 5 | Fasilitasi Pembinaan UMKM | orang | 230 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 1880 |
| 6 | Fasilitasi akses permodalan KUMKM | UMKM | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 |
| 7 | Fasilitasi akses permodalan Koperasi | Koperasi | 34 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| 8 | Pemberdayaan kelembagaan UMKM, Gapoktan dan KUBE | Unit | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 9 | Pengesahan akta notaris lembaga Gapoktan dan usaha tani berbasis Lembang/Kelurahan | Unit | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 10 | Promosi dan Pemasaran produk UMKM | Kali | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 52 |
| 11 | Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu | Unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| XI | Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Organisasi pemuda | Organisasi | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| 2 | Jumlah kegiatan pemuda | Kegiatan | 3 | 11 | 23 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja pemuda | Pemuda | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4 | Presentase pemuda yang tamat SD | Persen | 10 | 15 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 |
| 5 | Presentase pemuda yang tamat SMP | Persen | 15 | 20 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 |
| 6 | Persentase pemuda yang tamat SMA | Persen | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 |
| 7 | Persentase Pemuda yang tamat perguruan tinggi | Persen | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 95 |
| 8 | Persentase Pemuda yang tidak pernah sekolah | Persen | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Persentase Pemuda yang putus sekolah | Persen | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Persentase Pemuda yang buta huruf | Persen | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 |
| 11 | Jumlah Klub olahraga | Klub | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| 12 | Jumlah gedung olahraga | Buah | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Jumlah kegiatan olahraga | Kegiatan | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 |
| 14 | Presentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga | Persen | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 | Jumlah kegiatan olahraga massal dalam satu bulan/ tahun | Kegiatan | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 | Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum | Persen | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 55 |
| 17 | Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional | Persen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Persentase rekor nasional yang dikuasai oleh atlet daerah | Persen | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 19 | Jumlah atlet daerah yang dikirim ke even olahraga diluar negeri | Orang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur | Persen | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 21 | Pembinaan Lembaga Pemuda dan Olahraga | Lembaga | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 22 | Penyediaan sarana dan prasarana olahraga | Paket | - | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 23 | Insentif (reward) prestasi olahraga | Orang | - | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 150 |
| 24 | Kemitraan lembaga Pemuda dan Olahraga | Lembaga | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 25 | Event prestasi olahraga | Event | - | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| XII | Kantor Arsip dan Perpustakaan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah pengunjung/budaya baca dan minat baca masyarakat | Orang | 28.405 | 28.405 | 28.450 | 28.500 | 28.505 | 28.600 | 28.600 |

Tabel 9.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Tana Toraja, 2016 - 2020

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----------|---|--------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Pertanian | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah produksi padi | Ton | 142.686,10 | 142.686,10 | 145.539,80 | 148.450,60 | 151.419,60 | 154.448,00 | 154.448,00 |
| 2 | Jumlah produksi jagung | Ton | 4.150,50 | 4.150,50 | 4.980,60 | 5.976,70 | 7.172,10 | 8.606,50 | 8.606,50 |
| 3 | Jumlah produksi kacang tanah | Ton | 191,60 | 275,60 | 281,10 | 286,70 | 292,50 | 298,30 | 298,30 |
| 4 | Jumlah produksi kedelai | Ton | 275,60 | 275,60 | 319,70 | 370,80 | 430,20 | 499,00 | 499,00 |
| 5 | Jumlah Produksi ubi jalar | Ton | 2.383,10 | 2.383,10 | 2.430,80 | 2.479,40 | 2.529,00 | 2.579,50 | 2.579,50 |
| 6 | Jumlah produksi Ubi kayu | Ton | 3.910,50 | 3.910,50 | 3.988,70 | 4.068,50 | 4.149,90 | 4.232,90 | 4.232,90 |
| 7 | Jumlah produksi sayur-sayuran | Ton | 306.499,80 | 306.499,80 | 312.629,80 | 318.882,40 | 325.260,00 | 331.765,20 | 331.765,20 |
| 8 | Pengembangan unggulan padi lokal (pare barri', pare jawa, pare lotong, pare pulu' lotong, barra' rarang,pare kombong dan pare bau') | ton | - | - | 140 | 580 | 600 | 960 | 960 |
| 9 | Pengembangan pola tanaman semusim dan tumpang sari (kedelai, jagung, umbian, kacang-kacangan dan sayur mayur) | Ha | - | - | 50 | 75 | 100 | 125 | 125 |
| 10 | Pengembangan pencetakan sawah baru | Ha | 150,95 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 550,95 |
| 11 | Pengadaan sarana produksi pertanian | Unit | 176 | - | 142 | 142 | 142 | 142 | 744 |
| 12 | Pengembangan kerbau belang secara alami (Bittuang dan Gandang Batu Sillanan) | Induk | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 13 | Pengembangan sapi potong (Bongkaradeng, Rano, Mengkendek, Bittuang, Malimbong Balepe, Masanda dan Sangalla Selatan) | Ekor | - | - | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 14 | Pengembangan ternak babi | Klp. | - | - | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 |
| 15 | Pengembangan ternak kambing | Klp. | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 | Pengembangan budidaya mina padi | Ha | 1.350 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.600 | 3.250 | 3.600 |
| 17 | Supervisi dan Pencegahan/ penanggulangan penyakit ternak | L/K | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 18 | Pengadaan sarana dan prasarana pasar hewan | Unit | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 19 | Pengembangan produksi pertanian yang berdaya saing berbasis luasan lahan dan perdesaan (kopi arabika, robusta dan kakao) | ton | 3.050 | 3.120 | 3.200 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.450 |
| 20 | Pengembangan produksi vanili, merica | ton | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 |
| 21 | Penanganan konservasi lahan kritis, lahan tidur untuk pemanfaatan tanaman | ha | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Pengembangan tanaman aren | ton | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 23 | Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura di kawasan agrowisata | ha | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| II | Perindustrian dan Perdagangan | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas dan keterampilan usaha industry | Klp. | 5 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 |
| 2 | Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi keterampilan rakyat | Keg. | | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana usaha industry | Klp. | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| 4 | Peningkatan kapasitas magang kerajinan | Orang | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 5 | Peningkatan ketersediaan informasi pasar | L/K | 1 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 6 | Fasilitasi dan pembinaan desa kerajinan, anyaman dan tenun (Tongol, kurra, Randanan, Lemo dan Simbuang) | Desa | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Fasilitasi dan pembinaan industri kue lokal | Klp. | - | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 |
| 8 | Fasilitasi HAKI terhadap produk industri dan pangan | Produk | - | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional dan modern | Unit | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| III | Pariwisata | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah wisatawan Manca Negara | Orang | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Jumlah wisatawan nusantara | Orang | 125.000 | 200.000 | 255.000 | 400.000 | 800.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | Rata-rata lama tinggal | hari | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| 4 | Jumlah kawasan destinasi / pengembangan pariwisata | kawasan | - | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| 5 | Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kali | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 6 | Pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata | Lokasi | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 7 | Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan sosialisasi taman Bahasa Inggris | Klp | - | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 8 | Kemitraan dengan lembaga kepariwisataan | Lembaga | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 9 | Supervisi dan sosialisasi kepariwisataan | L/K | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | | | | | | | | | |
| IV | Kebudayaan | | | | | | | | |
| 1 | Penelusuran Situs-situs Budaya/Adat Istiadat, Legenda/Cerita Rakyat | Paket | - | 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 2 | Penguatan kelembagaan usaha pariwisata, kerajinan/tenun, kuliner, sentra seni budaya | Klp | - | 3 | 7 | 11 | 16 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | |
| V | Transmigrasi | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan fasilitas BLK dan Tempat Penitipan anak terlantar | Unit | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Peningkatan sarana dan prasarana dalam kawasan transmigrasi | Km | 5 | - | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Tabel 9.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja, 2016 - 2020

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|--|---|------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2015 | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | |
| 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | Dokumen | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Revisi RTRW, Dokumen RDTR , Master Plan dan Pemetaan Potensi Kawasan | Dokumen | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | RKPD dan Renja SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah | L/K | 19 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 5 | Up-dating data perencanaan pembangunan daerah | Keg. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Sistem pendekatan holistic integrate sustainable, prioritas dan kearifan lokal pembangunan daerah | Dokumen | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Master Plan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata | Dokumen | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Pemetaan potensi kesesuaian lahan | L/K | - | 159 | - | - | - | - | - |
| 9 | Kerjasama lembaga dan kelembagaan dalam dan luar negeri | Lembaga | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Sistem perencanaan pembangunan daerah secara holistic, integrated dan sustainable, prioritas dan kearifan lokal | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 11 | Tingkat kepuasan publik terhadap pembangunan daerah | Persen | 60 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| II Kepegawaian dan Pengembangan SDM | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PNS yang berpendidikan minimal S1 | Persen | 60,87 | 63,75 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| 2 | Tingkat kedisiplinan PNS | Orang | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 3 | SK Pensiun | Dok. | 85 | 160 | 93 | 108 | 112 | 121 | 141 |
| 4 | SK Fungsional | Dok | | | | | | | |
| 5 | SK Kenaikan Pangkat | Dok | 1.467 | 740 | 835 | 610 | 600 | 660 | 630 |
| 6 | Pendidikan Prajabatan, | Orang | 150 | 125 | 174 | | | | |
| 7 | Pendidikan Latipim | Orang | 1 | 134 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | Pendidikan Formal (S3, S2, S1/D4, Spesialis) | Orang | 88 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| 9 | Pendidikan dan pelatihan Teknis | Orang | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Pemberian penghargaan ASN | Orang | 781 | | | | | | |
| 11 | Up-dating data kepegawaian | Dok. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III Pendapatan Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Peningkatan Penerimaan Pajak dan retribusi Daerah | Persen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Pemetaan asset Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah | Sertifikat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Sertifikasi dan penyediaan lahan pembangunan Bandara Udara | Ha | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 6 | Pembinaan kepada lembaga keumatan dan rumah ibadah dan pendidikan tinggi | Paket | - | 20 | 35 | 50 | 57 | 70 | 70 |
| 7 | Supervisi pengelolaan keuangan daerah dan ADD | Paket | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| IV Bagian Organisasi dan Tata Laksana | | | | | | | | | |
| 1 | SKPD yang sesuai PP yang berlaku | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama | SKPD | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 3 | Persentase Satuan Kerja yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan | Persen | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah SKPD yang telah dievaluasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) | SKPD | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Struktur kelembagaan daerah | SKPD | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6 | Analisis beban kerja (ABK) dan jabatan (Anjab) serta Tupoksi | SKPD | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| V Bagian Hukum | | | | | | | | | |
| 1 | Penegakan supremasi hukum, HAM dan pemberantasan KKN | Perda | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Perda yang mendukung iklim usaha dan investasi | Perda | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Sosialisasi dan penyuluhan hukum, peraturan daerah dan perundang-undangan | Keg. | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Kerjasama TP4D, Advokasi dan Pendampingan Hukum | Keg | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Kerangka regulasi daerah dan hukum adat | Keg. | 1 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | 36 |
| VI Bagian Ekonomi | | | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan penguatan dana usaha ekonomi produktif dan usaha tani | Kec. | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi produktif | Keg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Data dan Informasi harga barang dan jasa | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Fasilitasi pengawasan peredaran barang dan jasa | Kec. | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 |
| 5 | Pengendalian dan ketepatan sasaran penerima RASKIN | Lembang | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 6 | Penciptaan regulasi kemudahan peluang usaha dan investasi | Keg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VII Bagian Umum dan Perlengkapan | | | | | | | | | |
| 1 | Sarana dan prasarana fasilitas gedung pemerintah | Unit | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | Fasilitasi dan akomodasi pelayanan tamu daerah | Keg. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Fasilitasi dan pelayanan kegiatan Pimpinan Daerah | Keg. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VIII Bagian Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 1 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | SKPD | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | SKPD | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 3 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah | SKPD | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPI AMJ) Kepala Daerah | SKPD | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Kepala Daerah | SKPD | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 6 | Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) | SKPD | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 7 | Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) | SKPD | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| IX Bagian Kesra | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio ketersediaan sarana penunjang UKS sekolah terhadap murid | Unit | - | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| 3 | Jumlah gedung sekolah yang baik | unit | - | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Persentase murid SD/M yang mendapat pemeriksaan mulut dan gigi disekolah | persen | - | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 5 | Bantuan beasiswa prestasi, fakir miskin, penyandang cacat dan korban PMKS | Paket | - | 300 | 425 | 475 | 600 | 625 | 675 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-------------|--|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | Pembinaan dan Pengendalian kasus pengguna NAPZA dan HIV-AIDS | Persen | - | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 |
| 7 | Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan acara-acara keagamaan, insentif sekolah minggu dan kelompok anak-anak pengajian | Paket | - | 5 | 20 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 8 | Kerukunan dan toleransi inter dan antar umat beragama dalam menjalankan syariah | Paket | - | 7 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 9 | Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, diaspora dan lembaga social kemasyarakatan | Paket | - | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| 10 | Pemberdayaan dan penguatan keumatan khususnya pada daerah/wilayah terpencil | Paket | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Fasilitasi dan reward prestasi UKS | Sekolah | - | 1 | 62 | 124 | 186 | 248 | 310 |
| 12 | Pengembangan seni tradisional dan sangar seni | Paket | - | 5 | 15 | 20 | 27 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | | |
| X | Bagian Hubungan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah publikasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan Pemkab Tana Toraja | Kegiatan | - | 120 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Jumlah dokumentasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan Pemkab Tana Toraja | Kegiatan | - | 120 | 180 | 240 | 240 | 240 | 250 |
| 3 | Jumlah data bidang persandian, telekomunikasi dan elektronik yang diterima | Data | - | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.300 |
| 4 | Jumlah data bidang persandian, telekomunikasi dan elektronik yang dikirim | Data | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| 5 | Tingkat kepuasan pimpinan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan dan fasilitasi protokoler pimpinan daerah | Persen | - | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 6 | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan/acara Pemkab Tana Toraja | Kegiatan | - | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 210 |
| | | | | | | | | | |
| XI | Bagian Sumber Daya Alam | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya alam | Persen | 15 | 25 | 50 | 60 | 85 | 95 | 100 |
| 2 | Terciptanya regulasi yang memberikan kemudahan peluang investasi dibidang sumber daya alam | Buah | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Peningkatan kerjasama dengan pendidikan tinggi dan lembaga profesi dalam pemetaan pemanfaatan potensi sumber daya alam | Peta | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Pengembangan system konservasi alam | Persen | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| XII | Sekretariat DPRD | | | | | | | | |
| 1 | Anggota Legislatif | Orang | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | Peraturan Daerah | Perda | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | Peningkatan kapasitas dan fungsi pengawasan | Paket | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| XIII | Inspektorat | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Saranan dan Prasarana Aparatur | Unit | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2 | Peningkatan Propesionalisme Aparat | PKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Terlaksananya Pengawasan yang Intensif | Lembang | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| | | Obrik SKPD | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | | | | | | | | | |
| XIV | Penanaman Modal dan PTSP | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 75 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Jumlah perizinan yang dikeluarkan | Berkas | 1567 | 1050 | 1100 | 900 | 920 | 1567 | 1600 |
| | | | | | | | | | |
| XV | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah kejadian yang ditangani | Persen | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Mitigasi Bencana | Lokasi | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja sampai dengan tahun 2021. Khusus untuk tahun 2016, meskipun penyusunan program dan kegiatan dalam RAPBD 2016 mengacu pada pencapaian sasaran RPJPD periode 2010 – 2030 dengan memperhatikan RKP Nasional dan RKPD Provinsi, namun RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2016. Sedangkan untuk tahun 2021, penyusunan program dan kegiatan masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya RPJMD Kabupaten Tana Toraja periode berikutnya.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Tana Toraja mempublikasikan RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya program-program pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021;
3. Bupati Tana Toraja berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
4. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 agar seluruh program-program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
6. Seluruh SKPD dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Tana Toraja berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya;
7. Evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 dilakukan setiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021.
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, maka diperlukan :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari masing-masing kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan seluruh SKPD;
9. Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan/bertentangan dengan kepentingan nasional. Perubahan mendasar dimaksud antara lain : terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

